



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2024**



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 ditetapkan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan RPJPD Provinsi.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
  - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
  - d. BAB IV VISI, DAN MISI DAERAH;
  - e. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH; DAN
  - f. BAB VI PENUTUP.
- (4) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional, RPJMD Provinsi, kondisi lingkungan strategis di Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 19 November 2024  
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 19 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MESDIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024 NOMOR 135



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, PROVINSI  
SULAWESI SELATAN: B.HK.05.113.24

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	4
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA .....	7
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN .....	8
1.4.1. Maksud .....	8
1.4.2. Tujuan .....	8
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN .....	9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	10
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI .....	10
2.1.1. Aspek Geografi .....	10
2.1.1.1. Kualitas Lingkungan Hidup.....	15
2.1.1.1.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .....	15
2.1.1.1.2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman.....	16
2.1.1.1.3. Pengelolaan Sampah .....	17
2.1.1.1.3.1 Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah .....	17
2.1.1.1.3.2 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah.....	18
2.1.1.2. Pengurangan Ancaman dan Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati .....	20
2.1.1.2.1. Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia .....	20
2.1.1.2.2. Indeks Pertanaman (IP) Padi .....	21
2.1.1.2.3. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya .....	22
2.1.1.2.4. Angka Konsumsi Ikan .....	23
2.1.1.3. Resilensi Bencana .....	23
2.1.1.3.1. Indeks Risiko Bencana.....	23
2.1.1.3.2. Persentase Penurunan Emisi GRK .....	27
2.1.1.4. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan.....	28
2.1.1.4.1. Ketahanan Energi .....	28
2.1.1.4.1.1. Konsumsi Listrik per Kapita .....	28
2.1.1.4.2. Ketahanan Air.....	29
2.1.1.4.2.1. Kapasitas Air Baku .....	29
2.1.1.4.2.2. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan.....	30
2.1.1.4.3. Ketahanan Pangan.....	32
2.1.1.4.3.1. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan .....	32
2.1.1.4.3.2. Indeks Ketahanan Pangan .....	32
2.1.1.4.3.2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) .....	33
2.1.2. Aspek Demografi .....	34

2.1.2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk .....	34
2.1.2.2. Rasio Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	36
2.1.2.3. Komposisi Penduduk.....	36
2.1.2.4. Kepadatan Penduduk.....	38
2.1.2.5. Migrasi Penduduk .....	39
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT .....	39
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi.....	39
2.2.1.1. Indeks Daya Saing Daerah .....	39
2.2.1.2. Jumlah Kerjasama antar Daerah .....	40
2.2.1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	41
2.2.1.4. PDRB Perkapita.....	45
2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	47
2.2.1.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) .....	49
2.2.1.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.....	50
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya .....	50
2.2.2.1. Kesehatan .....	50
2.2.2.1.1. Umur Harapan Hidup (UHH).....	50
2.2.2.1.2. Kesehatan Ibu dan Anak.....	52
2.2.2.1.2.1. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan.....	52
2.2.2.1.2.2. Prevalensi Stunting.....	52
2.2.2.1.2.3. Jumlah Kematian Ibu .....	53
2.2.2.1.2.4. Jumlah Kematian Bayi .....	54
2.2.2.1.3. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) .....	55
2.2.2.1.4. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ).....	56
2.2.2.1.5. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.....	57
2.2.2.2. Perlindungan Sosial .....	57
2.2.2.2.1. Tingkat Kemiskinan .....	57
2.2.2.2.2. Indeks Gini .....	59
2.2.2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	60
2.2.2.2.4. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal .....	62
2.2.2.2.5. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan .....	63
2.2.2.3. Beragama dan Berkebudayaan.....	64
2.2.2.3.1. Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi .....	64
2.2.2.3.2. Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/Fasilitasi.....	65
2.2.2.4. Pembangunan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender .....	66
2.2.2.4.1. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga.....	66

2.2.2.4.2. Indeks Perlindungan Anak.....	67
2.2.2.4.3. Indeks Ketimpangan Gender .....	68
2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH .....	69
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah .....	69
2.3.1.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan .....	69
2.3.1.2 Pengembangan Pariwisata.....	70
2.3.1.2.1 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum .....	70
2.3.1.2.2 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Domestik .....	71
2.3.1.3 Jumlah Industri Ekonomi Kreatif.....	71
2.3.1.4 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD .....	72
2.3.1.4.1 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian .....	72
2.3.1.4.2 Jumlah Industri Kecil dan Menengah .....	73
2.3.1.4.3 Persentase Koperasi Sehat.....	73
2.3.1.4.4 Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB....	74
2.3.1.4.5 Return on Aset (ROA) BUMD.....	75
2.3.1.4.6 Produktivitas Padi.....	76
2.3.1.4.7 Produksi Peternakan.....	77
2.3.1.4.8 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap .....	78
2.3.1.5 Penerapan Indeks Ekonomi Hijau .....	79
2.3.1.5.1 Indeks Ekonomi Hijau.....	79
2.3.1.5.2. Indeks Kualitas Air .....	80
2.3.1.5.3. Indeks Kualitas Udara .....	80
2.3.1.5.4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan.....	81
2.3.1.6. Penerapan Ekonomi Biru .....	82
2.3.1.7. Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok.....	83
2.3.1.8. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) .....	84
2.3.1.9. Net Ekspor Barang dan Jasa.....	84
2.3.1.10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.....	85
2.3.1.10.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB.....	85
2.3.1.10.2. Tingkat Inflasi.....	86
2.3.1.10.3. Pertumbuhan Investasi Daerah.....	86
2.3.1.10.4. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah .....	87
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia .....	88
2.3.2.1. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi.....	89
2.3.2.2. Tingkat Penguasaan IPTEK .....	89
2.3.2.2.1. Indeks Kapabilitas Inovasi .....	89
2.3.2.2.2. Indeks Inovasi Daerah .....	90
2.3.2.2.3. Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah terhadap APBD .....	91

2.3.2.3.	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional....	91
2.3.2.4.	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional di Kabupaten .....	92
2.3.2.5.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun	93
2.3.2.6.	Harapan Lama Sekolah .....	94
2.3.2.7.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.....	94
2.3.2.8.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi .....	95
2.3.2.9.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan .....	96
2.3.3.	Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah .....	97
2.3.3.1.	Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan.....	97
2.3.3.2.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan .....	97
2.3.3.3.	Persentase Desa Mandiri .....	98
2.3.3.4.	Indeks Desa Membangun .....	98
2.3.3.5.	Indeks Infrastruktur.....	99
2.3.4.	Daya Saing Iklim Investasi .....	101
2.3.4.1.	Persentase Gangguan Tantribum yang dapat Diselesaikan	101
2.3.4.2.	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah .....	101
2.3.4.3.	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani .....	101
2.3.4.4.	Demokrasi Substansial .....	102
2.4.	ASPEK PELAYANAN UMUM .....	105
2.4.1.	Indeks Reformasi Hukum .....	105
2.4.2.	Indeks Pelayanan Publik .....	105
2.4.3.	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) .....	106
2.4.4.	Indeks Survei Penilaian Integritas .....	107
2.4.5.	Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	108
2.4.6.	Nilai <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	109
2.4.7.	Indeks Maturitas .....	109
2.5.	EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025.....	110
2.6.	TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK.....	112
2.6.1.	Tren Demografi.....	112
2.6.1.1.	Proyeksi Jumlah Penduduk.....	112
2.6.1.2.	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	113
2.6.1.3.	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	114
2.6.2.	Tren Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik .....	115
2.6.2.1.	Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal .....	115
2.6.2.2.	Kebutuhan Air Bersih/Air Minum .....	116
2.6.2.3.	Kebutuhan Energi dan Kelistrikan .....	118

2.6.2.4. Kebutuhan Sarana Pengelolaan Persampahan .....	118
2.6.2.5. Kebutuhan Fasilitas Kesehatan.....	119
2.6.2.6. Kebutuhan Fasilitas Pendidikan.....	119
2.7. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH .....	119
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH .....	133
3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN .....	133
3.2 ISU STRATEGIS DAERAH.....	144
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH .....	155
4.1 VISI .....	155
4.2 SASARAN VISI.....	156
4.3 MISI .....	159
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH .....	163
5.1 ARAH KEBIJAKAN DAERAH.....	163
5.1.1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029 .....	163
5.1.2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034 .....	165
5.1.3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039 .....	166
5.1.4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045 .....	167
5.2 SASARAN POKOK.....	175
5.2.1. Sasaran Pokok .....	175
5.2.2. Arah Pembangunan.....	188
5.2.3. Arah Kebijakan Transformasi .....	192
5.2.4. Indikator Utama Pembangunan.....	215
5.3. ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN SARANA PRASARANA .....	229
5.3.1 Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar .....	229
5.3.1.1 Arah Kebijakan Wilayah.....	231
BAB VI PENUTUP.....	246

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar .....	10
Tabel 2. 2 Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah .....	18
Tabel 2. 3 Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% Ruta) .....	19
Tabel 2. 4 Kejadian dan Penanganan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018-2022 .....	24
Tabel 2. 5 Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 – 2022.....	33
Tabel 2. 6 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2012- 2023 .....	35
Tabel 2. 7 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 - 2023.....	36
Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.....	37
Tabel 2. 9 Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Sex Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar 2018-2022.....	38
Tabel 2. 10 Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015 - 2022 .....	38
Tabel 2. 11 Jumlah Kerjasama dan persentase Kerjasama antar daerah yang ditindaklanjuti di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 – 2023 .....	41
Tabel 2. 12 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2011-2023 .....	42
Tabel 2. 13 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menuru Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015 dan 2018-2023 ..	44
Tabel 2. 14 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015 dan 2018-2023.....	45
Tabel 2. 15 PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010-2023 .....	46
Tabel 2. 16 Perbandingan PDRB Perkapita ADHB antara Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 .....	47
Tabel 2. 17 Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Kawasan Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2010-2023 .....	49
Tabel 2. 18 Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Kawasan Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2010-2023 .....	51
Tabel 2. 19 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Kawasan Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2010-2023 .....	58
Tabel 2. 20 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014- 2023 .....	60
Tabel 2. 21 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Kawasan Setara, Provinsi Selatan Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2010-2023.....	61
Tabel 2. 22 Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan dan Jenis Penghasilan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 .....	62

Tabel 2. 23	Jumlah Produksi Daging Ternak Kabupaten Kepulauan Selayar .....	77
Tabel 2. 24	Jumlah Produksi Telur Kabupaten Kepulauan Selayar.....	78
Tabel 2. 25	Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Kepulauan Selayar.....	78
Tabel 2. 26	Nilai realisasi dan pertumbuhan investasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2023.....	87
Tabel 2. 27	Nilai Indeks IDM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023.....	99
Tabel 2. 28	Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023.....	104
Tabel 2. 29	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik Kabupaten Kepulauan Selayar .....	104
Tabel 2. 30	Indeks Matirutas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2022 .....	110
Tabel 2. 31	Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 .....	110
Tabel 2. 32	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar .....	112
Tabel 2. 33	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	114
Tabel 2. 34	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	115
Tabel 2. 35	Proyeksi Kebutuhan Rumah / Tempat Tinggal Kabupaten Kepulauan Selayar .....	116
Tabel 2. 36	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Kepulauan Selayar.....	117
Tabel 2. 37	Proyeksi Kebutuhan Energi / Listrik Kabupaten Kepulauan Selayar .....	118
Tabel 2. 38	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan.....	118
Tabel 2. 39	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar ..	119
Tabel 2. 40	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar ..	119
Tabel 3. 1	Isu Strategis RPJPN, KLHS RPJPD, RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045.....	153
Tabel 4. 1	Makna Pernyataan Visi.....	155
Tabel 4. 2	Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan.....	156
Tabel 4. 3	Penyelarasan 5 (Lima) Sasaran Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Sasaran Visi RPJPD.....	157
Tabel 4. 4	Target Sasaran dan Indikator Visi Kabupaten Kepulauan Selayar Per Tahapan Jangka Menengah.....	159
Tabel 4. 5	Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar .....	162
Tabel 4. 6	Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 .....	162
Tabel 5. 1	Arah Kebijakan Lima Tahunan Berdasarkan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2045 .....	170
Tabel 5. 2	Misi dan Sasaran Pokok Jangka Panjang daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045 .....	175
Tabel 5. 3	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Derajat Kesehatan yang Merata, Maju, Modern dan Berkualitas Tahun 2025-2045 .....	176
Tabel 5. 4	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Pendidikan yang Merata, Maju, Modern dan Berkualitas Tahun 2025-2045.....	178
Tabel 5. 5	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2025-2045.....	178

Tabel 5. 6 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Perekonomian Kerakyatan yang Inklusif.....	179
Tabel 5. 7 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Meningkatnya Produktivitas Perikanan Pertanian, Industri dan Perdagangan secara Berkelanjutan melalui Penerapan Ekonomi .....	180
Tabel 5. 8 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Mandiri, .....	181
Tabel 5. 9 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Meningkatnya Investasi dan Ekspor Daerah Tahun 2025-2045 .....	181
Tabel 5. 10 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan Yang.....	186
Tabel 5. 11 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif,.....	182
Tabel 5. 12 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah.....	182
Tabel 5. 13 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang .....	183
Tabel 5. 14 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Meningkatnya Daya Saing Daerah Tahun 2025-2045 .....	188
Tabel 5. 15 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Beriman dan .....	184
Tabel 5. 16 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan .....	184
Tabel 5. 17 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2045 .....	186
Tabel 5. 18 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Infrastruktur Wilayah yang Handal dan Berwawasan Lingkungan Tahun 2025-2045 .....	185
Tabel 5. 19 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim .....	188
Tabel 5. 20 Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045 .....	189
Tabel 5. 21 Keselarasan Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Arah Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045 .....	189
Tabel 5. 22 Keterkaitan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045 .....	190
Tabel 5. 23 Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2045 .....	193
Tabel 5. 24 Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	215
Tabel 5. 25 Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar dan Penyelarasan dengan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan menurut Arah Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2045 .....	219
Tabel 5. 26 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan dan Target Berdasarkan Tahapan Pembangunan .....	224

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 dan 2018-2023 .....	16
Grafik 2. 2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023.....	17
Grafik 2. 3 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Kepulauan Selayar dan nasional Tahun 2015 dan 2018-2022.....	19
Grafik 2. 4 Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015, 2018-2021.....	21
Grafik 2. 5 Capaian indeks pertanaman padi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2023.....	22
Grafik 2. 6 Produktivitas Perikanan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023.....	22
Grafik 2. 7 Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2021 ....	23
Grafik 2. 8 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023 .....	25
Grafik 2. 9 Penurunan Emisi GRK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023 ...	27
Grafik 2. 10 Penurunan Emisi GRK Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2023.....	27
Grafik 2. 11 Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar .....	29
Grafik 2. 12 Kapasitas Air Baku Kabupaten Kepulauan Selayar .....	30
Grafik 2. 13 Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari Kabupaten Kepulauan Selayar .....	31
Grafik 2. 14 Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023 .....	31
Grafik 2. 15 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023 .....	32
Grafik 2. 16 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 .....	33
Grafik 2. 17 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional .....	34
Grafik 2. 18 Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010- 2022 .....	35
Grafik 2. 19 Piramida Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.....	37
Grafik 2. 20 Migrasi Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 .....	39
Grafik 2. 21 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar .....	40
Grafik 2. 22 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2010 - 2023.....	42
Grafik 2. 23 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2010-2023.....	48
Grafik 2. 24 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2023.....	49
Grafik 2. 25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 dan 2018-2023.....	50
Grafik 2. 26 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.....	51
Grafik 2. 27 Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023.....	52
Grafik 2. 28 Prevalensi Stunting Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 .....	53

Grafik 2. 29 Jumlah Kematian Ibu per 100 ribu kelahiran hidup .....	54
Grafik 2. 30 Jumlah Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup .....	55
Grafik 2. 31 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2023 .....	56
Grafik 2. 32 Angka Keberhasil Pengobatan TB Kabupaten Kepulauan Selayar.....	56
Grafik 2. 33 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 .....	57
Grafik 2. 34 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2010-2023.....	58
Grafik 2. 35 Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2022 .....	59
Grafik 2. 36 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional tahun 2010 -2023 .....	61
Grafik 2. 37 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 .....	63
Grafik 2. 38 Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Informal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 .....	64
Grafik 2. 39 Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi Kabupaten Kepulauan Selayar .....	65
Grafik 2. 40 Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar.....	66
Grafik 2. 41 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga .....	67
Grafik 2. 42 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2022 .....	68
Grafik 2. 43 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2023 .....	69
Grafik 2. 44 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten.....	69
Grafik 2. 45 Rasio PDRB Penyedia Akomodasi makan dan Minum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015 dan 2018-2023.....	70
Grafik 2. 46 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Domestik .....	71
Grafik 2. 47 Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Selayar.....	72
Grafik 2. 48 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015 dan 2018-2022.....	72
Grafik 2. 49 Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.....	73
Grafik 2. 50 Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Kepulauan Selayar .....	74
Grafik 2. 51 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015 dan 2018-2022.....	74
Grafik 2. 52 <i>Return On Asset</i> (ROA) BUMD Kabupaten Kepulauan Selayar .....	75
Grafik 2. 53 <i>Return On Asset</i> (ROA) Masing-masing BUMD Kabupaten Kepulauan Selayar .....	76
Grafik 2. 54 Produktivitas Padi (kw/Ha) Kabupaten Kepulauan Selayar .....	76
Grafik 2. 55 Produktivitas Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015 dan 2018-2023 .....	78
Grafik 2. 56 Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2022..	80
Grafik 2. 57 Indeks Kualitas Air Kabupaten Kepulauan Selayar.....	80
Grafik 2. 58 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kepulauan Selayar.....	81
Grafik 2. 59 Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	82

Grafik 2. 60	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 .....	83
Grafik 2. 61	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015, 2018-2023.....	84
Grafik 2. 62	Kontribusi Net ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015, 2018-2023.....	85
Grafik 2. 63	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar .....	86
Grafik 2. 64	Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015 dan 2018-2023 .....	86
Grafik 2. 65	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar .....	88
Grafik 2. 66	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 .....	89
Grafik 2. 67	Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022-2023 .....	90
Grafik 2. 68	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2023 .....	91
Grafik 2. 69	Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah terhadap APBD Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan .....	91
Grafik 2. 70	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Kemampuan Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2022 .....	92
Grafik 2. 71	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Kemampuan Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2022 .....	93
Grafik 2. 72	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar .....	93
Grafik 2. 73	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar .....	94
Grafik 2. 74	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2023.....	95
Grafik 2. 75	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 dan 2018-2023 .....	96
Grafik 2. 76	Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023 .....	96
Grafik 2. 77	Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2010, 2015 dan 2018-2023 .....	97
Grafik 2. 78	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 dan 2018-2023 .....	98
Grafik 2. 79	Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018-2023.....	99
Grafik 2. 80	Indeks infrastruktur Kabupaten Kepulauan Selayar .....	100
Grafik 2. 81	Rinican Capaian Setiap Indikator Indeks infrastruktur Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 .....	101
Grafik 2. 82	Persentase tindak kriminal yang ditangani Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023.....	102
Grafik 2. 83	Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2023 .....	103

Grafik 2. 84 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023 .....	106
Grafik 2. 85 Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023 .....	106
Grafik 2. 86 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023 .....	107
Grafik 2. 87 Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Kepulauan Selayar .....	107
Grafik 2. 88 Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Kepulauan Selayar .....	108
Grafik 2. 89 Nilai MCP KPK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 .....	109
Grafik 2. 90 Rata-Rata Pertumbuhan Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2025-2045.	113
Grafik 2. 91 Capaian dan Proyeksi TFR Kabupaten Kepulauan Selayar .....	113
Grafik 2. 92 Rata-Rata Pertumbuhan Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045 .....	114
Grafik 2. 93 Proyeksi Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045.....	115

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Lainnya .....	8
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.....	12
Gambar 2. 2 Peta Rawan Bencana Kab. Kepulauan Selayar.....	26
Gambar 5. 1 Pentahapan Implementasi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045 .....	163

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan satu-satunya kabupaten yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Pulau Sulawesi, terdiri dari 130 gugusan pulau-pulau, serta memiliki panjang garis pantai 670 km dengan beragam ekosistem laut yang menjadi potensi unggulan daerah. Hasil laut menjadi salah satu sumber utama pendapatan masyarakat selain sektor pertanian dan perkebunan, selain itu keindahan alam bawah laut dan pantai-pantai eksotis menjadi potensi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain keindahan alam bawah laut dan pantai, Kepulauan Selayar juga memiliki budaya yang kaya dengan berbagai tradisi maritim dan adat istiadat yang masih dipertahankan. Festival lokal dan kegiatan adat sering menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Keunggulan potensi alam dan sosial budaya yang dimiliki perlu dipadukan secara bijak dan dikelola seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip pembangunan dengan produktivitas tinggi, namun tetap inklusif dan berkelanjutan.

Pembangunan di Kepulauan Selayar selama ini telah dilakukan dengan memperhatikan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang terbangun antar wilayah, antar-ruang, antar waktu, dan antar fungsi, serta berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Capaian pembangunan Kepulauan Selayar selama kurun waktu 2005 hingga 2023 telah menunjukkan hasil yang semakin membaik, namun masih terdapat permasalahan yang perlu ditindaklanjuti penyelesaiannya pada pembangunan daerah periode 2025 hingga 2045. Olehnya itu, untuk kebutuhan pembangunan 20 tahun yang akan datang, maka disusun dan ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045 sebagai pedoman pembangunan daerah.

RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045 merupakan keberlanjutan dan pengembangan dari tahap pembangunan sebelumnya, untuk mencapai tujuan pembangunan dan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan

negara yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk itu, dalam 20 tahun ke depan sangat penting dan mendesak bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, baik di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaannya sehingga dapat maju dan berkembang sejajar dengan daerah lain di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia.

RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2005-2025 menunjukkan pencapaian yang sangat signifikan hal ini dapat dilihat dari kualitas hidup manusia di Kabupaten Kepulauan Selayar yang semakin membaik yang ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Selayar, pada tahun 2023, IPM Kabupaten Kepulauan Selayar telah mencapai 69,20. Angka ini meningkat 10,19 persen dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 62,15. Persentase penduduk miskin turun signifikan sebesar 46,13 persen dari 22,71 persen (tahun 2005) menurun menjadi 12,27 persen pada tahun 2023. Angka pengangguran turun menjadi 1,98 persen di tahun 2023 dari 12,92 pada tahun 2017 atau turun 84,67 persen. Pendapatan perkapita tahun 2005 sebesar Rp. 4.352.388 dan di tahun 2023 sudah mencapai Rp. 56.570.000 atau naik sebesar 1.299,75 persen. Indeks Gini mencapai 0,345 (tahun 2023) semakin kecil jika dilihat Indeks Gini di tahun 2014 yakni sebesar 0,339. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 3,68 persen, hal ini menandakan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Selayar mulai bergerak naik setelah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan Kabupaten Kepulauan Selayar, jika dibandingkan sepuluh tahun terakhir (tahun 2013) pertumbuhan ekonomi mencapai angka 8,18 persen.

Potensi dan capaian pembangunan 20 tahun sebelumnya menjadi bagian penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang. Selain itu, pembangunan 20 tahun kedepan harus menggunakan paradigma baru agar lebih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Transformasi pembangunan yang menjadi paradigma baru pembangunan Indonesia, sudah seharusnya juga menjadi paradigma pembangunan di Kepulauan Selayar, yang dijabarkan dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045 yang merupakan satu kesatuan NKRI. Agenda transformasi dimaksud, yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi dan Transformasi Tata Kelola. Transformasi yang telah dirumuskan dapat berjalan dengan baik, jika ditopang stabilitas daerah yang kondusif dilihat dari supremasi hukum, keamanan dan ketertiban; demokrasi substansial; ketahanan sosial budaya dan ekologi; dan stabilitasi ekonomi makro daerah.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi diperlukan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus pembangunan yang berkelanjutan. Interaksi yang kuat dan sinergis antara ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan dengan mengintegrasikan konsep pembangunan manusia yang melibatkan

individu, keluarga dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya baik fisik dan non fisik secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif serta pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Transformasi yang dilakukan Kabupaten Kepulauan Selayar memerlukan kerangka implementasi yang kuat berupa pembangunan kewilayahan yang didukung oleh sarana prasarana yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk itu diperlukan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 – 2045 memiliki arti penting untuk menjamin sinkronisasi perencanaan antara provinsi dan kabupaten, dan menjadi dokumen perencanaan makro berwawasan dua puluh tahun yang memuat visi, misi, arah pembangunan dan sasaran pokok jangka panjang daerah untuk penyelenggara pemerintahan daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung perwujudan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional “Indonesia Emas” di tahun 2045.

Oleh karena itu, dukungan kontribusi dan sinergitas perencanaan serta kesinambungan pembangunan mulai dari nasional, provinsi dan daerah menjadi hal yang mutlak dilakukan. Sinergitas perencanaan nasional dan daerah dilakukan melalui perumusan 8 (delapan) misi yang dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang diukur dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama keberhasilan pembangunan.

RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045 disusun melalui 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dan *Top Down Planning*, serta pendekatan politis. Serta secara substantif menggunakan pendekatan Tematik Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Seluruh desain perencanaan tersebut bertumpu pada karakteristik daerah, potensi daerah, masalah dan tantangan yang dihadapi daerah, dan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah di masa depan.

Penyusunan RPJPD Kepulauan Selayar tahun 2025-2045 juga memperhatikan dan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 050/4512/Bappelitbangda tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten / Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025- 2045. Dan dalam proses penyusunan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari persiapan penyusunan, orientasi penyusunan RPJPD, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, konsultasi vertikal ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), penyusunan rancangan akhir, review APIP, evaluasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hingga penetapan Peraturan Daerah RPJPD.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Penyusunan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 - 2045 berpedoman pada peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
  14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam dasar hukum penyusunan RPJPD (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
25. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28).

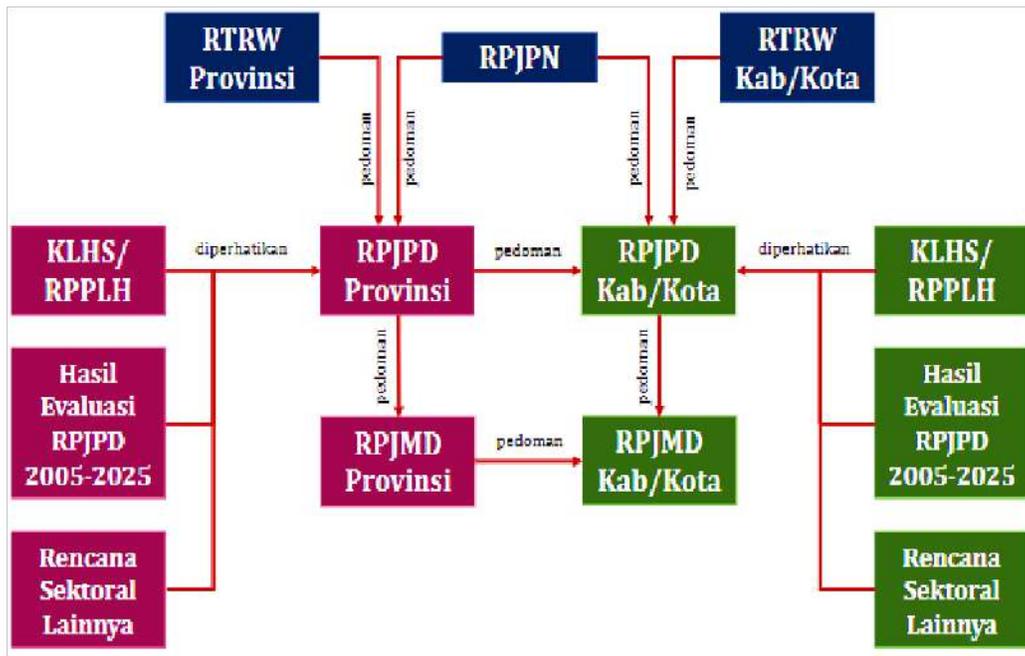
### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA**

Perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045 disusun selaras dan berpedoman pada : 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045, meliputi keselarasan dalam visi, misi/agenda pembangunan, arah/tujuan pembangunan, dan indikator kinerja utama pembangunan, dan 2) RTRW Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar, meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang utamanya struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis daerah. Selain itu, penyusunan RPJPD Kepulauan Selayar juga memperhatikan isu strategis dan arah kebijakan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2005 – 2025 terutama pada tingkat ketercapaian dan rekomendasi, dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan lainnya.

RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Hubungan antar dokumen perencanaan dalam penyusunan

RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045, digambarkan pada **Gambar 1.1.**



Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya  
Sumber: *Inmendagri Nomor 1 tahun 2024*

## 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1.4.1. Maksud

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) disusun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya.

### 1.4.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. merumuskan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok jangka panjang Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045;
2. menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat;

4. menyelesaikan permasalahan pembangunan, mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta meraih setiap peluang yang ada untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
5. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar untuk setiap jangka waktu lima tahun; dan
6. menjadi pedoman penyusunan visi dan misi Calon Bupati dan Wakil Bupati.

#### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan.** Bab ini memuat latar belakang penyusunan RPJPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen dengan RPJPD, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan dokumen RPJPD.

**Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah.** Bab ini memuat gambaran umum daerah yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2005-20225 dan tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

**Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis.** Bab ini memuat penjelasan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis yang harus diperhatikan dan dikedepankan yang dipakai sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok dua puluh tahun kedepan.

**Bab IV Visi dan Misi Daerah.** Bab ini memuat visi dan misi daerah, yang akan dicapai dua puluh tahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan.

**Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok.** Bab ini memuat arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah berdasarkan masing-masing misi dan indikator utama pembangunan. Pada bab ini juga diuraikan tentang tahapan dan prioritas pembangunan setiap lima tahunan yang nantinya dipakai dasar perumusan arah dan kebijakan pembangunan setiap lima tahun dalam RPJMD serta arah pembangunan kewilayahan.

**Bab VI Penutup.** Bab ini memuat kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen resiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

##### 2.1.1. Aspek Geografi

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki karakteristik berupa gugus kepulauan yang terletak antara 5°40' - 7°35' LS dan 120°15' - 122°30' BT dengan luas wilayah sebesar 10.503,69 km<sup>2</sup>, terdiri atas wilayah daratan dengan luas 1.357,03 km<sup>2</sup>, dan luas wilayah laut 9.146,66 km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai 670 km.

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Sebanyak 5 (lima) kecamatan berada di kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu dengan ibukota Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukota Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan ibukota Ujung Jampea, Kecamatan Taka Bonerate dengan ibukota Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena dengan ibukota Kalaotoa. Sedangkan 6 (enam) kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar, masing-masing Kecamatan Benteng dengan ibukota Benteng, Kecamatan Bontoharu dengan ibukota Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu dengan ibukota Pariangan, Kecamatan Bontomanai dengan ibukota Polebunging, Kecamatan Buki dengan ibukota Buki dan Kecamatan Bontomatene dengan ibukota Batangmata. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba (Selat Bira);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur

Luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )
1	Pasimarannu	195,33
2	Pasilambena	114,88
3	Pasimasunggu	131,8
4	Taka Bonerate	49,3
5	Pasimasunggu Timur	67,14

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )
6	Bontosikuyu	248,22
7	Bontoharu	128,12
8	Benteng	24,63
9	Bontomanai	136,42
10	Bontomatene	193,05
11	Buki	68,14
	Kepulauan Selayar	1.357,03

*Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024*

Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas 130 pulau dengan pulau berpenghuni sebanyak 34 buah, terletak di tengah bentangan Barat dan Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berada diantara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan ALKI III. Keunggulan tersebut dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi tersebut melalui Selat Bira, sehingga Kepulauan Selayar sangat potensial dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik 9 (Sembilan) bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Disamping itu, pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya sangat didukung oleh potensi sumberdaya alam, terutama disektor perminyakan di kawasan Utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di kawasan tengah dan Selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Takabonerate. Gambaran wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar secara administratif, dapat dilihat pada **Gambar 2.1.**



Kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Selayar sangat bervariasi, sebagian tanah datar dan ada yang agak miring. Fisiografi Pulau Selayar berdasarkan kondisi batuan dan kontrol struktur geologi terdiri dari tiga satuan morfologi, yaitu: Satuan morfologi daratan *alluvial* pantai, Satuan morfologi perbukitan bergelombang, dan Satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal.

Satuan morfologi daratan *alluvial* pantai menempati daratan sempit di pantai Barat. Pulau Selayar terbentuk oleh endapan pasir, pantai lempungan, kerikil yang bersifat lepas dan lapisan tipis batu gamping koral. Sedangkan satuan morfologi perbukitan gelombang dan satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal secara dominan menempati bagian Barat dengan ketinggian 356-657 meter di atas permukaan laut. Bentang alam yang tinggi disini diantaranya puncak Gunung Bontoharu (435 m), Gunung Bontokali (353 m), serta Gunung Bontosikuyu (607 m). Satuan morfologi ini ditempati oleh endapan hasil gunung api berupa breksi, lafa, konglomerat, tufa dengan batuan dengan selingan batuan sedimen laut.

Persentase kelas kelerengan Pulau Selayar umumnya didominasi oleh lereng landai (2-15 persen), dan semakin ke Selatan kelerengan tersebut semakin besar. Kecamatan Bontosikuyu mempunyai kelas kelerengan sangat terjal (>40 persen) mencapai 43,97 persen terhadap luas wilayah kecamatan, sedangkan di Kecamatan Bontoharu kelas kelerengan sangat terjal mencapai 33,12 persen, akan tetapi kebalikannya di Kecamatan Bontomatene dimana kelas kelerengan sangat terjal hanya mencapai 4,21 persen dari luas wilayah kecamatan.

Kondisi geologi Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu geologi Pulau Selayar dan geologi pulau-pulau kecil yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar. Geologi Pulau Selayar masih berhubungan dengan geologi Sulawesi Selatan bagian Selatan. Sedang geologi pulau-pulau kecil di kabupaten ini, yang terletak di Laut Flores, kemungkinan berhubungan dengan geologi Pulau Buton.

Batuan tertua yang menyusun Pulau Selayar adalah batuan gunung api Formasi Camba yang berumur *Miosen* Tengah hingga *Miosen* Akhir. Bagian bawah dari Formasi Camba tersusun oleh breksi, lava, konglomerat dan tufa. Di atasnya dijumpai batuan sedimen laut yang berselingan dengan batuan gunung api. Batuan-batuan Formasi Camba dijumpai di bagian tengah pulau dengan arah penyebaran Utara-Selatan. Di atas Formasi Camba dijumpai Formasi Walanae yang menjemari dengan batu gamping Selayar. Formasi Walanae terdiri dari batu pasir yang berselingan dengan batu lanau, tufa, napal, batu lempung,

konglomerat, dan batu gamping. Formasi ini berumur dari *Miosen* Tengah hingga *Pliosen*.

Umumnya pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar disusun oleh terumbu karang. Beberapa pulau menunjukkan kondisi geologi yang sangat berbeda dengan daratan Pulau Selayar. Beberapa pulau disusun oleh batuan beku yang berasal dari kerak kontinen seperti halnya Pulau Buton. Pulau-pulau ini adalah Pulau Jampea yang disusun oleh batuan beku granit, Pulau Kayuadi bagian Utara disusun oleh batuan beku yang bersifat menengah. Keberadaan pulau-pulau ini sampai sekarang masih menjadi obyek penelitian yang menarik bagi pakar geologi. Batuan-batuan yang menyusun Pulau Selayar pada umumnya terlihat lemah sampai sedang dengan kemiringan batuan ke arah Barat dan jurus perlapisannya relatif Utara-Selatan.

Kondisi hidrologis Pulau Selayar sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi pulau ini. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Pulau Selayar, yang pada umumnya debit air sungai tersebut relatif kecil akibat sempitnya daerah aliran sungai dan sistem sungainya. Akibat sistem pengaliran langsung ke laut dan kondisi batuan yang berkelurusan (*straight*) rendah, serta curah hujan yang tidak mendukung sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga besaran debit air sungai-sungai di Selayar sulit diukur. Berdasarkan susunan stratigrafi dan struktur geologi, maka pada wilayah bagian tengah (yang merupakan sebaran endapan formasi Walanae) merupakan suatu formasi lapisan batuan pembawa air yang bersifat tertekan (*aresian aquifes*) dengan debit air kecil sampai sedang (kurang dari 1-3 liter/detik). Air tanah bebas (*watertable groundwater*) dijumpai pada endapan alluvial dan endapan pantai, endapan formasi Walanae serta pada lembah-lembah yang ditempati oleh endapan batuan formasi Camba. Tingkat kedalaman air tanah sangat bervariasi tergantung pada keadaan alam dan jenis lapisan batuan. Pada endapan alluvial dan endapan pantai, tingkat kedalaman muka air tanahnya berkisar antara 5-6 meter, dan sangat dipengaruhi oleh intrusi air laut. Air tanah bebas ini dapat dijumpai pada daerah yang ditutupi oleh endapan batu gamping Selayar dari formasi Walanae berupa aliran tanah terbatas rekahan ataupun ruang akibat pelarutan yang membentuk sungai bawah tanah. Sumber air yang ada sangat terbatas, sehingga hampir keseluruhannya telah dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan penduduk. Indikasi keberadaan mata air tersebut terdapat di beberapa wilayah antara lain: Batangmata Sapo, Lembang-lembang, Bonto dan sebelah timur Tile-tile, dengan besaran debit air relatif kecil sampai sedang (1-4 liter/detik).

Sistem aliran hidrogeologi di Pulau Selayar menunjukkan adanya pergerakan air, baik air permukaan maupun air tanah menuju ke kawasan perairan laut. Pada daerah yang ditempati satuan batu gamping, aliran air tanah terbatas pada rekahan ataupun ruang akibat pelarutan membentuk sungai-sungai bawah tanah. Ini dapat dijumpai di sekitar wilayah Tajuiya, Tamasongia dengan debit air yang bervariasi. Keterbatasan sumber air akibat cakupan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) yang relatif sempit, struktur batuan permukaan dan *catchment area* sangat sempit menjadi tolak ukur untuk menggali potensi air. Oleh karena itu arahan penggunaan lahan pada kawasan potensial resapan air dibatasi untuk kawasan budidaya dan penggalian sumber air tanah khususnya kawasan Utara.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Berdasarkan pencatatan pada beberapa stasiun di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023, secara rata-rata jumlah hari hujan di daerah ini terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,6 hari per bulan dengan rata-rata curah hujan sebesar 106,6 mm dibanding dengan kondisi pada tahun sebelumnya yakni pada tahun 2022, rata-rata hari hujan sebesar 11,08 hari dengan rata-rata curah hujan sebesar 120,78 mm. Hujan turun tersebar dengan bulan-bulan relatif basah ( $\geq 100$  mm) antara Bulan Februari-Juli dan Desember dengan curah hujan rata-rata 168,06 mm sedangkan bulan relatif lembab (60-100 mm) terjadi pada Bulan Januari, Juni dan November dengan curah hujan rata-rata 86,89 mm sementara bulan relatif kering ( $< 60$  mm) antara Bulan Agustus-Oktober dengan curah hujan rata-rata 3,44 mm.

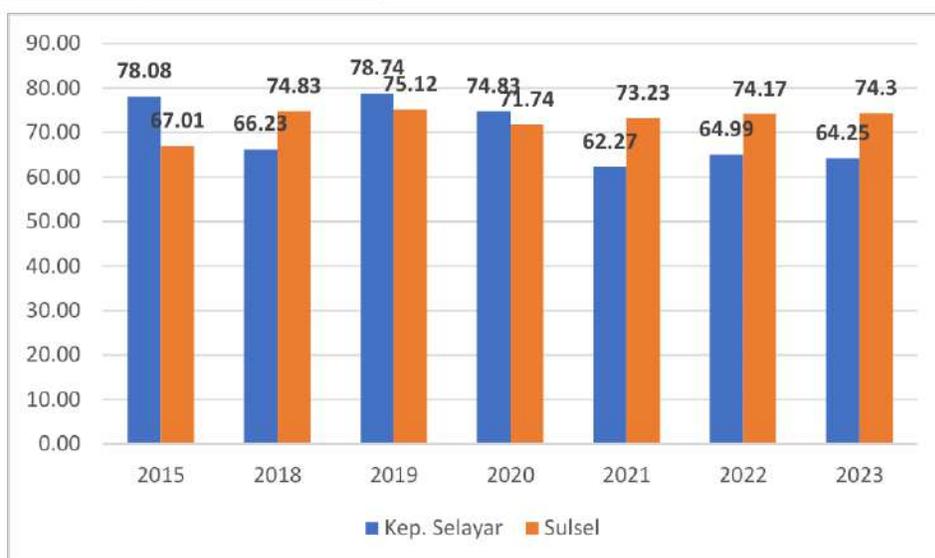
#### **2.1.1.1. Kualitas Lingkungan Hidup**

Kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan sebagai berikut:

##### **2.1.1.1.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan isu strategis dan hal penting dalam pembangunan. Perubahan yang terjadi karena proses pembangunan, diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan penduduk tetapi tidak mengganggu aspek lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan/atau pertumbuhan ekonomi wilayah selalu bersinggungan dengan aspek lingkungan hidup. Oleh karena itu, paradigma pembangunan daerah yang berkelanjutan menjadi tuntutan bagi pengambil kebijakan pembangunan nasional dan juga daerah. Hal ini karena sumber daya alam semakin terbatas sementara tuntutan kebutuhan dan jumlah penduduk semakin meningkat.

Kualitas lingkungan hidup suatu daerah dapat dilihat dari capaian dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar tiap tahunnya mengalami penurunan, tahun 2023 nilai IKLH sebesar 64,25 (kategori sedang), penurunan ini disebabkan perubahan tutupan lahan yang semakin berkurang dan penambahan luas permukiman. Selain itu, penurunan kualitas air juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup dimaksud. Nilai IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada di bawah nilai IKLH Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian IKLH di Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tahun 2015 dan 2018-2023 dapat dilihat pada **Grafik 2.1**.

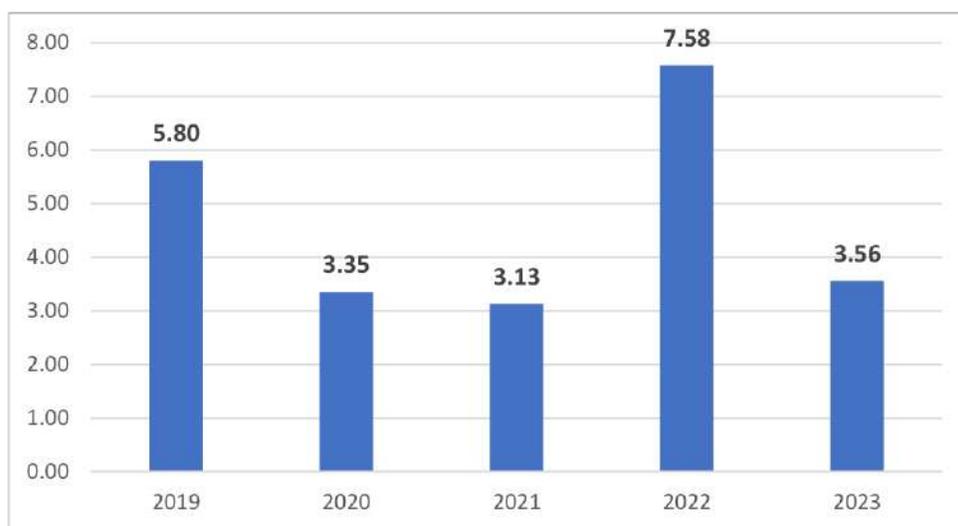


Grafik 2. 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 dan 2018-2023  
 Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

#### 2.1.1.1.2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga bersanitasi aman didefinisikan sebagai rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang terhubung dengan *septic tank* atau tanki septik, atau terhubung dengan sistem perpipaan yang diolah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD). Akses sanitasi yang masuk kategori aman, umumnya lumpur tinja disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan diolah lebih lanjut ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Akses sanitasi aman di Kabupaten Kepulauan Selayar tergolong masih rendah karena Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Selain itu, beberapa wilayah kepulauan terkhusus pulau-pulau kecil masih memiliki keterbatasan terhadap akses air bersih. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkhusus dalam pemanfaatan sarana prasarana sanitasi turut berkontribusi pada rendahnya capaian indikator ini.

Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 sebesar 3,56 persen, lebih rendah dari rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebesar 12,83 persen dan rata-rata nasional sebesar 10,21 persen. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kepulauan Selayar dapat dilihat dari data yang tersedia sejak tahun 2019 (**Grafik 2.2**).



Grafik 2. 2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023

Sumber Data: SIINSAN, 2024

### 2.1.1.1.3. Pengelolaan Sampah

#### 2.1.1.1.3.1 Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Pengelolaan timbulan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Berdasarkan data tahun 2023, capaian persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 1,30 persen dengan timbulan sampah sebesar 20.568,63 ton, timbulan sampah yang terkelola sebesar 4.975,50 ton dan daur ulang sampah sebesar 265,00 ton. Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 lebih rendah dibanding Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 22,45 persen.

Hal ini diakibatkan, karena Kabupaten Kepulauan Selayar hanya memiliki satu buah bank sampah yang terletak di Kota Benteng. Selain itu, penanganan sampah yang masih menggunakan pendekatan tradisional yaitu Kumpul-Angkut-Buang kemudian ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mengakibatkan semakin banyaknya timbulan sampah yang tidak terkelola yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Pelayanan pengumpulan melalui mobil sampah yang masih melayani masyarakat yang berdomisili pada wilayah Kota Benteng sehingga pengurangan

timbulan sampah tidak maksimal. Persentase sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah dapat dilihat pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2. 2 Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Tahun	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah terkelola (ton/tahun)	Persentase Sampah terkelola	Sampah Masuk TPA (ton/tahun)	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
2021	20.488,47	9.381,90	45,79	8.212,50	5,71
2022	20.144,20	6.420,45	31,87	5.381,59	5,16
2023	20.568,63	4.975,50	24,19	4.708,50	1,30

Sumber Data: SIPSN-KLHK, 2024

#### 2.1.1.1.3.2 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mengacu pada SEB penyalarsan RPJPN dengan RPJPD yaitu: a) Rumah tangga menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah; b) Rumah tangga memiliki tempat pengumpulan sampah bersama yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah. Proporsi rumah tangga yang menerima layanan penuh pengumpulan sampah hingga tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Selayar belum dilakukan. Informasi yang tersedia adalah proporsi rumah tangga dengan layanan pengumpulan sampah, yang pada tahun 2023 baru mencapai 5,45 persen, dan cenderung semakin turun persentasenya jika dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini lebih rendah dari proporsi capaian rumah tangga di Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 33,31 persen. Hal ini menunjukkan masih ada daerah-daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang belum menerima pelayanan pengumpulan sampah. Pada daerah yang tidak terlayani pengumpulan sampah, sampah yang dihasilkan tidak dikumpulkan ke TPS dan diangkut ke TPA, namun dikelola sendiri antara lain dibuang ke sungai/kebun, dikubur, atau dibakar. Capaian proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

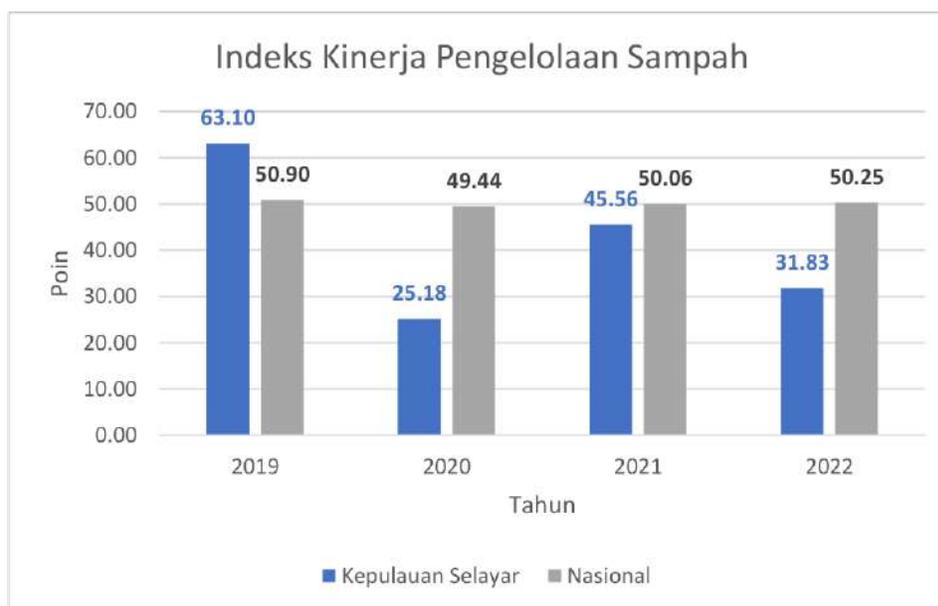
Tabel 2. 3 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% Ruta)

Tahun	Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Pengumpulan Sampah	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% Ruta)
	a	b	$c=(b/a)*100$
2021	34.490	2.186	6,34%
2022	34.752	2.254	6,49%
2023	45.501	2.457	5,45%

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Kinerja pengelolaan sampah Pemerintah Daerah juga dapat diukur melalui Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS). IKPS merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik tentang pencapaian pengelolaan sampah, dan juga sebagai instrument untuk mengukur keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola sampah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan, skor IKPS di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 31,63 poin pada tahun 2022. Nilai tersebut mengalami penurunan 13,73 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 45,56 poin. Skor IKPS mengalami cenderung berfluktuasi selama empat tahun terakhir. Adapun, skor IKPS Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2019 merupakan yang tertinggi pada rentang tahun 2019-2022. Capaian IKPS Kepulauan Selayar dan Nasional dapat dilihat pada **Grafik 2.3**.



Grafik 2. 3 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Nasional Tahun 2019-2022

Sumber Data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

#### **2.1.1.2. Pengurangan Ancaman dan Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati**

Keanekaragaman hayati sangat diperlukan bagi keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Pada kenyataannya, seiring dengan pembangunan yang semakin masif, ancaman keanekaragaman hayati berpotensi terjadi yang akan menyebabkan kepunahan baik itu satwa maupun jenis tumbuhan tidak terkecuali di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan luas laut dan potensi perikanan yang melimpah serta perekonomiannya yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang tentunya sangat perlu untuk memperhatikan keberlangsungan keanekaragaman hayati.

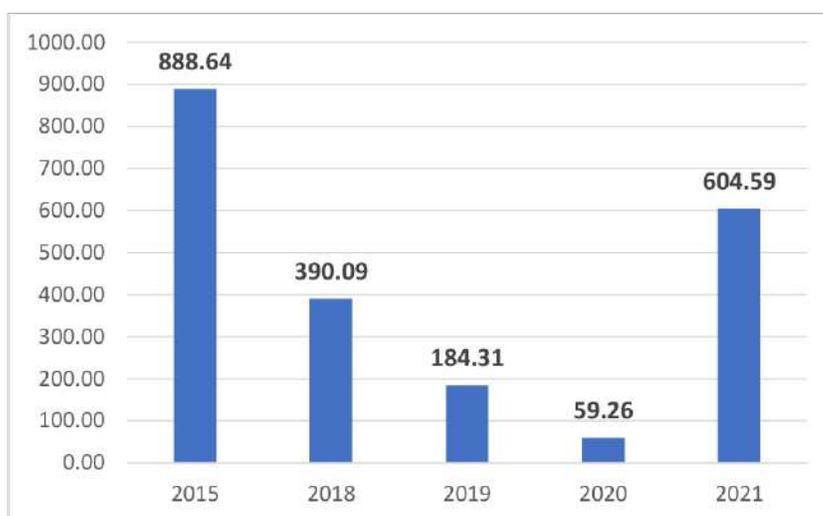
Untuk mengukur seberapa jauh pengurangan ancaman dan keberlanjutan pemanfaatan keanekaragaman hayati dapat dilihat dari beberapa tolok ukur sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut.

##### **2.1.1.2.1. Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia**

Penyiangan dan pemupukan merupakan praktik pertanian yang penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Pengelolaan proses pemupukan sangat erat kaitannya dengan peningkatan keanekaragaman hayati. Proses pemupukan harus melindungi atau meningkatkan keanekaragaman hayati lahan pertanian untuk lingkungan ekologi yang lebih baik dengan tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga mengurangi penggunaan herbisida.

Paparan pestisida terhadap keanekaragaman hayati di darat dapat menyebabkan efek mematikan pada tanaman, sehingga membunuh tanaman non-target. Sisa herbisida fenoksi yang masih tertinggal di udara atau menguap dapat melukai pohon dan semak di dekatnya. Serupa dengan pestisida, pemberian pupuk kimia yang berlebihan juga dapat mengganggu keseimbangan nutrisi dalam tanah sehingga akan berpotensi merusak tanaman serta keanekaragaman hayati lainnya.

Untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia pada masyarakat, maka penyaluran bantuan pupuk organik sangat perlu untuk dilakukan. Terkhusus di Kabupaten Kepulauan Selayar, selama kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2021, jumlah pupuk organik yang disalurkan selalu lebih banyak dari jumlah pupuk kimia yang disalurkan ke masyarakat, terkecuali pada tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia pada **Grafik 2.4**.



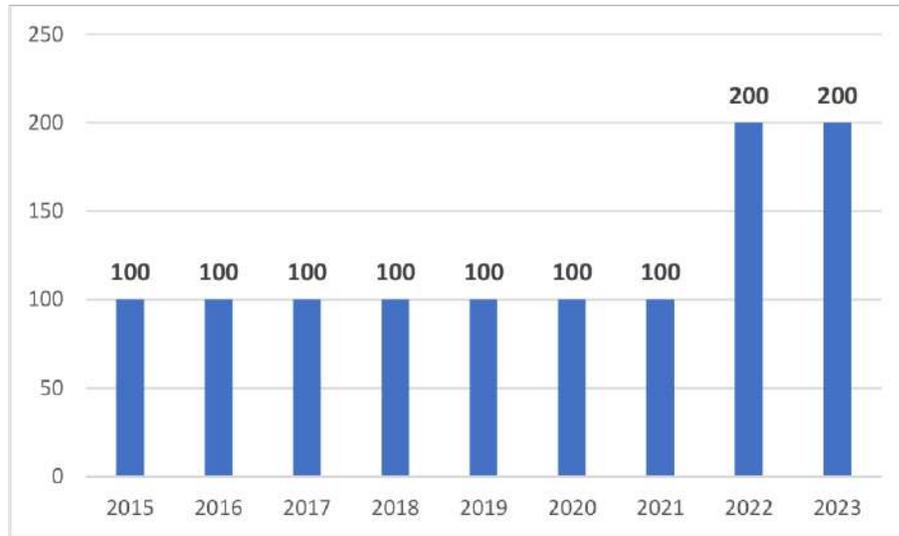
Grafik 2. 4 Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015, 2018-2021

*Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024*

#### 2.1.1.2.2. Indeks Pertanaman (IP) Padi

Indeks Pertanaman (IP) adalah rata-rata masa tanam dan panen dalam satu tahun pada lahan yang sama. Potensi peningkatan IP di setiap wilayah dapat dilakukan melalui optimalisasi lahan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, iklim, tanah, dan unsur hara secara terpadu serta melalui perbaikan pola tanam, baik padi maupun tanaman pangan lainnya.

Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 adalah IP 100. Hal ini dapat diartikan bahwa petani dapat melakukan panen atau menanam padi sebanyak satu kali dalam setahun. Pada tahun 2022 dan tahun 2023, Indeks Pertanaman Padi meningkat ke angka 200 yang berarti bahwa petani telah melakukan panen sebanyak dua kali dalam setahun. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah dalam memberikan bantuan peralatan teknologi pertanian kepada para kelompok tani. Selain itu, program dan kegiatan Pemerintah untuk perbaikan dan penambahan jaringan irigasi turut berkontribusi dalam peningkatan waktu panen padi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Capaian Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.5**



Grafik 2. 5 Capaian Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2023

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

### 2.1.1.2.3. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Produktivitas perikanan budidaya mengalami kondisi yang fluktuatif dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir. Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Kepulauan Selayar masih cenderung rendah karena sektor perikanan masih difokuskan pada perikanan tangkap. Produksi perikanan budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.6**.



Grafik 2. 6 Produktivitas Perikanan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023

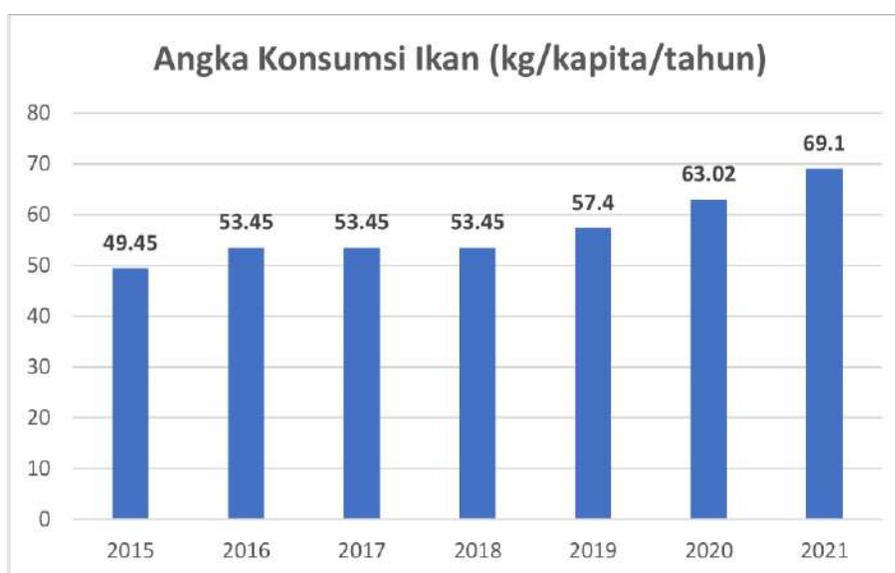
Sumber Data: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Faktor penghambat kurang maksimalnya produksi perikanan budidaya dalam beberapa tahun terakhir antara lain: Kondisi perairan tidak mendukung aktivitas budidaya rumput laut; Belum ada peta partisipatif tentang potensi detail rumput laut per lokasi budidaya; Adanya bencana alam (banjir) di sentra budidaya tambak; Masih lemahnya penanganan hama dan penyakit ikan; Lesunya pasar ikan hidup karena pandemi Covid 19; serta Pengembangan Budidaya air tawar belum optimal.

#### 2.1.1.2.4. Angka Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan (AKI) merupakan angka konsumsi ikan yang didapatkan dari konsumsi ikan dalam rumah tangga ditambah konsumsi ikan luar rumah tangga ditambah dengan konsumsi ikan tidak tercatat. Angka konsumsi ikan (AKI) adalah salah satu parameter penting untuk mengetahui tingkat konsumsi makan ikan masyarakat pada suatu wilayah. Angka konsumsi ikan perkapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat. Angka konsumsi ikan per wilayah dimanfaatkan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan suatu wilayah dalam pengelolaan perikanan.

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah yang memiliki potensi perikanan yang berlimpah tentunya memiliki angka konsumsi ikan yang cukup tinggi bahkan melebihi rata-rata nasional. Sebagaimana diketahui bahwa AKI Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021 sebesar 69,1 kg/kapita/tahun, lebih besar dari rata-rata AKI nasional sebesar 55,37 kg/kapita/tahun. Ketersediaan produk perikanan tangkap yang tinggi dan budaya konsumsi masyarakat terhadap produk ikan, merupakan pendorong tingginya angka konsumsi ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun nilai angka konsumsi ikan dapat dilihat pada **Grafik 2.7**.



Grafik 2. 7 Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2021

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

#### 2.1.1.3. Resilensi Bencana

Resilensi bencana digambarkan dengan capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) dan persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sebagai berikut :

##### 2.1.1.3.1. Indeks Risiko Bencana

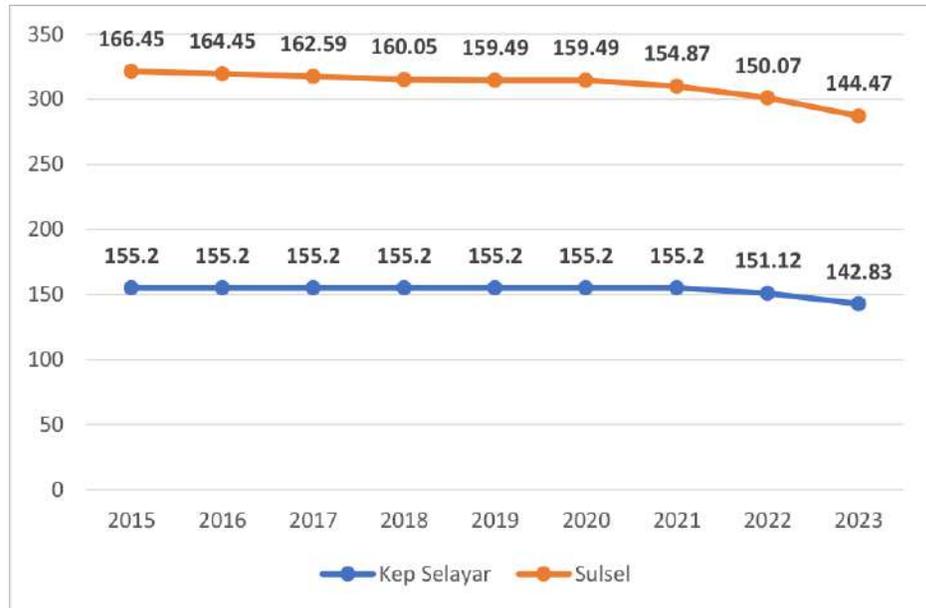
Kabupaten Kepulauan yang secara geografis terletak di ujung Selatan jazirah Sulawesi dan memanjang dari Utara ke Selatan dan terdiri

dari gugusan pulau-pulau (130 pulau), Kabupaten Kepulauan Selayar berpotensi terhadap bencana alam berupa tsunami, kecelakaan laut, angin kencang, abrasi pantai dan banjir. Hampir semua desa dan kelurahan sepanjang pantai Barat dan pantai Timur serta 36 pulau berpenghuni pada 5 (Lima) kecamatan yang berada di kepulauan, rawan terhadap bencana alam laut. Dibawah ini disajikan data kejadian bencana (**Tabel 2.4**) serta Peta Rawan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar (**Gambar 2.2**). Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2015 hingga 2023 mengalami tren penurunan nilai indeks tetapi Kabupaten Kepulauan Selayar masih termasuk daerah dengan tingkat resiko bencana tinggi. Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Kepulauan Selayar masih dibawah Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini dapat dilihat pada **Grafik 2.8**.

Tabel 2. 4 Kejadian dan Penanganan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2022

Kejadian Bencana		Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
Angin Kencang	Lokasi	Kec.	5	6	6		9
	Korban Terdampak	KK	28	81	10	71	84
	Kejadian	Kali	18	26	10	71	119
	Kerugian	Juta Rp.	21	62	69	111,143	
Banjir/ Banjir Rob	Lokasi	Kec.	-	2	-		8
	Korban Terdampak	KK	-	123	-		25
	Kejadian	Kali	-	1	-	1	11
	Kerugian	Juta Rp.	-	289	-		
Tanah Longsor	Lokasi	Kec.					5
	Korban Terdampak	KK					2
	Kejadian	Kali					6
	Kerugian	Juta Rp.					
Kebakaran	Lokasi	Kec.	6	4	6		4
	Korban Terdampak	KK	9		17	5	46
	Kejadian	Kali	9		6	5	6
	Kerugian	Juta Rp.	99	72	106	23,144	
Gempa Bumi	Lokasi	Kec.	-	-	-	2	1
	Korban Terdampak	KK	-	-	-	1.176	
	Kejadian	Kali	-	-	-	1	1
	Kerugian	Juta Rp.	-	-	-	8.691,3	

Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024



Grafik 2. 8 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023

Sumber Data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024



**2.1.1.3.2. Persentase Penurunan Emisi GRK**

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi komitmen internasional untuk secara bersama menahan laju pemanasan global. Progres penurunan emisi tahun 2023 cukup baik (10.626,25 tonCO<sub>2</sub>eq). Untuk penurunan emisi, *track record* pada tahun 2018 realisasi penurunan emisi 1.004,21 tonCO<sub>2</sub>eq, meningkat ditahun 2019 sebesar 4393,29 tonCO<sub>2</sub>eq, meningkat ditahun 2020 sebesar 5056,25 tonCO<sub>2</sub>eq dan tahun 2022 sebesar 10.626,25 tonCO<sub>2</sub>eq (**Grafik 2.9** dan **Grafik 2.10**).



Grafik 2. 9 Penurunan Emisi GRK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023

Sumber Data: Aplikasi AKSARA, 2024



Grafik 2. 10 Penurunan Emisi GRK Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2023

Sumber Data: Aplikasi AKSARA, 2024

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian tingkat intensitas emisi antara lain: a) lemahnya pelaksanaan pelestarian dan rehabilitasi lahan kritis yang terdampak aktivitas perekonomian komoditas/ sektor unggulan; b) masih terjadinya pembukaan lahan dan alih fungsi lahan untuk sektor ekonomi unggulan c) rendahnya praktik dan pemanfaatan teknologi berkelanjutan serta ramah lingkungan pada sektor ekonomi unggulan; d) kebutuhan peningkatan produktivitas pertanian cenderung bersifat ekstensifikasi dibanding intensifikasi. Diperlukan beberapa upaya untuk menurunkan GRK di Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain: mendorong peningkatan produktivitas ekonomi yang tetap mengupayakan pelestarian dan rehabilitasi sumber daya alam dan jasa ekosistem; mendorong intensifikasi sektor ekonomi unggulan yang rendah karbon; dan transisi dari subsidi bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan

#### **2.1.1.4. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan**

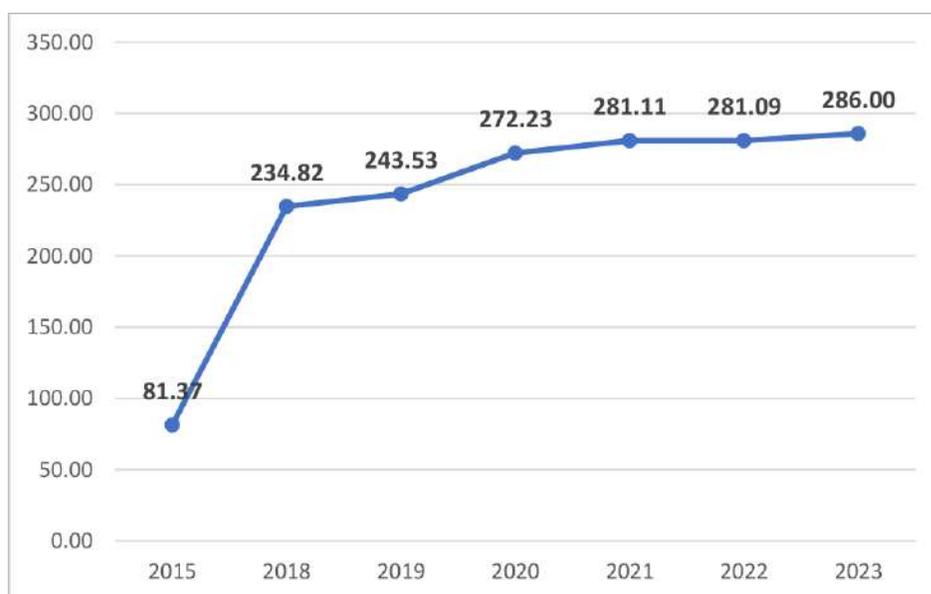
Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan tidak terlepas dari potensi sumber daya alam dan geografis yang dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Ketahanan energi, air dan pangan dapat dilihat sebagai berikut.

##### **2.1.1.4.1. Ketahanan Energi**

Pengembangan dan pemanfaatan energi ditujukan kepada pengelolaan energi yang hemat dan efisien dengan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan masyarakat, industri dan kebutuhan pemerintah untuk jangka panjang. Titik berat pembangunannya adalah upaya memaksimalkan sumber energi serta memanfaatkan sumber-sumber energi alternatif. Usaha kelistrikan masuk desa untuk mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih ditingkatkan. Beberapa permasalahan ketenagalistrikan yang dihadapi untuk keperluan pemukiman masyarakat adalah biaya yang tinggi untuk mengembagan listrik pedesaan, karena letak desa yang berjauhan dan terpisah oleh lautan dengan sumber listrik PLTD yang disediakan PLN, sehingga untuk memenuhi kebutuhan listrik perlu mengadakan unit-unit pembangkit kapasitas kecil di setiap desa

##### **2.1.1.4.1.1. Konsumsi Listrik per Kapita**

Konsumsi energi listrik rumah tangga perkapita mengalami peningkatan selama kurun waktu 10 tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,00 persen. Konsumsi energi listrik mengalami penurunan di tahun 2015 disebabkan karena adanya modernisasi/ pergantian pada mesin pembangkit listrik pada PLN Cabang Selayar. Konsumsi Listrik perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.11**.



Grafik 2. 11 Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 dan 2018-2023

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Peningkatan konsumsi listrik perkapita sebagaimana yang tergambar pada **Grafik 2.11** di atas disebabkan oleh infrastruktur kelistrikan yang semakin berkembang dan merata khususnya di wilayah kepulauan. Beberapa wilayah kepulauan termasuk Pulau Jampea dan Pulau Bonerate telah menikmati jaringan listrik PLN. Selain itu, pada tahun 2023, terdapat 4 (empat) PLTS yang dibangun yaitu 3 (tiga) PLTS dibangun di wilayah kepulauan yaitu di Kecamatan Taka Bonerate, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena, serta 1 (satu) PLTS dibangun di wilayah daratan Kepulauan Selayar.

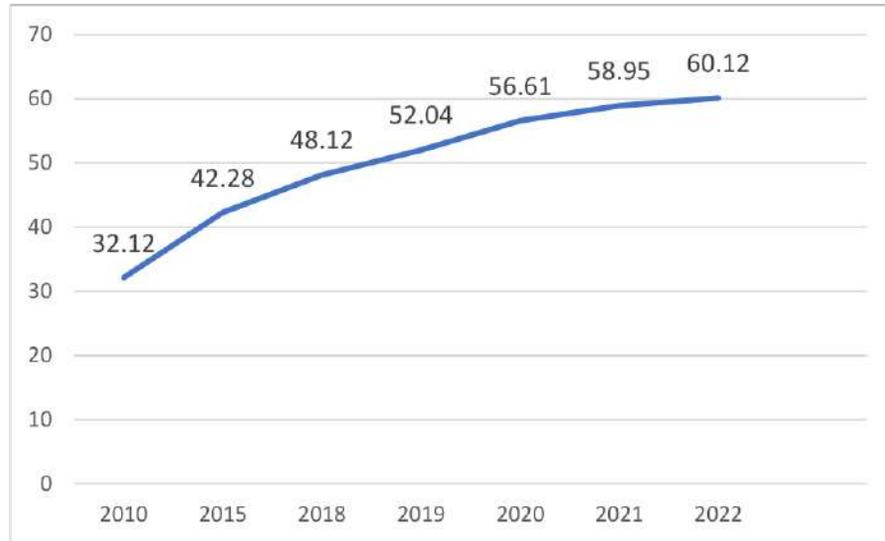
#### **2.1.1.4.2. Ketahanan Air**

Ketahanan air sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kondisi air yang aman sangatlah bermanfaat dan diperlukan sebagai penguat negara yang produktif dan meminimalkan daya rusaknya. Setiap orang mengharapkan air bersih yang aman dan terjangkau untuk kehidupan yang sehat dan produktif. Selain itu, Pemerintah Daerah juga senantiasa berupaya melindungi masyarakatnya dari dampak negatif akibat banjir, kekeringan, tanah longsor, erosi, dan penyakit yang ditularkan melalui air. Dinamika perkembangan Indeks Ketahanan Air pada saat ini menjadi perhatian strategis bagi para pengambil kebijakan sampai pada tingkatan kabupaten / kota. Ketahanan air dapat digambarkan dari kapasitas air baku dan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, sebagai berikut.

##### **2.1.1.4.2.1. Kapasitas Air Baku**

Air baku adalah air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum. Ketersediaan air baku memiliki peranan penting bagi pemenuhan air minum bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan sumber-sumber air baku sangat diperlukan untuk menjaga

kapasitas air baku yang ideal bagi masyarakat. Kapasitas air baku Kabupaten Kepulauan Selayar terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh pembangunan beberapa bendungan serta jaringan irigasi di beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Capaian kapasitas air baku Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.12**.

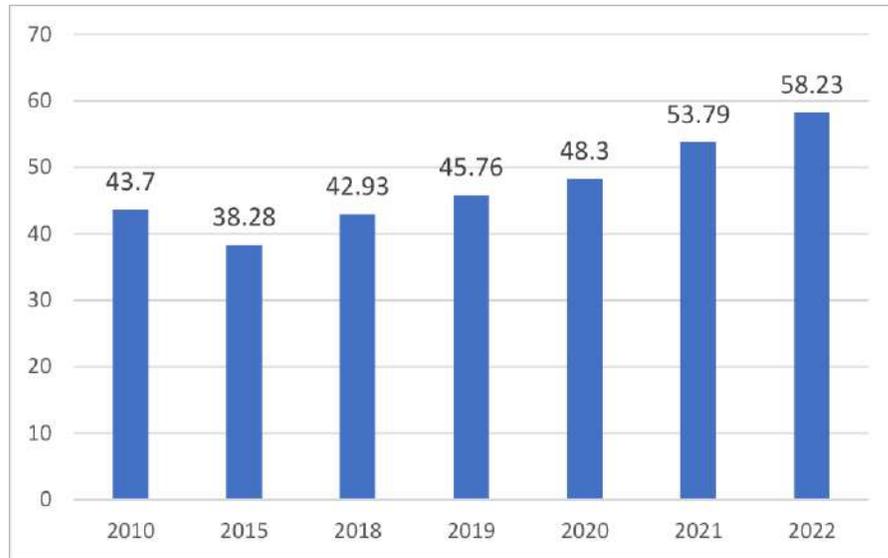


Grafik 2. 12 Kapasitas Air Baku Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015, 2018-2022 (m<sup>3</sup>/detik)

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

#### 2.1.1.4.2.2. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian

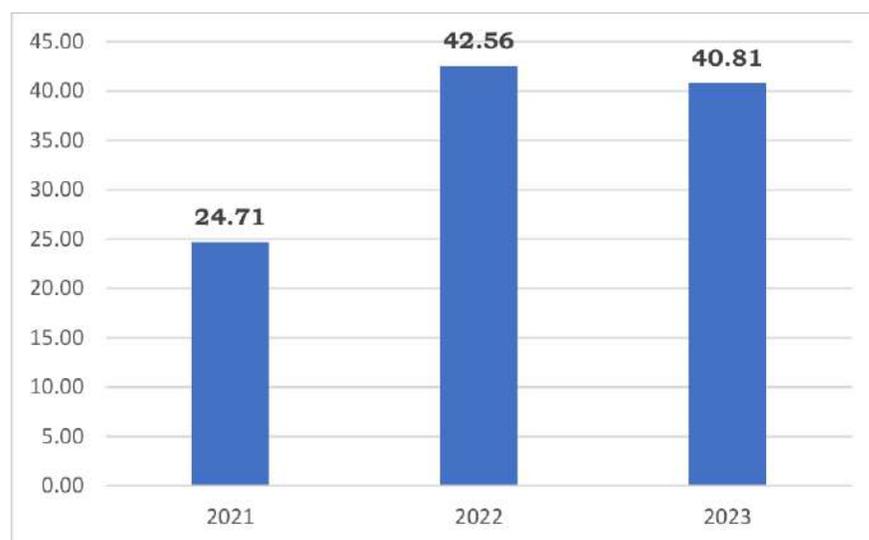
Penyediaan air minum aman merupakan masalah utama yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai daerah kepulauan, ketersediaan air minum aman bagi masyarakat belum optimal terpenuhi. Hal ini disebabkan, wilayah geografis Kepulauan Selayar yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan beberapa diantaranya tidak memiliki sumber air (sumber air tadah hujan). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di pulau-pulau kecil dengan membangun embung, sumur dan melalui penyulingan air laut ataupun pembangunan arsinum di beberapa wilayah. Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Kabupaten Kepulauan Selayar secara dapat dilihat pada **Grafik 2.13**.



Grafik 2. 13 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015, 2018-2022

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, 2023

Data pada **Grafik 2.13**, dapat dilihat dari 58,23 persen masyarakat yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2023, terdapat sekitar 40 persen rumah tangga di wilayah perkotaan yang memiliki akses terhadap air minum perpipaan. Hal ini disebabkan karena PDAM sebagai perusahaan daerah atau lembaga yang bertanggungjawab untuk menyediakan akses terhadap air minum perpipaan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Disamping itu, air yang disediakan oleh PDAM terkadang keruh dan tidak aman untuk digunakan sebagai air minum sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan air sumur sebagai sumber air sehari-hari. Capaian akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 sampai 2023 dapat dilihat pada **Grafik 2.14**.



Grafik 2. 14 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023

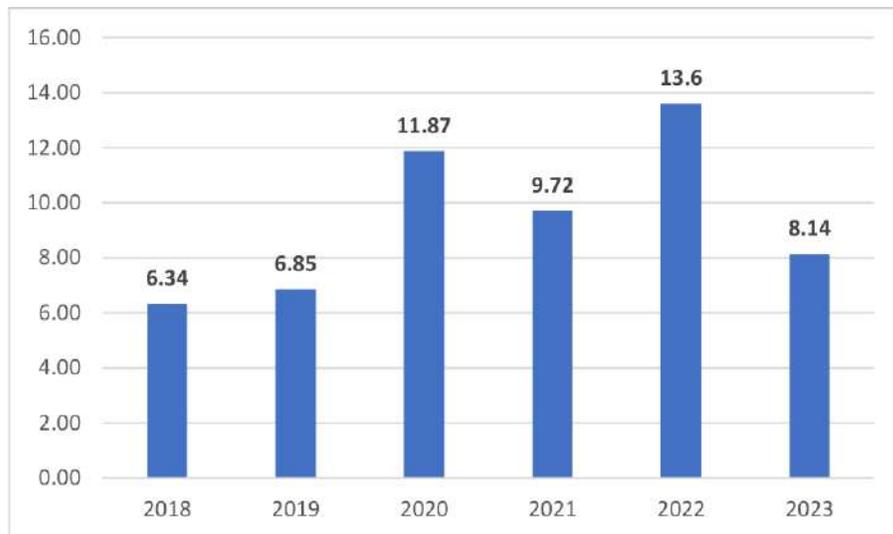
Sumber Data: SIMSPAM, 2024

#### 2.1.1.4.3. Ketahanan Pangan

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan ketahanan pangan, sebagai berikut.

##### 2.1.1.4.3.1. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi sehari-hari biasanya dari makanan, dimana makanan yang dikonsumsi tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. Ketidakcukupan konsumsi energi sehari-hari dinyatakan dalam bentuk persentase ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) yang didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang, secara reguler, mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.15**.



Grafik 2. 15 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023

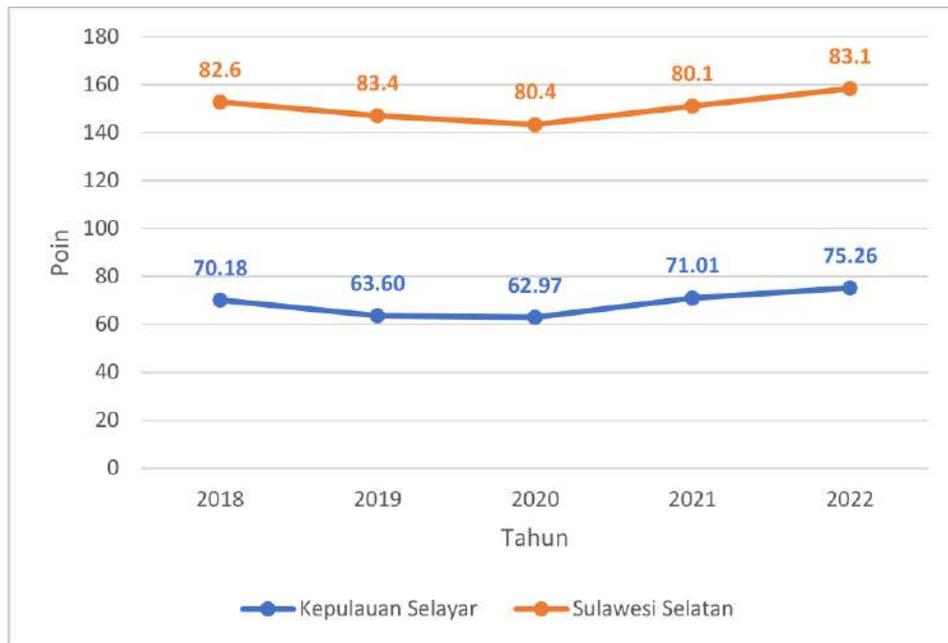
Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

**Grafik 2.15** di atas dapat dilihat bahwa capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung fluktuatif dari tahun 2018 sampai 2023, namun pada tahun 2022, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan memiliki capaian tertinggi selama enam tahun terakhir. Semakin tinggi prevalensinya, maka semakin tinggi pula persentase penduduk yang mengonsumsi makanan, tetapi kurang untuk memenuhi kebutuhan energinya.

##### 2.1.1.4.3.2. Indeks Ketahanan Pangan

Nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten. Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah : a) Rasio konsumsi normatif perkapita terhadap produksi bersih; b) Persentase penduduk yang hidup

di bawah garis kemiskinan; c) Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran; d) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik; e) Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun; f) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih; g) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk; h) Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting); i) Angka harapan hidup pada saat lahir. Secara umum IKP kabupaten maupun kota se-Sulawesi Selatan pada tahun 2022 masuk dalam kategori Sangat Tahan Pangan, kecuali Kabupaten Kepulauan Selayar masuk dalam kategori Tahan Pangan (> 67,75– 75,68). Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada **Grafik 2.16**.



Grafik 2. 16 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Sumber Data: Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2024

Tabel 2. 5 Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 – 2022

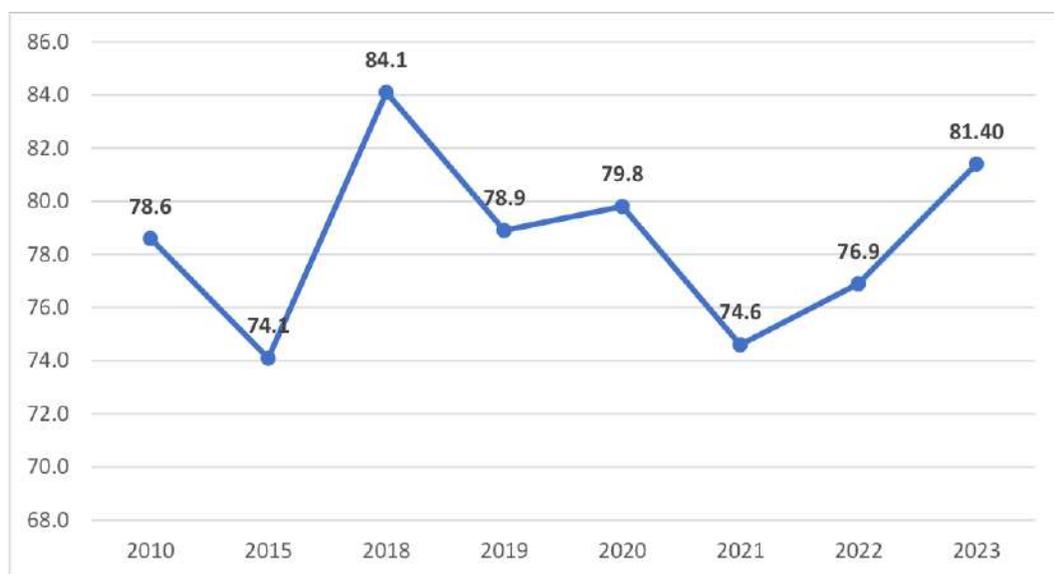
Tahun	Indeks			IKP
	Ketersediaan (IK)	Keterjangkauan (IA)	Pemanfaatan (IP)	
2019	41,26	76,96	70,32	63,60
2020	25,85	80,59	77,60	62,97
2021	58,87	77,14	75,51	71,01
2022	73,32	76,43	75,85	75,26

Sumber Data: Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2024

#### 2.1.1.4.3.2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor

PPH. Skor PPH sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Skor PPH Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010, 2015 dan dalam lima tahun terakhir berfluktuasi, seperti tergambar pada **Grafik 2.17**.



Grafik 2. 17 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015 dan 2018-2023

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Skor PPH tahun 2015 mengalami penurunan dari lima tahun sebelumnya (tahun 2010) dan selanjutnya mengalami capaian fluktuatif sampai tahun 2021. Selanjutnya capaian dari tahun 2021 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar. Skor PPH Kabupaten Kepulauan Selayar masih dibawa skor PPH Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional.

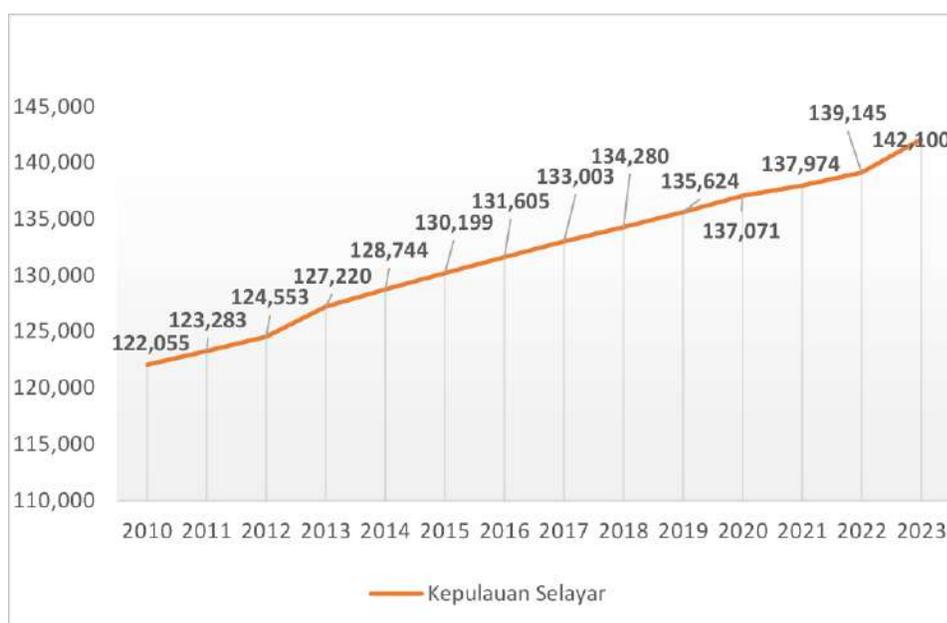
### 2.1.2. Aspek Demografi

Kondisi aspek demografi yang perlu diperhatikan dalam perencanaan jangka panjang sebagai berikut.

#### 2.1.2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Data BPS Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 berjumlah 142.100 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Benteng yaitu sebanyak 25.096 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2010 adalah 122.055 jiwa, kemudian pada tahun 2015 tumbuh menjadi 130.199 jiwa dan data tahun 2018 menjadi 134.270 jiwa, atau tumbuh rata-rata sebesar 1,21 persen pertahun. Kecamatan Benteng merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan

Kecamatan Buki merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terendah. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar selama beberapa tahun terakhir bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan relatif rendah dan fluktuatif. Gambaran lebih rinci tentang jumlah penduduk dapat dilihat pada **Grafik 2.18** serta laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Tabel 2.6**



Grafik 2. 18 Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010- 2023  
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Tabel 2. 6 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2023

Kecamatan	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar (%)											Rata-rata
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	
Pasimarannu	1,44	0,47	0,36	0,40	0,29	0,31	0,61	12,01	1,06	1,25	1,67	1,81
Pasilambena	2,56	1,61	1,50	1,45	1,43	1,29	1,23	2,69	1,14	1,31	4,58	1,89
Pasimasunggu	2,33	1,29	1,26	1,22	1,21	1,08	1,20	0,62	0,74	0,92	5,45	1,57
Takabonerate	2,41	1,47	1,38	1,32	1,29	1,18	1,13	-3,41	0,42	0,61	8,45	1,48
Pasimasunggu Timur	1,31	0,35	0,31	0,25	0,24	0,41	0,41	3,81	0,24	0,43	2,27	0,91
Bontosikuyu	1,71	0,81	0,71	0,63	0,64	0,63	0,60	-0,35	0,16	0,35	4,22	0,92
Bontoharu	2,01	1,03	1,02	0,91	0,94	0,71	0,86	6,76	1,05	1,24	2,54	1,73
Benteng	3,54	2,61	2,53	2,48	2,43	2,06	2,09	-6,94	0,99	1,20	-3,48	0,86
Bontomanai	1,53	0,60	0,52	0,46	0,44	0,48	0,47	6,32	0,63	0,82	1,55	1,26
Bontomatene	1,53	0,58	0,50	0,45	0,44	0,48	0,47	1,00	0,13	0,32	0,92	0,62
Buki	1,57	0,64	0,57	0,46	0,45	0,39	0,42	4,32	0,46	0,63	1,60	1,05
<b>Kepulauan Selayar</b>	<b>2,14</b>	<b>1,20</b>	<b>1,13</b>	<b>1,08</b>	<b>1,06</b>	<b>0,96</b>	<b>1,00</b>	<b>1,07</b>	<b>0,66</b>	<b>0,85</b>	<b>2,13</b>	<b>1,21</b>

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Benteng. Pertumbuhan penduduk tertinggi pada tahun 2023 terjadi pada 3 wilayah kecamatan kepulauan yaitu Kecamatan Taka Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dan Kecamatan Pasilambena. Laju pertumbuhan penduduk dimaksud seyogianya diikuti oleh pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan,

yang berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat mendatangkan pengaruh langsung kepada masyarakat namun tidak merusak lingkungan serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

#### 2.1.2.2. Rasio Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2015 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Kecamatan Bontoharu merupakan kecamatan yang memiliki rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin tertinggi yaitu sebesar 99,05 persen di tahun 2023 dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan Kecamatan Taka Bonerate merupakan kecamatan yang memiliki nilai rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin terendah yaitu sebesar 88,06 persen. Rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Tabel 2.7**.

Tabel 2. 7 Rasio Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2023

Kecamatan	Tahun								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pasimarannu	87	87	87	87	87	97	98	99	96,70
Pasilambena	94	94	94	94	94	98	98	98	98,47
Pasimasunggu	90	90	90	90	90	96	96	96	97,42
Taka bonerate	97	97	97	97	97	98	98	98	88,06
Pasimasunggu Timur	90	90	90	90	90	96	96	96	96,72
Bontosikuyu	95	95	95	95	95	96	96	96	98,44
Bontoharu	95	95	95	95	95	100	100	100	99,05
Benteng	92	93	93	93	93	94	93	93	94,12
Bontomanai	97	97	97	97	98	99	98	98	98,78
Bontomatene	87	87	87	87	88	93	,93,11	93	92,22
Buki	91	91	91	92	92	97	97	97	96,20
<b>Kepulauan Selayar</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>96,83</b>

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

#### 2.1.2.3. Komposisi Penduduk

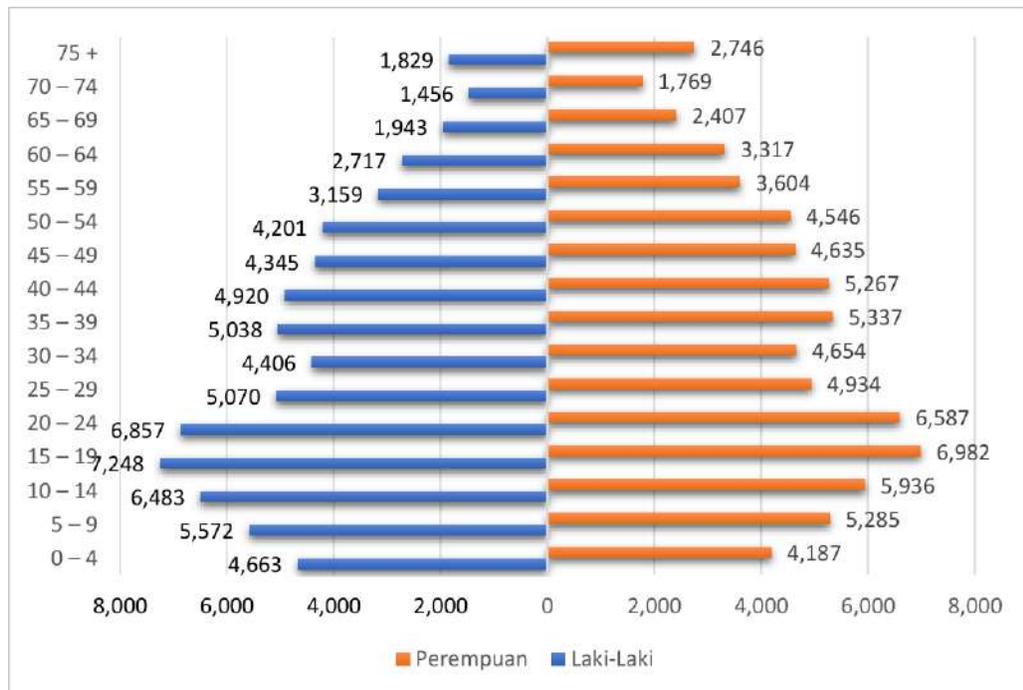
Komposisi penduduk terdiri dari komposisi penduduk menurut umur dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, secara umum dapat dikatakan bahwa struktur penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk kategori sedang, karena proporsi penduduk berusia di bawah 15 tahun tidak melampaui angka 40 persen atau pada tahun 2023 jumlah penduduk kelompok usia 0-14 tahun sebesar 22,61 persen (32.126 jiwa, terdiri dari 16.718 laki-laki dan 15.408 perempuan) dari total penduduk. Sedangkan penduduk yang termasuk kelompok usia produktif (15-64

tahun) berjumlah 97.824 jiwa (68,84 persen) dan penduduk berusia 65 tahun ke atas hanya sekitar 8,55 persen atau 12.150 jiwa (terdiri dari 5.228 laki-laki dan 6.922 perempuan). Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 2.8** dan **Grafik 2.19**.

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			Seks Rasio
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	0 – 4	4.663	4.187	8.850	111,37
2	5 – 9	5.572	5.285	10.857	105,43
3	10 – 14	6.483	5.936	12.419	109,21
4	15 – 19	7.248	6.982	14.230	103,81
5	20 – 24	6.857	6.587	13.444	104,10
6	25 – 29	5.070	4.934	10.004	102,76
7	30 – 34	4.406	4.654	9.060	94,67
8	35 – 39	5.038	5.337	10.375	94,40
9	40 – 44	4.920	5.267	10.187	93,41
10	45 – 49	4.345	4.635	8.980	93,74
11	50 – 54	4.201	4.546	8.747	92,41
12	55 – 59	3.159	3.604	6.763	87,65
13	60 – 64	2.717	3.317	6.034	81,91
14	65 – 69	1.943	2.407	4.350	80,72
15	70 – 74	1.456	1.769	3.225	82,31
16	75 +	1.829	2.746	4.575	66,61
JUMLAH		<b>69.907</b>	<b>72.193</b>	<b>142.100</b>	<b>96,83</b>

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024



Grafik 2. 19 Piramida Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023  
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Data *sex ratio* berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Data Statistik tahun 2023 menunjukkan bahwa *sex ratio* penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 96,83 persen yang berarti bahwa penduduk laki-laki di Kabupaten Kepulauan Selayar 3,17 persen lebih sedikit

dibandingkan jumlah penduduk perempuan. *Sex ratio* terbesar berada di Kecamatan Bontoharu yakni sebesar 99,05 persen sedangkan yang terkecil berada di Kecamatan Benteng sebesar 92,22 persen. Informasi tentang jumlah penduduk per jenis kelamin dan *sex ratio* diuraikan pada **Tabel 2.9**.

Tabel 2. 9 Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Kecamatan, dan *Sex Ratio* Kabupaten Kepulauan Selayar 2018-2023

No.	Kecamatan	Penduduk			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pasimarannu	5.366	5.549	10.915	96,70
2	Pasilambena	4.256	4.322	8.578	98,47
3	Pasimasunggu	4.570	4.691	9.261	97,42
4	Takabonerate	7.352	7.422	14.774	88,06
5	Pasimasunggu Timur	3.982	4.117	8.099	96,72
6	Bontosikuyu	7.952	8.078	16.030	98,44
7	Bontoharu	7.626	7.699	15.325	99,05
8	Benteng	11.886	12.628	24.514	94,12
9	Bontomanai	7.016	7.103	14.119	98,78
10	Bontomatene	6.508	7.057	13.565	92,22
11	Buki	3.393	3.527	6.920	96,20
	<b>2023</b>	<b>69.907</b>	<b>72.193</b>	<b>142.100</b>	<b>96,83</b>
	2022	68.296	70.849	139.145	96,40
	2021	67.713	70.261	137.974	96,37
	2020	67.262	69.809	137.071	96,35
	2019	65.424	70.200	135.624	93,20
	2018	64.672	69.608	134.280	92,54

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

#### 2.1.2.4. Kepadatan Penduduk

Persebaran jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar yang tidak merata, mengakibatkan kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 rata-rata sebesar 105 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk per kecamatan dapat dilihat pada **Tabel 2.10**.

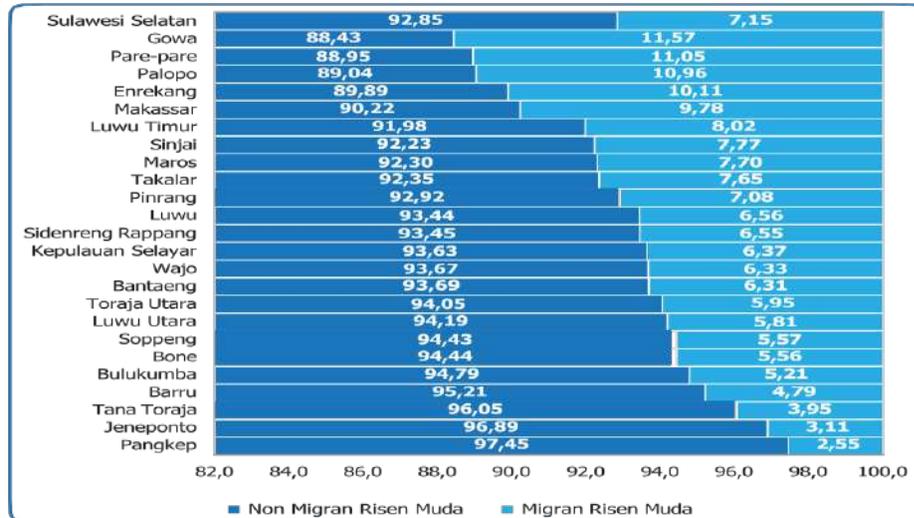
Tabel 2. 10 Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015 -2023

Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa / Km <sup>2</sup> )									
		2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pasimarannu	195,33	46	46	47	48	48	48	54	54	55	56
Pasilambena	114,88	59	61	65	66	67	68	70	70	71	75
Pasimasunggu	131,8	58	59	63	64	64	65	66	66	67	70
Taka bonerate	49,3	249	256	273	277	280	283	274	275	276	300
Pasimasunggu Timur	67,14	109	109	112	112	112	113	117	117	118	121
Bontosikuyu	248,22	58	58	61	61	61	62	62	62	62	65
Bontoharu	128,12	97	99	104	105	106	107	114	115	117	120
Benteng	24,63	867	910	1.016	1.040	1.062	1.084	1.009	1.019	1.031	995
Bontomanai	136,42	90	90	93	94	94	94	100	101	102	104
Bontomatene	193,05	65	86	68	68	68	69	69	69	70	70
Buki	68,14	90	91	94	94	94	95	99	99	100	102
<b>Kepulauan selayar</b>	<b>1.357,03</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>105</b>

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

### 2.1.2.5. Migrasi Penduduk

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki migran terbesar diatas Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Luwu, yaitu sebesar 6,37 persen. Penduduk Kabupaten Selayar yang melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan dan melanjutkan pendidikan ke beberapa perguruan tinggi di Makassar dan daerah lain (Yogyakarta, Bogor). Migrasi penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar dan kabupaten / kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada **Grafik 2.20**.



Grafik 2. 20 Migrasi Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022  
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, SP2020 Logform

## 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi aspek kesejahteraan ekonomi dan aspek kesejahteraan sosial budaya. Kondisi kedua aspek tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

### 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Gambaran kesejahteraan ekonomi dapat dilihat dari Indeks Daya Saing Daerah, persentase kerjasama yang ditindaklanjuti, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka.

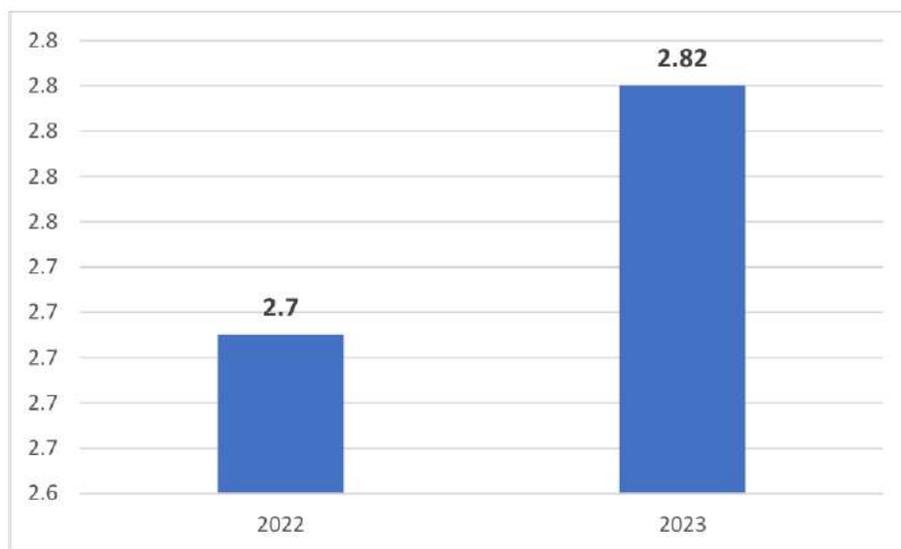
#### 2.2.1.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.

Pengukuran IDSD untuk level kabupaten/kota baru dilaksanakan mulai tahun 2022. IDSD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023

meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022. Beberapa pilar IDSD Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 adalah pilar adopsi TIK, pilar stabilitas ekonomi makro dan pilar ukuran pasar. Peningkatan capaian pilar adopsi TIK disebabkan karena pada tahun 2023, banyak tower BTS yang dibangun di wilayah terpencil dan kepulauan sehingga masyarakat di wilayah tersebut dapat menikmati jangkauan layanan telepon selular dan internet. Lebih lanjut bahwa capaian ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami capaian yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi serta PDRB perkapita yang meningkat seiring banyaknya *event-event* yang diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Selayar serta beberapa pekerjaan konstruksi yang menyebabkan aktivitas ekonomi semakin menggeliat. Selain itu, tingkat pengangguran yang rendah serta inflasi yang dapat ditekan turut berkontribusi dalam peningkatan capaian IDSD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Namun di sisi lain, masih ada beberapa pilar IDSD yang masih memiliki capaian dibawah nilai indeks 1 (satu) yaitu pilar sistem keuangan dan pilar kapabilitas inovasi. Rendahnya pilar sistem keuangan disebabkan oleh belum masifnya pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh masyarakat untuk membuka usaha. Terkhusus untuk pilar kapabilitas inovasi, Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki ekosistem riset dan inovasi yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasan jumlah peneliti serta masih belum optimalnya belanja riset dalam APBD Kabupaten Kepulauan Selayar. Capaian IDSD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.21**.



Grafik 2. 21 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2023

Sumber Data: BRIN, 2024

#### 2.2.1.2. Jumlah Kerjasama antar Daerah

Kerjasama antar daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan

kebutuhan bersama. Dalam konteks pengembangan wilayah atau program kewilayahan, kerjasama antar daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergis dan selaras. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai bentuk kerjasama antar daerah dengan tata cara kerjasama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan yang ada.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan kerjasama antar daerah, baik itu kerjasama dengan kabupaten/kota yang lain, kerjasama dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan pemerintah pusat. Dari berbagai kerjasama yang dilakukan, kemudian seluruh dari kerjasama dimaksud kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan kerjasama yang ada. Jumlah kerjasama serta persentase kerjasama antar daerah yang ditindaklanjuti dapat dilihat pada **Tabel 2.11**.

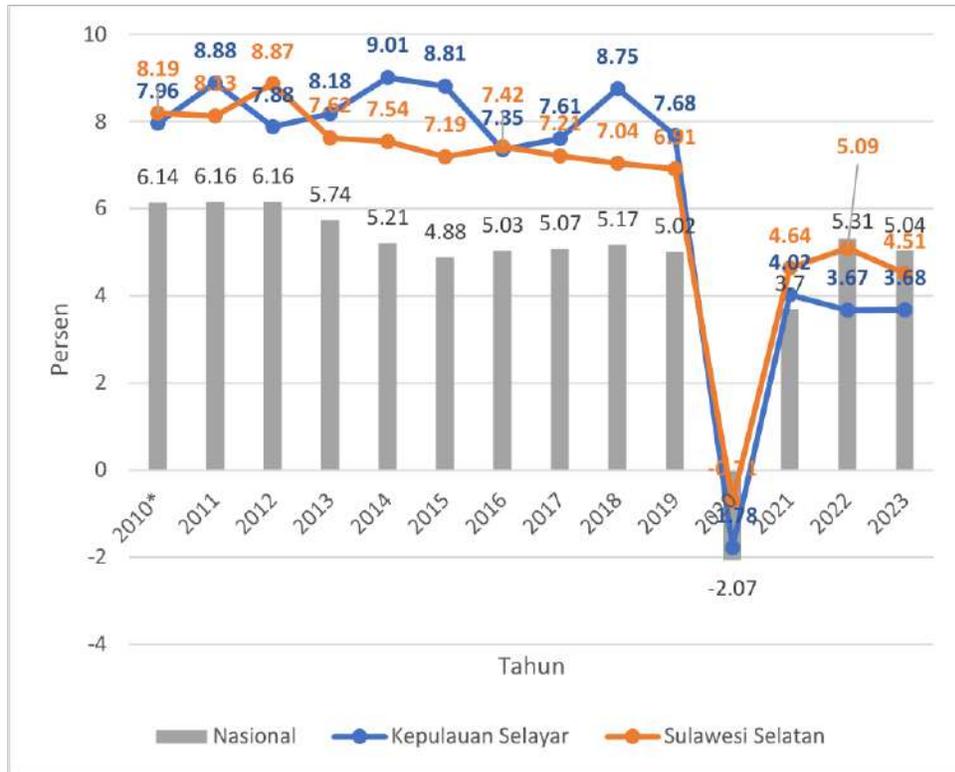
Tabel 2. 11 Jumlah Kerjasama dan Persentase Kerjasama Antar Daerah yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2023

NO	JENIS KERJASAMA	JUMLAH KERJSAMA			
		2020	2021	2022	2023
1	Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	2	-
2	Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi	3	1	2	2
3	Kerjasama dengan Pemerintah Pemerintah Pusat/ Instansi Vertikal/ Lembaga non Kementerian	1	6	5	1
4	Kerjasama luar negeri	-	-	-	-
JUMLAH		4	7	9	3
Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

### 2.2.1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi suatu daerah dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010 sebesar 8,01 persen, naik di tahun 2015 menjadi sebesar 8,81 persen dan tahun 2018-2023, mengalami penurunan dari 7,68 persen pada tahun 2019 menjadi -1,78 persen pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 4,02 persen namun pada tahun 2022 mengalami perlambatan menjadi 3,67 persen dan tahun 2023 sebesar 3,68 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar masih dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional (**Grafik 2.22**) dan untuk melihat perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar dengan daerah setara dapat dilihat pada **Tabel 2.12**.



Grafik 2. 22 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2010-2023  
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Tabel 2. 12 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2011-2023

KABUPATEN/ KOTA	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN)												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SINJAI	7,60	7,32	7,79	6,98	7,55	7,09	7,23	7,44	6,12	1,55	5,23	4,87	5,71
BANTAENG	9,38	9,67	9,00	8,33	6,64	7,39	7,31	8,13	10,75	0,52	8,86	15,45	5,56
BULUKUMBA	5,49	9,65	7,77	8,54	5,62	6,77	6,89	5,05	5,49	0,43	4,76	3,81	4,11
KEPULAUAN SELAYAR	8,88	7,88	8,18	9,01	8,83	7,35	7,61	8,75	7,68	-1,78	4,02	3,67	3,68
JENEPONTO	8,44	7,55	6,64	7,93	6,54	8,32	8,25	6,29	5,47	0,16	5,40	3,81	1,90
SULSEL	8,13	8,87	7,62	7,54	7,19	7,42	7,21	7,04	6,91	-0,71	4,64	5,10	4,51

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Melihat **Grafik 2.22**, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 selalu impresif pada angka diatas 7 persen. Namun setelah terjadi pandemi Covid 19 pada awal tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami kontraksi hingga pada angka -1,78 persen namun kembali meningkat menjadi 3,68 persen pada tahun 2023. Kontraksi ini diakibatkan oleh beberapa sektor lapangan usaha penyumbang PDRB yang mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2020 khususnya beberapa sektor lapangan usaha penyumbang terbesar terhadap PDRB yaitu sebagai berikut:

- a. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kepulauan Selayar pada tahun 2019 mencapai 44,69 persen dan

- mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 42,44 persen, kemudian meningkat terus sampai tahun 2023 menjadi 43,89 persen. Selain pertumbuhan ekonomi sektor ini yang tumbuh positif pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebagai dampak pandemi Covid 19 yang mengakibatkan berkurangnya permintaan pasar terhadap produksi yang dihasilkan pada kategori ini dan pada tahun 2021-2023 kategori ini kembali tumbuh positif menandakan kembali membaiknya perekonomian pada kategori ini.
- b. Pertumbuhan sektor konstruksi yang menyumbang sebesar 20 persen lebih pada PDRB Kepulauan Selayar pada tahun 2020 melambat jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terjadi karena terjadinya *refocusing* anggaran dari program dan kegiatan infrastruktur untuk menggarakan jaminan sosial serta jaminan kesehatan. Sektor ini meningkat kembali pada tahun 2021-2023 karena terjadi peningkatan pembangunan fisik antara lain: pembangunan mesjid agung, pembangunan jalan dan jembatan kabupaten, PLTS dan pembangunan fisik lainnya.
  - c. Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran mengalami kontraksi akibat pandemi Covid 19 pada tahun 2020 sebesar -0,42 persen. Hal ini karena, terjadinya pembatasan pergerakan aktivitas perdagangan eceran dan besar serta penurunan pendapatan sehingga pengeluaran konsumen juga berkurang.
  - d. Pertumbuhan sektor administrasi pemerintahan mengalami perlambatan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 disebabkan penurunan belanja pegawai akibat kebijakan dari pemerintah pusat yang membatasi proporsi belanja pegawai terhadap APBD.
  - e. Pandemi Covid 19 juga mengakibatkan sektor transportasi khususnya transportasi udara menjadi tidak optimal sehingga kunjungan ke wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi berkurang sangat signifikan. Sektor transportasi dan tingkat hunia hotel kembali meningkat pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, disebabkan beberapa pelaksanaan *event-event* berskala regional Sulawesi Selatan dipusatkan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang meningkatkan kunjungan orang.

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha dapat dilihat pada **Tabel 2.13**.

Tabel 2. 13 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015 dan 2018-2023

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	Nilai PDRB ADHK (Milliar Rupiah)							
		2010	2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	775,08	1188,54	1.501,93	1.616,63	1.501,47	1.550,58	1.591,13	1.643,05
B	Pertambangan dan Penggalian	12,2	22,17	27,94	29,13	29,55	31,6	34,02	35,22
C	Industri Pengolahan	64,13	84,96	99,65	118,68	118,44	124,49	133,48	138,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,41	3,87	4,9	5,1	5,47	5,71	5,76	6,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,38	3,57	4,43	4,85	5,51	5,51	5,74	5,75
F	Konstruksi	284,16	473,44	624,29	648,26	661,28	688,54	719,95	744,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	162,4	237,82	297,72	324,34	322,97	340,01	366,73	384,71
H	Transportasi dan Pergudangan	41,1	62,6	83,22	95,13	77,05	87,75	94,63	99,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,6	5,98	8,54	10,07	8,88	9,24	10,49	11,03
J	Informasi dan Komunikasi	52,67	84,88	110,41	125,29	139,5	141,47	143,78	153,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	16,86	31,67	40,39	42,86	44,68	44,97	45,17	46,46
L	Real Estat	31,04	46,44	56,27	58,43	64,47	65,27	65,74	68,95
M,N	Jasa Perusahaan	0,25	0,45	0,58	0,64	0,57	0,57	0,58	0,6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	194,49	254,53	278,14	295,66	306,42	319,14	312,04	318,64
P	Jasa Pendidikan	117,55	161,67	202,32	218,13	233,89	244,96	257,68	268,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36,99	48,94	64,8	71,61	80,21	87,76	95,22	100,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,99	12,43	17,14	20,88	19,84	20,99	21,64	22,77
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>1.807,29</b>	<b>2.723,95</b>	<b>3.422,67</b>	<b>3.685,67</b>	<b>3.620,20</b>	<b>3.765,56</b>	<b>3.903,80</b>	<b>4.047,38</b>

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sebesar 7.986,24 Milliar Rupiah, nilai tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 dengan nilai PDRB ADHB tahun 2010 sebesar 1.807,29 Milyar Rupiah, tahun 2015 sebesar 4.148,07 Milyar Rupiah dan tahun 2022 sebesar 7.480,47 Milliar Rupiah. Sepanjang lima tahun terakhir, struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2023 sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan

Selayar yaitu sebesar 3.504,83 Milliar Rupiah atau 43,89 persen. Struktur ekonomi digambarkan dari kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB suatu daerah. Semakin besar persentase suatu sektor semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan perekonomian daerah. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha dapat dilihat pada **Tabel 2.14**.

Tabel 2. 14 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015 dan 2018-2023

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	Nilai PDRB ADHB (Milliar Rupiah)							
		2010	2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	775,08	1.913,92	2.645,71	2.879,61	2.712,88	2.913,58	3.268,73	3.504,83
B	Pertambangan dan Penggalian	12,2	40,3	53,84	56,67	59,67	64,26	71,11	75,72
C	Industri Pengolahan	64,13	108,4	142,46	177,48	179,35	191,83	207,73	224,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,41	2,99	4,97	5,22	5,54	5,88	5,99	6,43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,38	4,2	5,41	6,12	6,98	7,07	7,45	7,55
F	Konstruksi	284,16	810,69	1.261,88	1.370,81	1.401,65	1.494,77	1.621,53	1.732,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	162,4	301,65	440,51	495,76	499,08	532,85	599,82	645,43
H	Transportasi dan Pergudangan	41,1	99,03	134,51	156,45	127,02	142,5	169,67	187,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,6	8,15	12,74	15,73	14,32	15,07	17,31	18,74
J	Informasi dan Komunikasi	52,67	85,96	120,89	143,42	160,6	165,03	167,74	178,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	16,86	50,56	73,78	81,8	86,62	89,01	95,55	100,94
L	Real Estat	31,04	60,02	79,41	84	93,31	94,78	96,64	102,09
M,N	Jasa Perusahaan	0,25	0,69	1,04	1,16	1,06	1,08	1,16	1,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	194,49	363,47	436,99	475,38	501,06	526,87	518,76	537,26
P	Jasa Pendidikan	117,55	214,45	314,6	340,75	371,18	397,82	420,18	437,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36,99	66,69	100,6	119,45	139,66	157,9	173,45	184,75
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,99	16,89	27,93	34,39	32,75	35,1	37,63	39,81
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>1807,29</b>	<b>4.148,07</b>	<b>5.857,28</b>	<b>6.444,22</b>	<b>6.392,74</b>	<b>6.835,40</b>	<b>7.480,47</b>	<b>7.986,24</b>

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

#### 2.2.1.4. PDRB Perkapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah adalah dengan mengukur nilai PDRB perkapita. PDRB perkapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB

perkapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB perkapita diperoleh dari output yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB perkapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB perkapita di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2020 terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya nilai PDRB ADHB seluruh lapangan usaha dari 6.835,40 Miliar Rupiah pada tahun 2021, meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 7.480,47 Miliar Rupiah dan meningkat lagi menjadi 7.986,24 Miliar Rupiah pada tahun 2023. PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2021 sebesar 49,54 Juta Rupiah, meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 53,76 Juta Rupiah, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 56,57 Juta Rupiah. Berikut ini digambarkan perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2010-2023 (**Tabel 2.15**).

Tabel 2. 15 PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2023

Periode	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010
2010	14,81	14,81
2011	17,19	15,96
2012	19,79	17,04
2013	22,64	18,05
2014	27,14	19,44
2015	31,86	20,92
2016	35,46	22,22
2017	39,27	23,66
2018	43,62	25,49
2019	47,99	27,45
2020	46,73	26,46
2021	49,47	27,29
2022	53,56	28,06
<b>2023</b>	<b>56,57</b>	<b>28,48</b>

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar yang positif di tahun 2023 menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, yang berkontribusi pada peningkatan PDRB perkapita. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain dalam wilayah setara berdasarkan persentil 33 dan 67, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 berada pada urutan keempat dari delapan kabupaten/kota setara, yang terendah adalah Kabupaten Luwu

Utara dengan PDRB perkapita sebesar 53,35 Juta Rupiah. PDRB perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 69,70 Juta Rupiah dan nasional sebesar 74,96 Juta Rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 2.16**.

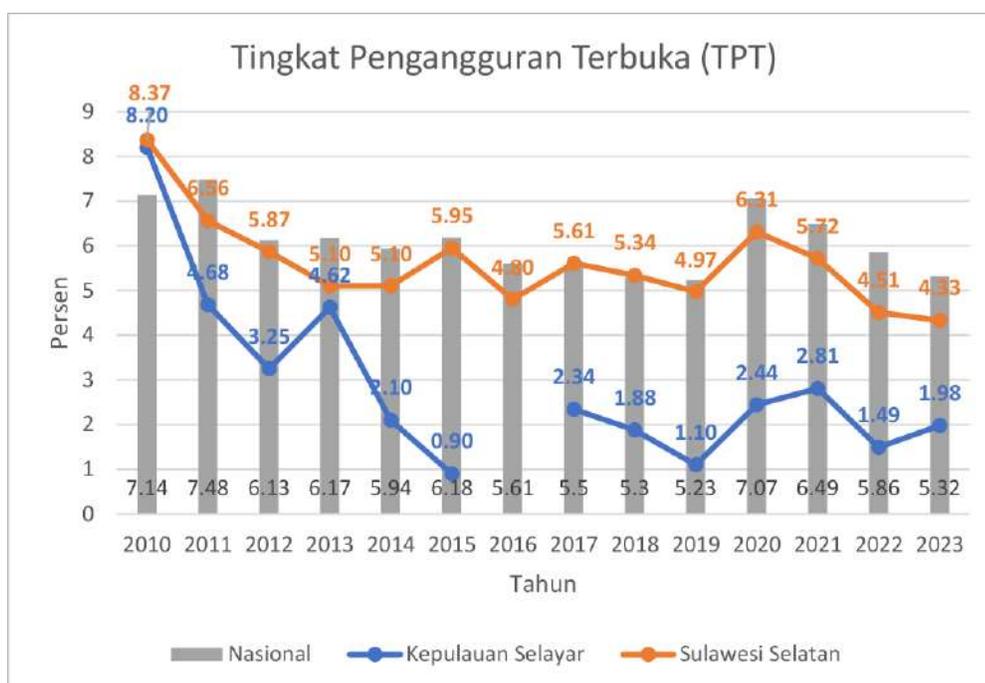
Tabel 2. 16 Perbandingan PDRB Perkapita ADHB antara Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

No	Kab./ Kota	Satuan	PDRB Per Kapita ADHB				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pare Pare	Juta Rp	50,06	48,5	51,18	56,16	58,78
2	Luwu	Juta Rp	43,04	43,91	48,55	54,03	57,36
3	Bone	Juta Rp	47,81	45,68	48,80	53,67	57,02
<b>4</b>	<b>Kepulauan Selayar</b>	<b>Juta Rp</b>	<b>47,99</b>	<b>46,73</b>	<b>49,54</b>	<b>53,76</b>	<b>56,57</b>
5	Sidrap	Juta Rp	46,49	44,12	47,19	51,00	55,51
6	Sinjai	Juta Rp	45,05	43,74	47,05	51,29	55,29
7	Palopo	Juta Rp	43,79	43,66	46,52	51,18	54,47
8	Luwu Utara	Juta Rp	41,65	41,07	44,33	48,96	53,45
	<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>Juta Rp</b>	<b>56,98</b>	<b>56,51</b>	<b>59,66</b>	<b>65,59</b>	<b>69,70</b>
	<b>Nasional</b>	<b>Juta Rp</b>	<b>59,32</b>	<b>57,27</b>	<b>62,26</b>	<b>71,03</b>	<b>74,96</b>

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

#### 2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sangat erat kaitannya dengan jumlah angkatan kerja. Capaian TPT Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010 sangat tinggi yakni 8,20 persen dalam lima tahun sampai tahun 2015 menurun menjadi 0,90 persen. Tahun 2022 nilai TPT sebesar 1,49 persen mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 2,81 persen. Angka ini diharapkan terus dapat diturunkan pada tahun-tahun berikutnya. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar berada dibawah (lebih baik) dibandingkan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Detail capaian persentase TPT Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional tahun 2010-2023 dapat dilihat pada **Grafik 2.23**



Grafik 2. 23 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2010-2023

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Besarnya penurunan angka TPT pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,54 persen didorong oleh penurunan dampak Covid-19 terhadap penduduk usia kerja Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tahun 2021 jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 sebanyak 8.000 jiwa dan pada tahun 2022 turun menjadi 199 jiwa dengan rincian sebagai berikut: jumlah pengangguran karena Covid-19 tahun 2021 sebanyak 121 jiwa dan pada tahun 2022 sudah tidak ada, jumlah penduduk yang sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 658 jiwa dan pada tahun 2022 menurun menjadi 70 jiwa, serta jumlah penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja pada tahun 2021 sebanyak 7.221 jiwa dan pada tahun 2022 turun menjadi sebanyak 129 jiwa.

Dibandingkan dengan kabupaten lain dalam wilayah setara, TPT Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 merupakan yang terendah ketiga, TPT terendah adalah Kabupaten Bulukumba dengan TPT sebesar 1,31 persen, sedangkan yang tertinggi adalah Kabupaten Bantaeng sebesar 3,71 persen. Angka TPT Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 2.17**.

Tabel 2. 17 Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2010-2023

KABUPATEN/ KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (PERSEN)												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BULUKUMBA	7,45	5,46	2,71	4,16	2,80	3,00	3,73	3,62	3,06	3,42	3,14	1,26	1,31
SINJAI	3,81	5,59	2,84	0,43	0,90	1,55	4,53	2,14	2,17	2,65	2,61	1,80	1,69
KEPULAUAN SELAYAR	8,20	4,68	3,25	4,62	2,10	0,90	2,34	1,88	1,10	2,44	2,81	1,49	1,98
JENEPONTO	6,33	5,06	4,35	2,77	2,70	4,00	3,31	2,81	1,99	2,31	2,38	2,21	2,13
BANTAENG	5,51	5,54	7,02	6,44	2,40	4,07	5,23	3,69	3,65	4,27	4,07	2,72	3,71
SULAWESI SELATAN	8,37	6,56	5,87	5,10	5,10	5,95	5,61	5,34	4,62	6,31	5,72	4,51	4,33

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

### 2.2.1.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio antara angkatan kerja dan total penduduk dengan rentang usia yang sama. TPAK Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010 adalah 6,84 persen dan meningkat signifikan tahun 2015 menjadi sebesar 67,64 persen. TPAK tahun 2020 adalah 68,18 persen, meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 69,07 persen dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 69,93 persen dan tahun 2023 menjadi 71,88 persen. TPAK Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018-2023 dapat dilihat pada **Grafik 2.24**.



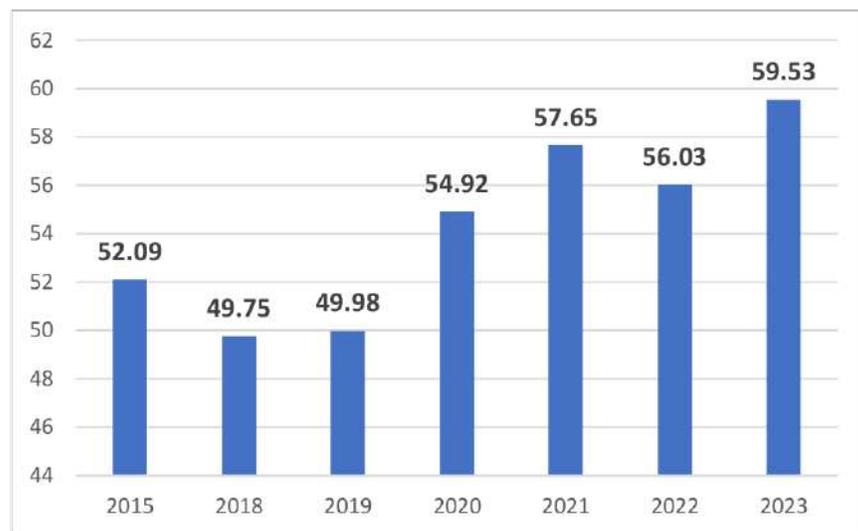
Grafik 2. 24 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2023

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 merupakan dampak positif dari kebijakan pemerintah dimasa pandemi yang tidak lagi memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat seperti tahun sebelumnya sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan normal dengan mematuhi protokol kesehatan.

### 2.2.1.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. TPAK Perempuan Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung fluktuatif jika dilihat dalam kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2023. Data tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sudah berada di atas 50 persen, ini menunjukkan bahwa perempuan usia produktif (berusia 15 tahun keatas) sudah bekerja untuk mencari nafkah dan membantu perekonomian keluarga. TPAK Perempuan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.25**.



Grafik 2. 25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 dan 2018-2023

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

### 2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Gambaran kesejahteraan sosial budaya digambarkan dari kondisi kesehatan; perlindungan sosial; agama dan kebudayaan; serta keluarga dan kesetaraan gender.

#### 2.2.2.1. Kesehatan

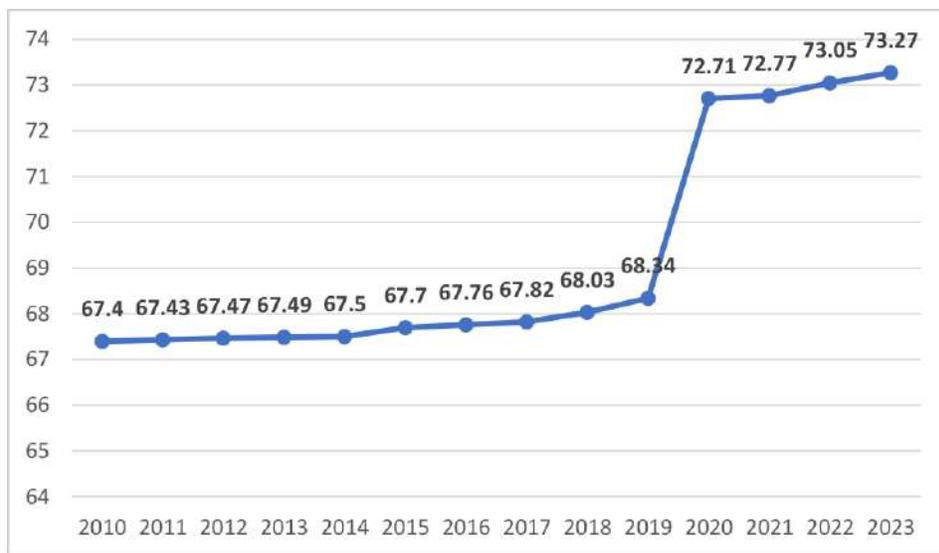
Beberapa indikator yang menjadi ukuran kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut.

##### 2.2.2.1.1. Umur Harapan Hidup (UHH)

Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat ditandai dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. UHH dapat meningkat jika meningkatnya Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat dan penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas serta mudah diakses oleh masyarakat.

Angka Harapan Hidup atau Usia Harapan Hidup merupakan perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup atau dapat juga disebut sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah lahir atau setelah mencapai usia ke-x. Usia harapan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar terus meningkat selama kurun waktu 2010 sampai tahun 2023. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan capaian UHH yang cukup signifikan karena data yang digunakan adalah UHH hasil Sensus Penduduk tahun 2020 yang metode penghitungannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya usia harapan hidup, maka indeks kesehatan juga turut mengalami peningkatan. Angka usia harapan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010-2023 dapat dilihat pada **Grafik 2.26** dan perbandingan UHH Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kabupaten setara dapat dilihat pada **Tabel 2.18**.



Grafik 2. 26 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2023

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Tabel 2. 18 Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2010-2023

WILAYAH	UMUR HARAPAN HIDUP SAAT LAHIR MENURUT WILAYAH SETARA													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BANTAENG	69,44	69,52	69,59	69,65	69,68	69,77	69,84	69,90	70,11	70,42	72,15	72,20	72,46	72,67
KEPULAUAN SELAYAR	67,40	67,43	67,47	67,49	67,50	67,70	67,76	67,82	68,03	68,34	72,71	72,77	73,05	73,27
BULUKUMBA	66,15	66,23	66,31	66,39	66,43	66,73	66,84	66,96	67,27	67,69	73,06	73,25	73,67	74,01
SINJAI	66,11	66,19	66,26	66,33	66,36	66,46	66,54	66,61	66,83	67,17	72,22	72,30	72,60	72,83
JENEPONTO	65,09	65,18	65,27	65,35	65,39	65,49	65,57	65,65	65,89	66,24	73,11	73,23	73,60	73,81
SULAWESI SELATAN	68,93	69,12	69,31	69,50	69,59	69,80	69,82	69,84	70,08	70,43	73,02	73,11	73,40	73,63

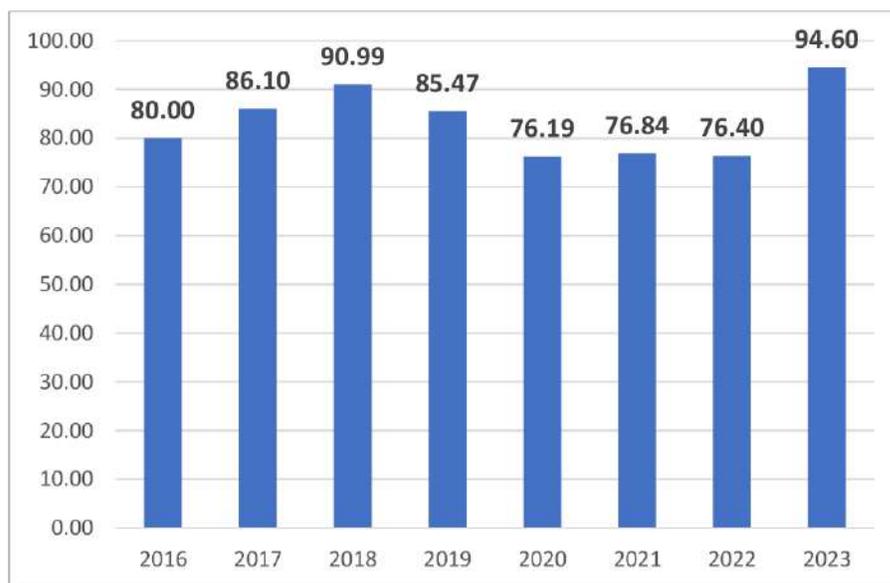
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

### 2.2.2.1.2. Kesehatan Ibu dan Anak

#### 2.2.2.1.2.1. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, serta bidan, dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ibu bersalin merupakan salah satu indikator pelayanan wajib dasar dalam Standar Pelayanan Kesehatan (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah kabupaten / kota kepada setiap warganya tanpa terkecuali.

Pada tahun 2023, jumlah ibu bersalin di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 1.868 orang. Dari jumlah dimaksud, sebanyak 1.767 orang proses persalinannya dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Gambaran cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan mulai tahun 2016 – 2023 dapat dilihat pada **Grafik 2.27**.



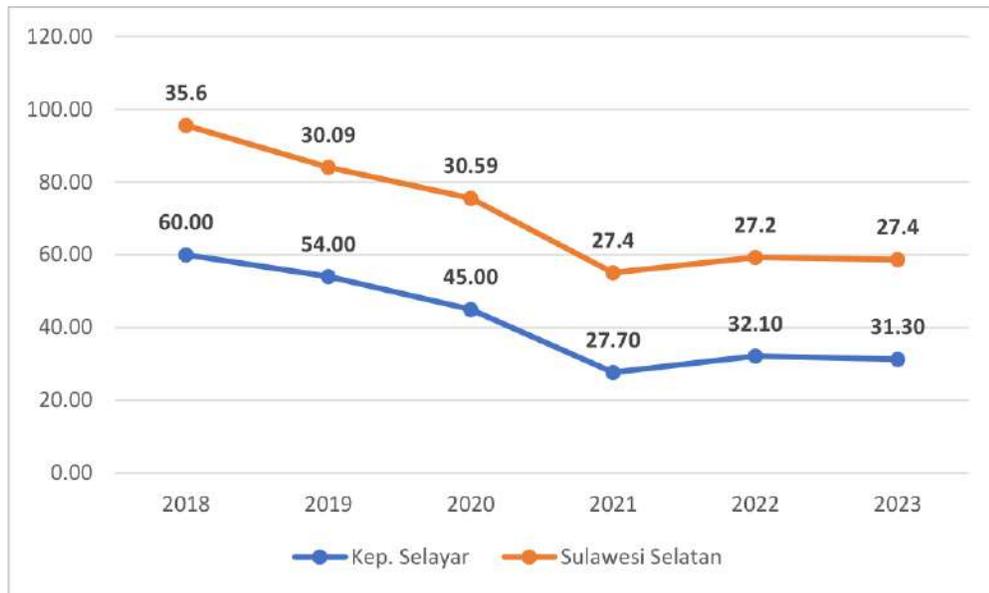
Grafik 2. 27 Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Tahun 2016-2023

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

#### 2.2.2.1.2.2. Prevalensi Stunting

Status stunting dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain asupan makan, penyakit infeksi, ketahanan pangan keluarga, kesehatan lingkungan, dan pola asuh orang tua termasuk praktik dalam pemberian makan. Prevalensi balita stunting Kabupaten Kepulauan Selayar selama empat tahun terakhir terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 sebesar 60 persen dapat ditekan dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 2021 menjadi sebesar 27,7 persen, namun berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 meningkat menjadi 32,1 persen dan kemudian menurun kembali pada tahun 2023 menjadi

sebesar 31,3 persen. Prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar masih lebih tinggi dari prevelensi stunting Provinsi Sulawesi Selatan. Data prevalensi balita stunting Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 dapat dilihat pada **Grafik 2.28**.



Grafik 2. 28 Prevalensi Stunting Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

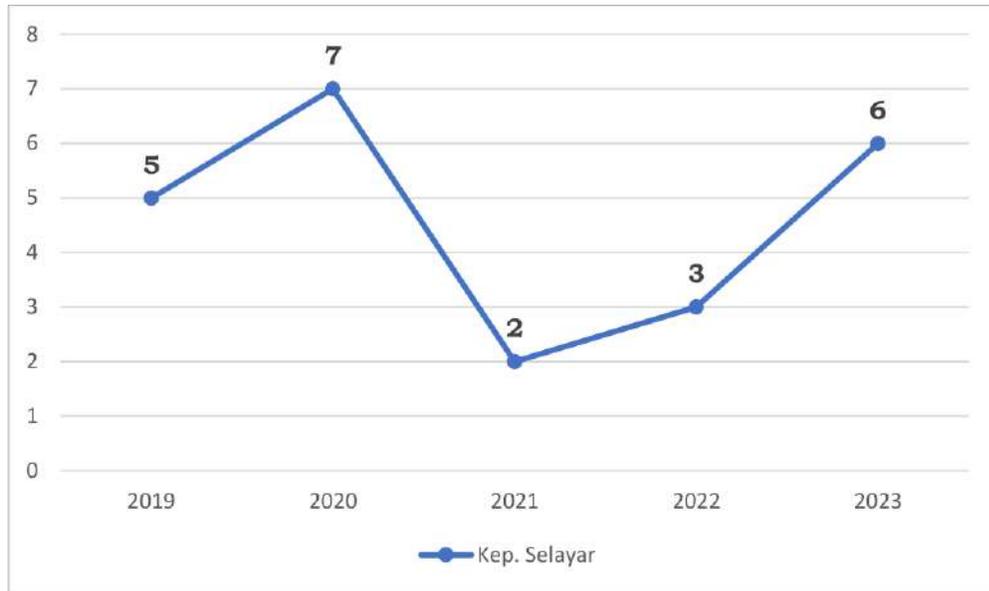
Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Beberapa faktor penyebab tingginya angka stunting adalah asupan gizi dan nutrisi yang kurang mencukupi, pola asuh yang salah, kurangnya sarana air bersih, tidak tersedianya jamban keluarga, keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan yang dibutuhkan ibu hamil, kurangnya menyusui balita, kurangnya pengetahuan ibu hamil dan ibu menyusui tentang pola asuh yang benar.

### 2.2.2.1.2.3. Jumlah Kematian Ibu

Jumlah kematian ibu adalah salah satu indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Disebut demikian karena indikator dimaksud dapat menunjukkan kemampuan dan kualitas layanan kesehatan. Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu pada masa kehamilan, bersalin atau nifas, bukan karena kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2023 sebesar 6, artinya terdapat kematian ibu sebanyak 6 ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Secara absolut jumlah kematian ibu sebanyak 6 orang ibu. Jumlah tersebut terdiri dari 4 kematian ibu hamil, 1 kematian ibu bersalin dan 1 kematian ibu nifas. Perhitungan AKI dipengaruhi jumlah kelahiran hidup. Tren jumlah kematian ibu Kabupaten Kepulauan Selayar per 100.000 kelahiran hidup dapat dilihat pada **Grafik 2.29**.



Grafik 2. 29 Jumlah Kematian Ibu per 100 Ribu Kelahiran Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

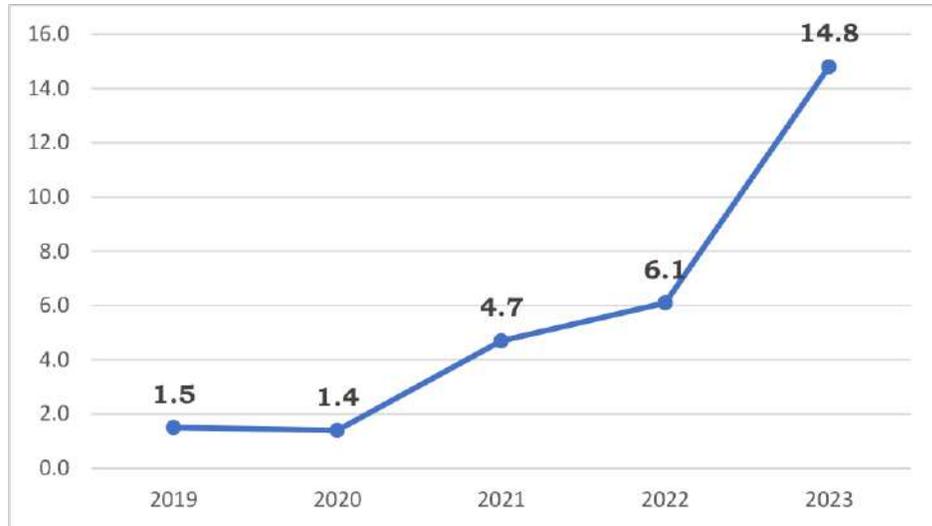
Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 3 per 100.000 kelahiran hidup, maka terdapat peningkatan angka dari tahun sebelumnya. Standar Nasional angka kematian ibu adalah 210 per 100.000 kelahiran hidup sehingga dapat dikatakan bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat baik karena berada jauh dibawah standar nasional. Ini menunjukkan upaya menjaga kesehatan ibu hamil dan bersalin sangat baik di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kematian ibu hamil dan bersalin dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan dan pengetahuan, sosial budaya, sosial ekonomi, geografi dan lingkungan, aksesabilitas ibu pada fasilitas kesehatan serta kebijakan makro dalam kualitas pelayanan kesehatan. Penyebab kematian ibu pada tahun 2023 terbesar adalah karena perdarahan sebanyak 2 kasus, disusul kematian ibu disebabkan karena gangguan *cerebrovascular* sebanyak 1 kasus dan disebabkan penyebab lain-lain sebanyak 3 kasus.

#### 2.2.2.1.2.4. Jumlah Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup dalam tahun yang sama. AKB merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat dan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian. Angka kematian bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan sosial ekonomi.

Angka kematian neonatal yang dilaporkan pada tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 12,2 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah absolut sebanyak 23 neonatal. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) yang dilaporkan adalah 14,8 per 1.000 kelahiran hidup, dengan jumlah absolut 28 dari 1.887 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) yang dilaporkan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada **Grafik 2.30**.

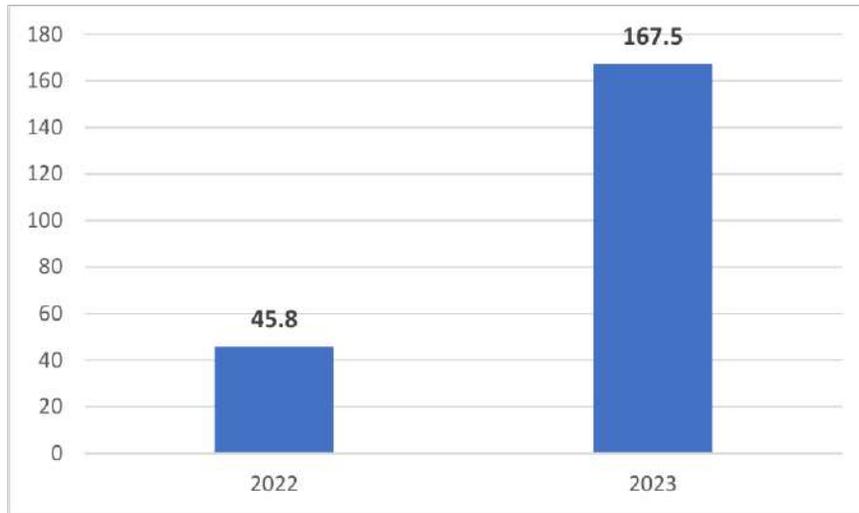


Grafik 2. 30 Jumlah Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

#### 2.2.2.1.3. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)

Jumlah penemuan kasus TBC dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat untuk meminimalisir penularan TBC (misalnya: penderita yang tidak menggunakan masker saat berinteraksi dengan masyarakat dan terlambatnya masyarakat untuk berobat secara lengkap). Pada tahun 2023, berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, jumlah perkiraan penderita Tuberculosis di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar 496 orang. Dari jumlah tersebut, pada kenyataannya, jumlah penderita Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 831 orang, sehingga capaian *treatment coverage* kasus Tuberculosis pada tahun 2023 sebesar 167,5 persen. Hal ini dapat dilihat pada **Grafik 2.31**.



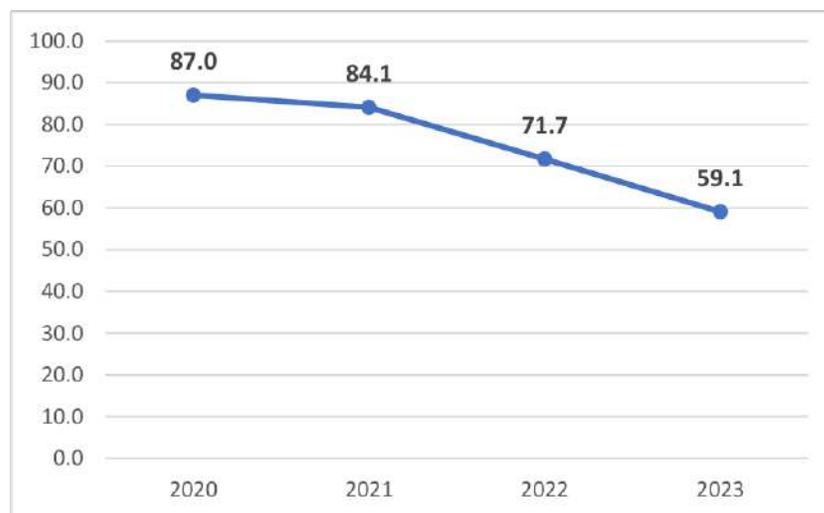
Grafik 2. 31 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2023

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

#### 2.2.2.1.4. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)

Angka keberhasilan pengobatan TBC (*Success Rate*) adalah jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan. Penderita TBC yang ditemukan dan diobati pada kurun waktu 10 – 15 bulan yang lalu (menurut Buku Pedoman Nasional Penanggulangan TBC). Sehingga data yang dievaluasi pada tahun berjalan adalah penderita TBC yang ditemukan dan diobati pada tahun sebelumnya.

Angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis di Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami penurunan dari tahun 2020-2023, meskipun secara jumlah orang yang berhasil untuk disembuhkan semakin meningkat. Terkhusus pada tahun 2023, jumlah pasien TBC yang berhasil diobati sebanyak 240 orang dari 406 kasus yang ditemukan pada tahun sebelumnya sehingga angka keberhasilan pengobatan TBC pada tahun 2023 sebesar 59,1 persen, hal ini dapat dilihat pada **Grafik 2.32**.



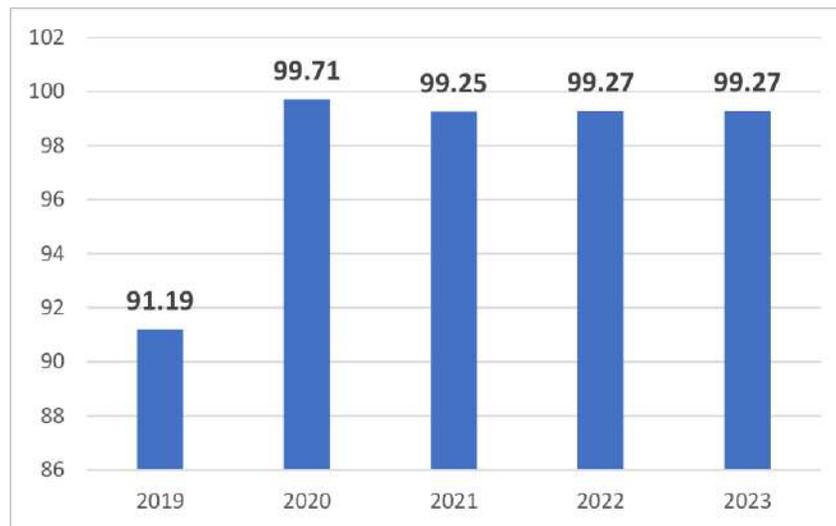
Grafik 2. 32 Angka Keberhasilan Pengobatan TB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2023

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

### 2.2.2.1.5. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan kesehatan nasional atau BPJS bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Untuk menjamin seluruh lapisan masyarakat mendapatkan layanan jaminan kesehatan nasional, maka pemerintah wajib mendaftarkan dan membayarkan warga miskin dan kurang mampu sebagai peserta jaminan kesehatan nasional.

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Kepulauan Selayar telah melampaui target nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah beberapa kali menerima penghargaan *Universal Health College* atas capaian dimaksud. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.33**.



Grafik 2. 33 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

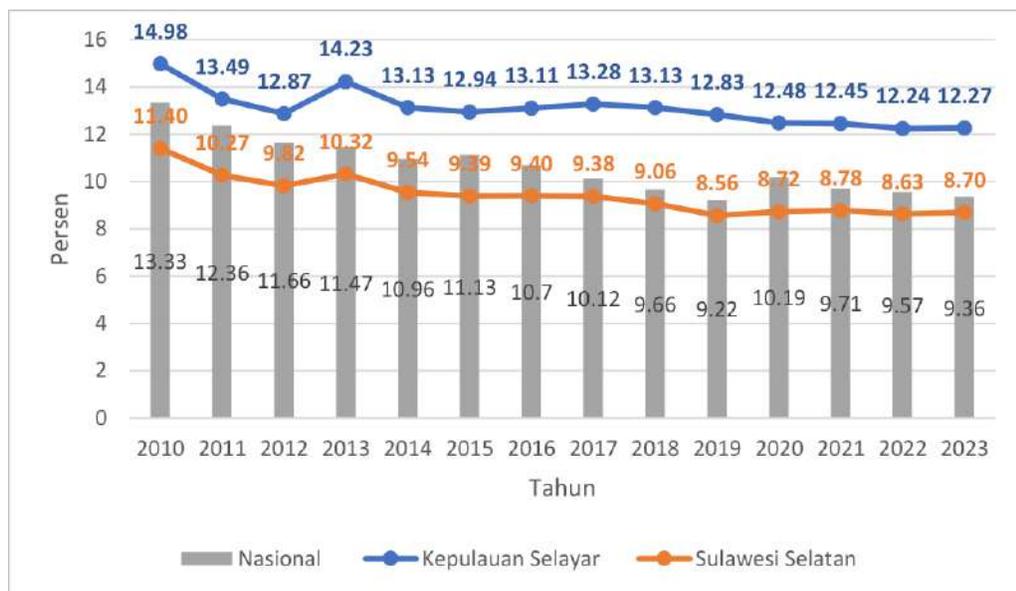
### 2.2.2.2. Perlindungan Sosial

Gambaran perlindungan sosial digambarkan dari kondisi tingkat kemiskinan, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

#### 2.2.2.2.1. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022. Kondisi ini dapat dilihat pada tahun 2010 persentase penduduk miskin sebesar 18,29 persen, tahun 2015 sebesar 12,94 persen, tahun 2018 sebesar 13,13 persen dan tahun 2022 persentase penduduk miskin sebesar 12,24. Rata-rata penurunan angka kemiskinan sebesar 0,22 persen. Namun tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen dari 12,24 persen menjadi 12,27 persen. Penurunan angka kemiskinan tersebut

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: meningkatnya produksi sektor-sektor unggulan, optimalisasi penyaluran bantuan sosial dan program hibah dari Pemerintah Daerah untuk masyarakat miskin. Sementara peningkatan yang terjadi pada tahun 2023 disebabkan oleh struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan) yang cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap faktor alam dan permintaan pasar, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga dan musim. Sementara sektor sekunder, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi ekonomi, masih memiliki kontribusi yang rendah terhadap perekonomian. Tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar masih di atas tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Secara detail dapat dilihat pada **Grafik 2.34**.



Grafik 2. 34 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2010-2023

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan yang terendah keempat jika dibandingkan dengan kabupaten lain dalam wilayah setara, dimana yang terendah adalah Kabupaten Bulukumba sebesar 7,22 persen dan yang tertinggi adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 13,06 persen (**Tabel 2.19**).

Tabel 2. 19 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Kawasan Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2010-2023

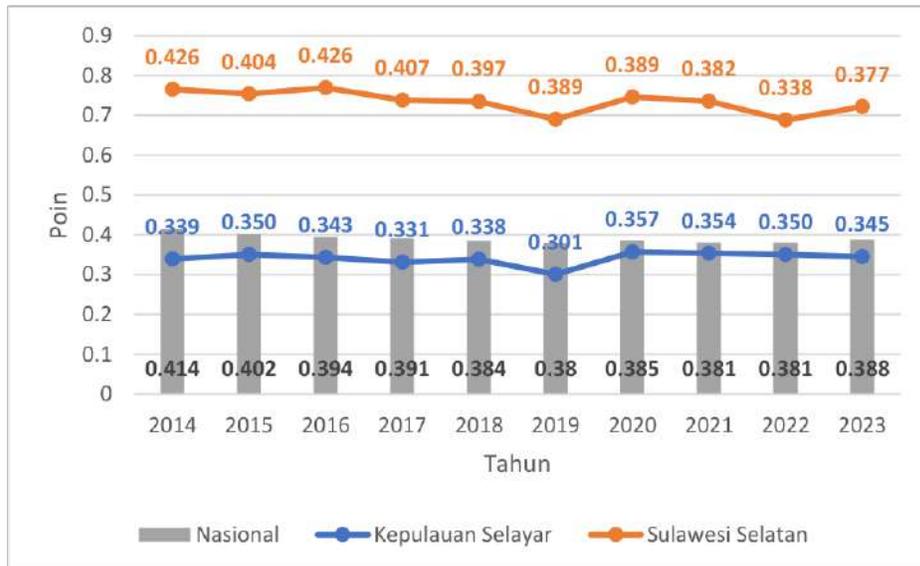
KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT WILAYAH SETARA (PERSEN)													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Bulukumba</b>	9,02	8,12	7,83	9,04	8,37	8,15	8,06	7,97	7,48	7,26	7,10	7,43	7,39	7,22
<b>Sinjai</b>	10,68	9,63	9,29	10,32	9,56	9,26	9,41	9,24	9,28	9,14	9,00	8,84	8,80	8,55
<b>Bantaeng</b>	10,24	9,21	8,90	10,45	9,68	9,53	9,51	9,66	9,23	9,03	8,95	9,41	9,07	9,18
<b>Kepulauan Selayar</b>	14,98	13,49	12,87	14,23	13,13	12,94	13,11	13,28	13,13	12,83	12,48	12,45	12,24	12,27
<b>Jeneponto</b>	19,09	17,16	16,59	16,52	15,31	15,18	15,49	15,40	15,48	14,88	14,58	14,28	13,73	13,06

Sulawesi Selatan	11,40	10,27	9,82	10,32	9,54	9,39	9,40	9,38	9,06	8,69	8,72	8,78	8,63	8,70
------------------	-------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan 2024

#### 2.2.2.2.2. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai indeks gini berkisar antara 0 hingga 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar berfluktuasi selama lima tahun terakhir, pada tahun 2018 sebesar 0,338 kemudian menurun positif menjadi 0,301 pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,357, capaian tersebut meningkat negatif jika dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2019). Pada tahun 2023 Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar kembali mengalami penurunan positif menjadi sebesar 0,345. Selengkapnya dapat dilihat pada **Grafik 2.35**.



Grafik 2. 35 Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2023

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Penurunan angka Indeks Gini pada **Grafik 2.35** dipengaruhi oleh menurunnya persentase pengeluaran perkapita penduduk pada golongan pengeluaran <300 Ribu Rupiah dari 3,93 persen pada tahun 2020 menjadi 0,80 persen pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 menurun lagi menjadi 0,70 persen sementara golongan pengeluaran  $\geq$  300 Ribu Rupiah mengalami peningkatan. **Grafik 2.35** juga menunjukkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung menurun dan lebih rendah dibandingkan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional.

Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada urutan ketiga jika dibandingkan dengan kabupaten lain dalam wilayah setara, kabupaten dengan Indeks Gini terendah adalah Kabupaten Bantaeng

yakni sebesar 0,336. Sedangkan kabupaten dengan Indeks Gini tertinggi adalah Kabupaten Bulukumba dengan nilai sebesar 0,379. Jika dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,377, Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah, jika dibandingkan dengan nasional, capaian Kabupaten Kepulauan Selayar juga masih lebih baik, dimana pada tahun 2023 Indeks Gini nasional sebesar 0,388. Data perbandingan Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kabupaten/kota setara dapat dilihat pada **Tabel 2.20**.

Tabel 2. 20 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2023

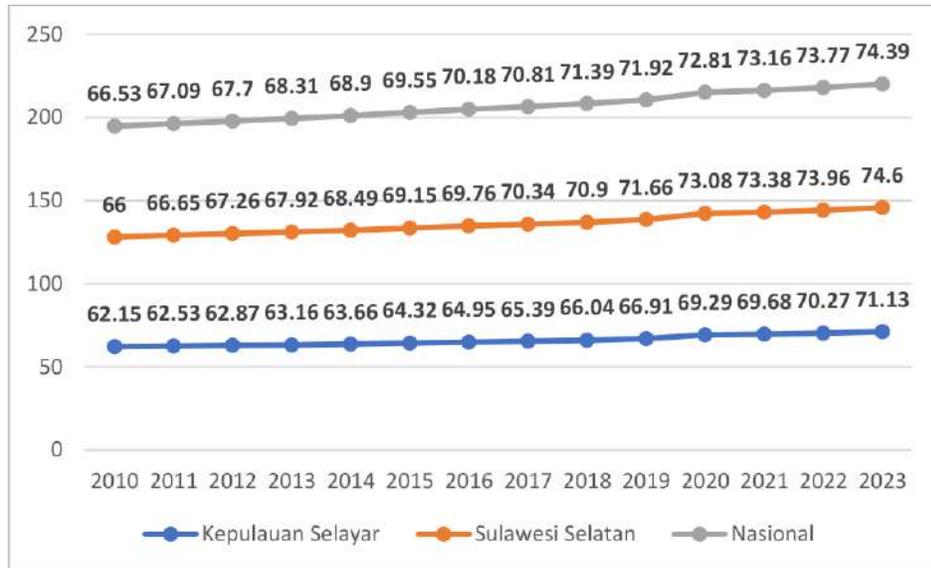
Kabupaten / Kota	Indeks Gini Menurut Wilayah Setara									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bantaeng	0,455	0,435	0,382	0,422	0,342	0,338	0,344	0,332	0,320	0,336
Jeneponto	0,360	0,355	0,364	0,331	0,309	0,331	0,349	0,353	0,338	0,340
Kep.Selayar	0,339	0,350	0,343	0,331	0,338	0,301	0,357	0,354	0,350	0,345
Sinjai	0,382	0,396	0,429	0,376	0,369	0,354	0,372	0,384	0,357	0,345
Bulukumba	0,415	0,391	0,378	0,324	0,354	0,377	0,371	0,362	0,361	0,379
Sulawesi Selatan	0,426	0,424	0,426	0,407	0,397	0,389	0,389	0,382	0,377	0,377

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

#### 2.2.2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM terbentuk dari empat dimensi dasar yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, harapan hidup, dan pengeluaran perkapita.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015: 64,32 dan dalam lima tahun terakhir terus meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 66,91, pada tahun 2020 menjadi 67,38 pada tahun 2021 menjadi 67,76 dan meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 68,35 dan tahun 2023 menjadi 69,20. Capaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010-2023 dapat dilihat pada **Grafik 2.36**.



Grafik 2. 36 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2010 -2023

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Salah satu penyebab capaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar masih termasuk dalam kategori sedang adalah karena pertumbuhan angka harapan lama sekolah yang bergerak melambat dibandingkan dengan komponen pembentuk lainnya. Nilai IPM Kabupaten Kepulauan Selayar masih dibawah jika dibandingkan IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional dalam kurun waktu 13 tahun terakhir.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar jika dibandingkan dengan capaian kabupaten lain dalam kawasan setara, berada pada urutan kedua. Kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Jeneponto dengan nilai sebesar 65,90 dan yang tertinggi adalah Kabupaten Bulukumba dengan nilai sebesar 71,21. Jika dilihat dari laju pertumbuhan, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan laju pertumbuhan IPM sebesar 1,24 poin hanya berada dibawah Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng dengan laju pertumbuhan IPM yang sama yaitu 1,26 poin. Perbandingan IPM Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kabupaten/kota dalam wilayah setara dapat dilihat pada **Tabel 2.21**.

Tabel 2. 21 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Selatan Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2010-2023

WILAYAH	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT WILAYAH SETARA													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bulukumba	62,73	63,36	63,82	64,27	65,24	65,58	66,46	67,08	67,70	68,28	68,99	69,62	70,34	71,21
Bantaeng	62,46	63,07	63,99	64,88	65,77	66,20	66,59	67,27	67,76	68,30	68,73	68,99	69,69	70,57
Kepulauan Selayar	62,15	62,53	62,87	63,16	63,66	64,32	64,95	65,39	66,04	66,91	67,38	67,76	68,35	69,20
Sinjai	61,31	62,13	62,74	63,47	63,83	64,48	65,36	65,80	66,24	67,05	67,60	67,75	68,33	68,92
Jeneponto	58,31	58,95	59,62	60,55	61,45	61,61	61,81	62,67	63,33	64,00	64,26	64,56	65,13	65,90
Sulawesi Selatan	66,00	66,65	67,26	67,92	68,49	69,15	69,76	70,34	70,90	71,66	71,93	72,24	72,82	73,46

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

#### 2.2.2.2.4. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas memiliki hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, yang meliputi : (1) Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi, (2) Memperoleh upah yang sama dengan pekerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, (3) Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan, (4) Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, (5) Mendapatkan program kembali bekerja, (6) Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat, (7) Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya, (8) Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

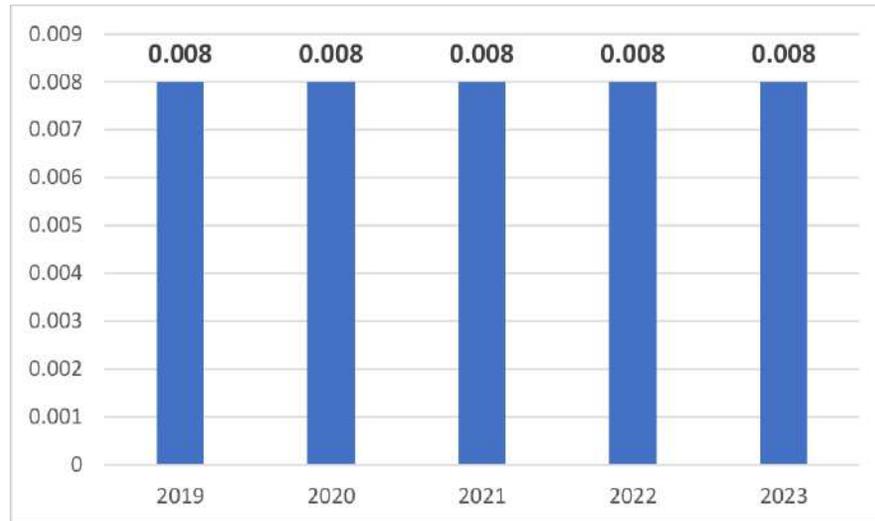
Melihat hal tersebut, seluruh pemerintah di berbagai tingkatan baik dari pusat maupun daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar wajib mengakomodir masyarakat disabilitas untuk bekerja di berbagai sektor terkhusus pada sektor formal. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, Jumlah masyarakat disabilitas pada tahun 2023 sebanyak 607 orang. Dari 607 orang, 380 orang atau sekitar 62,6 persen tidak bekerja, 34 orang atau sekitar 5,6 persen berprofesi sebagai pelajar, 10 orang sebagai buruh, 31 orang sebagai petani, serta 152 orang atau 25,04 persen yang bekerja di sektor lainnya. Jumlah penyandang disabilitas menurut tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan jenis penghasilan dapat dilihat pada **Tabel 2.22**.

Tabel 2. 22 Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan dan Jenis Penghasilan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

Pendidikan (Orang)				
Tidak sekolah	SD	SMP	SMA	Diploma
301	204	47	54	1
Penghasilan per bulan (Orang)				
0	1 - 500 ribu	500.001 - 1 juta	lebih 1,5 juta	
546	55	4	2	
Pekerjaan (Orang)				
tidak bekerja	pelajar/ mahasiswa	buruh	petani	lainnya
380	34	10	31	152

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Tahun 2019 sampai 2023, dari 607 disabilitas di Kabupaten Kepulauan Selayar, terdapat 5 orang disabilitas yang bekerja di sektor formal atau sektor pemerintahan sehingga persentase disabilitas yang bekerja di sektor formal pada Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.37**.

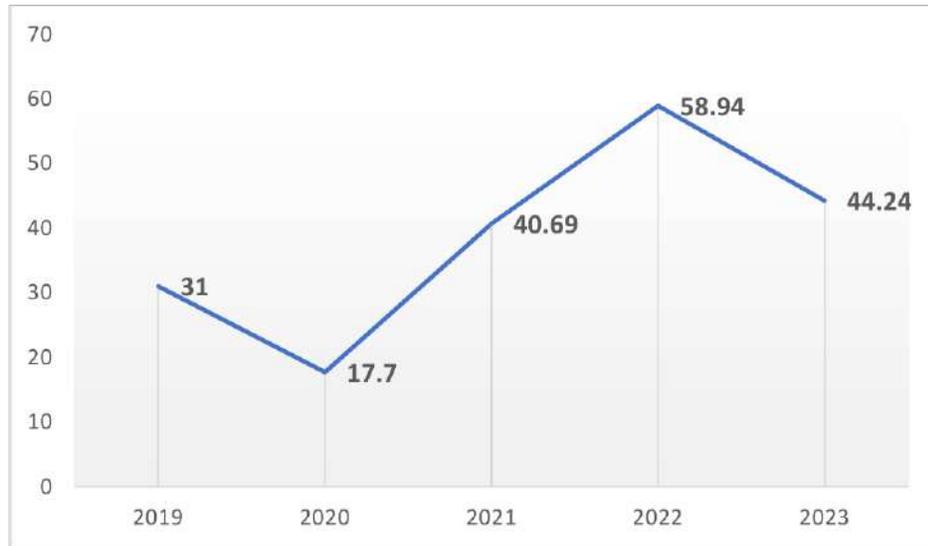


Grafik 2. 37 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

#### 2.2.2.2.5. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Data menunjukkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kerja informal meningkat dari tahun 2021 sampai 2022 dengan penambahan kepesertaan sebanyak 666 orang, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya peran pemerintah memberikan rasa aman kepada masyarakat khususnya tenaga kerja informal di Kabupaten Kepulauan Selayar. Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.38**



Grafik 2. 38 Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Informal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

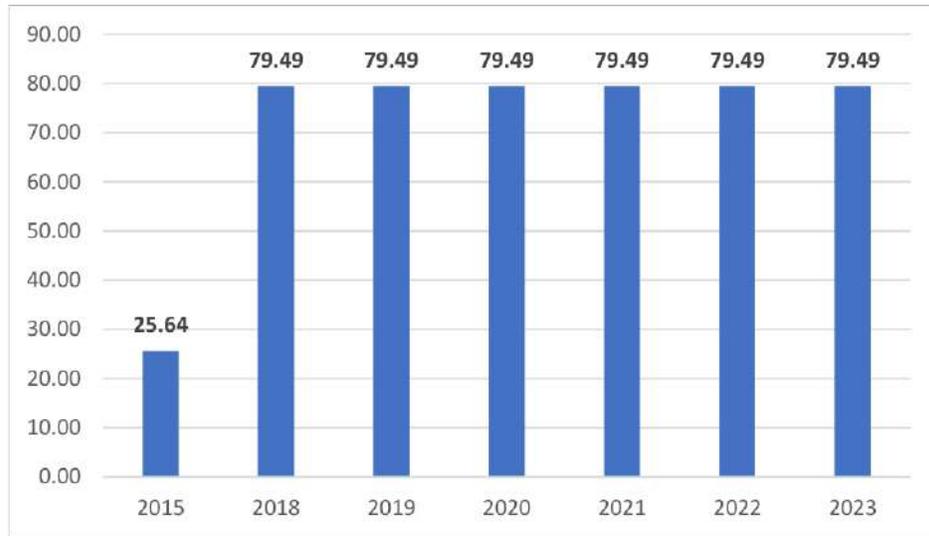
### 2.2.2.3. Beragama dan Berkebudayaan

Gambaran beragama dan berkebudayaan digambarkan dengan persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi dan persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi.

#### 2.2.2.3.1. Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi

Cagar budaya didefinisikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya. Sejatinya, cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Oleh karena itu, suatu tempat harus punya ciri khas dan daya tarik wisata maupun atraksi di dalamnya untuk menarik kunjungan wisatawan.

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 39 cagar budaya yang dilestarikan dan diregistrasi. Pada tahun 2015, 10 dari 39 cagar budaya telah ditetapkan dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 31 cagar budaya yang telah ditetapkan. Namun capaian indikator ini tidak berubah sampai tahun 2023 disebabkan oleh belum ada lagi benda, bangunan ataupun situs yang didaftarkan atau diregistrasi menjadi cagar budaya sejak tahun 2018. Capaian ini selengkapnya dapat dilihat pada **Grafik 2.39**.

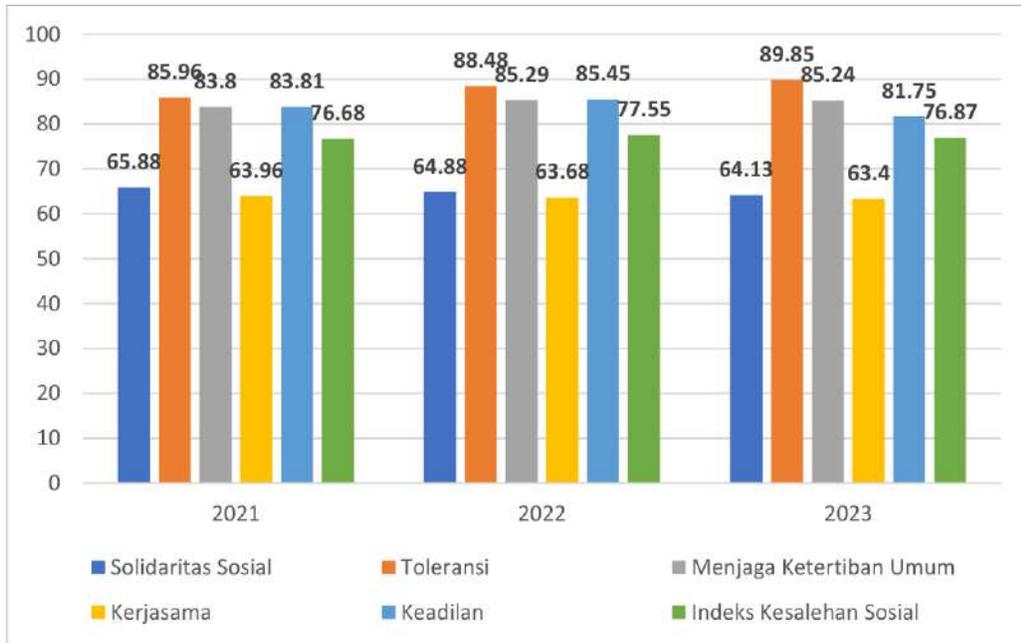


Grafik 2. 39 Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 dan 2018-2023

Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2024

#### 2.2.2.3.2. Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/Fasilitas

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan pemerintah daerah dan lembaga keagamaan. Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti hari besar keagamaan, kegiatan peningkatan nilai keimanan dan ketaqwaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kerukunan umat beragama mendapat dukungan dan fasilitasi dari pemerintah. Dukungan fasilitasi pemerintah dalam kegiatan keagamaan dapat juga dilihat dari Indeks Kesalehan Sosial masyarakat yang meningkat pada angka 76,87 pada tahun 2023. Dalam kurun waktu sampai tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Selayar berhasil mempertahankan Indeks Kesalehan Sosial yang relatif stabil. Meskipun terdapat fluktuasi dalam dimensi-dimensi pembentuknya, tetapi masyarakat di kabupaten ini terus berupaya menjaga nilai-nilai sosial dan budaya yang merupakan bagian integral dari identitas mereka. Peningkatan toleransi menjadi salah satu sorotan positif, menunjukkan bahwa masyarakat Kepulauan Selayar semakin terbuka dan inklusif dalam menghadapi perbedaan. Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.40.**



Grafik 2. 40 Indeks Kesalahan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023

Sumber Data: Bappelitbangda, 2024

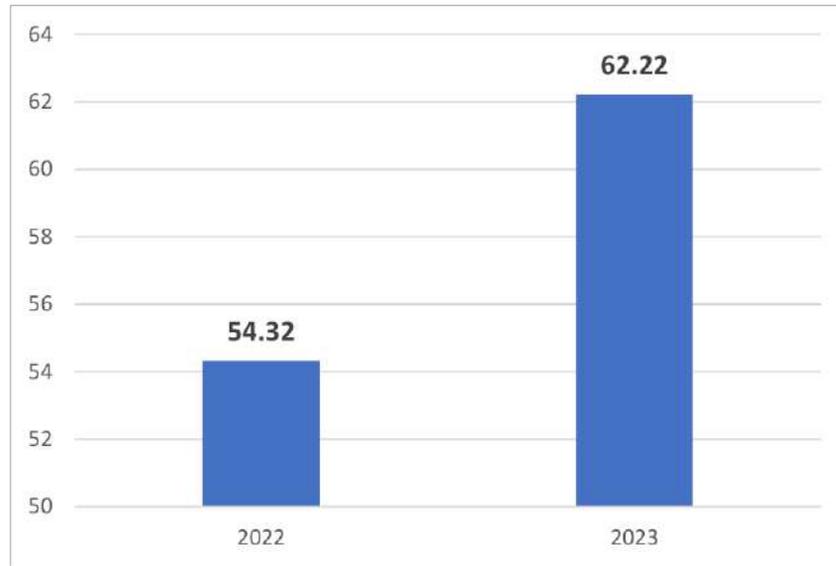
#### 2.2.2.4. Pembangunan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender

Gambaran pembangunan kualitas keluarga dan kesetaraan gender digambarkan dari kondisi Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Perlindungan Anak dan Indeks Ketimpangan Gender.

##### 2.2.2.4.1. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga terdiri atas 3 dimensi yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga.

Sebagai indikator pembangunan yang baru dirumuskan, Kabupaten Kepulauan Selayar baru melakukan pengukuran terhadap capaian indeks dimaksud pada tahun 2022. Dari hasil pengukuran dimaksud, capaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 sebesar 62,22, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 54,32. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan kualitas keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada kategori cukup responsif gender dan anak. Kondisi ini menunjukkan kualitas pengasuhan anak dan nilai serta pemenuhan kewajiban orang tua / keluarga terhadap anak masih menjadi prioritas kedepan. Capaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.41**.



Grafik 2. 41 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2023

Sumber Data: DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

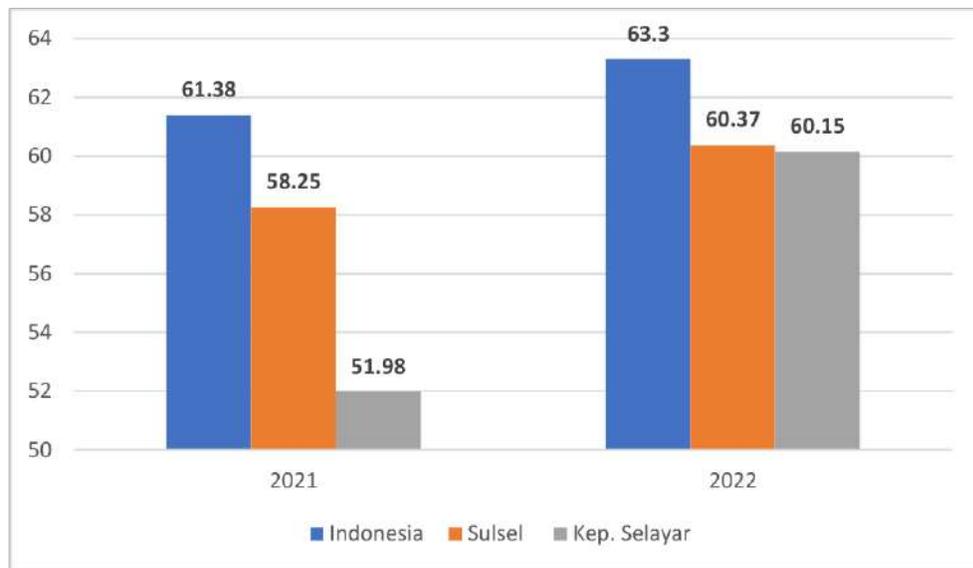
#### 2.2.2.4.2. Indeks Perlindungan Anak

Salah satu visi utama pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Indonesia Emas pada tahun 2045 adalah menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas emas. Perwujudan SDM yang berkualitas emas di Indonesia tentunya tidak terlepas dari berbagai program dan kebijakan yang berfokus pada anak. Hal ini penting karena anak-anak Indonesia memegang peranan penting dalam upaya perwujudan Indonesia menjadi Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memiliki mandat bagi penciptaan generasi Indonesia Emas 2045. Melalui berbagai program dan kebijakan, Kemen PPPA berfokus pada upaya perlindungan dan penjaminan hak-hak perempuan dan anak. Dengan adanya upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, diharapkan sebanyak 79,5 juta anak (0-17 tahun) di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang sehat, cerdas, unggul, dan berkarakter.

Tingginya kasus-kasus yang terkait dengan isu pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Indonesia merupakan indikasi perlunya upaya pemerintah yang terstruktur, berkesinambungan, serta melibatkan banyak pihak. Salah satu upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Indonesia adalah melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang digagas oleh Kemen PPPA bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Penyusunan IPA yang terdiri atas lima (5) klaster. Secara rinci klaster pada indeks dijabarkan sebagai berikut : Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus

Capaian IPA untuk tingkat kabupaten/kota baru diukur sejak tahun 2021 oleh Kemen PPA, Dimana capaian IPA Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021 dan 2022 lebih rendah dibandingkan capaian IPA Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Namun pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan pada capaian IPA Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menunjukkan masih perlunya dukungan perlindungan dan membangun resiliensi bagi anak-anak khususnya usia dini hingga usia 18 tahun. Capaian IPA Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional dapat dilihat pada **Grafik 2.42**.



Grafik 2. 42 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2022

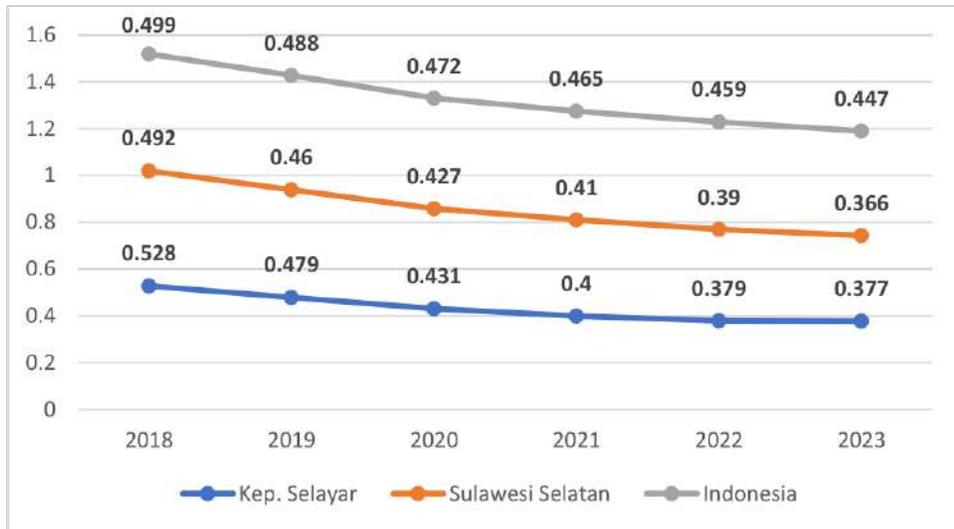
Sumber Data: Kemen PPA, 2024

#### 2.2.2.4.3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender menggambarkan dampak negatif atau kerugian yang timbul dari kurangnya kesetaraan gender terhadap pencapaian pembangunan. Indeks ini terdiri dari tiga aspek utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pasar kerja. Indikator yang digunakan dalam menghitung Indeks Ketimpangan Gender meliputi andil persalinan di luar fasilitas kesehatan, persentase wanita berusia 15-49 tahun yang menikah dan melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun, persentase populasi dengan pendidikan setidaknya SMA, persentase laki-laki dan perempuan di lembaga parlemen, serta proporsi angkatan kerja dalam populasi usia kerja.

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami penurunan mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Hal ini menunjukkan kesempatan berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki dari tahun ke tahun lebih setara. Hal ini juga ditandai dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

yang semakin meningkat selama kurun waktu dimaksud. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada **Grafik 2.43**.



Grafik 2. 43 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2023

Sumber Data: BPS, 2024

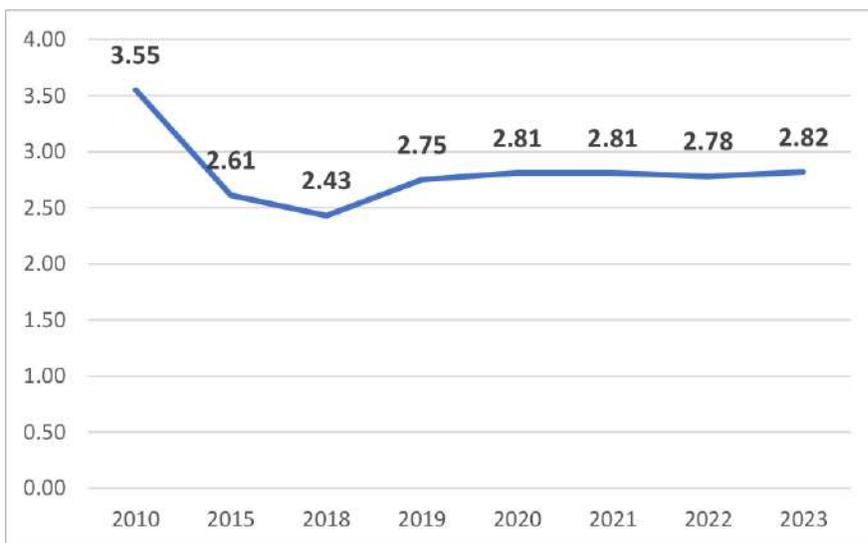
### 2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Gambaran aspek daya saing daerah dapat dilihat dari kondisi daya saing ekonomi daerah, daya saing sumber daya manusia, daya saing fasilitas/ infrastruktur wilayah dan daya saing iklim investasi.

#### 2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

##### 2.3.1.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan menggambarkan kontribusi pendapatan dari sektor industri pengolahan terhadap seluruh pendapatan masyarakat pada tahun berlaku. Melihat capaian Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kepulauan Selayar, capaian dimaksud mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Namun capaiannya belum diatas 3 persen selama kurun waktu tersebut. Capaian Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.44**.



Grafik 2. 44 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015 dan 2018-2023

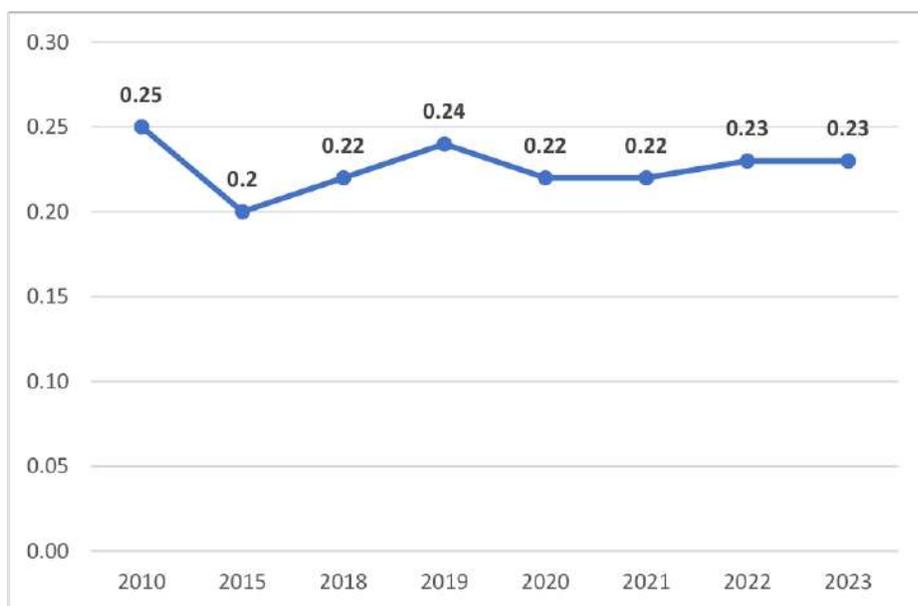
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Rendahnya PDRB sektor industri pengolahan disebabkan oleh belum adanya industri besar di Kepulauan Selayar dan masih didominasi oleh industri mikro, kecil dan menengah. Selain itu, produk-produk yang dihasilkan oleh sebagian besar Industri Kecil Menengah (IKM) dimaksud belum memiliki pasar yang luas baik itu di kalangan masyarakat Selayar itu sendiri maupun pasar ekspor ke luar wilayah Kepulauan Selayar. Lebih lanjut bahwa hilirisasi produk-produk unggulan belum terlaksana secara optimal serta industrialisasi sektor pariwisata dan perikanan yang menjadi andalan dari Kabupaten Kepulauan Selayar belum terlaksana secara optimal dikarenakan keterbatasan APBD yang diikuti oleh tidak optimalnya investasi untuk mengembangkan dua sektor ini.

### 2.3.1.2 Pengembangan Pariwisata

#### 2.3.1.2.1 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

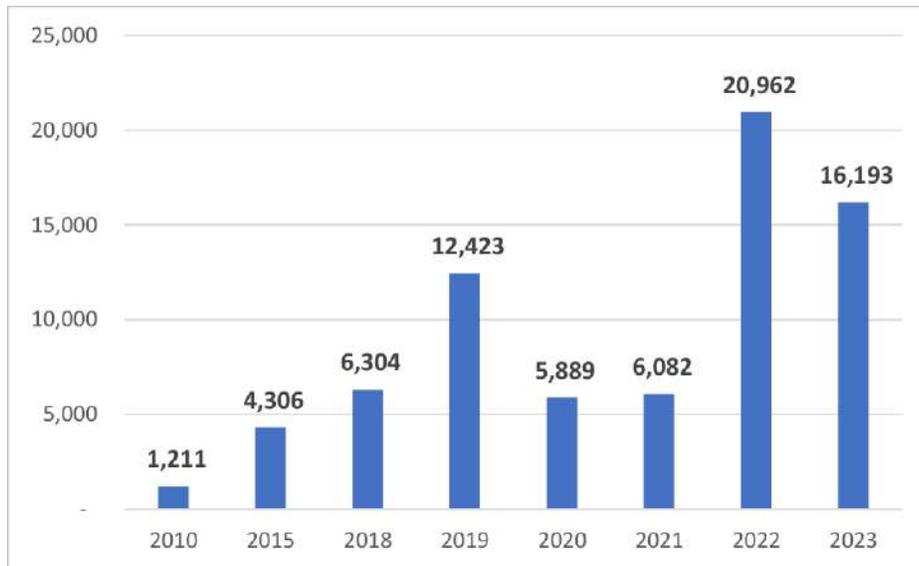
Rasio penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB menggambarkan kontribusi pendapatan dari sektor akomodasi dan makan minum terhadap seluruh pendapatan masyarakat pada tahun berlaku. Indikator dimaksud dapat menggambarkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PDRB sektor harga berlaku. Capaian indikator rasio penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari kontribusi dari sektor akomodasi, makan dan minum yang berkisar 0,2 persen selama kurun waktu 2015 sampai 2023. Kedepan ketersediaan objek wisata andalan terus dipercepat pembangunannya sebagai komponen terpenting untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan yang secara langsung dapat meningkatkan kontribusi jasa akomodasi dan makan minum pada PDRB. Capaian rasio penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.45**.



Grafik 2. 45 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015 dan 2018-2023  
 Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

### 2.3.1.2.2 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Domestik

Rendahnya pendapatan sektor pariwisata dipengaruhi oleh masih rendahnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Terkhusus pada saat dunia dilanda pandemi Covid- 19, kunjungan wisatawan semakin menurun, namun pada tahun 2022 kembali pulih yang dipengaruhi oleh beberapa pelaksanaan *event-event* tingkat provinsi dan nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.46**.



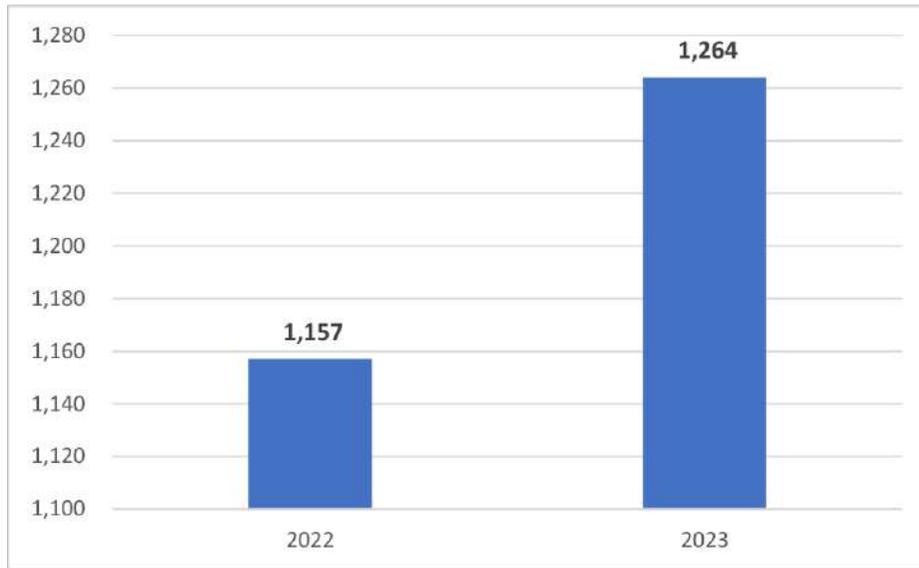
Grafik 2. 46 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Domestik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015 dan 2018-2023  
 Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

### 2.3.1.3 Jumlah Industri Ekonomi Kreatif

Industri ekonomi kreatif adalah industri yang berkontribusi oleh aktivitas ekonomi yang bersumber dari ekonomi kreatif, aktivitas dimaksud terdiri dari 17 subsektor yaitu fesyen, kuliner, kriya, film, animasi dan video, pengembang permainan, aplikasi, musik, seni pertunjukan, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, seni rupa, desain produk, periklanan, penerbitan, arsitektur, desain interior.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah industri ekonomi kreatif pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 juga dapat diketahui bahwa 92 persen lebih dari seluruh industri kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah industri yang bergerak di sektor ekonomi kreatif berupa industri kuliner, kerajinan, sandang atau pakaian dan industri lainnya. Beberapa hal yang menyebabkan meningkatnya industri ekonomi kreatif ini adalah peran pemerintah dalam mengembangkan industri-industri ekonomi kreatif melalui beberapa pelatihan serta pemberian bantuan peralatan dalam menunjang berkembangnya industri di sektor ekonomi kreatif

dimaksud. Jumlah industri ekonomi kreatif di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.47**.



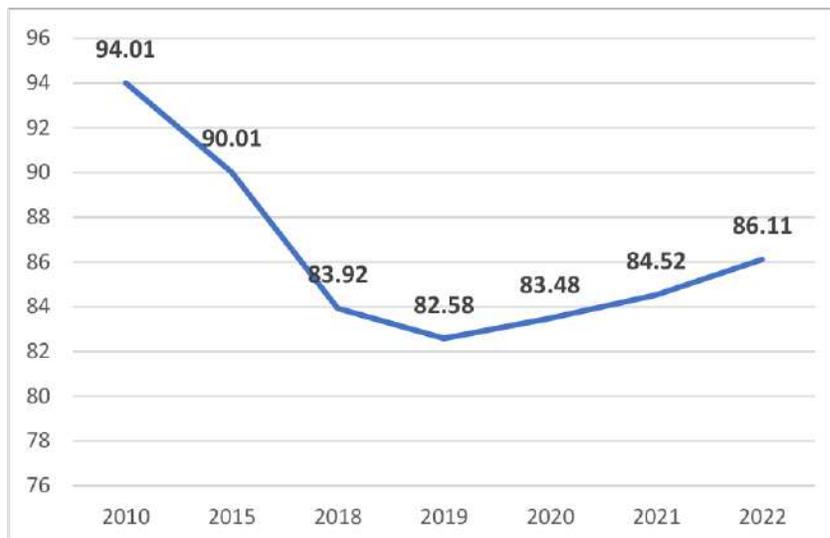
Grafik 2. 47 Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2023

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

### 2.3.1.4 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD

#### 2.3.1.4.1 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Capaian indikator ini terus meningkat dari tahun 2019 sampai dengan 2022 walaupun cenderung menurun dalam kurun waktu 2010 sampai 2018. Capaian proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.48**.

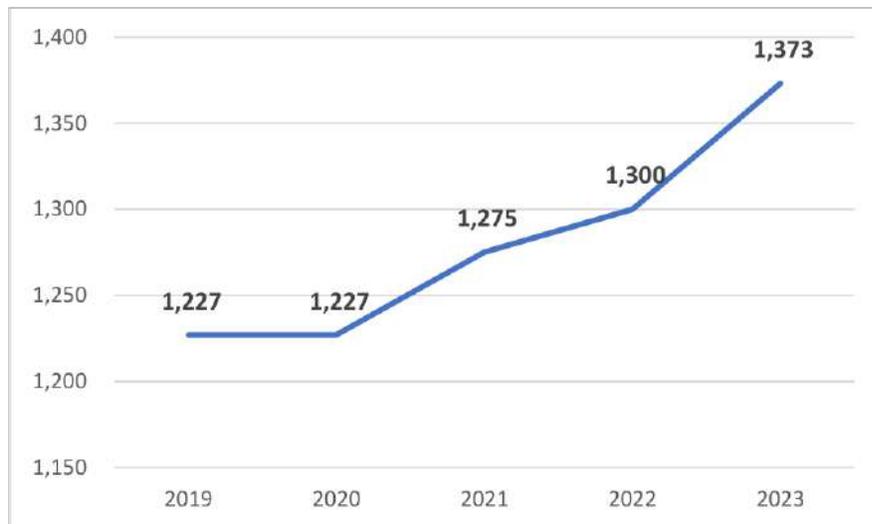


Grafik 2. 48 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015 dan 2018-2022

Sumber Data: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

#### 2.3.1.4.2 Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Sesuai data dari Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar sudah tidak memiliki industri dengan kategori mikro dan belum memiliki industri besar, hanya memiliki industri kategori kecil dan menengah. Oleh karena itu, proporsi jumlah industri kecil dan menengah tidak dapat dihitung. Terkait dengan industri kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah IKM terus meningkat dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023. Jumlah IKM dimaksud dapat dilihat pada **Grafik 2.49**.



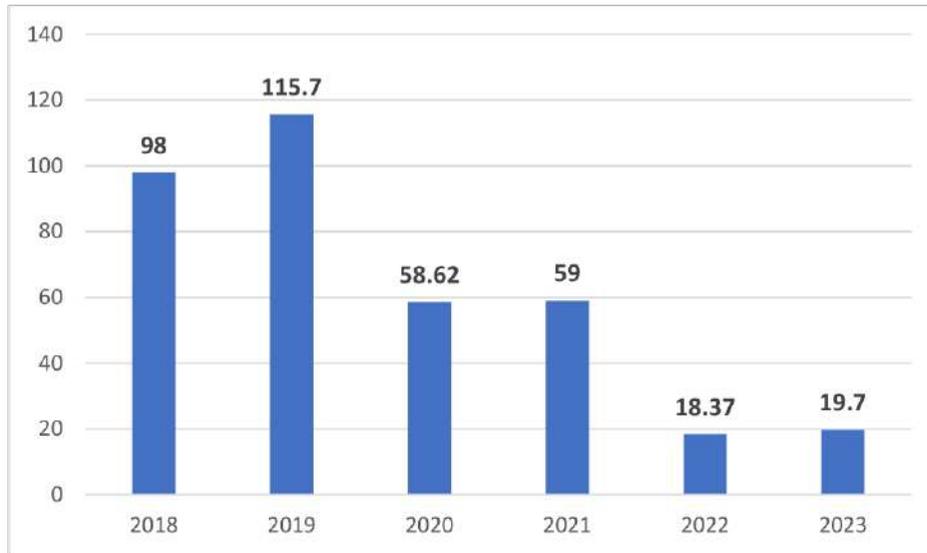
Grafik 2. 49 Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, 2024

#### 2.3.1.4.3 Persentase Koperasi Sehat

Koperasi sehat adalah koperasi yang memiliki nilai 81 - 100 dalam penilaian kesehatan meliputi 4 aspek pemeriksaan kesehatan koperasi yaitu: Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan. Pemeriksaan kesehatan koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan koperasi dan penerapan sanksi. (Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021).

Persentase koperasi sehat di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 sebesar 19,70 persen mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga persentase koperasi sehat pada tahun 2020-2022 mengalami tren penurunan. Persentase koperasi sehat dapat dilihat pada **Grafik 2.50**.



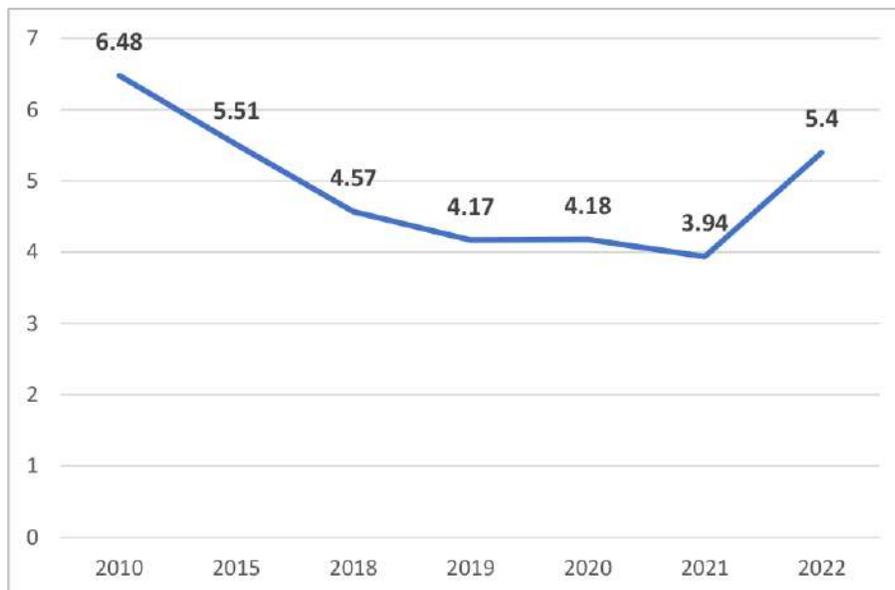
Grafik 2. 50 Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023

Sumber Data: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Badan Pusat Statistik, 2024

#### 2.3.1.4.4 Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Koperasi memegang peranan penting bagi perekonomian masyarakat serta menggerakkan perekonomian daerah. Volume usaha koperasi turut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut

Melihat capaian indikator ini cenderung fluktuatif dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022. Namun pada tahun 2022, capaian indikator ini adalah yang tertinggi dalam kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022. Capaian rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.51**.



Grafik 2. 51 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010,

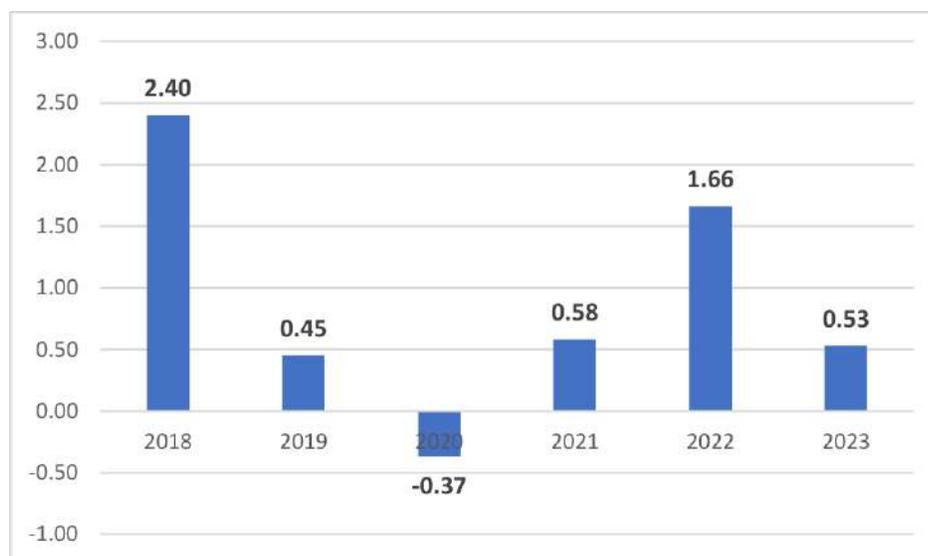
2015 dan 2018-2022

Sumber Data: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, 2024

### 2.3.1.4.5 Return on Aset (ROA) BUMD

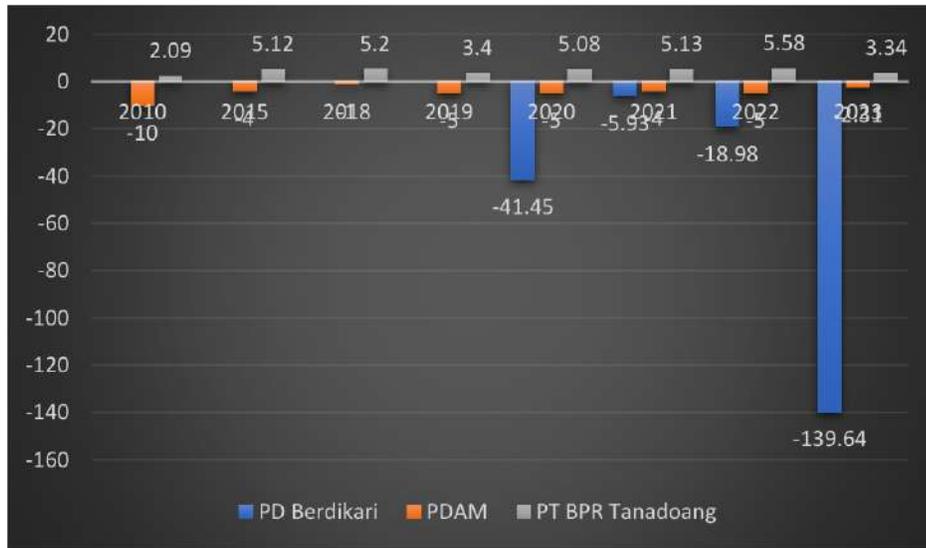
*Return On Asset (ROA)* merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama.

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 3 (tiga) BUMD yaitu Perusahaan Daerah Berdikari, PDAM, serta PT. Bank Pesisir Tanadoang. Dari tiga BUMD dimaksud, dua BUMD yaitu PD Berdikari serta PDAM belum menghasilkan keuntungan bagi Pemerintah Daerah, sedangkan PT Bank Pesisir Tanadoang telah menghasilkan keuntungan bagi Daerah dari tahun 2010 sampai tahun 2023. Kondisi ini disebabkan oleh tidak optimalnya pengelolaan dan manajemen keuangan, serta BUMD tidak memiliki inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sehingga tidak mendatangkan kemandirian dan hanya mengharapkan penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah. BUMD di Kabupaten Kepulauan Selayar juga kekurangan SDM yang berkualitas yang dapat menghambat inovasi dan pengembangan BUMD. Capaian *Return On Asset (ROA)* BUMD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.52** serta capaian ROA masing-masing BUMD dapat dilihat pada **Grafik 2.53**.



Grafik 2. 52 *Return On Asset (ROA)* BUMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023

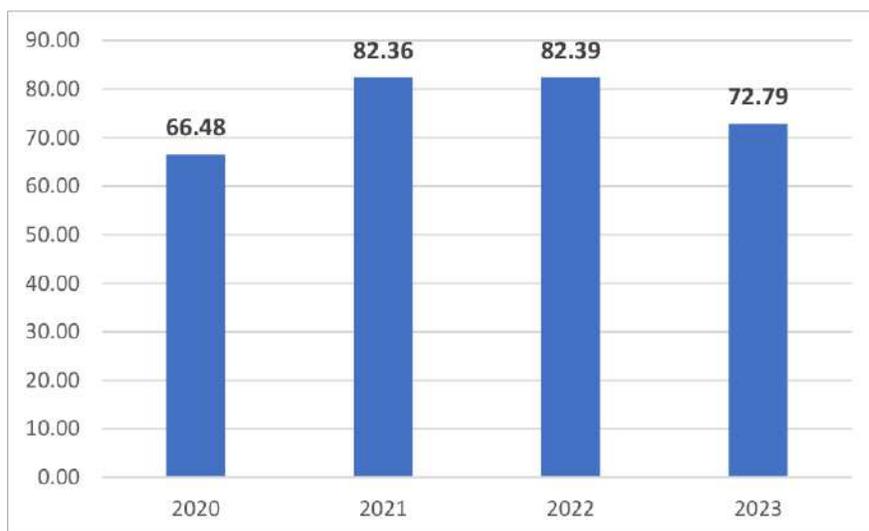
Sumber Data: Bagian Perekonomian SETDA Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024



Grafik 2. 53 Return On Asset (ROA) Masing-masing BUMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015 dan 2018-2023  
 Sumber Data: Bagian Perekonomian dan SDA Setda, 2024

**2.3.1.4.6 Produktivitas Padi**

Produktivitas padi sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau daya dukung lahan dalam memproduksi tanaman padi serta sistem pengolahan yang diterapkan terhadap lahan tersebut. Produktivitas padi merupakan indikator untuk mengukur produksi padi per hektar untuk kurun waktu tertentu. Produktivitas padi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023. Peningkatan produktivitas padi didukung oleh peningkatan penggunaan sarana pertanian berupa benih, pupuk, pestisida dan alsintan sesuai anjuran. Selain itu, didukung pula oleh kebijakan pembangunan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) berbasis Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan dalam peningkatan produksi pangan strategis. Namun, faktor iklim dan kekeringan akibat *el nino* pada tahun 2023 juga sangat mempengaruhi penurunan produktivitas padi. Produktivitas padi selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada **Grafik 2.54**.



Grafik 2. 54 Produktivitas Padi (kw/Ha) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023  
 Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

### 2.3.1.4.7 Produksi Peternakan

Kabupaten Kepulauan Selayar yang dikenal memiliki potensi perikanan dan pertanian yang melimpah namun tidak demikian dengan sektor peternakan. Produksi sektor peternakan yang belum optimal, diakibatkan oleh masih kurangnya minat dari masyarakat untuk menjadi peternak disamping karena lahan peternakan yang masih kurang, juga disebabkan oleh konsumsi hasil ternak yang rendah akibat dari sebagian besar masyarakat lebih memilih mengkonsumsi ikan.

Produksi daging ternak Kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi oleh daging sapi potong, ayam kampung dan kambing. Jumlah produksi daging ternak serta produksi telur mengalami fluktuasi dari tahun 2010 sampai tahun 2023 sebagaimana yang tergambar pada **Tabel 2.23** dan **Tabel 2.24**. Begitupun dengan jumlah populasi hewan ternak dan unggas yang juga mengalami capaian fluktuatif sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.25**. Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dalam peningkatan produksi daging dan telur adalah pemberian bantuan bibit ternak bagi masyarakat serta pemberian vaksinasi serta pelayanan kesehatan bagi hewan. Namun, disini lain beberapa faktor yang menghambat produksi ternak dan unggas adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang menyebabkan kekurangan air serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses beternak bagi masyarakat. Oleh karena itu, kedepannya diharapkan seluruh faktor penghambat yang dialami saat ini dapat diselesaikan demi peningkatan produksi peternakan yang akan menjamin ketersediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2. 23 Jumlah Produksi Daging Ternak Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun/ Jenis	Jumlah Produksi Daging (kg)						
	2010	2015	2018	2020	2021	2022	2023
Sapi Potong	76.836	106.640	153.037	201.732	233.992	315.444	248.005
Kerbau	5.884	25.934	25.171	54.957	41.862	43.450	29.165
Kuda	8.222	6.415	8.854	16.050	13.200	11.850	4.350
Kambing	63.200	30.752	37.095	27.767	51.776	18.583	34.813
Domba	517			38		26	
Ayam Kampung	137.091	42.974		60.453	65.646	56.930	62.966
Ayam Petelur	3.959	982	43.097	16.270	2.747	1.038	7.387
Ayam Pedaging	6.433	11.973	767	65.767	51.989	21.997	25.968
Itik	1.032	860	3.929	888		4.741	1.734
<b>Jumlah</b>	<b>303.174</b>	<b>226.530</b>	<b>271.950</b>	<b>443.922</b>	<b>461.212</b>	<b>474.059</b>	<b>414.388</b>

Sumber Data : BPS Kepulauan Selayar, 2024

Tabel 2. 24 Jumlah Produksi Telur Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun/ Jenis	Jumlah Produksi Telur (kg)					
	2015	2018	2020	2021	2022	2023
Ayam Kampung	112.849	11.935	275.307	102.155	108.256	112.849
Ayam Petelur	143.580	179.167	113.823	298.660	143.228	143.580
Itik	15.421		112.377		3.184	15.421
<b>Jumlah</b>	271.850	191.102	501.507	400.815	254.668	271.850

Sumber Data : BPS Kepulauan Selayar, 2024

Tabel 2. 25 Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun/ Jenis	Jumlah Populasi Ternak						
	2010	2015	2018	2020	2021	2022	2023
Sapi Potong	10.683	16.756	19.996	23.528	23.688	23.532	21.186
Kerbau	547	4.588	4.727	4.974	5.083	5.072	4.618
Kuda	3.366	3.766	3.975	4.293	4.601	4.762	4.962
Kambing	80.809	80.831	86.730	97.204	94.862	93.751	90.205
Domba	51		41	32	32	35	99
Ayam Kampung	220.138	272.371	270.834	425.184	428.589	463.090	495.897
Ayam Petelur	9.793	11.613	17.371	15.116	9.516	8.821	13.049
Ayam Pedaging	3.304	8.732	12.027	20.818	3.871	12.113	2.460
Itik	2.089	5.692	11.463	17.524	13.994	7.045	8.479

Sumber Data: BPS Kepulauan Selayar, 2024

#### 2.3.1.4.8 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Produktivitas perikanan tangkap dapat dilihat dari jumlah produksi perikanan tangkap yang dihasilkan. Produksi perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan cukup tinggi sehingga merupakan produsen perikanan terbesar karena merupakan daerah *fishing ground*. Produksi perikanan selama 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Produksi perikanan tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.55**.



Grafik 2. 55 Produktivitas Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015 dan 2018-2023

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Faktor penghambat kurang maksimalnya produksi perikanan tangkap dalam beberapa tahun terakhir antara lain: Kelembagaan usaha nelayan dan jenis usaha yang beragam menjadikan usaha penangkapan ikan sangat parsial dan lemah; Logistik penangkapan ikan yang belum terpenuhi secara maksimal; serta Produktivitas dan daya saing produksi kelautan dan perikanan masih rendah. Selain itu, ada beberapa faktor pendukung yang menyebabkan peningkatan produksi perikanan tangkap adalah pemberian bantuan peralatan perikanan tangkap bagi nelayan yang turut berkontribusi meningkatkan produktivitas nelayan.

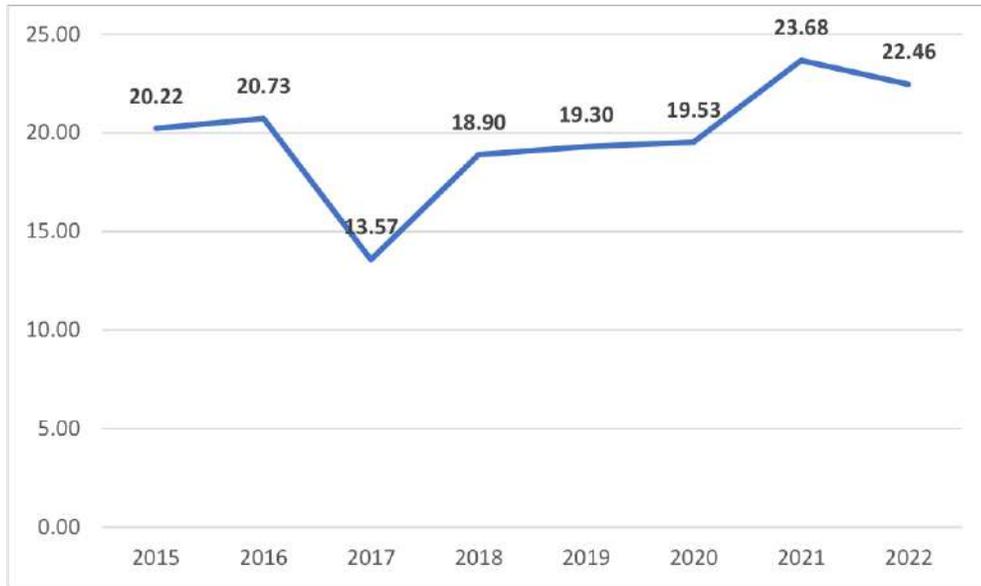
#### **2.3.1.5 Penerapan Indeks Ekonomi Hijau**

Gambaran penerapan ekonomi hijau dapat dilihat dari Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Ekonomi Biru, sebagai berikut.

##### **2.3.1.5.1 Indeks Ekonomi Hijau**

Indeks Ekonomi Hijau yang dikeluarkan oleh Bappenas menjadi alat ukur untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau. Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia. Indeks ini menggabungkan 3 pilar dari pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial. Indeks ini berskala 0-100, dimana bila nilainya mendekati 100, maka indeks ini semakin sangat baik. Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada level baik.

Capaian Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2015 sampai tahun 2022 cenderung fluktuatif. Namun capaian dimaksud masih tergolong rendah dan lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Jika ditinjau dari 3 pilar pembentuk Indeks Ekonomi Hijau, beberapa indikator memiliki capaian yang belum optimal. Beberapa diantaranya adalah produktivitas padi yang tidak optimal dikarenakan Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki keterbatasan lahan untuk menanam padi serta karakteristik daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki luas laut dan potensi perikanan tangkap yang melimpah sehingga pengembangan perikanan budidaya belum optimal. Lebih lanjut pada pilar sosial ekonomi, Tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar masih cukup tinggi. Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.56**.

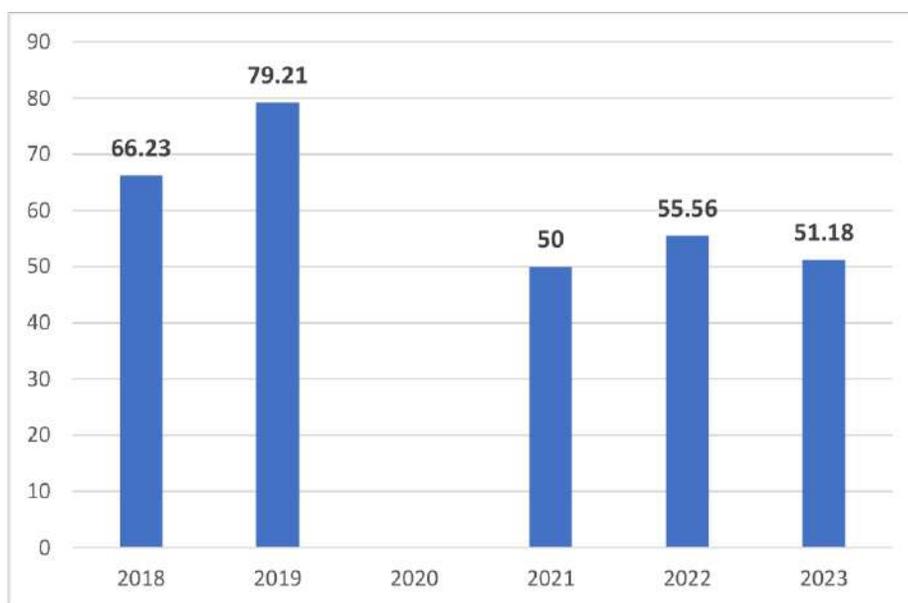


Grafik 2. 56 Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2022

Sumber Data: Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

### 2.3.1.5.2. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan kondisi kualitas air di suatu wilayah berdasarkan status mutu air hasil dari pengukuran parameter fisika, kimia dan bakteriologis suatu perairan baik sungai maupun danau. Parameter kualitas air permukaan salah satunya adalah kebutuhan oksigen biologi (BOD). Indeks Kualitas Air Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2021 sampai tahun 2023 masih berada pada kategori sedang. Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.57**.



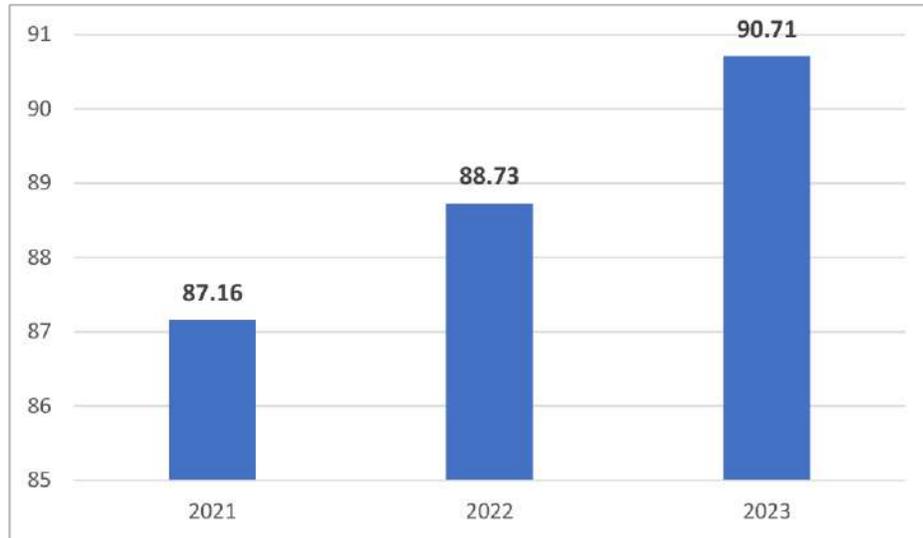
Grafik 2. 57 Indeks Kualitas Air Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

### 2.3.1.5.3. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil tranfonnasi parameter-parameter (indikator) individual

polusi udara yang saling berhubungan, seperti konsentrasi SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, SPM, O<sub>2</sub>, CO menjadi satu nilai atau satu set nilai. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2021 dan tahun 2022 masih berada pada kategori baik, namun pada tahun 2023 meningkat menjadi kategori sangat baik. Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.58.**

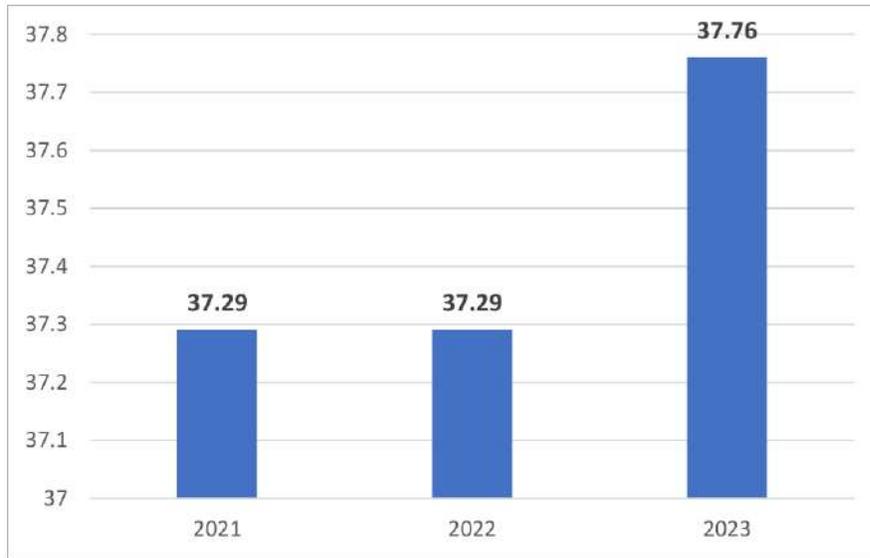


Grafik 2. 58 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

#### 2.3.1.5.4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah suatu alat ukur yang mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah. IKTL dibuat dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan. Skor IKTL biasanya ditunjukkan dalam bentuk skala yang menunjukkan tingkat kualitas penutupan lahan, dengan skor tertinggi menunjukkan lahan yang paling baik dan stabil. IKTL berguna untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam menilai dan memantau kualitas tutupan lahan dan membuat tindakan yang sesuai untuk memperbaiki kualitas lahan yang buruk. IKTL dihitung berdasarkan tutupan vegetasi hutan, belukar, belukar rawa, RTH (Ruang Terbuka Hijau), dan hasil RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan). Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2021 sampai tahun 2023 masih berada pada kategori kurang. Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.59.**



Grafik 2. 59 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

### 2.3.1.6. Penerapan Ekonomi Biru

Ekonomi biru merupakan pendekatan inovatif untuk memanfaatkan sumber daya laut berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor ekonomi biru meliputi berbagai sektor penting, termasuk perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Ekonomi biru memiliki potensi penting sebagai sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Indeks Ekonomi Biru Indonesia menghitung kontribusi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kemajuan ekonomi biru. IBEI disusun dari beberapa indikator perekonomian makro, yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan sektor ekonomi biru. IBEI juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi ekonomi biru di masa depan, sesuai dengan asumsi-asumsi yang ditentukan.

Berdasarkan perhitungan dari Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, IBEI Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 83,56. Capaian ini lebih tinggi dari rata-rata capaian IBEI Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 69,71. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi pengembangan ekonomi biru. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari daratan Pulau Sulawesi. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan Barat-Timur NKRI dan berada di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan ALKI III yang merupakan akses pelayaran bagi kapal-kapal baik lokal ataupun asing. Berdasarkan data dari Danpos AL Selayar, jumlah kapal yang melintasi perairan selayar sebanyak 30 – 40 kapal per hari dan mencapai 15.000 – 25.000 kapal per tahun. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki panjang garis pantai sekitar 670 km dengan jumlah pulau sebanyak 130 pulau dan luas laut sekitar 9146,66 km<sup>2</sup>, Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai kawasan terumbu karang dengan luas sekitar

4.400 Ha sehingga sangat potensial untuk kegiatan penangkapan ikan dan budidaya perikanan. Disamping itu, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki atol terbesar Ketiga di dunia yang dapat menjadi ikon pariwisata dan telah ditetapkan menjadi salah satu Cagar Biosfer.

### 2.3.1.7. Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok

Barang kebutuhan pokok (Bapok) merupakan komoditi yang banyak diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan yang cukup dan harga yang terjangkau sangat diperlukan. Harga yang stabil dan terjangkau merupakan hal yang penting bagi masyarakat terutama yang memiliki pendapatan rendah.

Stabilisasi harga merupakan salah satu aspek dalam kebijakan pangan yang senantiasa menjadi agenda pemerintah. Stabilisasi harga komoditi barang kebutuhan pokok merupakan isu yang selalu dibahas dan perkembangan harga itu sendiri selalu dimonitor oleh pemerintah, mengingat sebagian besar komoditi Bapok merupakan produk pertanian yang memiliki karakteristik produksi bersifat musiman dan harga berfluktuasi sementara permintaan terjadi sepanjang waktu

Stabilitas harga dapat diukur dengan indikator koefisien variasi harga. Semakin kecil nilai koefisien variasi harga menunjukkan fluktuasi harga rendah (stabil) dan sebaliknya. Koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok menggambarkan variasi harga kebutuhan pokok antar waktu dalam setahun, mencakup 11 komoditi yaitu beras, kedelai, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar. Persentase penurunan koefisien variasi harga antar waktu diperoleh dari rata-rata koefisien variasi 11 komoditi. Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok dapat dilihat pada **Grafik 2.60**.

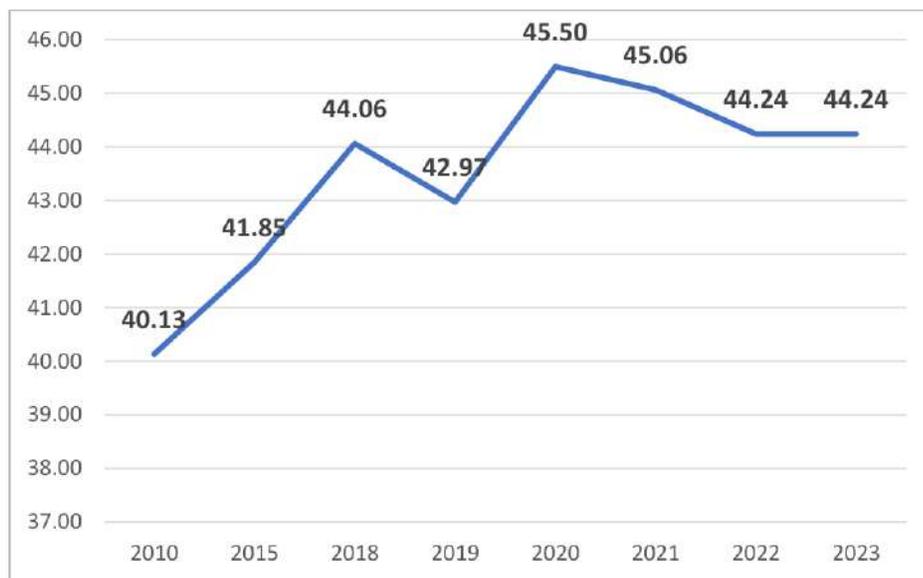


Grafik 2. 60 Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023  
Sumber Data: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

### 2.3.1.8. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. Pembentukan Modal Tetap Bruto yang meningkat akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan suatu daerah.

Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung fluktuatif namun mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2023. Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.61**.

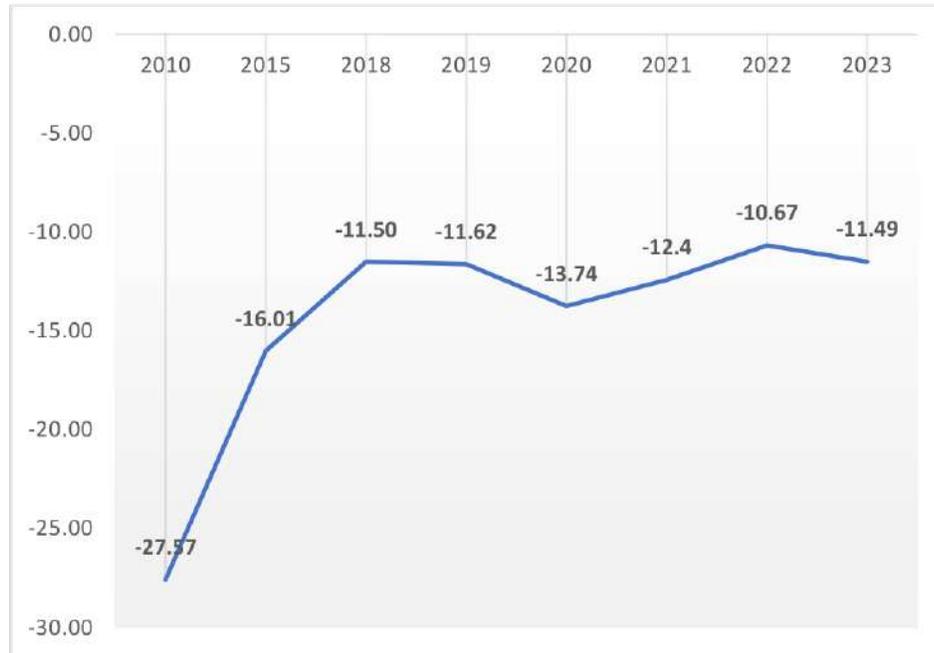


Grafik 2. 61 Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015, 2018-2023

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

### 2.3.1.9. Net Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor dan impor sangat mempengaruhi PDRB suatu daerah. Ekspor yang meningkat dan lebih banyak dari impor akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan suatu daerah. Selama kurun waktu 2018 sampai 2023, net ekspor Kabupaten Kepulauan Selayar selalu negatif. Hal ini berarti impor Kabupaten Kepulauan Selayar masih lebih banyak dari eksponya. ini terjadi karena Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat bergantung pada hasil barang dan jasa dari daerah lain. Kontribusi net ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.62**.



Grafik 2. 62 Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015, 2018-2023

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

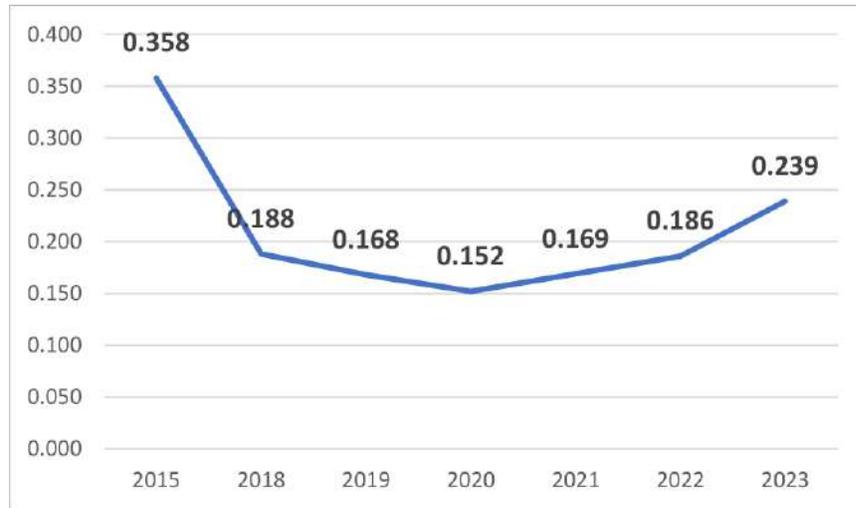
### 2.3.1.10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Gambaran stabilitas ekonomi makro dapat dilihat dari rasio pajak daerah terhadap PDRB dan tingkat inflasi, sebagai berikut.

#### 2.3.1.10.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah, maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terus menurun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Salah satu penyebabnya adalah pandemi Covid 19. Namun capaian ini kembali meningkat pada tahun 2021 sampai pada tahun 2023. Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.63**.

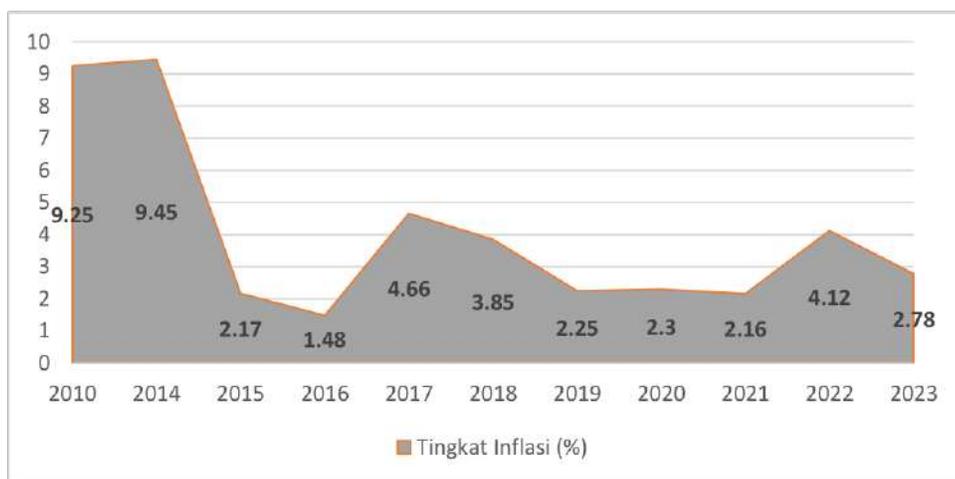


Grafik 2. 63 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 dan 2018-2023

Sumber Data: diolah dari data LKPD Kepulauan Selayar dan BPS, 2024

### 2.3.1.10.2. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Tingkat inflasi yang relatif tinggi menandakan lemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya perkembangan produksi. Karena Kabupaten Kepulauan Selayar berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulukumba, sehingga inflasi yang digunakan mengacu pada tingkat inflasi Kabupaten Bulukumba. Adapun gambaran laju inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar (Zona Bulukumba) dapat dilihat pada **Grafik 2.64**. Inflasi tahun 2023 menurun jika dibandingkan tahun 2022 dikarenakan komoditas utama penyumbang inflasi, antara lain bensin, telur ayam ras, beras, rokok kretek filter, kontrak rumah, bawang merah, kue kering, tomat dan sabun harganya relatif stabil di tahun 2023.



Grafik 2. 64 Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 dan 2014-2023

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

### 2.3.1.10.3. Pertumbuhan Investasi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hal yang paling penting dalam mengukur kinerja perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah terjadi, jika ada kenaikan produksi barang dan jasa dalam perekonomian, atau ditunjukkan oleh kenaikan PDRB (Produk Domestik

Regional Bruto). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak hanya berarti telah terjadi kenaikan produksi barang dan jasa, tetapi juga berarti terciptanya lapangan pekerjaan.

Investasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena investasi dapat mendorong pertumbuhan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi), selain itu investasi juga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, yang berarti akan mengurangi jumlah pengangguran. Berkurangnya pengangguran akan mengurangi kemiskinan, yang akan berdampak pada teratasinya masalah-masalah ikutan lain seperti gizi buruk, buta huruf, kejahatan dan lain-lain. Selain itu investasi juga bisa dipakai sebagai alat untuk pemerataan baik pemerataan antar daerah, antar sektor dan antar perorangan.

Pertumbuhan investasi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami kontraksi pada tahun 2016, tahun 2019, dan tahun 2022. Pada tahun 2023, nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar 76,286 Milyar dengan pertumbuhan sebesar 83,19 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Nilai realisasi dan pertumbuhan investasi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Tabel 2.26**.

Tabel 2. 26 Nilai Realisasi Dan Pertumbuhan Investasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2023

No	Tahun	Realisasi Investasi (Rp)		Pertumbuhan Investasi
		Jumlah Pelaku Usaha (Orang)	Nilai Investasi	
1	2015	106	46.719.238.757	
2	2016	597	1.500.000.000	(3.014,62)
3	2017	727	6.254.800.000	76,02
4	2018	792	94.255.870.000	93,36
5	2019	350	25.716.000.000	(266,53)
6	2020	209	39.200.520.000	34,40
7	2021	-	67.442.916.200	41,88
8	2022	8	12.826.155.311	(425,82)
9	2023	17	76.286.000.000	83,19

Sumber Data: DPMPSTSP Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

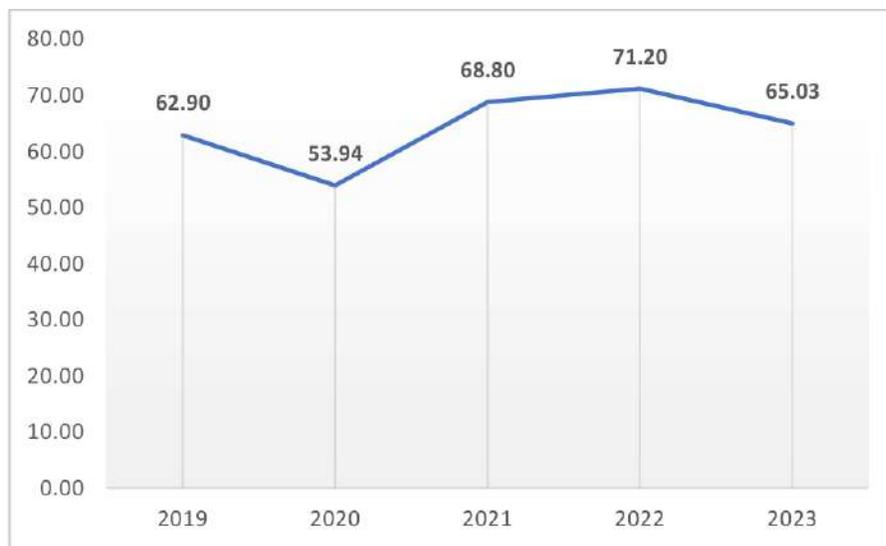
#### 2.3.1.10.4. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Stabilitas ekonomi makro suatu daerah sangat tergantung pada kualitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah yang kuat dan stabil akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan serta mengoptimalkan capaian-capaian indikator ekonomi makro lainnya. Pengelolaan keuangan daerah dapat diukur melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan

keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Capaian IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung fluktuatif. Capaian IPKD pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan dan cukup rendah karena pada saat itu perencanaan dan penganggaran daerah belum menggunakan SIPD sehingga perencanaan dan penganggaran menjadi tidak terintegrasi. Namun setelah menerapkan SIPD pada tahun 2021 dan tahun 2022 sehingga mengalami peningkatan. Capaian IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar juga didukung oleh capaian WTP yang diraih sebanyak 8 kali berturut-turut.

Beberapa faktor penghambat dalam meningkatkan IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar, faktor yang paling utama itu adalah kemandirian keuangan. Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan pembangunan masih mengandalkan sumber pendanaan dari dana transfer Pemerintah Pusat dikarenakan Pemerintah Daerah belum mampu memaksimalkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Capaian IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar selengkapnya dapat dilihat pada **Grafik 2.65**.



Grafik 2. 65 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023

Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri, 2024

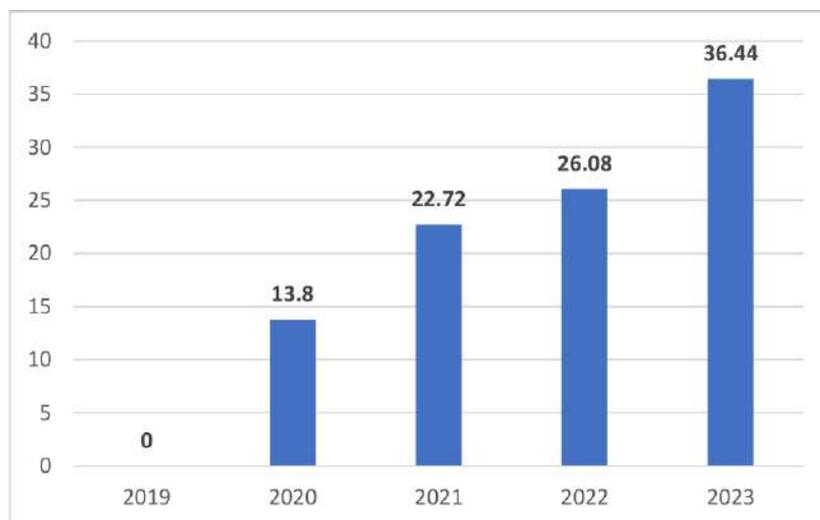
### 2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Gambaran daya saing sumber daya manusia dapat dilihat dari persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi, tingkat penguasaan Iptek, persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kabupaten, rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun, harapan lama sekolah, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan, sebagai berikut.

### 2.3.2.1. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara *Online* dan Terintegrasi

Berdasarkan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka Pemerintah Daerah telah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mengupayakan agar seluruh layanan publik diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi agar seluruh stakeholder dapat memiliki akses yang sama dalam layanan publik dimaksud. Layanan publik yang diselenggarakan secara *online* adalah layanan publik berbasis elektronik serta layanan publik terintegrasi adalah layanan yang prosesnya saling terhubung dan menyatu ke dalam beberapa layanan SPBE lainnya ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan beberapa pelayanan publik sudah berbasis *website/internet* yang dapat digunakan masyarakat dalam mendapatkan layanan pelayanan pada sarana pelayanan publik (sarana kesehatan, pelayanan identitas kependudukan dan layanan perizinan). Hal ini diperkuat oleh pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) pada tahun 2021 yang merupakan MPP pertama di wilayah kepulauan. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.66**



Grafik 2. 66 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara *Online* dan Terintegrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023

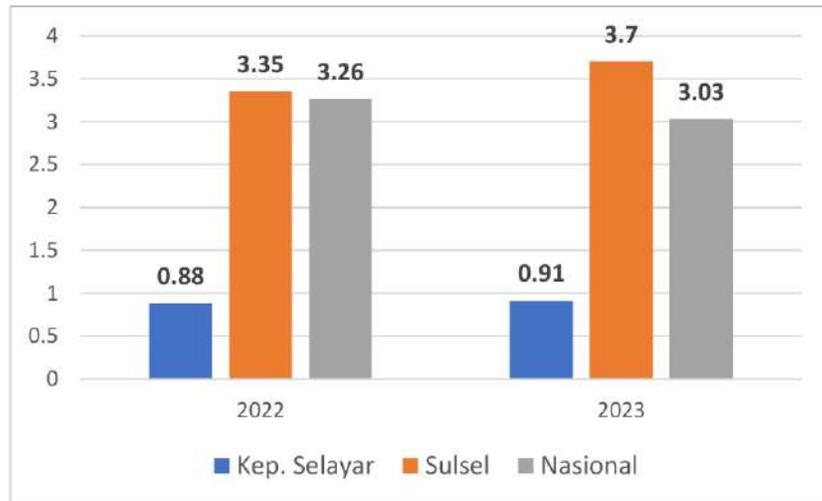
Sumber Data: Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

### 2.3.2.2. Tingkat Penguasaan IPTEK

#### 2.3.2.2.1. Indeks Kapabilitas Inovasi

Kapabilitas inovasi merupakan salah satu pilar dalam mengukur daya saing suatu daerah. Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan formal. Kapabilitas inovasi juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru.

Capaian Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Namun capaiannya masih di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain: riset daerah yang belum berkembang ditandai dengan anggaran riset yang belum optimal, publikasi ilmiah yang masih sedikit, serta keterbatasan kuantitas dan kualitas peneliti. Capaian nilai **Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah** Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.67**.



Grafik 2. 67 Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022-2023  
Sumber Data: BRIN, 2024

#### 2.3.2.2.2. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Pada tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Selayar telah tergolong sebagai kabupaten yang inovatif. Capaian nilai **Indeks Inovasi Daerah** Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.68**.



Grafik 2. 68 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2023

Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meningkat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain semakin banyaknya produk-produk inovasi yang dilakukan oleh OPD dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja masing-masing OPD dimaksud. Salah satu kendala dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah adalah kurang maksimalnya pelaporan inovasi. Terdapat beberapa inovasi sudah dilaporkan namun belum melengkapi indikator-indikator ataupun data pendukung yang diperlukan.

#### 2.3.2.2.3. Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah terhadap APBD

Proporsi anggaran riset terhadap APBD di Kabupaten Kepulauan Selayar relatif berfluktuasi, proporsi anggaran riset terbesar pada tahun 2021. Proporsi anggaran untuk kegiatan riset sangat penting untuk terus ditingkat tiap tahunnya dalam rangka terwujudnya perencanaan yang berkualitas yang berbasis dari hasil riset yang berkualitas. Proporsi anggaran riset Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap APBD dapat dilihat pada **Grafik 2.69**.



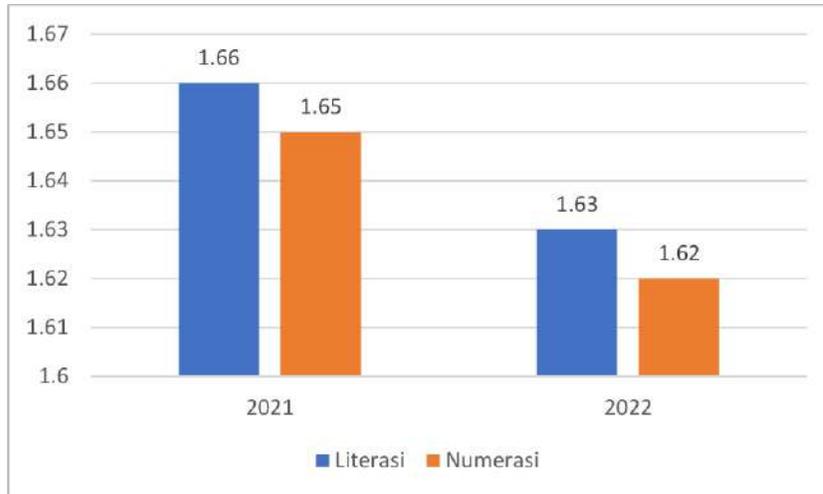
Grafik 2. 69 Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah terhadap APBD Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023

Sumber Data: Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

#### 2.3.2.3. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

Pendidikan yang berhasil selain diukur dari tingkat partisipasi sekolah, juga diukur dari sejauh mana kualitas pembelajaran yang dihasilkan oleh para siswa. Kualitas hasil pembelajaran dimaksud dapat diukur menggunakan tingkat literasi dan numerasi dari sebuah satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan kemampuan numerasi paling sedikit 75 persen peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

Tingkat literasi dan numerasi diperoleh dari hasil asesmen nasional oleh Kemendikbudristek. Sebagaimana hasil asesmen nasional dari Kemendikbudristek, nilai rata-rata kemampuan literasi membaca dan kemampuan numerasi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Oleh karena itu, kedepan pemerintah mendorong peserta didik mencapai kompetensi minimum yang lebih meningkat. Capaian dimaksud dua tahun terakhir dapat dilihat pada **Grafik 2.70**.

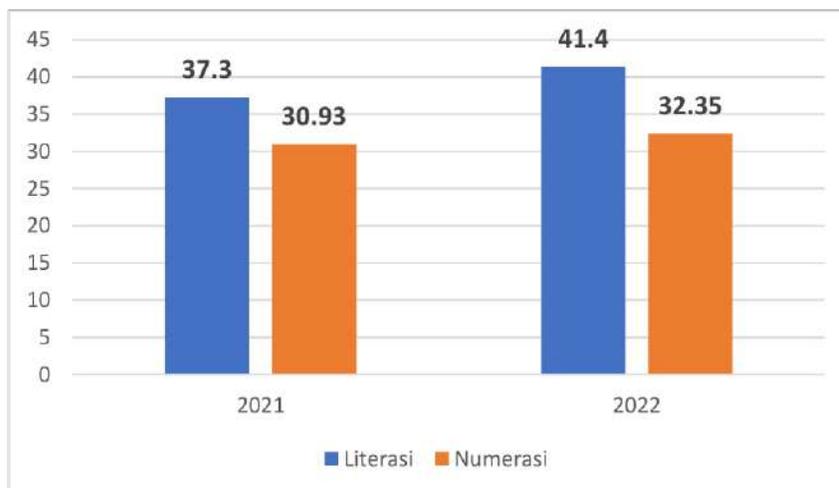


Grafik 2. 70 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk kemampuan literasi membaca dan numerasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2022

Sumber Data: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

#### **2.3.2.4. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional di Kabupaten**

Satuan pendidikan yang memiliki tingkat literasi sesuai standar minimum meningkat dari tahun 2021 sampai 2022. Begitupula dengan capaian numerasinya. Lebih lanjut bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki lebih banyak satuan pendidikan yang mencapai standar minimum tingkat literasi dibandingkan dengan kemampuan numerasi. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional, untuk kemampuan literasi membaca dan numerasi dapat dilihat pada **Grafik 2.71**



Grafik 2. 71 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk kemampuan literasi membaca dan numerasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2022

Sumber Data: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

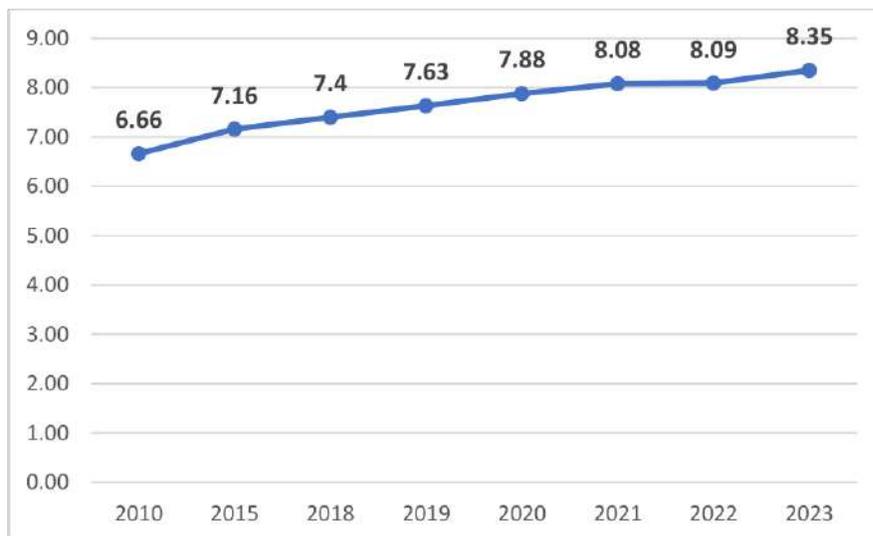
Beberapa faktor penyebab rendahnya literasi dan numerasi siswa adalah rendahnya kompetensi satuan pendidikan dan guru. Satuan pendidikan dan guru memiliki peran penting untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa disatuan pendidikannya masing-masing. Rendahnya literasi dan numerasi juga disebabkan antara lain : Guru kurang memiliki kompetensi tentang bagaimana meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa pada saat proses pembelajaran di kelas; Guru masih kurang memberikan pembiasaan dan latihan tentang literasi dan numerasi kepada siswa; dan masih banyak sekolah yang belum membuat program kepada siswa dalam meningkatkan kompetensi literasi numerasi siswa.

Oleh karena itu, Pemerintah juga harus berperan aktif dalam peningkatan literasi dan numerasi siswa melalui : memperbanyak pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik; penyediaan buku bacaan yang variatif di perpustakaan; dan peningkatan pembelajaran matematika yang inovatif.

#### 2.3.2.5. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tanpa diperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 13 tahun mulai dari tahun 2010. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya Pemerintah dalam menghadirkan pelayanan pendidikan yang baik dan merata. Capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada **Grafik 2.72.**



Grafik 2. 72 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar

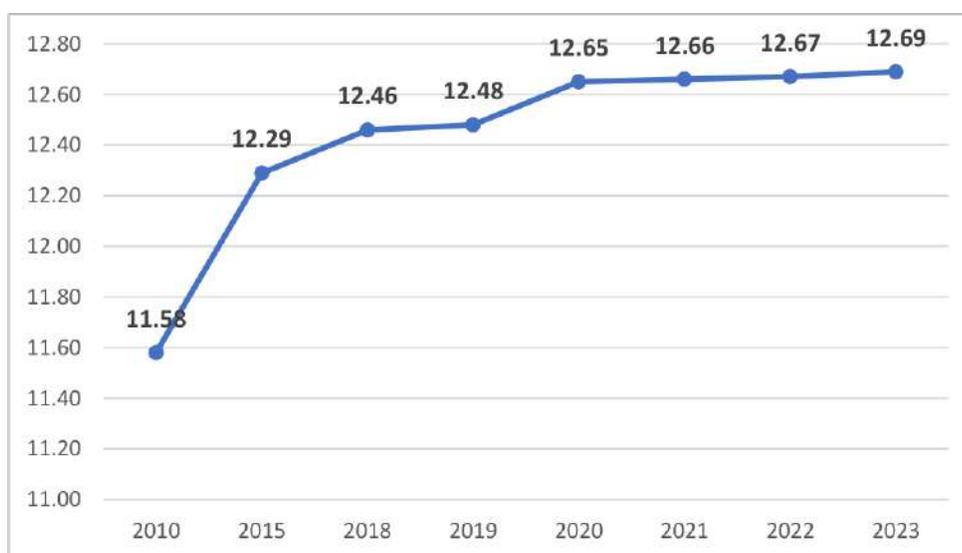
Tahun 2010, 2015 dan 2018-2023

*Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024*

### 2.3.2.6. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun dari 12,66 pada tahun 2021 menjadi 12,67 tahun 2022. Nilai HLS tersebut menggambarkan anak usia 7 tahun saat ini sudah dapat merasakan pendidikan selama 13 tahun atau kira-kira setara tamat kelas 3 SLTA. Kenaikan HLS ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Pendidikan yang lebih lama dapat membuka pintu peluang yang lebih besar bagi individu, membantu mereka mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang lebih baik, serta meningkatkan taraf hidup mereka. Kenaikan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang lebih baik bagi seluruh warga negara.

Peningkatan angka harapan lama sekolah tidak terlepas dari kolaborasi dan peran Pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah membangun dan merehabilitasi banyak sekolah dan sarana prasarana pendidikan lainnya serta disisi lain, kesadaran masyarakat akan pendidikan juga semakin bertambah. Hal ini diperkuat dengan, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memiliki Perguruan Tinggi sebagai tempat bagi lulusan SMA yang ingin melanjutkan pendidikan. Capaian angka harapan lama sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010-2023, dapat dilihat pada **Grafik 2.73**.



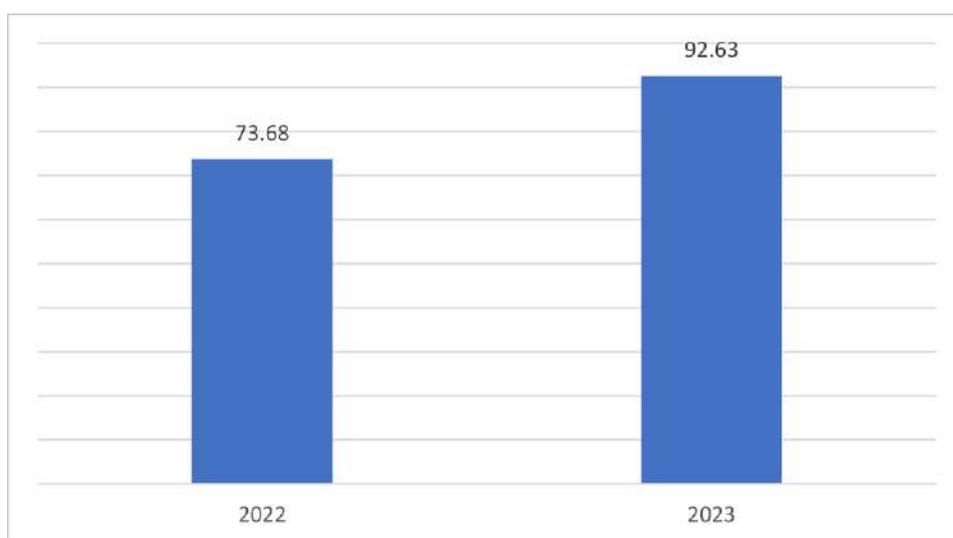
Grafik 2. 73 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015 dan Tahun 2018-2023

*Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024*

### 2.3.2.7. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Beberapa upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, antara lain pemerataan layanan perpustakaan di desa, mencukupkan koleksi dan tenaga perpustakaan, serta sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah, maka capaian IPLM Kabupaten Kepulauan Selayar meningkat dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Sebagaimana diketahui bahwa pengukuran IPLM untuk kabupaten/kota dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI yang dimulai pada tahun 2022, maka capaian IPLM Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada **Grafik 2.74**.



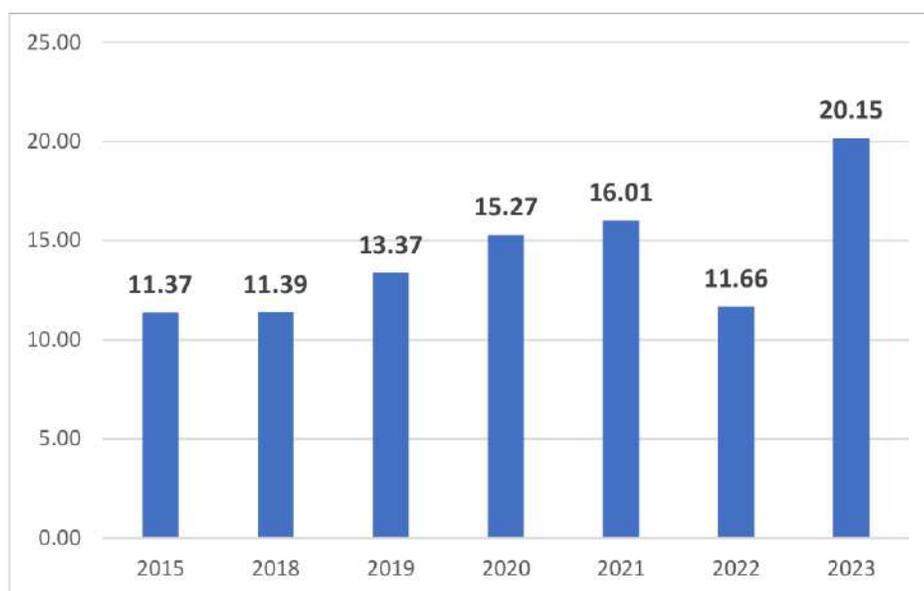
Grafik 2. 74 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2023

Sumber Data: Perpustakaan Nasional RI, 2024

#### **2.3.2.8. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi**

Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Tingginya proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.

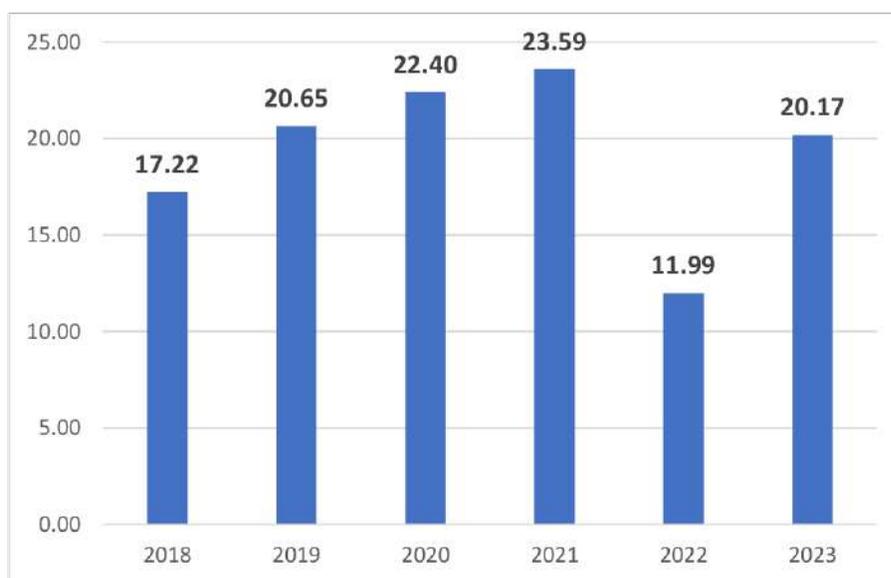
Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Kabupaten Kepulauan Selayar terus meningkat dalam kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2021. Namun capaian indikator ini menurun pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang setelah tamat SMA memilih untuk langsung bekerja di luar daerah dibandingkan dengan melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi. Capaian ini kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023. Capaian indikator ini dapat dilihat pada **Grafik 2.75**.



Grafik 2. 75 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 dan 2018-2023  
 Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

### 2.3.2.9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

Persentase penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan dapat menggambarkan kualitas angkatan kerja dari masyarakat yang berkualifikasi pendidikan tinggi. Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar terus meningkat dalam kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2021. Namun capaian indikator ini menurun pada tahun 2022, hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang berhasil mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan kualifikasi pendidikan tinggi. Capaian ini kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023. Capaian indikator ini dapat dilihat pada **Grafik 2.76.**



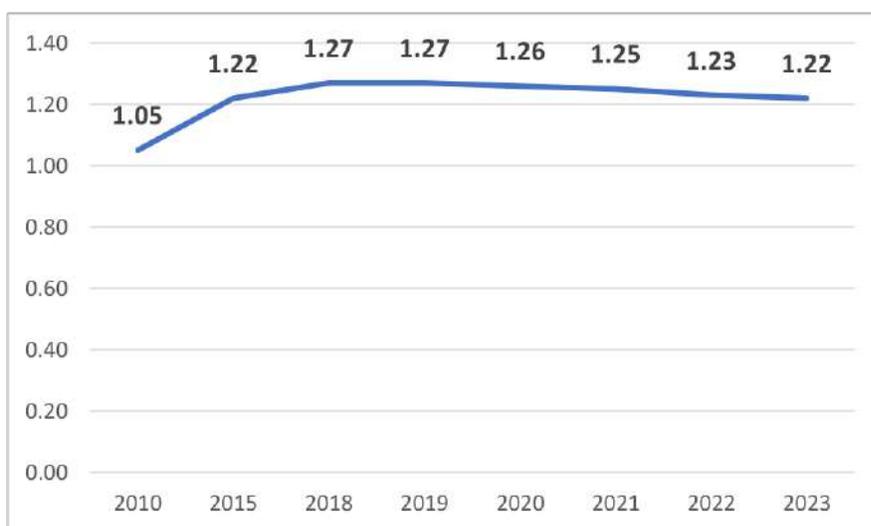
Grafik 2. 76 Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023  
 Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

### 2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

Gambaran daya saing fasilitas / infrastruktur wilayah dapat dilihat dari proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, persentase desa mandiri, Indeks Desa Membangun, Indeks Infrastruktur, sebagai berikut.

#### 2.3.3.1. Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan

Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Sulawesi Selatan masih tergolong rendah dan paling kecil dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan, karena jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar paling kecil dari seluruh kabupaten/kota yang berdampak pada kecilnya kontribusi lapangan usaha penyusun PDRB. Capaian kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Sulawesi Selatan dapat dilihat pada **Grafik 2.77**.



Grafik 2. 77 Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2010, 2015 dan 2018-2023

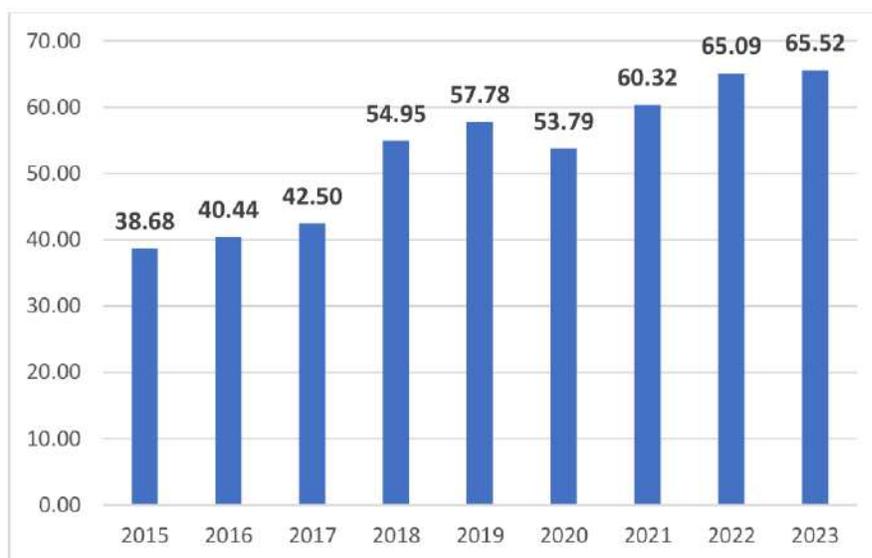
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

#### 2.3.3.2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, adalah rumah yang layak dan aman bagi setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Salah satu indikator untuk menciptakan lingkungan dan pemukiman yang nyaman adalah dengan tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Jumlah rumah layak huni dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Peningkatan dimaksud merupakan *impact* dari beberapa intervensi baik dari Pemerintah Pusat melalui Program Kota Tanpa

Kumuh (KoTaKu), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun program Pemerintah Daerah melalui Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dapat dilihat pada **Grafik 2.78**.



Grafik 2. 78 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2023

Sumber Data: SUSENAS, 2015-2023

### 2.3.3.3. Persentase Desa Mandiri

Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan untuk menentukan kategori pembangunan seluruh desa. Sebagaimana diketahui bahwa di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki Desa Mandiri. Pada tahun 2022 sejak dimulainya Program Gerbangsari (Gerakan Membangun Desa Mandiri) dapat meningkatkan status sebanyak 3 desa menjadi Desa Mandiri atau sebesar 3,7 persen dari 81 desa dan sebanyak 14 desa pada tahun 2023 atau sebesar 17,28 persen dari 81 desa di Kabupaten Kepulauan Selayar.

### 2.3.3.4. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Nilai IDM Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun 2018 sebesar 0,5929 (tertinggal), meningkat menjadi 0,6061 (berkembang) pada tahun 2020 dan meningkat terus sampai tahun 2022 menjadi 0,6953 (berkembang). Diantara beberapa desa di Kabupaten Kepulauan Selayar yang masih berstatus desa tertinggal disebabkan rata-rata nilai IDM yang rendah, yaitu pada nilai IKE yang terdiri dari komponen: keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit dan keterbukaan wilayah. Oleh karena itu pengembangan kawasan perdesaan menjadi salah satu yang perlu mendapat perhatian kedepannya. Nilai indeks pembentuk IDM dan Nilai IDM Kabupaten

Kepulauan Selayar tahun 2018-2023 dapat dilihat pada **Tabel 2.27** dan **Grafik 2.79**.

Tabel 2. 27 Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023

Tahun	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM
2018	0,6195	0,5058	0,6535	0,5929	Tertinggal
2019	0,6662	0,4850	0,6444	0,5985	Tertinggal
2020				0,6061	Berkembang
2021				0,6201	Berkembang
2022				0,6670	Berkembang
2023				0,6953	Berkembang

Sumber Data: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2024



Grafik 2. 79 Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018-2023

Sumber Data: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2024

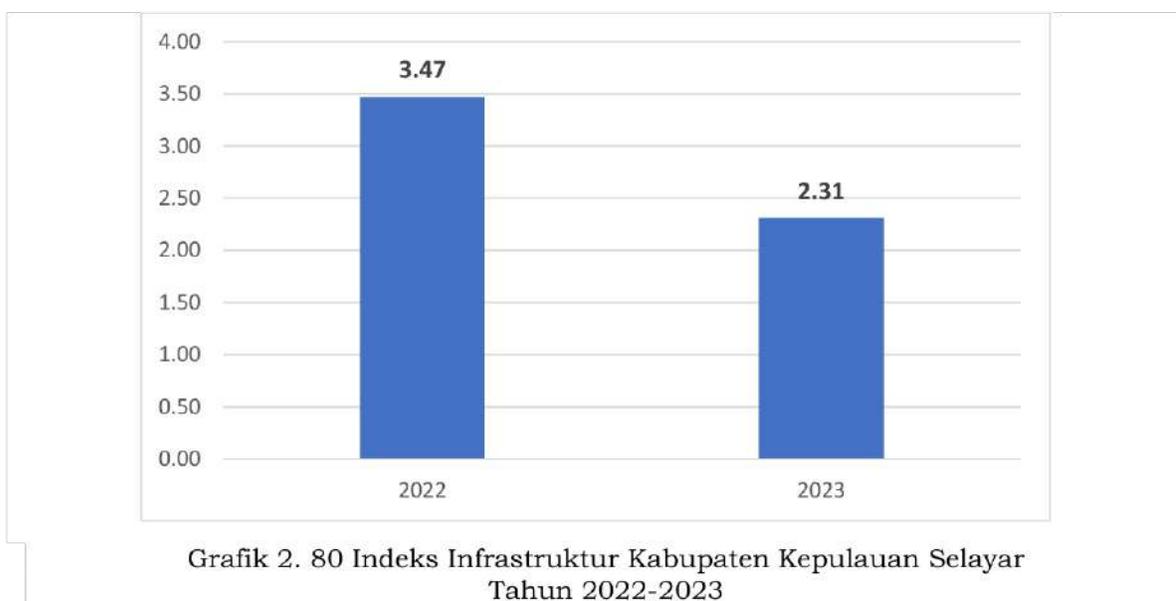
### 2.3.3.5. Indeks Infrastruktur

Daya saing infrastruktur wilayah dapat dilihat pada urusan pekerjaan umum yang merupakan salah satu urusan wajib penunjang utama dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang termasuk ke dalam urusan wajib karena selain urusan penataan ruang, didalamnya terdapat pula layanan jaringan jalan dan jaringan irigasi.

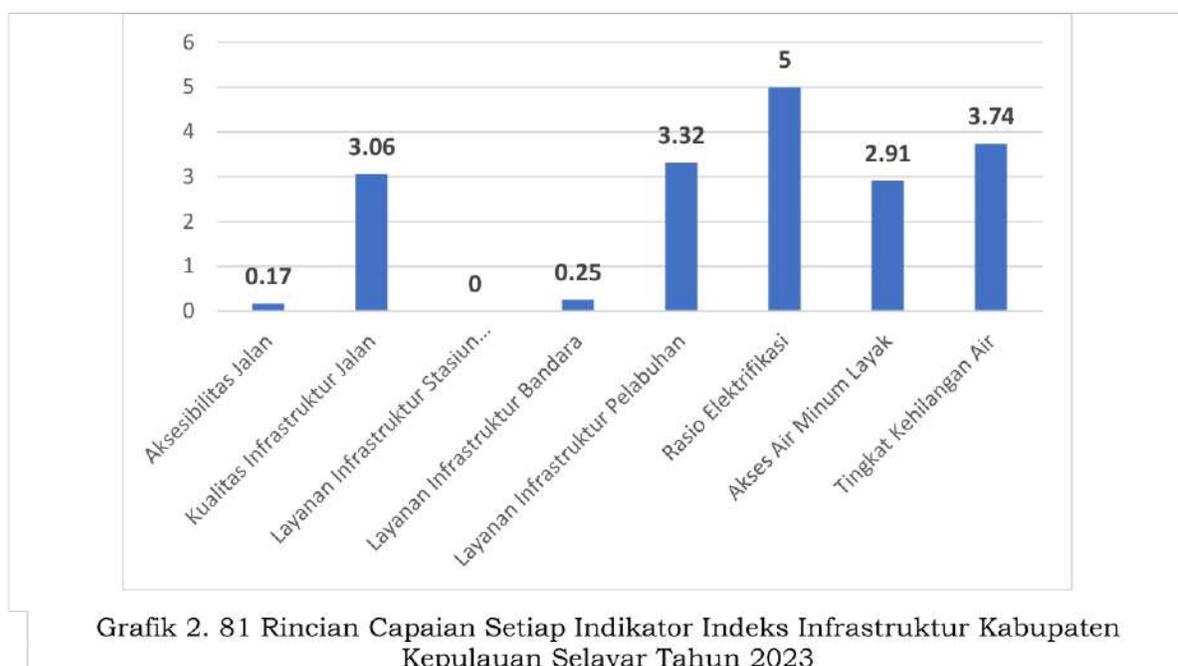
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan, perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan

secara berkala maupun periodik. Keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai 974,3 Km yang terdiri dari Jalan Kabupaten sepanjang 824,8 Km (berdasarkan SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 605/XII/Tahun 2018), Jalan Provinsi sepanjang 44,1 Km (berdasarkan SK Gubernur Sulsel Nomor 1159/IV/Tahun 2018) dan jalan Negara sepanjang 105,4 Km (berdasarkan Kepmen PUPR Nomor 248/KPTS/M/2015).

Indeks infrastruktur merupakan salah satu pilar pembentuk Indeks Daya Saing Daerah. Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022, dan lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Walaupun demikian, pada tahun 2022 capaian Kabupaten Kepulauan Selayar lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata Indeks Infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Beberapa faktor yang menghambat capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Selayar adalah tingkat kemantapan jalan yang belum optimal yaitu masih sebesar 57,26 persen, belum memiliki layanan stasiun kereta api, layanan infrastruktur bandara yang tidak berjalan optimal akibat pandemi Covid 19, serta beberapa wilayah kepulauan yang masih memiliki keterbatasan untuk mengakses air minum layak. Indeks Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.80**, serta rincian capaian setiap indikator pembentuk Indeks Infrastruktur pada tahun 2023 dapat dilihat pada **Grafik 2.81**.



Sumber Data: BRIN, 2024



#### 2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Gambaran daya saing iklim investasi dapat dilihat dari persentase gangguan tantribum yang dapat diselesaikan, persentase penegakan hukum peraturan daerah, persentase tindak kriminal yang ditangani dan demokrasi substansial, sebagai berikut.

##### 2.3.4.1. Persentase Gangguan Tantribum yang dapat Diselesaikan

Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara pemerintahan. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2018-2023) yaitu 100 persen.

##### 2.3.4.2. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah

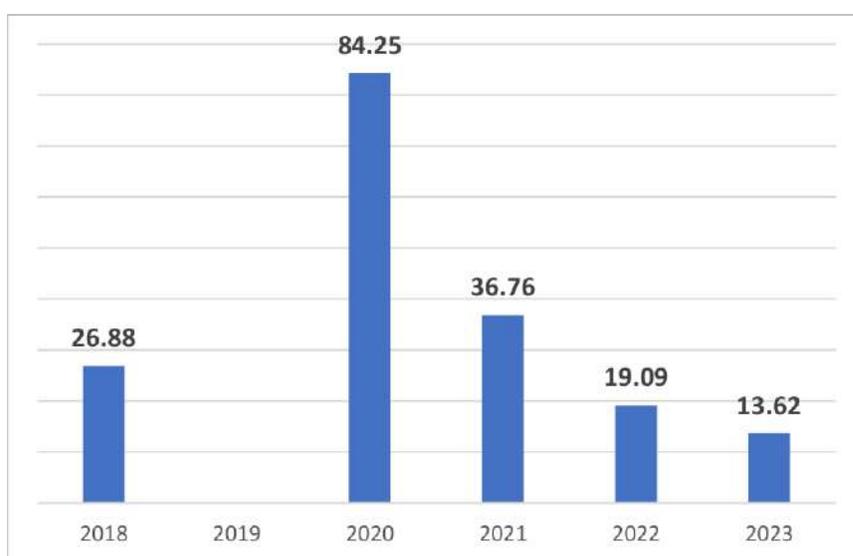
Penegakan Peraturan Daerah merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tujuh tahun terakhir dari tahun 2016 sampai 2023 sebesar 100 persen.

##### 2.3.4.3. Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani

Pembangunan suatu daerah juga dipengaruhi oleh tingkat kriminalitas yang terjadi di suatu daerah. Semakin kondusif keadaan di suatu daerah, maka

masyarakat akan semakin tenang dalam menjalankan aktivitas di segala bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial ataupun budaya.

Jumlah tindak pidana di Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung fluktuatif dalam 6 tahun terakhir. Namun, jumlah tindak pidana meningkat secara signifikan pada tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu melebihi 300 tindak pidana dari yang sebelumnya hanya pada kisaran 100 tindak pidana. Persentase tindak kriminal yang ditangani juga mengalami capaian yang fluktuatif dan yang tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 84,25 persen. Persentase tindak kriminal yang ditangani di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.82**.



Grafik 2. 82 Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023

Sumber Data: BPS, 2024

#### **2.3.4.4. Demokrasi Substansial**

Capaian demokrasi substansial pada pemerintah kabupaten termasuk Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari beberapa tolok ukur, sebagai berikut.

##### **2.3.4.4.1. Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD**

Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan. Selama 4 kali pemilihan legislatif, jumlah anggota DPRD perempuan terpilih sebanyak 4 sampai 6 orang dengan persentase sebesar 16 sampai 24 persen, yang dapat dilihat pada **Grafik 2.83**.



Grafik 2. 83 Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2023

Sumber Data: BPS, 2024

#### 2.3.4.4.2. Peraturan Daerah yang merupakan Inisiatif DPRD

Peraturan Daerah (Perda) bagi sebuah negara merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Implementasi sistem desentralisasi adalah menguatnya peran daerah-daerah secara konstruktif untuk memberdayakan masyarakat lokal. Keberhasilan desentralisasi adalah adanya evaluasi positif tentang menguatnya kontribusi daerah-daerah terhadap kekuatan kolektif nasional. Era desentralisasi telah membentuk daya saing secara sehat antara daerah. Kekuatan suatu daerah dapat dilihat dari kemampuannya memaksimalkan keseluruhan potensi-potensi di daerah demi kemakmuran rakyat daerah.

Sejalan dengan semangat dan era reformasi, salah satu unsur penting yang selalu mengiringi implementasi desentralisasi adalah pembentukan peraturan daerah. Kewenangan pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu wujud adanya kemandirian daerah dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah merupakan instrumen strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal.

Selama kurun waktu 13 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dari unsur eksekutif maupun legislatif telah menghasilkan beberapa Peraturan Daerah setiap tahunnya dalam rangka mengatur pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun, dari beberapa Peraturan Daerah dimaksud belum ada Peraturan Daerah yang dihasilkan merupakan inisiatif dari DPRD melainkan keseluruhan adalah inisiatif atau usulan dari unsur eksekutif. Olehnya itu, kedepannya DPRD dapat melakukan inisiasi untuk membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan dapat menjadi solusi bagi penyelesaian masalah dimaksud. Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Tabel 2.28**.

Tabel 2. 28 Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, 2015 dan 2018-2023

No	Tahun	Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan	Jumlah Peraturan Daerah inisiatif DPRD
1	2010	11	0
2	2015	10	0
3	2018	12	0
4	2019	6	0
5	2020	6	0
6	2021	10	0
7	2022	10	0
8	2023	11	0

Sumber: BPS Kepulauan Selayar dan Bagian Hukum Setda, 2024

#### 2.3.4.4.3. Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

Peran perempuan dalam partai politik sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik. Keterwakilan perempuan di parlemen dan partisipasi politik perempuan dalam Pemilu bukan hanya sekedar pelengkap semata, melainkan keterwakilan perempuan dan partisipasi politik perempuan dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang mendukung, memberdayakan dan berkontribusi dalam perubahan secara nyata dan dapat dirasakan oleh perempuan.

Persentase perempuan pengurus partai politik di Kabupaten Kepulauan Selayar telah melebihi 30 persen sebagaimana syarat sekurang-kurangnya keterwakilan perempuan sebagai pengurus partai politik. Persentase perempuan pengurus partai politik sudah mencapai 38,66 persen dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, dengan rincian setiap partai dapat dilihat pada **Tabel 2.29**.

Tabel 2. 29 Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik Kabupaten Kepulauan Selayar

Partai Politik	Jumlah Pengurus	Jumlah Perempuan	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik
PKB	18	7	38,89
Gerindra	26	9	34,62
PDIP	15	5	33,33
Nasdem	31	11	35,48
Buruh	3	1	33,33
Gelora	3	1	33,33
PKS	44	19	43,18
PKN	9	4	44,44
Hanura	13	5	38,46
Garuda	7	4	57,14
PAN	23	9	39,13
PBB	9	4	44,44
Demokrat	48	22	45,83
PSI	5	2	40,00
PPP	3	1	33,33
Ummat	16	5	31,25
Golkar	40	12	30,00
<b>TOTAL</b>	<b>313</b>	<b>121</b>	<b>38,66</b>

Sumber : KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

## 2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Gambaran aspek pelayanan umum tergambar pada regulasi dan tata kelola yang terintegrasi dan adaptif dapat dilihat pada pencapaian indikator, sebagai berikut.

### 2.4.1. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

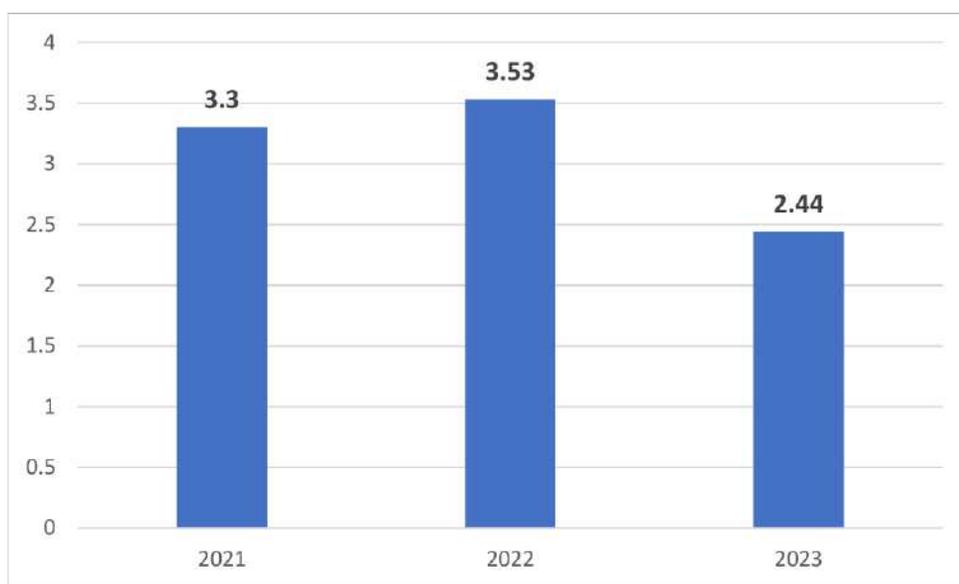
Penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu:

- a. memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi;
- b. mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu;
- c. mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (*legal drafter*) pusat dan daerah

Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh, dari hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023, capaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sebesar 45,48 atau masih kategori buruk. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya reuiu berbagai Peraturan Daerah ataupun Peraturan Kepala Daerah serta kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Perancang Perundang-undangan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

### 2.4.2. Indeks Pelayanan Publik

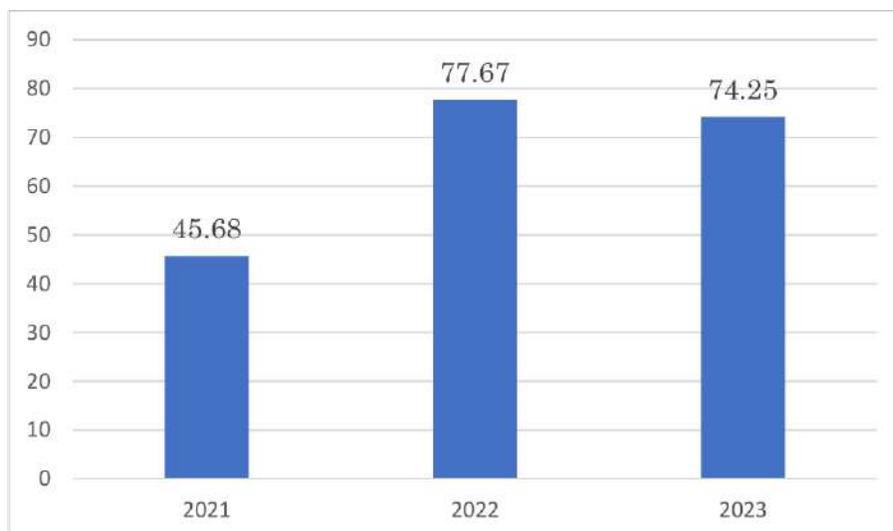
Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem. Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 berada pada kategori "B". Namun pada tahun 2023, capaian IPP Kabupaten Kepulauan Selayar menurun ke angka 2,44 dengan kategori C. Capaian dimaksud dapat dilihat pada **Grafik 2.84**.



Grafik 2. 84 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023

Sumber Data: Kemenpan RB, 2024

Selain capaian Indeks Pelayanan Publik, indikator lain yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik adalah tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang diterbitkan oleh Ombudsman RI. Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada **Grafik 2.85**.

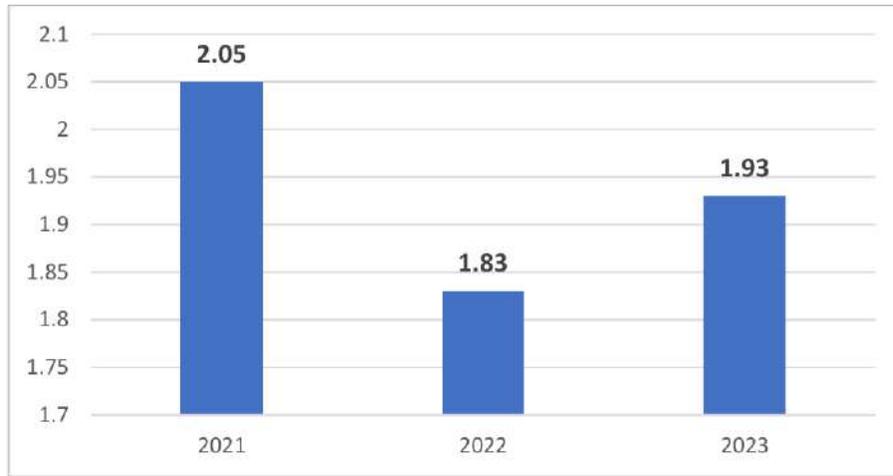


Grafik 2. 85 Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023

Sumber Data: Ombudsman RI, 2024

#### 2.4.3. Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE di Kabupaten Kepulauan Selayar berfluktuasi dari tahun 2021 dengan nilai 2,05 dan menurun di tahun 2022 dengan nilai 1,83 kemudian meningkat kembali pada tahun 2023 dengan nilai 1,93 (**Grafik 2.86**). Capaian ini masih berada pada kategori cukup. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masih pada tahapan mempersiapkan kebijakan internal yang mengatur arsitektur SPBE serta perencanaan strategis yang mengatur SPBE.



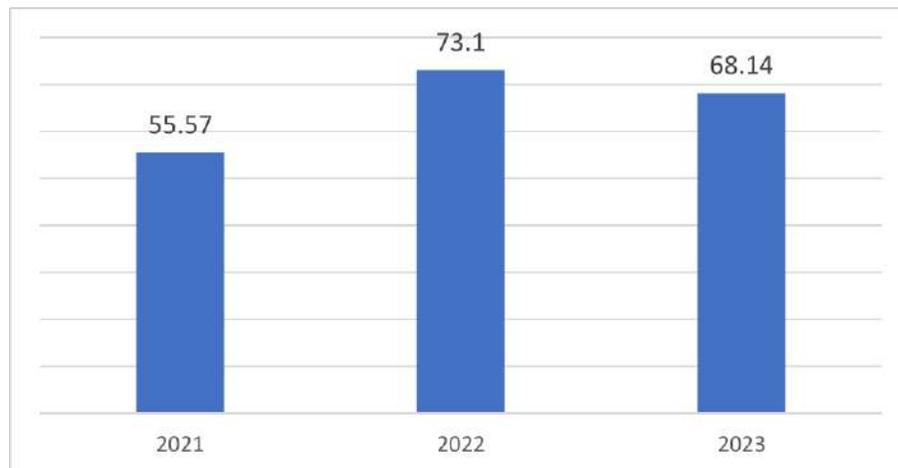
Grafik 2. 86 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023

Sumber Data: Kementerian PAN dan RB, 2024

#### 2.4.4. Indeks Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD). SPI berusaha mengukur penilaian persepsi dan pengalaman sebagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yang terbagi menjadi dua penilaian yaitu penilaian internal dengan responden adalah pegawai pada instansi tersebut dan penilaian eksternal dengan responden adalah pengguna layanan/mitra kerja sama.

Indeks Survei Penilaian Integritas diukur mulai dari tahun 2021. Capaian Indeks SPI Kabupaten Kepulauan Selayar selama tiga tahun terakhir memiliki capaian yang fluktuatif, sebagaimana yang tergambar pada **Grafik 2.87**. Untuk meningkatkan Indeks SPI Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu melakukan berbagai upaya dalam pencegahan korupsi, optimalisasi penyediaan informasi layanan publik dan penyederhanaan proses bisnis yang tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan.

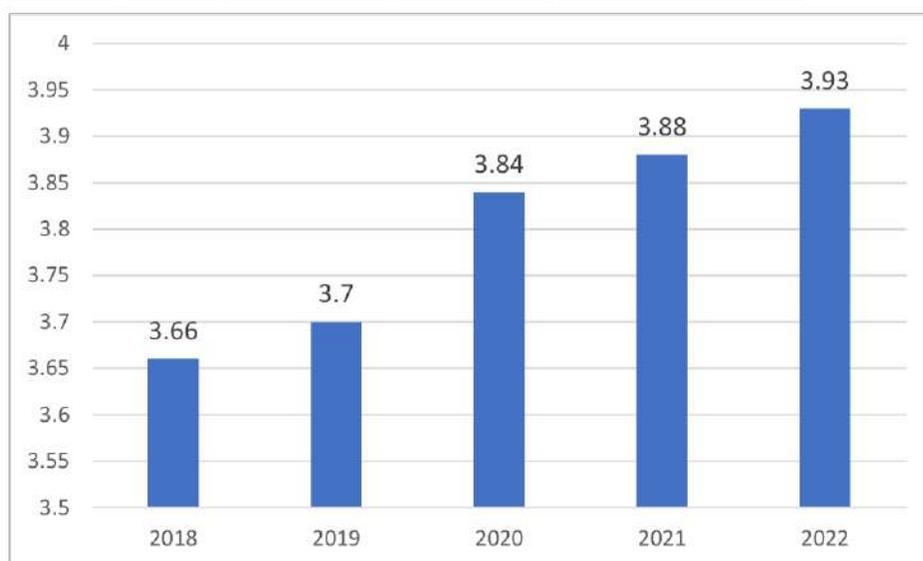


Grafik 2. 87 Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023

Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

#### 2.4.5. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Pemerintahan yang bersih dan transparan merupakan salah satu komponen penting dalam reformasi birokrasi pada tata kelola pemerintahan daerah. Untuk mengukur hal dimaksud, salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Persepsi Anti Korupsi. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh KPK RI di Kabupaten Kepulauan Selayar, Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 adalah sebesar 3,93. Capaian ini terus meningkat mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Hal ini dapat diartikan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk daerah yang cukup bersih dari korupsi, tetapi belum mencapai kriteria bersih dari korupsi. Capaian ini dapat dilihat pada **Grafik 2.88**.



Grafik 2. 88 Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2022

Sumber Data: KLHS RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045, 2024

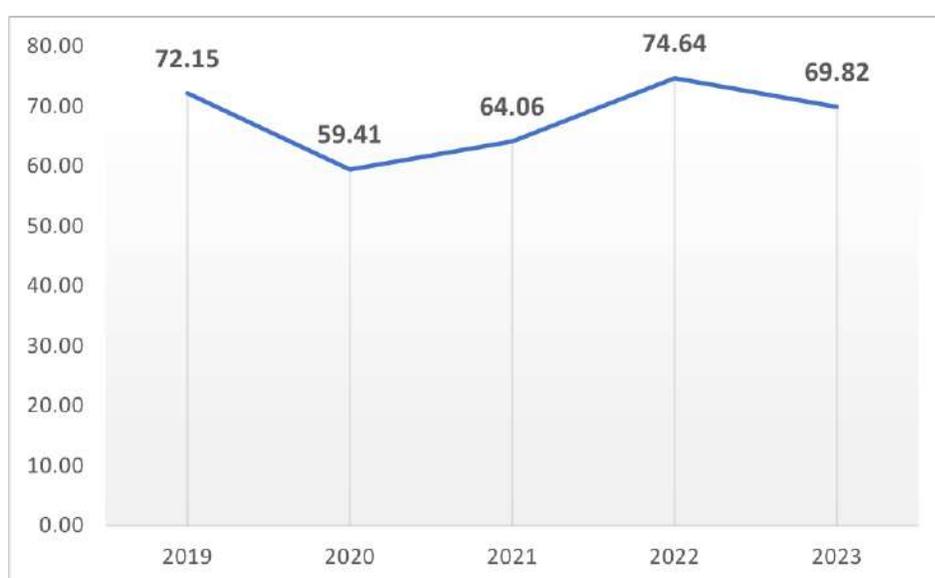
Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, maka dibutuhkan pengawasan yang kuat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penguatan pengawasan dimaksud dapat tercermin dari nilai kapabilitas APIP serta maturitas SPIP yang dimiliki oleh suatu daerah. Sesuai dengan laporan hasil Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022, kapabilitas APIP Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada pada level 2 yang berarti APIP mampu memberikan keyakinan bahwa proses audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi. Berdasarkan laporan yang sama, Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Selayar juga masih berada pada level 2 yang berarti Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun belum terdokumentasi dengan baik serta efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

#### 2.4.6. Nilai *Monitoring Center for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Korupsi masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi di Indonesia. Pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk *concern* dan komitmen tinggi KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi daerah adalah melakukan pemberantasan korupsi daerah melalui tugas koordinasi.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi. Pelaporan atas upaya pencegahan korupsi Pemerintah Daerah dilakukan melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)*. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan korupsi baik sebelum terjadi korupsi maupun setelah upaya penindakan korupsi telah dilakukan baik oleh KPK maupun APH lain.

Nilai MCP KPK Kabupaten Kepulauan Selayar selama kurun waktu 2019 sampai 2023 cenderung fluktuatif. Namun capaian nilai MCP KPK pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa, pengawasan APIP serta pengelolaan Barang Milik Daerah. Nilai MCP KPK Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.89**



Grafik 2. 89 Nilai MCP KPK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023  
Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

#### 2.4.7. Indeks Maturitas

Capaian kinerja bidang pengawasan menunjukkan hasil yang cukup baik karena dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, Kabupaten Kepulauan Selayar memperoleh 5 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan laporan keuangan daerah. Capaian WTP dari tahun 2018 sampai dengan tahun

2022 tersebut menunjukkan efektifitas pelaksanaan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dimana tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang mencapai level 3 (terdefenisi) dengan nilai 3,002 pada tahun 2022, sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.30**.

Tabel 2. 30 Indeks Matirutas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2022

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	3	3	3,007	3,002

Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

## 2.5. EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025

Selama pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2005 – 2025 telah mencapai kemajuan yang signifikan. Pencapaian kinerja RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2005-2025 sebesar **84,30** dengan predikat kinerja **Tinggi**.

Indikator makro dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Indikator makro pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita / PDRB Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan arah kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Tabel 2.31**.

Tabel 2. 31 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan	Capaian Tahun 2023	Pertumbuhan/ Penurunan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	62,15**	71,13	14,45
2	Angka Kemiskinan	22,71	12,27	45,97
3	Angka Pengangguran	12,92*	1,98	84,67
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,9	3,68	-5,64
5	Pendapatan Perkapita / PDRB Per Kapita	4.352.388	56.570.000	1199,75
6	Ketimpangan Pendapatan	0,339***	0,345	-1,77

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar, Diolah, 2023

Keterangan : \* ) Data tahun 2007

\*\* ) Data tahun 2010

\*\*\* ) Data tahun 2014

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2005-2025, beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Pengembangan serta pemanfaatan peluang Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai hub Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia, mengingat komitmen dan perhatian pemerintah saat ini dan kedepannya terhadap perkembangan perekonomian di Kawasan Timur Indonesia diprediksi akan semakin meningkat, dikuatkan dengan berpindahnya Ibukota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pengembangan industri perikanan terpadu, mengingat potensi lestari perikanan tangkap masih tersedia bagi beberapa jenis ikan dan masih banyaknya lokasi yang sesuai untuk kawasan pengembangan budidaya laut dan tambak serta pasar produk ikan dan turunannya masih terbuka luas baik pasar nasional maupun internasional sehingga sektor perikanan masih menjadi sektor andalan untuk 20 tahun ke depan.
3. Pengembangan sektor pariwisata yang inklusif dan holistik, mengingat potensi wisata bahari, alam dan budaya yang banyak dan dikenal luas, merupakan potensi dan peluang menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kawasan Khusus/Prioritas Pariwisata
4. Pengembangan dan peningkatan produktivitas kawasan pertanian dan perkebunan seperti pengembangan daerah pertanian (di Pulau Jampea) agroklimatnya mendukung, serta dukungan areal persawahan, sarana dan prasarana pertanian. Disamping itu, masih banyak komoditas khas Kabupaten Kepulauan Selayar (Jeruk Keprok) yang belum dikembangkan secara maksimal dan memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya, untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya masyarakat petani, maka hilirisasi produksi pertanian dan perkebunan menjadi sangat vital untuk dilaksanakan.
5. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur perhubungan baik itu infrastruktur laut seperti pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dan tambatan perahu maupun infrastruktur udara yaitu bandar udara serta beberapa sektor pendukung prioritas lainnya sangat perlu untuk diwujudkan mengingat potensi Selat Selayar yang merupakan pintu gerbang transportasi orang dan barang dari dan ke Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan letak geografis yang diapit oleh Alur Lintas Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III serta karakteristik daerah kepulauan (terdiri dari 130 pulau) yang memiliki laut luas dan dalam.
6. Penyediaan, peningkatan kualitas, serta pemerataan infrastruktur pendukung seperti air bersih/minum dan ketersediaan listrik untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, serta sebagai prasyarat untuk mendatangkan

investasi bagi pengembangan sektor-sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Selayar

7. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) dan UMKM lokal dan pengembangan sentra industri yang mendukung terbangunnya kawasan industri terpadu masih perlu ditingkatkan
8. Pengelolaan lingkungan hidup terutama kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim, pemanasan global yang berdampak pada produksi sektor perikanan, pertanian dan perkebunan. Pengelolaan sampah sebagai dampak pertambahan penduduk dan aktivitas masyarakat dapat meningkatnya timbulan sampah yang berdampak over kapasitas pada TPA sebagai tempat pembuangan akhir sampah.

## 2.6. TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

### 2.6.1. Tren Demografi

Kondisi umum demografi dapat diketahui dari berbagai indikator kependudukan dengan berbagai representasi yang bervariasi sesuai dengan indikator yang digunakan. Tren kondisi demografi Kabupaten Kepulauan Selayar dijabarkan dengan menggunakan beberapa jenis data antara lain jumlah penduduk, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur.

#### 2.6.1.1. Proyeksi Jumlah Penduduk

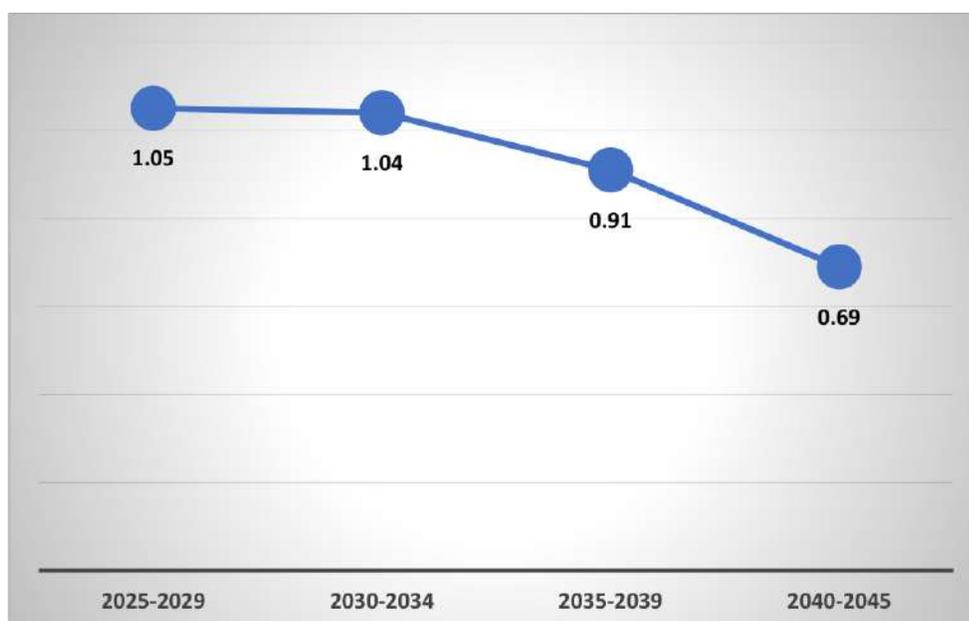
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 142.100 orang. Dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan penduduk, maka proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar mulai tahun 2025 sampai 2045 dapat dilihat pada **Tabel 2.32**

Tabel 2. 32 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar

Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
142.100	143.646	151.325	159.364	166.713	172.533

Sumber : Data diolah, 2024

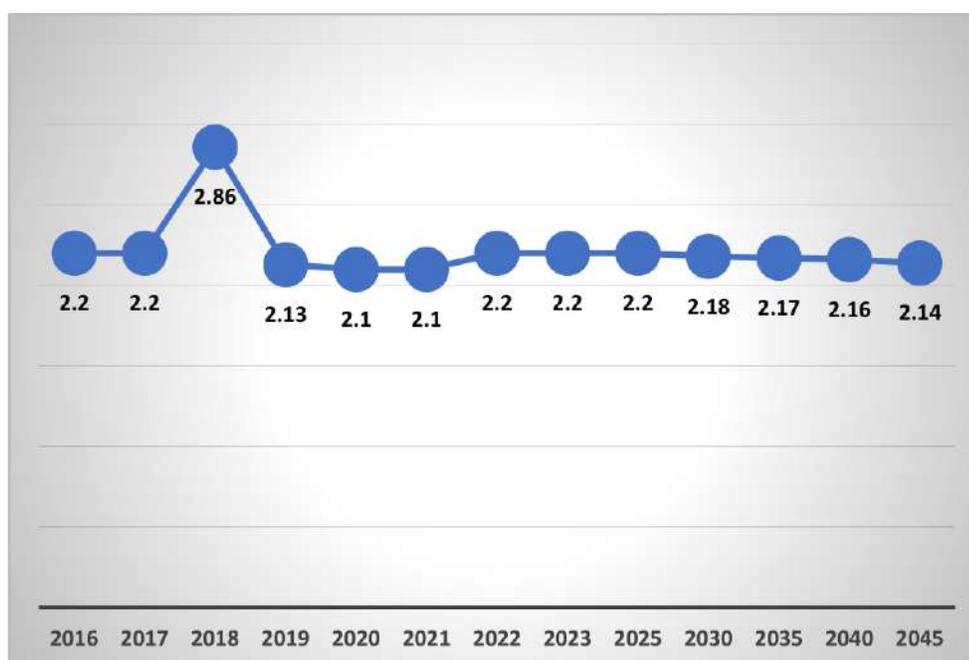
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar terus bertambah sampai tahun 2045, namun rata-rata pertumbuhan penduduk setiap periode mengalami perlambatan, sebagaimana tergambar pada **Grafik 2.90**



Grafik 2. 90 Rata-Rata Pertumbuhan Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2025-2045

Sumber Data: Data diolah, 2024

Perlambatan pertumbuhan penduduk di atas disebabkan karena capaian *Total Fertility Rate (TFR)* atau angka kelahiran total diproyeksi mengalami penurunan sampai dengan tahun 2025, sebagaimana tergambar pada **Grafik 2.91**.



Grafik 2. 91 Capaian dan Proyeksi TFR Kabupaten Kepulauan Selayar

Sumber Data: Data diolah, 2024

#### 2.6.1.2. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

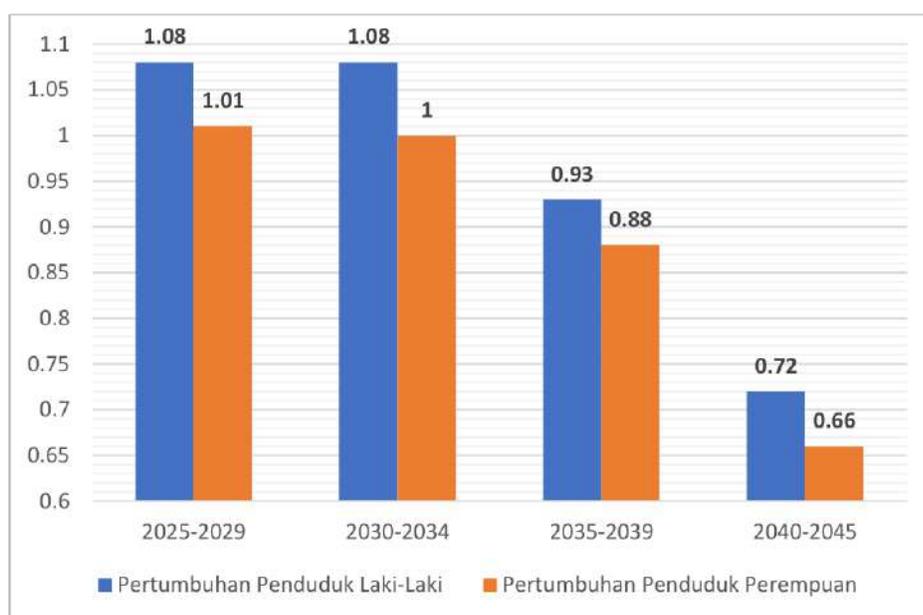
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, dari jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 142.100 orang, terdapat 69.907 orang berjenis kelamin laki-laki dan 72.193 orang berjenis kelamin perempuan. Dengan mempertimbangkan proyeksi tren *Total Fertility Rate (TFR)* Kabupaten Kepulauan Selayar sampai tahun 2045, maka proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jenis kelamin mulai tahun 2025 sampai 2045 dapat dilihat pada **Tabel 2.33**

Tabel 2. 33 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Selayar

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	69.907	70.675	74.579	78.685	82.432	85.425
Perempuan	72.193	72.972	76.746	80.679	84.280	87.108
Rasio	96,83	95,62	95,41	94,58	93,19	91,33

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rasio antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan diproyeksikan mengalami penurunan. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Proyeksi rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada **Grafik 2.92**.



Grafik 2. 92 Proyeksi Rata-rata Pertumbuhan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045

Sumber Data: Data diolah, 2024

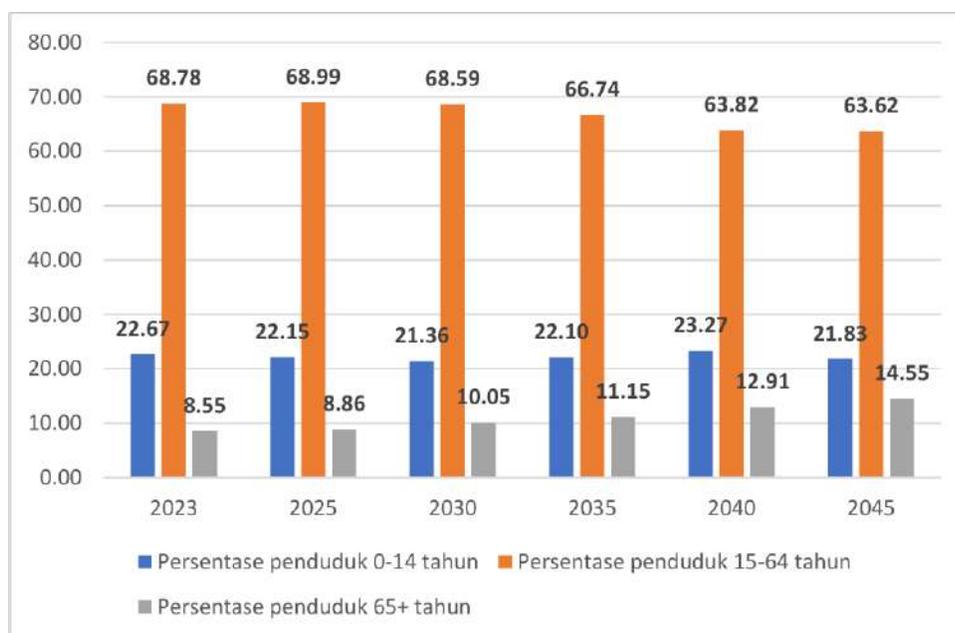
### 2.6.1.3. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan proyeksi *Total Fertility Rate (TFR)* yang telah dijelaskan sebelumnya, TFR Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami tren penurunan setiap periode dan menjadi 2,14 pada tahun 2045. Sejalan dengan menurunnya TFR, angka harapan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar terus meningkat seiring dengan peningkatan kualitas kesehatan pada tahun 2045. Perubahan angka harapan hidup akan mendorong perubahan struktur penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.34**.

Tabel 2. 34 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Kepulauan Selayar

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	32.216	31.816	32.321	35.221	38.798	37.662
15-64 Tahun	97.734	99.102	103.799	106.367	106.398	109.761
>65 Tahun	12.150	12.728	15.205	17.776	21.517	25.110
Angka Ketergantungan	45,39	44,95	45,79	49,82	56,69	57,19

Sumber : Data diolah, 2024



Grafik 2. 93 Proyeksi Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045

Sumber Data: Data diolah, 2024

Melihat **Grafik 2.93** dapat digambarkan bahwa, persentase penduduk usia 15-64 tahun terus mengalami penurunan sampai tahun 2045 seiring dengan proyeksi TFR yang terus menurun. Sebaliknya, Angka Harapan Hidup yang diproyeksikan meningkat menyebabkan tren persentase penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami peningkatan. Keadaan ini mengakibatkan rasio ketergantungan mengalami peningkatan sampai tahun 2045.

## 2.6.2. Tren Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

### 2.6.2.1. Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Peningkatan jumlah penduduk yang mengalami peningkatan tiap tahun mengakibatkan tuntutan pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan pemukiman beserta sarana dan prasarana lingkungan, serta infrastruktur yang memadai. Data pada **Tabel 2.35** menunjukkan proyeksi kebutuhan rumah / tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan proyeksi jumlah penduduk di tahun 2045 yaitu sebanyak 182.769 jiwa diproyeksikan dibutuhkan tempat tinggal/ rumah sebanyak 45.692 unit rumah tinggal.

Tabel 2. 35 Proyeksi Kebutuhan Rumah / Tempat Tinggal Kabupaten Kepulauan Selayar

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah / Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	142.100	144.779	153.375	162.543	172.329	182.769
Proyeksi Kebutuhan Rumah	n/a	36.195	38.344	40.636	43.082	45.692

Sumber : Data diolah, 2024

#### 2.6.2.2. Kebutuhan Air Bersih/Air Minum

Sistem sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memenuhi kebutuhan air menggunakan sistem perpipaan dengan perangkat penjernihan serta sistem non perpipaan. Proyeksi kebutuhan air penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar hingga tahun 2045 dapat dilihat pada **Tabel 2.36**.

Tabel 2. 36 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Kepulauan Selayar

Uraian	Kondisi Tahun 2022			Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Unit)														
				2025			2030			2035			2040			2045		
	Total	Perdes aan	Perkot aan	Total	Perdes aan	Perkot aan	Total	Perdes aan	Perkot aan	Total	Perdes aan	Perkot aan	Total	Perdes aan	Perkot aan	Total	Perdes aan	Perkot aan
Jumlah Penduduk	142.100			144.779	117.972	26.807	153.375	124.452	28.923	162.543	131.338	31.205	172.329	138.661	33.668	182.769	146.444	36.325
Kebutuhan air (M <sup>3</sup> /hari/kapita) (BSNI, 2002)		21,9	43,8		21,9	43,8		21,9	43,8		21,9	43,8		21,9	43,8		21,9	43,8
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (M <sup>3</sup> /hari/kapita)				3.757.733	2.583.587	1.174.147	3.992.326	2.725.499	1.266.827	4.243.081	2.876.302	1.366.779	4.511.334	3.036.676	1.474.658	4.798.159	3.207.124	1.591.035

Sumber : Data diolah, 2024

### 2.6.2.3. Kebutuhan Energi dan Kelistrikan

Berdasarkan data yang ada, layanan listrik yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Selayar dialiri listrik PLN dan non-PLN. Dari 11 kecamatan, masih terdapat 3 kecamatan yang belum mendapatkan layanan listrik PLN secara menyeluruh, yaitu : Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Taka Bonerate. Di kecamatan-kecamatan yang belum terjangkau oleh layanan listrik PLN, masyarakat menggunakan generator atau tenaga surya. Penggunaan generator atau tenaga surya diusahakan secara swadaya oleh masyarakat, koperasi dan juga perorangan. Rasio elektrifikasi pada Tahun 2022 baru mencapai 96,37 persen. Proyeksi kebutuhan listrik Kabupaten Kepulauan Selayar sampai pada tahun 2045 dapat dilihat pada **Tabel 2.37**.

Tabel 2. 37 Proyeksi Kebutuhan Energi / Listrik Kabupaten Kepulauan Selayar

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	142.100	144.779	153.375	162.543	172.329	182.769
Jumlah Rumah	n/a	36.195	38.344	40.636	43.082	45.692
Proyeksi Kebutuhan Listrik (kwh) (1.172 kwh per kapita)	40.083.599	169.680.988	179.755.500	190.500.396	201.969.588	214.205.268

Sumber : Data diolah, 2024

### 2.6.2.4. Kebutuhan Sarana Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan masih terbatas di Kota Benteng. Dengan bertambahnya jumlah penduduk berdampak pada bertambahnya timbulan sampah yang dihasilkan rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Selayar. Proyeksi timbulan sampah dan kebutuhan tempat pengolahan sampah untuk mengurangi timbulan sampah sampai pada tahun 2045 dapat dilihat pada **Tabel 2.38**.

Tabel 2. 38 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kepulauan Selayar

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah (ton)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	142.100	144.779	153.375	162.543	172.329	182.769
Proyeksi Timbulan Sampah (ton)	n.a	112.280,74	117.197,94	122.372,32	127.818,36	133.551,66
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	1	3	7	10	11	11

Sumber : Data diolah, 2024

### 2.6.2.5. Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan terdiri dari Rumah Sakit (RS), puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu. Rumah Sakit K.H Hayyung yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar masih berstatus tipe C yang didukung sebanyak 16 puskesmas. Kebutuhan fasilitas kesehatan sampai pada tahun 2045 dapat dilihat pada **Tabel 2.39**.

Tabel 2. 39 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	142.100	144.779	153.375	162.543	172.329	182.769
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
- Rumah Sakit	2	3	3	3	4	4
- Puskesmas	15	15	16	17	18	19

Sumber : Data diolah, 2024

### 2.6.2.6. Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Pencapaian hasil pembangunan di bidang pendidikan merupakan gambaran komitmen pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dapat digambarkan bahwa jumlah fasilitas pendidikan yang telah dibangun pemerintah sampai pada tahun 2023 dengan rincian jumlah TK/RA sebanyak 162 unit, jumlah SD / MI sebanyak 155 unit, jumlah SMP / MTs sebanyak 65 unit dan jumlah SMA/MA/ SMK sebanyak 20 unit. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat pada **Tabel 2.40**.

Tabel 2. 40 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	142.100	144.779	153.375	162.543	172.329	182.769
Proyeksi Fasilitas Pendidikan (sekolah)						
- TK / RA	162	169	179	190	201	214
- SD / MI	155	156	157	158	159	161
- SMP / MTs	65	65	67	68	69	71
- SMA / MA / SMK	20	22	25	27	29	32

Sumber : Data diolah, 2024

## 2.7. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Kondisi kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat digambarkan dengan kondisi penduduk dan ketersediaan infrastrukturnya. Pada tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki jumlah penduduk 142.100 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan. Hasil proyeksi tahun 2045 jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar akan mencapai 182.769 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk akan terus meningkat yang membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan kebutuhan dasar di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pembangunan wilayah, ketersediaan infrastruktur (konektivitas, energi dan sarana prasarana dasar) menjadi faktor pendorong yang penting dan memerlukan fokus pembangunan dan kekuatan fiskal daerah. Dengan pertimbangan letak geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Peta Indonesia, yang berada di tengah-tengah Bentang Timur dan Barat Indonesia, diperkuat dengan posisi wilayah perairan laut yang diapit oleh dua Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III sebagai alur penting dan strategis bagi pelayaran nusantara dan mancanegara, sehingga perairan Selat Selayar sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai pusat distribusi barang dan jasa serta hasil perikanan di Kawasan Timur Indonesia.

Disamping itu, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki panjang garis pantai sekitar 670 km dengan jumlah pulau kecil sebanyak 130 pulau yang tentunya memerlukan kolaborasi pendanaan dalam hal penyediaan infrastruktur dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Penyediaan infrastruktur dan pembangunan ekonomi pada beberapa lokasi telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012- 2032, antara lain (1) Kota Benteng ditetapkan sebagai kota Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar; (2) Kota Pamatata ditetapkan sebagai kota Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai kawasan perdagangan skala sedang, yaitu kawasan terpadu pelabuhan, peti kemas dan perdagangan di Pamatata yang direncanakan sebagai pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia; (3) PKLp Kayuadi; (4) PKLp Bonerate; (5) PPK Pariangan; (6) PPK Matalalang; (7) PPK Polebungin; (8) PPK Buki; (9) PPK Benteng Jampea; (10) PPK Latokdok; (11) PPL Appatanah; (12) PPL Pattumbukang; (13) PPL Jammeng; (14) PPL Padang; (15) PPL Barugaiya; (16) PPL Onto; (17) PPL Jinato; (18) PPL Tambuna; (19) PPL Rajuni; (20) PPL Karumpa; dan (21) PPL Pulo Madu. Melihat peruntukan ruang yang termuat dalam Peraturan Daerah dimaksud dapat dilihat pula pembangunan kawasan sebagai berikut:

### **2.7.1. Pembangunan Kawasan Bontomatene**

Sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, maka kebijakan pengembangan kawasan Bontomatene diprioritaskan pada pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan dukungan Pelabuhan pengumpan, terminal barang; Mendukung ketersediaan energi listrik dengan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan energi listrik terbarukan; Peruntukan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi; peruntukan industri besar dan industri rumah tangga dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar

terhadap Provinsi Sulawesi Selatan. Penyediaan air minum melalui sistem jaringan sumber daya air dan air baku dan menjaga ketersediaan air melalui peruntukan kawasan resapan air. Kawasan peruntukan komoditas unggulan khususnya pertanian dan peternakan serta sebagai kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan khususnya komoditas jambu mede, kakao dan kenari untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat. Untuk mendukung fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan kawasan peruntukan hutan rakyat, pelestarian alam dan cagar budaya berupa kawasan pantai berhutan bakau serta Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Daerah Pelestarian Laut (DPL). Selain itu dalam rangka peningkatan pemenuhan pelayanan dasar diprioritaskan pada pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi serta pengembangan destinasi pariwisata sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan DPP Baru Selayar-Makassar-Toraja yang didukung oleh penguatan dan pengembangan kewirausahaan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Memperhatikan capaian peruntukan ruang di Kecamatan Bontomatene, maka dapat dilihat jumlah Pelabuhan penyeberangan dan Pelabuhan pengumpan sebanyak 2 buah; Sebagian besar desa di Kecamatan Bontomatene sudah dialiri listrik dengan mayoritas listrik PLN dan 1 desa dengan listrik non PLN; Sebagian besar sumber air minum keluarga di 4 desa/kelurahan adalah air isi ulang, 3 desa/kelurahan adalah air sumur bor/pompa, 3 desa/kelurahan adalah air sumur, 1 desa adalah mata air dan 1 desa lainnya adalah air embung/bendungan/sungai; Komoditas unggulan perikanan tangkap dengan produksi 1.728,35 ton. Sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) untuk pengembangan budidaya alternatif perkebunan dengan komoditi unggulan jambu mede dengan produksi 670,94 ton, kakao 11,02 ton dan kenari 29,24 ton. Untuk mendukung Kepulauan Selayar sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan DPP Baru Selayar-Makassar-Toraja terdapat 22 objek wisata andalan.

Memenuhi pelayanan dasar telah dibangun sarana kesehatan berupa 2 puskesmas dan 8 puskesmas pembantu dengan ketersediaan tenaga kesehatan sebagai berikut: 54 Perawat, 75 Bidan, 7 Tenaga Farmasi dan 5 Ahli Gizi. Persentase kelahiran hidup di Kecamatan Bontomatene sebesar 99,60 persen (bayi hidup : 247 bayi dan bayi meninggal : 1 bayi) dan persentase persalinan yang dilakukan tenaga kesehatan sebesar 100 persen. Pelayanan dasar pendidikan telah dibangun 16 PAUD, 4 RA (Raudhatul Athfal), 17 SD, 6 SMP, 1 SMA, dan 1 SMK, dengan rasio guru terhadap murid sebagai berikut: PAUD 1 : 4, Sekolah Dasar 1 : 5 dan Sekolah Menengah Pertama 1 : 5.

### **2.7.2. Pembangunan Kawasan Buki**

Sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, maka kebijakan pengembangan kawasan Buki diprioritaskan pada pengembangan pertambangan mineral logam dan industri rumah tangga. Penyediaan air minum melalui sistem jaringan sumber daya air dan air baku. Kawasan peruntukan komoditas unggulan khususnya pertanian, peternakan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya dengan komoditas rumput laut serta sebagai kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan khususnya komoditas jambu mede, kakao dan kenari untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat. Untuk mendukung fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan kawasan peruntukan hutan rakyat, pelestarian alam dan cagar budaya berupa kawasan pantai berhutan bakau, Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Daerah Pelestarian Laut (DPL). Selain itu dalam rangka peningkatan pemenuhan pelayanan dasar diprioritaskan pada pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi.

Memperhatikan capaian peruntukan ruang di Kecamatan Buki, maka dapat dilihat seluruh desa di Kecamatan Buki sudah dialiri listrik dengan mayoritas listrik PLN; Sebagian besar sumber air minum keluarga di 4 desa adalah air isi ulang dan 3 desa lainnya adalah air sumur; Komoditas unggulan perikanan tangkap dengan produksi 846,79 ton. Sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) untuk pengembangan budidaya alternatif perkebunan dengan komoditi unggulan jambu mede dengan produksi 174,85 ton, kakao 5,20 ton dan kenari 78,81 ton. Untuk mendukung Kepulauan Selayar sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan DPP Baru Selayar-Makassar-Toraja terdapat 4 (empat) objek wisata andalan.

Memenuhi pelayanan dasar telah dibangun sarana kesehatan berupa 1 puskesmas dan 5 puskesmas pembantu dengan ketersediaan tenaga kesehatan sebagai berikut: 21 Perawat, 52 Bidan, 3 Tenaga Farmasi dan 1 Ahli Gizi. Dengan persentase kelahiran hidup di Kecamatan Buki sebesar 98,32 persen (bayi hidup: 117 bayi dan bayi meninggal : 2 bayi) dan persentase persalinan yang dilakukan tenaga kesehatan sebesar 100 persen. Pelayanan dasar pendidikan telah dibangun 18 PAUD, 2 RA (Raudhatul Athfal), 10 SD, 4 MI (Madrasah Ibtidaiyah), 3 SMP, 2 MTS (Madrasah Tsanawiyah), dan 1 SMA, dengan rasio guru terhadap murid sebagai berikut: PAUD 1 : 5, Sekolah Dasar 1 : 4 dan Sekolah Menengah Pertama 1 : 3.

### **2.7.3. Pembangunan Kawasan Bontomanai**

Sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, maka kebijakan pengembangan kawasan Bontomanai sebagai kawasan strategis dengan sudut lingkungan hidup diprioritaskan pada pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) untuk mendukung ketersediaan energi

listrik; peruntukan kawasan pertambangan komoditas bukan logam dan batuan; peruntukan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan dan industri rumah tangga. Penyediaan air minum melalui sistem jaringan sumber daya air dan air baku serta untuk menjaga ketersediaan air melalui peruntukan kawasan resapan air. Kawasan peruntukan komoditas unggulan khususnya pertanian, peternakan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya komoditas rumput laut serta sebagai kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan khususnya komoditas jambu mede, kakao dan kenari untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat. Untuk mendukung fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan hutan bakau, serta Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Daerah Pelestarian Laut (DPL). Selain itu dalam rangka peningkatan pemenuhan pelayanan dasar diprioritaskan pada pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi serta pengembangan destinasi pariwisata sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan DPP Baru Selayar-Makassar-Toraja yang didukung oleh penguatan kewirausahaan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Memperhatikan capaian peruntukan ruang di Kecamatan Bontomanai, maka dapat dilihat seluruh desa di Kecamatan Bontomanai sudah dialiri listrik berasal dari listrik PLN; Sebagian besar sumber air minum keluarga di 7 desa adalah air isi ulang, 1 desa adalah leding dengan meteran dan 2 desa lainnya adalah mata air; Komoditas unggulan perikanan tangkap dengan produksi 628,08 ton. Sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) untuk pengembangan budidaya alternatif perkebunan dengan komoditi unggulan jambu mede dengan produksi 165,95 ton, kakao 12,43 ton dan kenari 124,36 ton. Untuk mendukung Kepulauan Selayar sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan DPP Baru Selayar-Makassar-Toraja terdapat 19 objek wisata andalan.

Memenuhi pelayanan dasar telah dibangun sarana kesehatan berupa 2 puskesmas dan 8 puskesmas pembantu dengan ketersediaan tenaga kesehatan sebagai berikut: 68 Perawat, 86 Bidan, 4 Tenaga Farmasi dan 4 Ahli Gizi. Persentase kelahiran hidup di Kecamatan Bontomanai sebesar 100 persen (bayi hidup : 246 bayi dan bayi meninggal : 0 bayi) dan persentase persalinan yang dilakukan tenaga kesehatan sebesar 100 persen. Pelayanan dasar pendidikan telah dibangun 20 PAUD, 1 RA (Raudhatul Athfal), 19 SD, 3 MI (Madrasah Ibtidaiyah), 5 SMP, 3 MTS (Madrasah Tsanawiyah), 1 SMA, dan 1 SMK, dengan rasio guru terhadap murid sebagai berikut: PAUD 1 : 5, Sekolah Dasar 1 : 5 dan Sekolah Menengah Pertama 1 : 4.

#### **2.7.4. Pembangunan Kawasan Benteng**

Sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, maka kebijakan pengembangan kawasan Benteng sebagai pusat pelayanan daerah dan perkotaan utama serta kawasan strategis cepat tumbuh, diprioritaskan pada peningkatan konektivitas wilayah dengan pengembangan pelabuhan pengumpul; Mendukung ketersediaan energi listrik dengan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); Pengembangan kawasan pertambangan komoditas batuan; Pengembangan pelabuhan pendaratan ikan, terminal barang dan terminal penumpang tipe B; serta pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan dan industri rumah tangga. Penyediaan air minum melalui sistem jaringan sumber daya air dan air baku. Peruntukan kawasan komoditas unggulan khususnya pertanian dan peternakan serta kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan khususnya komoditas kakao untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat. Untuk mendukung fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya berupa kawasan pantai berhutan bakau. Selain itu dalam rangka peningkatan pemenuhan pelayanan dasar diprioritaskan pada pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi serta pengembangan kawasan pariwisata terpadu sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan DPP Baru Selayar-Makassar-Toraja yang didukung oleh penguatan kewirausahaan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif..

Memperhatikan capaian peruntukan ruang di Kecamatan Benteng, maka dapat dilihat jumlah pelabuhan pengumpul sebanyak 2 buah; Seluruh kelurahan di Kecamatan Benteng sudah dialiri listrik yang berasal dari listrik PLN; Sebagian besar sumber air minum keluarga di 3 kelurahan adalah air isi ulang; Komoditas unggulan perikanan tangkap dengan produksi 163,54 ton. Untuk mendukung Kepulauan Selayar sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan DPP Baru Selayar-Makassar-Toraja terdapat 4 (empat) objek wisata andalan.

Memenuhi pelayanan dasar telah dibangun sarana kesehatan berupa 1 puskesmas dan 1 puskesmas pembantu dengan ketersediaan tenaga kesehatan sebagai berikut: 37 Perawat, 43 Bidan, 5 Tenaga Farmasi dan 5 Ahli Gizi. Persentase kelahiran hidup di Kecamatan Benteng sebesar 99,23 persen (bayi hidup : 516 bayi dan bayi meninggal : 4 bayi) dan persentase persalinan yang dilakukan tenaga kesehatan sebesar 100 persen. Pelayanan dasar pendidikan telah dibangun 12 PAUD, 3 RA (Raudhatul Athfal), 10 SD, 2 MI (Madrasah Ibtidaiyah), 5 SMP, 2 MTS (Madrasah Tsanawiyah), 2 SMA, 3 SMK dan 1 MA (Madrasah Aliyah), dengan rasio guru terhadap murid sebagai berikut: PAUD 1 : 8, Sekolah Dasar 1 : 10 dan Sekolah Menengah Pertama 1 : 9.

### **2.7.5. Pembangunan Kawasan Bontoharu**

Sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, maka kebijakan pengembangan kawasan Bontoharu sebagai kawasan budidaya ikan karang dan kawasan pariwisata terpadu serta kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan lingkungan hidup, diprioritaskan pada pengembangan kawasan pengolahan hasil pertanian dan perikanan; Pengembangan bandar udara umum H. Aroepala sebagai bandar udara pengumpan; Peruntukan kawasan pertambangan dengan komoditas mineral logam, bukan logam, dan batuan, serta peruntukan kawasan industri rumah tangga. Penyediaan air minum melalui sistem jaringan sumber daya air dan air baku, serta untuk menjaga ketersediaan air ditetapkan sebagai kawasan resapan air. Kawasan peruntukan komoditas unggulan khususnya pertanian, peternakan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya air payau dengan komoditas udang dan bandeng, budidaya air laut dengan komoditi rumput laut serta sebagai kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan khususnya komoditas jambu mente, kakao dan kenari untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat. Untuk mendukung fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya berupa kawasan pantai berhutan bakau, serta Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Daerah Pelestarian Laut (DPL). Selain itu dalam rangka peningkatan pemenuhan pelayanan dasar diprioritaskan pada pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi serta pengembangan destinasi pariwisata sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan DPP Baru Selayar-Makassar-Toraja yang didukung oleh penguatan kewirausahaan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Memperhatikan capaian peruntukan ruang di Kecamatan Bontoharu, maka dapat dilihat seluruh desa di Kecamatan Bontoharu sudah dialiri listrik mayoritas listrik PLN; Sebagian besar sumber air minum keluarga di 6 desa adalah air isi ulang, 1 desa adalah air sumur dan 1 desa lainnya adalah mata air; Komoditas unggulan perikanan tangkap dengan produksi 3.562,86 ton, perikanan budidaya dengan komoditi unggulan udang windu dengan produksi 0,89 ton, udang vaname dengan produksi 32,18 ton, dan bandeng dengan produksi 15,48 ton. Sebagai Kawasan Strategis Provinsi untuk pengembangan budidaya alternatif perkebunan dengan komoditi unggulan jambu mede dengan produksi 131,32 ton, kakao 4,47 ton dan kenari 16,11 ton. Untuk mendukung Kepulauan Selayar sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan DPP Baru Selayar-Makassar-Toraja terdapat 22 objek wisata andalan.

Memenuhi pelayanan dasar telah dibangun sarana kesehatan berupa 1 rumah sakit, 2 puskesmas dan 7 puskesmas pembantu dengan ketersediaan

tenaga kesehatan sebagai berikut: 242 Perawat, 119 Bidan, 30 Tenaga Farmasi dan 12 Ahli Gizi. Persentase kelahiran hidup di Kecamatan Bontoharu sebesar 99,07 persen (bayi hidup : 212 bayi dan bayi meninggal : 2 bayi) dan persentase persalinan yang dilakukan tenaga kesehatan sebesar 99,35 persen. Pelayanan dasar pendidikan telah dibangun 12 PAUD, 5 RA (Raudhatul Athfal), 13 SD, 3 MI (Madrasah Ibtidaiyah), 4 SMP, 2 MTS (Madrasah Tsanawiyah), dan 2 SMA, dengan rasio guru terhadap murid sebagai berikut: PAUD 1 : 6, Sekolah Dasar 1 : 5 dan Sekolah Menengah Pertama 1 : 6.

#### **2.7.6. Pembangunan Kawasan Bontosikuyu**

Sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, maka kebijakan pengembangan kawasan Bontosikuyu yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas wilayah dengan pengembangan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pengumpan; Mendukung ketersediaan energi listrik dengan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan energi listrik terbarukan; Peruntukan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dan pertambangan komoditas logam, bukan logam dan batuan; Pembangunan terminal penumpang tipe C; serta pengembangan industri rumah tangga. Penyediaan air minum melalui sistem jaringan sumber daya air dan air baku. Kawasan peruntukan komoditas unggulan khususnya pertanian, peternakan, perikanan tangkap, perikanan budidaya air payau dengan komoditas udang dan bandeng, perikanan budidaya air laut dengan komoditas rumput laut serta sebagai kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan khususnya komoditas jambu mede, kakao dan kenari untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat. Untuk mendukung fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya berupa kawasan pantai berhutan bakau, serta Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Daerah Pelestarian Laut (DPL). Selain itu dalam rangka peningkatan pemenuhan pelayanan dasar diprioritaskan pada pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi serta pengembangan destinasi pariwisata sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan DPP Baru Selayar-Makassar-Toraja yang didukung oleh penguatan kewirausahaan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Memperhatikan capaian peruntukan ruang di Kecamatan Bontosikuyu, maka dapat dilihat jumlah pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pengumpan sebanyak 1 buah; Sebagian besar desa di Kecamatan Bontosikuyu sudah dialiri listrik dengan mayoritas listrik PLN dan 3 desa masih menggunakan listrik non PLN; Sebagian besar sumber air minum keluarga di 8 desa adalah air isi ulang, 2 desa adalah sumur dan 2 desa lainnya adalah mata

air; Komoditas unggulan perikanan tangkap dengan produksi 3.775,19 ton, perikanan budidaya dengan komoditi unggulan udang windu dengan produksi 0,24 ton, udang vaname dengan produksi 11,56 ton, bandeng dengan produksi 2,23 ton, dan rumput laut dengan produksi 0,90 ton. Sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) untuk pengembangan budidaya alternatif perkebunan dengan komoditi unggulan jambu mede dengan produksi 290,00 ton, kakao 6,79 ton dan kenari 2.010,53 ton. Untuk mendukung Kepulauan Selayar sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan DPP Baru Selayar-Makassar-Toraja terdapat 41 objek wisata andalan. Dalam memenuhi pelayanan dasar telah dibangun sarana kesehatan berupa 2 puskesmas dan 11 puskesmas pembantu dengan ketersediaan tenaga kesehatan sebagai berikut: 50 Perawat, 77 Bidan, 5 Tenaga Farmasi dan 3 Ahli Gizi. Persentase kelahiran hidup di Kecamatan Bontosikuyu sebesar 99,65 persen (bayi hidup : 286 bayi dan bayi meninggal : 1 bayi) dan persentase persalinan yang dilakukan tenaga kesehatan sebesar 99,51 persen. Pelayanan dasar pendidikan telah dibangun 20 PAUD, 6 RA (Raudhatul Athfal), 20 SD, 2 MI (Madrasah Ibtidaiyah), 7 SMP, 1 MTS (Madrasah Tsanawiyah), 1 SMA dan 1 SMK, dengan rasio guru terhadap murid sebagai berikut: PAUD 1 : 7, Sekolah Dasar 1 : 7 dan Sekolah Menengah Pertama 1 : 5.

#### **2.7.7. Pembangunan Kawasan Taka Bonerate**

Sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, maka kebijakan pengembangan kawasan Taka Bonerate sebagai kawasan wisata bahari, kawasan budidaya ikan karang, kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan lingkungan hidup, diprioritaskan pada peningkatan konektivitas wilayah dengan pengembangan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pengumpan; Mendukung ketersediaan energi listrik dengan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan energi listrik terbarukan; Peruntukan kawasan pertambangan mineral logam dan industri rumah tangga; Kawasan peruntukan komoditas unggulan khususnya pertanian, peternakan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya air laut dengan komoditas rumput laut serta sebagai kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan khususnya komoditas jambu mede untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat. Untuk mendukung fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya berupa kawasan taman nasional dan kawasan pantai berhutan bakau, serta Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Daerah Pelestarian Laut (DPL). Selain itu dalam rangka peningkatan pemenuhan pelayanan dasar diprioritaskan pada pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi serta pengembangan destinasi pariwisata sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan DPP Baru

Selayar-Makassar-Toraja yang didukung oleh penguatan kewirausahaan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Memperhatikan capaian peruntukan ruang di Kecamatan Taka Bonerate, maka dapat dilihat jumlah pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pengumpan sebanyak 4 buah; seluruh desa di Kecamatan Taka Bonerate dialiri mayoritas listrik non PLN; Sebagian besar sumber air minum keluarga di 4 desa adalah air isi ulang dan 5 desa lainnya adalah embung/sungai; Komoditas unggulan perikanan tangkap dengan produksi 5.705,43 ton. Sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) untuk pengembangan budidaya alternatif perkebunan dengan komoditi unggulan jambu mede dengan produksi 16,12 ton. Untuk mendukung Kepulauan Selayar sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan DPP Baru Selayar-Makassar-Toraja terdapat 6 (enam) objek wisata andalan.

Memenuhi pelayanan dasar telah dibangun sarana kesehatan berupa 2 puskesmas dan 6 puskesmas pembantu dengan ketersediaan tenaga kesehatan sebagai berikut: 24 Perawat, 49 Bidan, 4 Tenaga Farmasi dan 1 Ahli Gizi. Persentase kelahiran hidup di Kecamatan Taka Bonerate sebesar 98,60 persen (bayi hidup : 282 bayi dan bayi meninggal : 4 bayi) dan persentase persalinan yang dilakukan tenaga kesehatan sebesar 90,58 persen. Pelayanan dasar pendidikan telah dibangun 10 PAUD, 13 SD, 7 SMP, dan 1 SMA, dengan rasio guru terhadap murid sebagai berikut: PAUD 1 : 12, Sekolah Dasar 1 : 10 dan Sekolah Menengah Pertama 1 : 5.

#### **2.7.8. Pembangunan Kawasan Pasimasunggu**

Sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, maka kebijakan pengembangan kawasan Pasimasunggu sebagai sentra kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan lingkungan hidup diprioritaskan pada peningkatan konektivitas wilayah dengan pengembangan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pengumpan; Mendukung ketersediaan energi listrik dengan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan energi listrik terbarukan; Peruntukan kawasan pertambangan mineral logam dan bukan logam. Penyediaan air minum melalui sistem jaringan sumber daya air dan air baku. Kawasan peruntukan komoditas unggulan khususnya pertanian, peternakan, perikanan tangkap perikanan budidaya air payau dengan komoditas udang dan bandeng, perikanan budidaya air laut dengan komoditas rumput laut serta sebagai kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan khususnya komoditas jambu mede dan kakao untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat. Untuk mendukung fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya berupa kawasan pantai berhutan bakau, serta Kawasan

Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Daerah Pelestarian Laut (DPL). Selain itu dalam rangka peningkatan pemenuhan pelayanan dasar diprioritaskan pada pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi serta pengembangan destinasi pariwisata sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata nasional (KSPN) dan DPP Baru Selayar-Makassar-Toraja yang didukung oleh penguatan kewirausahaan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Memperhatikan capaian peruntukan ruang di Kecamatan Pasimasunggu, maka dapat dilihat jumlah pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pengumpan sebanyak 1 buah; Seluruh desa di Kecamatan Pasimasunggu sudah dialiri listrik mayoritas PLN; Sebagian besar sumber air minum keluarga di 7 desa adalah air sumur; Komoditas unggulan perikanan tangkap dengan produksi 1.927,43 ton, perikanan budidaya dengan komoditi unggulan udang windu dengan produksi 0,26 ton, udang vaname dengan produksi 2,19 ton, bandeng dengan produksi 3,17 ton, dan rumput laut dengan produksi 1,29 ton. Sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) untuk pengembangan budidaya alternatif perkebunan dengan komoditi unggulan jambu mede dengan produksi 268,85 ton, kakao 70,15 ton. Untuk mendukung Kepulauan Selayar sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan DPP Baru Selayar-Makassar-Toraja terdapat 8 (delapan) objek wisata andalan. Dalam memenuhi pelayanan dasar telah dibangun sarana kesehatan berupa 1 puskesmas dan 5 puskesmas pembantu dengan ketersediaan tenaga kesehatan sebagai berikut: 25 Perawat, 42 Bidan, 4 Tenaga Farmasi dan 1 Ahli Gizi. Persentase kelahiran hidup di Kecamatan Pasimasunggu sebesar 98,18 persen (bayi hidup : 162 bayi dan bayi meninggal : 3 bayi), dan persentase persalinan yang dilakukan tenaga kesehatan sebesar 96,46 persen. Pelayanan dasar pendidikan telah dibangun 10 PAUD, 10 SD, 5 SMP, dan 1 SMK, dengan rasio guru terhadap murid sebagai berikut: PAUD 1 : 8, Sekolah Dasar 1 : 7 dan Sekolah Menengah Pertama 1 : 7.

#### **2.7.9. Pembangunan Kawasan Pasimasunggu Timur**

Sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, maka kebijakan pengembangan kawasan Pasimasunggu Timur sebagai sentra kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diprioritaskan pada peningkatan konektivitas wilayah dengan pengembangan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pengumpan; Mendukung ketersediaan energi listrik dengan pengembangan energi listrik terbarukan; Peruntukan kawasan pertambangan mineral logam dan bukan logam; Penyediaan air minum melalui sistem jaringan sumber daya air dan air baku; Kawasan peruntukan komoditas unggulan khususnya pertanian, peternakan, perikanan tangkap, perikanan budidaya air payau dengan komoditas udang dan bandeng, perikanan budidaya air laut dengan komoditas rumput laut serta sebagai kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan khususnya komoditas

jambu mede dan kakao untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat. Untuk mendukung fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan hutan lindung, serta Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Daerah Pelestarian Laut (DPL). Selain itu dalam rangka peningkatan pemenuhan pelayanan dasar diprioritaskan pada pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi

Memperhatikan capaian peruntukan ruang di Kecamatan Pasimasunggu Timur, maka dapat dilihat jumlah pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pengumpan sebanyak 1 buah; seluruh desa di Kecamatan Pasimasunggu Timur sudah dialiri listrik dengan mayoritas PLN; Sebagian besar sumber air minum keluarga di 4 desa adalah air isi ulang dan 2 desa lainnya adalah sumur; Komoditas unggulan perikanan tangkap dengan produksi 842,63 ton, perikanan budidaya dengan komoditi unggulan udang windu dengan produksi 4,52 ton, udang vaname dengan produksi 2,31 ton, dan bandeng dengan produksi 15,12 ton. Sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) untuk pengembangan budidaya alternatif perkebunan dengan komoditi unggulan jambu mede dengan produksi 229,10 ton dan kakao 50,01 ton. Dalam memenuhi pelayanan dasar telah dibangun sarana kesehatan berupa 1 rumah sakit, 1 puskesmas dan 5 puskesmas pembantu dengan ketersediaan tenaga kesehatan sebagai berikut: 67 Perawat, 60 Bidan, 6 Tenaga Farmasi dan 3 Ahli Gizi. Persentase kelahiran hidup di Kecamatan Pasimasunggu Timur sebesar 99,33 persen (bayi hidup : 149 bayi dan bayi meninggal : 1 bayi) dan persentase persalinan yang dilakukan tenaga kesehatan sebesar 100 persen. Pelayanan dasar pendidikan telah dibangun 10 PAUD, 9 SD, 4 SMP, 1 MTS, dan 1 SMA, dengan rasio guru terhadap murid sebagai berikut: PAUD 1 : 7, Sekolah Dasar 1 : 7 dan Sekolah Menengah Pertama 1 : 5.

#### **2.7.10. Pembangunan Kawasan Pasimarannu**

Sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, maka kebijakan pengembangan kawasan Pasimarannu sebagai kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan lingkungan hidup yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas wilayah dengan pengembangan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pengumpan; Mendukung ketersediaan energi listrik dengan pengembangan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) dan energi listrik terbarukan; Peruntukan kawasan pertambangan mineral logam dan bukan logam dan peruntukan industri pembuatan kapal serta industri rumah tangga; Penyediaan air minum melalui sistem jaringan sumber daya air dan air baku; Kawasan peruntukan komoditas unggulan khususnya pertanian, peternakan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya air laut dengan komoditi rumput laut serta sebagai kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan khususnya komoditas

jambu mede dan kakao untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat. Untuk mendukung fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya berupa kawasan pantai berhutan bakau, hutan produksi terbatas, serta Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Daerah Pelestarian Laut (DPL). Selain itu dalam rangka peningkatan pemenuhan pelayanan dasar diprioritaskan pada pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi.

Memperhatikan capaian peruntukan ruang di Kecamatan Pasimarannu, maka dapat dilihat jumlah pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pengumpan sebanyak 2 buah; Seluruh desa di Kecamatan Pasimarannu sudah dialiri listrik non PLN; Sebagian besar sumber air minum keluarga di 4 desa adalah air isi ulang dan 4 desa lainnya adalah sumur; Komoditas unggulan perikanan tangkap dengan produksi 3.703,21 ton, perikanan budidaya dengan komoditi unggulan rumput laut dengan produksi 299,57 ton. Sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) untuk pengembangan budidaya alternatif perkebunan dengan komoditi unggulan jambu mede dengan produksi 373,98 ton, kakao 13,84 ton. Untuk mendukung Kepulauan Selayar sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan DPP Baru Selayar-Makassar-Toraja terdapat 9 (sembilan) objek wisata andalan. Dalam memenuhi pelayanan dasar telah dibangun sarana kesehatan berupa 1 puskesmas dan 5 puskesmas pembantu dengan ketersediaan tenaga kesehatan sebagai berikut: 27 Perawat, 41 Bidan, 6 Tenaga Farmasi dan 2 Ahli Gizi. Persentase kelahiran hidup di Kecamatan Pasimarannu sebesar 99,04 persen (bayi hidup : 207 bayi dan bayi meninggal : 2 bayi) dan persentase persalinan yang dilakukan tenaga kesehatan sebesar 92,97 persen. Pelayanan dasar pendidikan telah dibangun 10 PAUD, 10 SD, 3 SMP dan 1 SMA, dengan rasio guru terhadap murid sebagai berikut: PAUD 1 : 9, Sekolah Dasar 1 : 9 dan Sekolah Menengah Pertama 1 : 8.

#### **2.7.11. Pembangunan Kawasan Pasilambena**

Sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, maka kebijakan pengembangan kawasan Pasilambena sebagai kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan lingkungan hidup diprioritaskan pada peningkatan konektivitas wilayah dengan pengembangan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pengumpan; Mendukung ketersediaan energi listrik dengan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan energi listrik terbarukan; Peruntukan kawasan pertambangan mineral logam dan bukan logam; Penyediaan air minum melalui sistem jaringan sumber daya air dan air baku; Kawasan peruntukan komoditas unggulan khususnya pertanian, peternakan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya air laut dengan komoditi rumput laut serta sebagai kawasan pengembangan budidaya alternatif

komoditi perkebunan unggulan khususnya komoditas jambu mede dan kakao; Pengembangan destinasi pariwisata sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan DPP Baru Selayar-Makassar-Toraja. Untuk mendukung fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan kawasan peruntukan hutan rakyat, pelestarian alam dan cagar budaya berupa kawasan pantai berhutan bakau, serta Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Daerah Pelestarian Laut (DPL). Selain itu dalam rangka peningkatan pemenuhan pelayanan dasar diprioritaskan pada pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi.

Memperhatikan capaian peruntukan ruang di Kecamatan Pasilambena, maka dapat dilihat jumlah pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pengumpan sebanyak 2 buah; Seluruh desa di Kecamatan Pasilambena sudah dialiri listrik non PLN; Sebagian besar sumber air minum keluarga di 5 desa adalah air sumur dan 1 desa lainnya adalah air embung/bendungan/sungai; Komoditas unggulan perikanan tangkap dengan produksi 2.079,39 ton, perikanan budidaya dengan komoditi unggulan rumput laut dengan produksi 13,80 ton. Sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) untuk pengembangan budidaya alternatif perkebunan dengan komoditi unggulan jambu mede dengan produksi 83,43 ton dan kakao 16,00 ton. Untuk mendukung Kepulauan Selayar sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan DPP Baru Selayar-Makassar-Toraja terdapat 8 (delapan) objek wisata andalan. Dalam memenuhi pelayanan dasar telah dibangun sarana kesehatan berupa 1 puskesmas dan 1 puskesmas pembantu dengan ketersediaan tenaga kesehatan sebagai berikut: 31 Perawat, 36 Bidan, 4 Tenaga Farmasi dan 1 Ahli Gizi. Persentase kelahiran hidup di Kecamatan Pasilambena sebesar 100 persen (bayi hidup : 157 bayi dan bayi meninggal : 0 bayi) dan persentase persalinan yang dilakukan tenaga kesehatan sebesar 68,36 persen. Pelayanan dasar pendidikan telah dibangun 6 PAUD, 10 SD, 5 SMP dan 1 SMA, dengan rasio guru terhadap murid sebagai berikut: PAUD 1 : 8, Sekolah Dasar 1 : 9 dan Sekolah Menengah Pertama 1 : 5.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

##### 3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan dalam RPJPD tahun 2025-2045 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia/dicapai. Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah menjadi dasar identifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang perlu diselesaikan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam periode tahun 2025-2045. Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut ini.

###### 1. *Belum optimalnya pemerataan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat*

Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Namun, pada kenyataannya pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum optimal. Kondisi ini dapat dilihat dari capaian Umur Harapan Hidup yang masih lebih rendah dari capaian rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Selain itu, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) juga mengalami peningkatan sampai tahun 2023. Lebih lanjut, capaian prevalensi stunting pada balita masih di atas 30 persen dan pada tahun 2023 berada pada peringkat 16 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sejumlah faktor yang menyebabkan permasalahan di atas adalah belum optimalnya upaya promotif, preventif dan pola hidup sehat di kalangan masyarakat. Masyarakat terutama masyarakat miskin dan masyarakat yang bermukim di wilayah terpencil belum memiliki pemahaman yang baik terhadap pola hidup sehat ataupun penerapan gizi yang seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, melihat kondisi dan karakteristik Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari beberapa pulau, maka fasilitas kesehatan yang ada di wilayah kepulauan masih sangat terbatas dan belum merata, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi ini diikuti ketersediaan tenaga kesehatan khususnya dokter umum maupun dokter ahli yang masih sangat kurang sehingga menghambat pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Lebih lanjut, Kabupaten Kepulauan Selayar hanya memiliki satu Rumah Sakit rujukan yang masih berstatus tipe C serta hanya memiliki satu Rumah Sakit Pratama di kecamatan kepulauan. Dalam konteks inilah perlu diprioritaskan peningkatan upaya pembudayaan hidup sehat, serta pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah, dengan prioritas di wilayah kepulauan.

2. *Belum optimalnya pemerataan layanan dan kualitas pendidikan*

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas masih menjadi permasalahan yang mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kondisi ini dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat literasi dan numerasi siswa di Kabupaten Kepulauan Selayar yang masih berada di bawah angka 40 persen, Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) yang cenderung stagnan serta masih lebih rendah dari capaian rata-rata AHLS Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Selain itu, jika dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat, hanya sekitar 20 persen masyarakat di atas 15 tahun berstatus angkatan kerja yang menyelesaikan pendidikannya di jenjang pendidikan tinggi. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kualitas angkatan kerja serta produktivitas kerja masyarakat.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kondisi ini antara lain : belum meratanya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak mulai usia 5 tahun keatas agar tetap bisa bersekolah hingga jenjang pendidikan tinggi; Belum meratanya kualitas sarana prasarana dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas dan memenuhi standar kompetensi antara perdesaan dan perkotaan, serta antara daratan dan kepulauan; Pemanfaatan teknologi pembelajaran yang belum menjadi prioritas kebijakan pembangunan pendidikan, sehingga perangkat lunak dan perangkat keras proses pembelajaran juga mengalami ketimpangan yang tajam antara perkotaan dengan perdesaan, antara daratan dengan daerah kepulauan; Kualitas lulusan masih rendah, sehingga produktivitas dan daya saingnya juga masih rendah. Selain itu, pemahaman dan *awareness* orang tua terhadap pendidikan anaknya juga turut berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak. Banyak orang tua yang belum memprioritaskan pendidikan dan menganggap anak lebih baik bekerja daripada bersekolah. Pemahaman ini harus dihilangkan sehingga kualitas dan kuantitas anak didik dapat meningkat di masa yang akan datang. Untuk itu perlu diprioritaskan perluasan akses pendidikan yang berkualitas di seluruh jenjang pendidikan di seluruh wilayah agar tidak ada kesenjangan pendidikan.

3. *Tingginya tingkat kemiskinan dan belum optimalnya perlindungan sosial*

Tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar yang tinggi dapat dilihat dari capaian persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar yang masih tinggi dan cenderung mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada peringkat 7 tertinggi dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan lebih tinggi dari rata-rata capaian persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kondisi ini adalah belum optimalnya penanganan kemiskinan berdasarkan skala prioritas dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan yang memerlukan perhatian khusus;

Peningkatan beban tanggungan bagi usia produktif akibat rasio ketergantungan penduduk meningkat; Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem data kependudukan sebagai basis perencanaan penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial yang inklusif; Lapangan kerja di perdesaan masih bertumpu pada sektor primer (perikanan, pertanian dan perkebunan); Pengembangan sektor jasa masih bertumpu di perkotaan; kesenjangan sarana prasarana dasar dan infrastruktur wilayah di wilayah kepulauan; keterbatasan akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan distribusi atau pemasaran hasil ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan.

Tingginya tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan perlindungan sosial yang adaptif. Hal ini terindikasi dari rendahnya kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja formal dan informal serta terbatasnya akses bagi penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya di sektor ekonomi formal dan informal. Berbagai tantangan dihadapi dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang efektif mulai dari segi pembiayaan maupun implementasi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang komprehensif berupa investasi dalam skema pembiayaan yang berkelanjutan, membangun kemitraan dan koordinasi antar lembaga, serta memaksimalkan inovasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan jangkauan program perlindungan sosial.

#### 4. *Rendahnya produktivitas perekonomian daerah*

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah kepulauan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun di sisi lain, produktivitas perekonomian daerah cenderung masih rendah. Hal ini ditandai dengan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar yang rendah dan cenderung stagnan. Pertumbuhan ekonomi yang rendah ini disebabkan antara lain belum berkembangnya industri pengolahan berbasis sumberdaya alam di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun terakhir tidak lebih dari 3 persen. Bahkan, pertumbuhan sektor ini mengalami penurunan pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh masih kurangnya sumber daya manusia pelaku industri yang ahli dan terampil dalam mengelola potensi SDA unggulan; kurangnya diversifikasi industri; kurang berkembangnya hilirisasi industri; dan kurangnya fasilitas sarana pengolahan dan sarana pengembangan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi industri. Selain itu, konektifitas wilayah antar pulau masih menjadi hambatan dalam pengembangan kerjasama dan investasi sektor industri.

Produktivitas ekonomi yang rendah juga disebabkan oleh rendahnya produktivitas koperasi serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagaimana diketahui bahwa koperasi sangat berperan penting dalam meningkatkan

kesejahteraan ekonomi serta menggerakkan roda perputaran ekonomi di kalangan masyarakat. Namun, kenyataannya Kabupaten Kepulauan Selayar hanya memiliki kurang dari 20 persen koperasi dengan kategori sehat. Selain itu, BUMD yang diharapkan mampu mendatangkan pendapatan bagi daerah pada kenyataannya belum mampu menghasilkan keuntungan. Dari tiga BUMD yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar, dua BUMD memiliki *Return On Asset (ROA)* yang negatif atau tidak menghasilkan keuntungan. Dalam konteks ini perlu diprioritaskan peningkatan kapasitas pengelola dan kualitas pengelolaan UMKM, Koperasi, dan BUMD.

Produktivitas sektor perikanan dan pariwisata sebagai dua sektor andalan Kabupaten Kepulauan Selayar juga masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum terhadap PDRB yang masih dibawah satu persen. Disektor perikanan, dengan wilayah laut yang sangat luas, jumlah produksi perikanan tangkap masih rendah dibandingkan dengan jumlah produksi perikanan tangkap di kabupaten tetangga seperti Bulukumba, Sinjai dan Bone. Beberapa kondisi di atas disebabkan oleh belum optimalnya aksesibilitas serta belum optimalnya kualitas pengelolaan objek wisata serta potensi wisata yang belum dikenal luas disebabkan promosi wisata yang kurang masif. Lebih lanjut, belum optimalnya produktivitas perikanan disebabkan pemanfaatan teknologi penangkapan ikan yang masih tradisional; Ketersediaan sarana pokok dan infrastruktur pendukung sektor kelautan dan perikanan serta pariwisata masih terbatas; Kelembagaan masih belum berjalan optimal; Pengelolaan perikanan di pulau-pulau belum berbasis sentra (TPI/PPI) termasuk minimnya infrastruktur pendukung terutama sarana pengolahan hasil tangkapan; dan belum berkembangnya industri perikanan terpadu di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam mengelolah potensi perikanan, perlu perhatian dan komitmen tinggi untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan laut. Selain itu, pengelolaan pulau-pulau kecil sebagai potensi wisata bahari patut menjadi prioritas yang berkelanjutan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi di Kepulauan Selayar

Peningkatan produktivitas sektor unggulan baik itu perikanan, pertanian dan pariwisata juga sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset dan inovasi. Namun, pada kenyataannya dapat dilihat bahwa kapabilitas inovasi Kabupaten Kepulauan Selayar masih rendah.

Produktivitas perekonomian juga sangat erat kaitannya dengan produktivitas tenaga kerja. Pada tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya walaupun capaiannya masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Rendahnya TPT dimaksud tidak sejalan dengan capaian tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah belum optimalnya produktivitas tenaga kerja serta lapangan pekerjaan yang digeluti sehingga belum memberikan nilai tambah bagi pendapatan para angkatan kerja.

Memperhatikan karakteristik tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 sebesar 60,63 persen merupakan pekerja di sektor informal seperti petani, nelayan, dan buruh. Para pekerja informal ini sangat bergantung pada produktivitas dan nilai tambah produk yang mereka hasilkan serta bergantung pada pemasaran produk yang baik yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Jika ditelisik lebih jauh, maka program dan kegiatan bantuan alat-alat pertanian dan perikanan, serta peralatan bagi UMKM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah telah terbukti dapat menurunkan angka pengangguran, namun masih diperlukan beberapa strategi untuk meningkatkan pendapatan bagi tenaga kerja dan mengurangi beban pengeluaran sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

5. *Belum optimalnya penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam pelaksanaan pembangunan*

Dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, perlu keseimbangan antara pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan. Ekonomi biru dan ekonomi hijau memuat konteks keberlanjutan dan inklusif yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi, namun penerapannya dalam pembangunan di Kepulauan Selayar dipandang belum optimal. Kondisi ini dapat tergambar dari capaian Indeks Ekonomi Hijau yang masih rendah dan masih dibawah rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Jika dilihat dari komponen pembentuk Indeks Ekonomi Hijau, maka rendahnya Indeks Ekonomi Hijau disebabkan oleh rendahnya capaian Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Pada pilar ekonomi, tenaga kerja pada sektor pertanian mengalami penurunan disebabkan tenaga kerja sektor pertanian bergeser ke sektor manufaktur dan jasa. Selain itu, produktivitas padi juga masih rendah serta produktivitas perikanan budidaya yang juga masih rendah.

Demikian pula halnya dengan penerapan ekonomi biru yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana yang dikemukakan pada permasalahan nomor 4 di atas. Selain itu, urusan pemerintahan bidang kelautan yang bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang menghambat pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang sebagian besar wilayahnya adalah laut serta menyebabkan pengawasan terhadap pemanfaatan dan

pengrusakan sumberdaya kelautan yang tidak optimal. Olehnya itu, perlu dikuatkan konsolidasi dan optimalisasi penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

6. *Masih terbatasnya penerapan transformasi teknologi digital*

Pembangunan pada era *society 5.0* mengharuskan pemanfaatan teknologi digital yang canggih. Namun pada kenyataannya, pemanfaatan teknologi digital di Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum optimal. Kondisi ini disebabkan: Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang belum menjangkau seluruh wilayah secara merata; Masih rendahnya regulasi dan kapasitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi digital yang tepat; Masih terdapat desa *blank spot* tanpa BTS; Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bijak terutama dalam hal kecakapan digital, etika digital dan budaya digital.

7. *Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik dan ekonomi regional*

Perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar perlu memperhatikan penguatan integrasi dan keterkaitan ekonomi domestik dengan ekonomi regional khususnya di kawasan Sulawesi Selatan. Integrasi ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar dan kawasan regional sangat erat kaitannya dengan kinerja ekspor dan impor. Dewasa ini, integrasi ekonomi dimaksud masih belum optimal dilihat dari capaian net ekspor barang dan jasa yang masih negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa ekspor barang atau produk hasil produksi Kepulauan Selayar masih lebih rendah dibandingkan barang atau produk yang diimpor masuk ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini disebabkan oleh produk-produk olahan Kepulauan Selayar belum memiliki pasar di luar daerah serta belum memiliki produk yang memiliki daya saing tinggi. Disisi lain, ketersediaan dan disparitas harga yang disebabkan oleh letak dan posisi Kepulauan Selayar menyebabkan impor barang terutama bahan makanan dan pakaian menjadi tinggi.

8. *Belum optimalnya pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan*

Pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan sangat erat kaitannya dengan pembangunan kewilayahan. Jika dilihat dari kontribusi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap pembangunan Sulawesi Selatan, maka kontribusi dimaksud masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat kecil dan paling kecil diantara 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Jika dilihat dari pembangunan kewilayahan perkotaan dan perdesaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka pembangunan wilayah perdesaan masih perlu untuk ditingkatkan. Hal ini terindikasi dari jumlah desa mandiri yang masih sebanyak 14 desa dan masih terdapat 8 desa dengan kategori tertinggal.

Selain itu, kesenjangan pembangunan perkotaan dan perdesaan juga dapat dilihat dari kualitas infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata sangat diperlukan dalam mendukung kegiatan ekonomi dan aktivitas sosial masyarakat. Kualitas infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai saat ini dipandang belum optimal. Hal ini ditandai dengan capaian Indeks Infrastruktur yang rendah bahkan terjadi penurunan pada tahun 2023. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya belum optimalnya upaya penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Belum optimalnya kualitas dan kuantitas jalan sebagai penghubung koridor utama pedesaan dan perkotaan mendukung integrasi dan distribusi penghubung antar pusat kegiatan; Belum meratanya akses dan kualitas infrastruktur wilayah antara daratan Selayar dan wilayah kepulauan; Belum meratanya cakupan sarana dan prasarana pelayanan publik di perdesaan dan perkotaan, khususnya air bersih dan sanitasi aman dan layak; Cakupan dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang belum merata; Belum terpenuhinya kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau; Belum meratanya penyediaan dan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan di perdesaan, serta ketersediaan dan reliabilitas listrik yang masih kurang di perkotaan; dan Belum optimalnya layanan reforma agraria; serta lambatnya penyelesaian RDTR sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang.

9. *Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif*

Tata kelola pemerintahan merupakan aspek sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu daerah termasuk di Kabupaten Kepulauan Selayar. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik harus berintegritas, adaptif dan inovatif. Namun, tata kelola Kabupaten Kepulauan Selayar yang berintegritas, adaptif dan inovatif masih belum optimal. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah yang beintegritas dapat dilihat dari rendahnya capaian Indeks Reformasi Hukum dan masuk dalam kategori buruk. Selain itu, indikasi lainnya adalah masih rendahnya Indeks Survei Penilaian Integritas serta nilai MCP KPK.

Tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif dan inovatif belum optimal dapat dilihat dari rendahnya nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks SPBE Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada peringkat 23 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan masih berada pada kategori cukup. Selain itu, kualitas pelayanan publik juga masih rendah yang ditandai oleh capaian Indeks Pelayanan Publik yang mengalami penurunan pada tahun 2023.

Untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud, maka diperlukan optimalisasi pelaksanaan kebijakan SPBE dalam hal kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE, kebijakan manajemen data, kebijakan internal

layanan pusat data, dan kematangan kebijakan internal pengguna sistem penghubung layanan. Selain itu, perlu pula dioptimalkan penerapan manajemen dan audit SPBE, seperti dalam hal kematangan penerapan manajemen risiko, kematangan penerapan manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, kompetensi sumberdaya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan kematangan penerapan manajemen layanan SPBE. Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pelayanan publik, penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam manajemen data dan keamanan informasi, serta pelayanan publik terhadap risiko korupsi, perlu menjadi perhatian ke depan.

*10. Belum optimalnya keamanan dan ketertiban umum*

Belum optimalnya keamanan dan ketertiban umum dapat dilihat dari angka kriminalitas yang masih tinggi serta persentase tindak kriminal yang ditangani semakin menurun dan tergolong rendah. Kondisi ini disebabkan antara lain kasus korupsi yang meningkat, baik dalam sistem hukum dan pemerintahan; Ketidaksetaraan akses ke hukum di masyarakat; Konflik dan ketidakstabilan politik; Teknologi keamanan siber masih kurang; Tingkat pendidikan dan pemahaman hukum masyarakat masih terbatas; Peredaran narkoba yang belum terselesaikan.

*11. Masih rendahnya stabilitas ekonomi makro daerah dan terbatasnya kapasitas fiskal daerah*

Stabilitas ekonomi makro sangat penting dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks pembangunan daerah, stabilitas ekonomi makro sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kapasitas fiskal daerah. Memperhatikan kapasitas fiskal yang terbatas dan stabilitas ekonomi makro yang masih rendah di Kabupaten Kepulauan Selayar menyebabkan tidak optimalnya pembangunan daerah.

Berbagai indikasi yang dapat dicermati terhadap keterbatasan fiskal ini adalah ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Dana Transfer ke daerah yang masih tinggi. Pemerintah Daerah belum mampu menciptakan kemandirian keuangan yang dilihat dari masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap tahunnya. Pajak yang merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah memiliki rasio yang sangat rendah terhadap PDRB. Belum optimalnya kemandirian keuangan ini juga tergambar dari rendahnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang salah satu penilaiannya adalah kemandirian keuangan dimaksud. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini adalah masih lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kualitas dan kuantitas SDM Aparatur yang lemah, kurangnya peran perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, serta belum berkembangnya sektor-sektor unggulan yang dapat mendatangkan PAD. Selain

itu, kebutuhan pembiayaan pembangunan semakin meningkat seiring dengan program strategis dari pemerintah provinsi dan arahan *mandatory* oleh Pemerintah. Hal ini juga berkontribusi bagi terbatasnya kapasitas fiskal daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya investasi yang diharapkan mampu menopang kapasitas fiskal daerah juga masih belum optimal. Pertumbuhan investasi daerah masih tidak stabil dan fluktuatif atau bahkan mengalami kontraksi di tahun-tahun tertentu. Selain itu, jumlah investasi di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menggambarkan bahwa kontribusi investasi belum optimal mendongkrak pendapatan daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya investasi dimaksud antara lain inkonsistensi kebijakan dan peraturan yang dibuat dan diimplementasikan, kurangnya tenaga kerja terampil, kurangnya pemerataan promosi untuk edukasi investasi, serta daerah belum memiliki rencana bisnis yang jelas terhadap pengembangan potensi unggulan yang akan ditawarkan.

Stabilitas ekonomi makro juga dapat dilihat dari kestabilan harga barang. Tingkat inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar masih cukup tinggi walaupun capaian tingkat inflasi gabungan Zona Bulukumba masih tergolong rendah. Faktor utama yang mengakibatkan hal ini adalah kondisi dan letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari 130 pulau. Oleh karena itu, perbaikan aksesibilitas sangat penting untuk menekan tingkat inflasi dimaksud.

#### 12. Rendahnya daya saing daerah

Rendahnya daya saing daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari rendahnya Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kepulauan Selayar. IDSD Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika dibandingkan dengan IDSD Provinsi Sulawesi Selatan dan berada pada peringkat 23 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi dimaksud antara lain Indeks Infrastruktur yang masih rendahnya, pertumbuhan ekonomi yang mengalami stagnasi, produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, sistem keuangan bagi UMKM yang belum optimal, belum masifnya pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh masyarakat untuk membuka usaha, keterbatasan jumlah peneliti serta masih belum optimalnya belanja riset dalam APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### 13. Belum optimalnya penguatan nilai keagamaan, sosial dan budaya

Ajaran setiap agama memiliki sistem kepercayaan, keyakinan, atau keimanan dan peribadatan. Perwujudan nilai ritual dan rangkaian ibadah sosial perlu mendapatkan perhatian yang lebih maksimal oleh Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten

Kepulauan Selayar. Fasilitasi ini dalam upaya untuk memperkuat hubungan kebersamaan antar umat beragama.

Penguatan nilai budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar juga dipandang belum optimal. Hal ini terindikasi dari jumlah benda, bangunan, struktur dan situs budaya yang ditetapkan menjadi cagar budaya tidak bertambah selama tahun 2018 sampai tahun 2023. Kedepannya diharapkan agar seluruh benda, bangunan, struktur dan situs budaya di Kepulauan Selayar dapat ditetapkan sebagai cagar budaya dan selanjutnya dapat dilestarikan keberadaannya sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat daerah serta memperkuat jati dari daerah.

#### *14. Masih rendahnya kualitas keluarga serta kesetaraan dan keadilan gender*

Peningkatan kualitas keluarga dalam pembangunan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat penting dilakukan demi mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Keluarga yang memiliki kualitas yang baik, maka setiap anggota keluarga akan lebih mampu memahami pentingnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Kualitas keluarga dan kesetaraan gender di Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indeks Kualitas Keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar yang lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Begitupun dengan capaian Indeks Ketimpangan Gender juga lebih rendah dari rata-rata capaian Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Sulawesi Selatan.

Salah satu fondasi dalam mewujudkan kualitas ketahanan keluarga adalah tercapainya kesetaraan gender. Terdapat tiga dimensi penyebab ketimpangan ini, dimensi kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Pada dimensi kesehatan beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif di seluruh wilayah terkhusus di wilayah kepulauan, Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh penduduk miskin dan rentan lainnya, dan perbaikan gaya hidup dan pola konsumsi ibu dan bayi baru lahir. Pada dimensi pemberdayaan terdapat beberapa penyebab ketimpangan gender yang perlu menjadi perhatian, yaitu kesetaraan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan terjangkau, termasuk pemenuhan hak pendidikan yang membutuhkan perlindungan khusus (penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi darurat, anak jalanan, korban perkawinan anak, anak di panti dan lainnya) hingga jenjang pendidikan tinggi. Selain itu ketersediaan SDM tenaga pendidik/kependidikan yang berkualitas di seluruh jenjang pendidikan, perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kesetaraan pada dimensi pemberdayaan. Pada dimensi pasar tenaga kerja perlu ditingkatkan akses terhadap lima modal penghidupan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perluasan kesempatan dan peluang kerja terutama untuk perempuan dan penyandang disabilitas, dan penerapan kebijakan

ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap perempuan dan penyandang disabilitas.

#### *15. Menurunnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan*

Lingkungan hidup yang berkualitas sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun akan mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sampai tahun 2023, kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar belum optimal yang dapat diukur dari pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada tahun 2023, IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar masih pada kategori sedang dan berada pada peringkat 20 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Jika dilihat dari komposit pembentuk kualitas lingkungan hidup, yaitu : (1) Indeks Kualitas Air belum optimal karena masih pada kategori sedang dan lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini sangat dipengaruhi oleh tingginya pencemaran sumber-sumber air baku oleh limbah, demikian juga dengan kualitas tutupan lahan yang menggambarkan kondisi vegetasi hutan dan vegetasi non hutan untuk mendukung keberlanjutan ekosistem terus menurun. (2) Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2023 belum optimal karena masih berada pada kategori kurang dan berada pada peringkat 17 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini dipengaruhi oleh terus menurunnya proporsi hutan terhadap luas seluruh lahan serta menurunnya proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas seluruh lahan.

Kualitas lingkungan hidup juga dapat dilihat dari kualitas pengelolaan sampah. Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik. Lingkungan kotor serta polusi sampah bisa membawa dampak buruk, baik itu terhadap manusia maupun terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah sangat penting untuk mengurangi dan menangani produksi sampah baik itu sampah rumah tangga ataupun industri. Kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Kepulauan Selayar belum optimal, dapat dilihat dari sekitar 20 ribu ton lebih timbulan sampah yang dihasilkan per tahun, hanya 1,30 persen sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah. Selain itu, proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah yang masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena fasilitas pengelolaan sampah yang masih kurang, pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang belum optimal serta kebijakan/regulasi pengelolaan persampahan yang belum berjalan secara maksimal.

### *16. Meningkatnya ancaman penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan*

Penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan dapat dilihat dengan: Belum meratanya dan belum berkualitاسnya akses energi; Masih tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan; Masih rendahnya kapasitas tampungan air; dan masih rendahnya persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan.

Kondisi ini disebabkan: Belum terpenuhinya pasokan listrik untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan industri; Belum optimalnya upaya pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; Terbatasnya upaya pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil khususnya pada daerah kepulauan.

Sedangkan permasalahan terkait menurunnya kemandirian pangan disebabkan masih rendahnya kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian berkelanjutan; Masih rendahnya diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan; Masih terbatasnya pembangunan tampungan air untuk memenuhi kebutuhan air baku; Masih terbatasnya jaringan irigasi, khususnya pada bendungan yang telah terbangun; Masih terbatasnya penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan; dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan daerah rawan air.

### *17. Masih rendahnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim*

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 masih pada kategori sedang. Kondisi dan karakteristik Kabupaten Kepulauan Selayar yang berpotensi mendatangkan bencana alam. Karakteristik yang dimaksud adalah daerah yang dikelilingi oleh laut dan memiliki garis pantai yang panjang sehingga berpotensi terjadinya banjir rob, abrasi, dan tsunami. Selain itu, cuaca dan gelombang ekstrim juga sering terjadi sepanjang tahun. Lebih lanjut, curah hujan yang semakin berkurang berpotensi terjadinya bencana kekeringan.

Beberapa prioritas yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dimaksud adalah perkuatan kebijakan dan kelembagaan; pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; penanganan tematik kawasan rawan bencana; peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan pengembangan sistem pemulihan bencana.

## **3.2 ISU STRATEGIS DAERAH**

Isu strategis perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik

secara langsung ataupun tidak langsung, baik berdampak negatif maupun berdampak positif secara signifikan pada masa datang. Isu-isu strategis daerah dapat berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh kedepan, pada satu sisi berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar ataupun pada sisi yang lain dapat memberikan tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan dalam jangka panjang, sehingga perlu menjadi fokus perhatian bagi stakeholder pembangunan daerah. Isu strategis pembangunan daerah ini merupakan faktor eksternal yang berpengaruh dan memberi dampak besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sebagai faktor eksternal, yang seringkali pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan dan kewenangan dalam mengelola pengaruh eksternal tersebut, sehingga fokus perhatian pemerintah daerah lebih kepada upaya-upaya mitigasi untuk mencegah dampak negatif yang dapat dirasakan atau mengoptimalkan kesempatan dan peluang untuk memperoleh dampak positif yang dapat diterima dalam implementasi pembangunan daerah. Isu-isu strategis daerah dimaksud sebagai berikut :

### **1. Perubahan iklim dan pemanasan global**

Pemanasan global dan perubahan iklim tengah terjadi dan diperkirakan akan terus terjadi pada masa-masa mendatang. Fokus adaptasi ini kiranya perlu ditunjukkan pada area-area yang rentan terhadap perubahan iklim seperti: sumber daya air, pertanian, perikanan, infrastruktur permukiman, kesehatan, dan kehutanan.

Perubahan iklim dan pemanasan global akan sangat berpengaruh pada Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai daerah kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah laut, perubahan iklim dan pemanasan global akan menyebabkan kenaikan air laut yang akan berdampak pada terjadinya bencana alam seperti banjir, erosi serta hilangnya ekosistem laut dan pesisir. Pemanasan global juga menyebabkan kenaikan suhu air laut yang berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati laut dan sumber daya perikanan berkurang. Selain itu, perubahan iklim dan pemanasan global akan mengancam produktivitas hasil pertanian dan perkebunan. Hal ini tentu akan sangat merugikan pembangunan daerah disektor perikanan, pertanian dan perkebunan yang dapat mempengaruhi pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

### **2. Risiko bencana alam**

Risiko bencana harus tetap menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah. Dampak bencana gempa bumi yang terjadi awal Desember tahun 2021 mengakibatkan dua kecamatan di wilayah kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu mengalami kerusakan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat baik itu kerugian materil ataupun immateril sangat besar.

Olehnya itu, isu bencana alam ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah.

Bencana gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Selayar diprediksi akan sewaktu-waktu terjadi seiring dengan ditemukannya patahan baru di sekitar dua wilayah kecamatan kepulauan dimaksud, yaitu Sesar Assambi Kalaotoa. Jika dilihat dari riwayat bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Selayar di masa terdahulu, maka sudah keharusan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah harus waspada terhadap kejadian gempa bumi dan tsunami serta dampak yang ditimbulkannya. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam adalah menurunnya permukaan tanah/daratan yang menyebabkan permukaan laut lebih tinggi dari daratan sehingga terjadi banjir di wilayah pesisir permukiman masyarakat. Resiko banjir akibat luapan air laut sangat mungkin terjadi. Meluapnya sungai-sungai terutama di wilayah perkotaan saat curah hujan tinggi penyebab banjir juga mungkin terjadi. Cuaca ekstrim saat musim barat juga berpotensi mendatangkan bencana bagi masyarakat akibat angin kencang. Ancaman bencana yang tidak dapat diprediksi seperti gempa bumi serta bencana musiman seperti banjir dan angin kencang, memerlukan antisipasi serta pemetaan potensi bencana. Memperhatikan karakteristik alam dan sosial yang kompleks menyebabkan Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi daerah yang rawan bencana. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar yang masih kategori sedang.

### **3. Pengelolaan pulau-pulau kecil**

Kawasan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang. Kawasan ini menyediakan sumberdaya alam yang produktif (potensi perikanan yang berlimpah), seperti terumbu karang yang salah satunya berada pada kawasan Taman Nasional Taka Bonerate yang merupakan salah satu cagar biosfer dunia, serta kawasan konservasi. Pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang tinggi, karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari. Disisi lain, potensi pulau-pulau kecil pemanfaatan dikelola secara optimal.

Pengelolaan dan pengembangan pulau-pulau kecil menghadapi berbagai isu yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada kenyataannya, sebagian besar pulau-pulau kecil merupakan kawasan tertinggal, namun memiliki potensi sumberdaya alam yang baik. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan laut yang menghubungkan pulau-pulau kecil dimaksud.

Selain itu, potensi masalah keamanan yaitu menjadi tempat kegiatan yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan nasional juga merupakan isu dan permasalahan yang harus dihadapi di masa yang akan datang. Beberapa pulau kecil berpotensi menjadi sengketa antar provinsi maupun antar kabupaten/kota sebagaimana yang terjadi pada Pulau Betang dan Pulau Kakabia.

Pengembangan kawasan pulau-pulau kecil merupakan suatu proses yang akan membawa suatu perubahan pada ekosistemnya. Perubahan-perubahan tersebut akan membawa pengaruh pada lingkungan hidup. Semakin tinggi intensitas pengelolaan dan pembangunan yang dilaksanakan berarti semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan sumberdaya serta semakin tinggi pula dan perubahan-perubahan lingkungan yang akan terjadi di kawasan pulau-pulau kecil. Kegiatan pengelolaan pulau-pulau kecil menghadapi berbagai ancaman baik dari aspek ekologi yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran, perusakan ekosistem dan penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*) maupun dari aspek sosial yaitu rendahnya aksesibilitas dan kurangnya penerimaan masyarakat lokal.

Oleh karena itu, di dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dan ancaman-ancaman tersebut, maka pengelolaan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Kebijakan dan strategi pengelolaan pulau-pulau kecil diharapkan dapat berfungsi dalam mengembangkan dan memanfaatkan pulau-pulau kecil.

#### **4. Pemanfaatan potensi pariwisata dan potensi ekonomi laut**

Kinerja pariwisata masih berada dibawah potensi yang dimiliki. Hal ini disebabkan masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan. Selain itu, terjadi perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan. Sementara itu, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata. Selanjutnya, inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasinya belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional juga masih terbatas.

Kondisi di atas tentunya sangat berkaitan dan mempengaruhi sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai kabupaten yang bercirikan kepulauan dan memiliki wilayah laut yang luas serta garis pantai yang panjang, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi pariwisata bahari yang sangat besar. Hal ini diperkuat dengan ditetapkannya Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan salah satu Cagar Biosfer yang ada di dunia.

Namun pada kenyataannya semua potensi dimaksud belum dimanfaatkan secara optimal.

Disamping potensi pariwisata, potensi perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar sangat berlimpah juga belum dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendatangkan pendapatan bagi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitupun dengan produksi perikanan budidaya yang masih rendah.

##### **5. Ancaman krisis pangan dan krisis energi**

Jumlah penduduk yang semakin bertambah berpotensi menimbulkan ancaman krisis terutama krisis pangan dan krisis energi. Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya juga dapat menyebabkan alih fungsi lahan dan kebutuhan lahan untuk sarana dan prasarana semakin meningkat sehingga berdampak semakin berkurangnya lahan produktif. Potensi konflik antar negara juga akan menyebabkan krisis pangan dan kelaparan akan semakin bertambah. Penurunan produktivitas perikanan akibat dari *illegal fishing* dan *destructive fishing* menyebabkan berkurangnya terumbu karang sebagai tempat pemijahan ikan. Di sisi lain permasalahan yang harus dihadapi petani dan nelayan adalah kenaikan biaya produksi dan perolehan keuntungan yang makin sedikit, sehingga Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi rendah.

Selain krisis pangan, krisis yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang adalah keterbatasan ketersediaan energi, bukan saja menyebabkan harga energi di pasaran menjadi makin mahal, tetapi juga menyebabkan dampak terhadap peningkatan harga kebutuhan masyarakat yang lain. Untuk mengatasi ancaman krisis energi, perlu diupayakan pencarian energi alternatif yang ramah lingkungan (energi baru terbarukan).

##### **6. Keberdayaan Masyarakat**

Kondisi sebagian masyarakat saat ini yang masih menghadapi tekanan kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja dan pengangguran, serta kualitas SDM masyarakat yang belum siap bersaing. Kondisi ini akan melahirkan marginalisasi masyarakat miskin, karena posisi mereka yang rentan. Berkurangnya kesempatan kerja, dan kolapsnya sejumlah usaha mandiri yang ditekuni masyarakat serta melahirkan dampak berupa peningkatan jumlah pengangguran yang menyebabkan terjadinya perluasan dan pendalaman kemiskinan. Akibat kualitas SDM masyarakat yang masih tertinggal, dengan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah dan belum ditunjang kecakapan, serta keahlian yang profesional, seringkali menyebabkan tenaga kerja yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk menangani kemiskinan salah satu yang dapat dilakukan, yaitu memberikan kesempatan dan fasilitasi akses masyarakat miskin terhadap berbagai sumber permodalan dan peluang usaha. Keberdayaan masyarakat

khususnya masalah tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar perlu didasarkan pada pemahaman harapan masyarakat miskin dan adanya perlindungan, dan pemenuhan hak dasar masyarakat, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

#### **7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia**

Dalam 20 tahun mendatang, Kabupaten Kepulauan Selayar akan menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar, Namun berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan menurunnya angka stunting. Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk sangat penting diperhatikan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan penduduk untuk mendukung terjadinya jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan.

Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Persebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi. Komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Selayar yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) harus menjadi agenda utama.

Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dan prioritas utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui : mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan secara merata; kesetaraan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan; pencegahan terhadap peningkatan penyakit menular dan tidak menular; serta pencegahan penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang.

#### **8. Penerapan dan pengembangan teknologi digital**

Perkembangan teknologi sangat penting untuk menjadi penggerak daya saing daerah termasuk Kabupaten Kepulauan Selayar. Penerapan dan pengembangan teknologi digital telah dimanfaatkan dalam segala aspek kehidupan pada era *society 5.0* sebagaimana era sekarang ini. Dalam perekonomian, perkembangan teknologi terutama teknologi digital telah dimanfaatkan dalam transaksi jual beli melalui berbagai jenis platform *e-commerce* tanpa harus melalui proses tatap muka antara penjual dan pembeli. Hal ini tentunya akan mendatangkan kemudahan bagi konsumen maupun produsen baik itu dari segi nilai tambah ekonomi yang lebih besar ataupun dari segi efektifitas dan efisiensi waktu yang diperlukan dalam

transaksi jual beli dimaksud. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan. Pada sektor pelayanan publik, pemanfaatan teknologi juga telah dimanfaatkan dalam memberikan kemudahan dan optimalisasi pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan serta pelayanan publik lainnya.

Perkembangan teknologi selain memberikan manfaat juga akan menimbulkan tantangan sekaligus ancaman. Tantangan utama di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah keterbatasan infrastruktur teknologi meliputi jaringan internet yang cepat dan andal, pusat data yang memadai maupun perangkat keras yang kuat. Selain itu, kewenangan dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan teknologi digital sangat terbatas sehingga sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat. Selain tantangan-tantangan di atas, perkembangan teknologi juga akan mendatangkan ancaman yang serius terhadap kehidupan masyarakat. Beberapa ancaman dimaksud antara lain penipuan, *cyberbullying*, penyebaran konten ilegal, serangan *malware* akibat kelemahan keamanan pada aplikasi, ketimpangan digital antara mereka yang mahir dan memiliki akses teknologi dengan mereka yang tidak, perubahan signifikan dalam lapangan pekerjaan yang digantikan oleh mesin, dampak lingkungan dari limbah elektronik, dan pencurian data pribadi. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan untuk meminimalkan resiko dari ancaman yang berpotensi muncul namun di saat yang bersamaan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **9. Hilirisasi sumber daya alam**

Hilirisasi dan peningkatan investasi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar, yang diharapkan akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. Hilirisasi dan peningkatan investasi dimaksud meliputi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan pariwisata. Upaya yang dapat ditempuh dalam rangka hilirisasi dan peningkatan investasi antara lain meningkatkan potensi unggulan daerah yang berdaya saing dengan meningkatkan jaringan distribusi produk, meningkatkan sarana dan prasarana yang langsung dapat dinikmati oleh pelaku usaha kecil dan mikro, meningkatkan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal, pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan IKM melalui akses permodalan, peningkatan keterampilan pelaku usaha serta pemasaran produk, juga mendorong produk UMKM agar mampu bersaing dipasar lokal maupun global.

## **10. Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah**

Infrastruktur wilayah termasuk pelabuhan, bandar udara, jalan beserta saluran dreinasenya dan jembatan, serta prasarana sumberdaya air dan jaringan irigasi, ketersediaan akses air minum layak dan sanitasi aman memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi maupun kehidupan sosial budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pembangunan dan upaya peningkatan dan perbaikan sudah dilakukan selama ini, namun masih tetap menjadi perhatian serius di masa mendatang.

Kualitas infrastruktur transportasi darat terutama akses jalan, transportasi laut terutama pembangunan pelabuhan yang relatif rendah mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan dalam transportasi orang, barang dan jasa baik di dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun dari dan ke luar kabupaten. Pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandar udara perintis/pengumpan, dan jalan baru perlu dilakukan terutama pada kawasan pariwisata, kawasan sentra produksi dan pusat-pusat pemasaran.

## **11. Kerusakan lingkungan hidup**

Polusi dan kerusakan lingkungan ditandai dengan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini ditandai dengan semakin sedikitnya penyedia jasa ekosistem di Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dilihat dari ketersediaan jasa lingkungan penyedia air dengan kategori rendah dan sangat rendah mencapai 98 persen. Selain itu, timbulan sampah yang cukup tinggi yang mencapai 20 ribu ton lebih per tahun namun hanya sekitar 5 sampai 6 persen dari timbulan sampah dimaksud yang dapat diolah di fasilitas pengolahan sampah, hal ini terjadi disebabkan oleh belum terpenuhinya fasilitas pengolahan sampah yang representatif baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Lebih lanjut, pemanfaatan energi baru terbarukan dalam penyediaan layanan listrik masyarakat masih belum optimal pembangunannya yang dapat menyebabkan pembangunan berkelanjutan dapat terhambat di masa yang akan datang.

## **12. Tata kelola pemerintahan**

Pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting dalam menyukseskan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tata kelola pemerintahan yang baik dihadapkan oleh berbagai permasalahan dan tantangan disamping tantangan dari internal juga datang dari eksternal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Beberapa tantangan internal dimaksud antara lain reformasi birokrasi yang belum berjalan optimal sehingga berimplikasi pada belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, belum terciptanya kemandirian fiskal daerah

sehingga anggaran belanja daerah tidak dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan pembangunan dan masyarakat.

Sedangkan tantangan eksternal yang dihadapi yaitu belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah. Tantangan lain adalah koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kurangnya sinergi dapat menghambat implementasi kebijakan yang efektif dan menyebabkan tumpang tindih atau konflik kepentingan. Untuk meningkatkan koordinasi pemerintahan, diperlukan adanya mekanisme komunikasi yang lebih baik dan integrasi dalam perencanaan serta pelaksanaan program. Pemerintah pusat harus menyediakan panduan yang jelas dan dukungan teknis untuk memastikan bahwa kebijakan pusat dapat diadaptasi dengan baik oleh Pemerintah Daerah.

### **13. Keamanan, ketertiban, politik dan hukum**

Perubahan geopolitik internasional dan nasional akan sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban di daerah. Tantangan yang dihadapi dalam bidang keamanan dan ketertiban ke depan adalah mewujudkan komitmen bersama dalam meningkatkan kondusivitas wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian daerah dalam kehidupan sosial budaya yang kondusif. Kesadaran masyarakat yang tanggap terhadap berbagai potensi ancaman dan gangguan kamtibmas perlu ditingkatkan bersama dengan peningkatan sistem pengelolaan keamanan dan ketertiban yang komprehensif dan partisipatif, khususnya dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.

Perkembangan bidang politik dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran politik dan kedewasaan politik bagi masyarakat serta perkembangan budaya politik sehingga lebih transparan serta mampu menciptakan iklim kondusif yang didukung tata pemerintahan yang baik. Tantangan yang dihadapi dalam bidang hukum adalah penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Disamping itu, peningkatan jaminan akan kepastian, rasa keadilan dan perlindungan hukum serta harmonisasi produk hukum daerah.

Keterkaitan isu strategis yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025 – 2045, KLHS RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Tabel 3.1.**

Tabel 3. 1 Isu Strategis RPJPN, KLHS RPJPD, RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045

Isu Strategis RPJPN Tahun 2025-2045	Isu Strategis RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045	Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045	Isu Strategis RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045
<p>Produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif tertinggal</p> <p>Belum meratanya akses jaminan sosial</p> <p>Rendahnya tingkat produktivitas di tengah peningkatan persaingan global</p> <p>Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi</p>	<p>Pemanfaatan bonus demografi</p>	<p>Masih tingginya angka kemiskinan dan kerentanan masyarakat miskin akibat belum meratanya akses terhadap perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan</p>	<p>Keberdayaan masyarakat</p>
<p>Kualitas pendidikan yang masih rendah</p>		<p>Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan.</p>	<p>Peningkatan kualitas sumber daya manusia</p>
<p>Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan</p>	<p>Perubahan iklim dan risiko bencana</p>	<p>Meningkatnya pencemaran lingkungan, resiko bencana dan terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung akses terhadap air minum aman dan berkelanjutan</p>	<p>Resiko bencana alam</p> <p>Perubahan iklim dan pemanasan global</p>
<p>Tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati</p>	<p>Daya tampung dan kerusakan lingkungan</p>	<p>Meningkatnya ancaman terhadap ekosistem alam, kerusakan lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam</p>	<p>Kerusakan lingkungan hidup</p>
<p>Kualitas dan kuantitas SDM dalam penelitian belum memadai</p>	<p>Ekosistem transformasi digital</p>	<p>Melambatnya pertumbuhan ekonomi dan akses teknologi informasi.</p>	<p>Penerapan dan pengembangan teknologi digital</p>

<b>Isu Strategis RPJPN Tahun 2025-2045</b>	<b>Isu Strategis RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045</b>	<b>Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045</b>	<b>Isu Strategis RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045</b>
Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata	Pengelolaan pusat - pusat pertumbuhan		Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah
Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Hilirisasi		Pengelolaan pulau-pulau kecil
Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut			Hilirisasi sumberdaya alam
Rendahnya penggunaan EBT dan efisiensi energi	Sistem logistik dan pemenuhan pangan nasional	Menurunnya ketahanan pangan dan rendahnya pemenuhan gizi masyarakat	Pemanfaatan potensi pariwisata dan potensi ekonomi laut
Disharmoni regulasi dan kelembagaan instansi yang terfragmentasi	Penguatan kelembagaan dan kemandirian fiskal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan khususnya yang berkaitan pengelolaan anggaran dan pelayanan publik, serta ketidaksetaraan gender	Acaman krisis pangan dan krisis energi
Belum meratanya kualitas pelayanan publik			Tata kelola pemerintahan
			Keamanan, ketertiban, politik dan hukum

Sumber : Hasil Olahan, 2024

**BAB IV**  
**VISI DAN MISI DAERAH**

**4.1 VISI**

Pembangunan 20 tahun yang akan datang lebih berorientasi pada membangun manusia seutuhnya untuk mencapai derajat sejahtera lahir maupun batin. Hal ini juga didasarkan proyeksi masa depan Kabupaten Kepulauan Selayar dimana kunci pokok pembangunan ke depan adalah membangun manusia yang berdaya saing, peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas hidup, dan kualitas lingkungan hidup menuju Kepulauan Selayar yang Mapan, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan serta mewujudkan Indonesia Emas di Tahun 2045.

Perumusan visi Kabupaten Kepulauan Selayar mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan permasalahan utama, tantangan, isu strategis, serta keterbatasan yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Selayar serta mengacu pada visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045, maka ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045 yaitu:

**“Kepulauan Selayar Mapan, Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan”.**

Pernyataan visi mengandung makna dapat dilihat pada **Tabel 4.1**

Tabel 4. 1 Makna Pernyataan Visi

<b>Visi</b>	<b>Makna / Substansi</b>	
<b>Mapan</b>	1.	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar telah terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak
	2.	Meningkatnya pendapatan perkapita lapisan masyarakat
	3.	Memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dengan menurunnya tingkat kemiskinan
<b>Mandiri</b>	1.	Kemampuan daerah mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat
	2.	Kemampuan daerah untuk menghadapi persaingan dan tantangan global dengan mengandalkan kemampuan sendiri, memaksimalkan potensi dan peluang serta tidak tergantung pada sumber daya dari luar
	3.	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki rasa aman berkehidupan, kebebasan berpolitik dan perlindungan dan keadilan hukum
<b>Maju</b>	1.	Memiliki tingkat ekonomi yang kuat dan inklusif merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Kepulauan Selayar
	2.	Memiliki tingkat keimanan, kehidupan sosial dan budaya yang berkualitas
	3.	Memiliki kualitas hidup yang lebih baik dengan meningkatnya daya saing sumber daya manusia

<b>Visi</b>	<b>Makna / Substansi</b>	
<b>Berkelanjutan</b>	1.	Pemerintah dan masyarakat Kepulauan Selayar melanjutkan pembangunan yang telah dicapai, melakukan adaptasi dan akselerasi pembangunan dengan memperhatikan prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
	2.	Memastikan tata kelola ekonomi, sosial dan lingkungan tidak merusak bagi kepentingan generasi mendatang
	3.	Mampu memenuhi kebutuhan generasi yang ada saat ini tanpa menghalangi kebutuhan generasi yang akan datang
	4.	Memiliki kualitas hidup manusia berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovatif (Iptekin)

Sumber : Hasil Olahan, 2024

Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045 dapat dilihat pada **Tabel 4.2**.

Tabel 4. 2 Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan

<b>Visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045</b>	<b>Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045</b>	<b>Visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045</b>
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Sulawesi Selatan Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan	Kepulauan Selayar Mapan, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan

#### **4.2 SASARAN VISI**

Melihat pentahapan perwujudan visi : Kepulauan Selayar Mapan, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan selama empat perodesasi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan sasaran visi yang diselaraskan dengan sasaran visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 – 2045, dapat dilihat pada **Tabel 4.3** dan target sasaran visi per tahapan dapat dilihat pada **Tabel 4.4**.

Tabel 4. 3 Penyelesaian 5 (Lima) Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045

No	RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045				RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025*	Target 2045
1.	Peningkatan pendapatan perkapita	1.PDRB perkapita (Rp Juta)	76,58 - 77,35	422,16 – 497,92	Peningkatan pendapatan perkapita	1.PDRB perkapita (Rp Juta)	63,96	413,37
		2.Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Indeks)	71,31	275,29		2.Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	106,35	334,24
		3.Kontribusi Industri Pengolahan (%)	12,95 - 13,05	18,62 – 19,92		3.Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	2,89	7,71
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4.Tingkat Kemiskinan (%)	7,30 – 7,89	0,19 – 0,69	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4.Tingkat Kemiskinan (%)	10,24	0,95
		5.Indeks Gini (Indeks)	0,371 – 0,376	0,309 – 0,332		5.Indeks Gini (Indeks)	0,341	0,301
		6. Kontribusi PDRB Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Nasional (%)	3,21	3,23		6.Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Provinsi Sulawesi Selatan (%)	1,22	1,48
		7.Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50 – 6,30	6,90 – 8,94		7.Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,84	7,08
3.	Peningkatan daya saing daerah	8.Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	54 - 55	75 - 80	Peningkatan daya saing daerah	8.Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	44,26 (Inovatif)	74,13 (Sangat Inovatif)
		9.Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,45	4,00		9.Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	2,85	3,40
4.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,52	0,69	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Indeks)	72,61	86,66
5.	Penurunan emisi GRK	11.Penurunan Intensitas Emisi	37,00	89,74	Penurunan emisi	11.Penurunan Intensitas Emisi	23,66	84,37

No	RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045				RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025*	Target 2045
	menuju <i>Net Zero Emission</i>	GRK (%)			GRK menuju <i>Net Zero Emission</i>	GRK Tahunan (%)		
		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	77,60	84,75		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	67,61 (Baik)	91,15 (Sangat Baik)

*\*) Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target*

*Sumber : Penetapan Sasaran Visi dan Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten / Kota Tahun 2025-2045 dan Hasil Olahan, 2024*

Target sasaran visi pertahapan pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada **Tabel 4.4**

Tabel 4. 4 Target Sasaran dan Indikator Visi Kabupaten Kepulauan Selayar Per Tahapan Jangka Menengah

No.	RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045		Baseline 2025*	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	Sasaran Visi	Indikator		2029	2034	2039	2045
1.	Peningkatan pendapatan perkapita	1.PDRB perkapita (Rp Juta)	63,96	146,13	236,68	329,36	413,37
		2.Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	106,35	151,93	208,90	265,88	334,24
		3.Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	2,89	4,80	5,89	7,17	7,71
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4.Tingkat Kemiskinan (%)	10,24	9,25	6,47	3,59	0,95
		5.Indeks Gini (Indeks)	0,341	0,331	0,321	0,311	0,301
		6.Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Provinsi Sulawesi Selatan (%)	1,22	1,34	1,42	1,48	1,48
		7.Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,84	6,31	6,75	6,85	7,08
3.	Peningkatan daya saing daerah	8.Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	44,26 (Inovatif)	44,26 (Inovatif)	55,92 (Inovatif)	68,83 (Sangat Inovatif)	74,13 (Sangat Inovatif)
		9.Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	2,85	2,99	3,12	3,26	3,40
4.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Indeks)	72,61	75,43	78,89	82,38	86,66
5.	Penurunan emisi GRK menuju <i>Net Zero Emission</i>	11.Penurunan Intensitas Emisi GRK Tahunan (%)	23,66	41,27	58,13	73,47	84,37
		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	67,61 (Baik)	72,32 (Baik)	78,21 (Baik)	84,09 (Baik)	91,15 (Sangat Baik)

\*) Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target

Sumber : Penetapan Sasaran Visi dan Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten / Kota Tahun 2025-2045 dan Hasil Olahan, 2024

### 4.3 MISI

Misi disusun berdasarkan visi yang telah dirumuskan, dan merupakan penjabaran secara operasional dalam rangka perwujudan visi daerah sampai dengan tahun 2045. Misi dalam RPJPD ini dipahami sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya umum tersebut bersifat menggerakkan perubahan secara transformatif. Transformasi menjadi keniscayaan, oleh sebab itu Kabupaten Kepulauan Selayar agar berkontribusi signifikan terhadap tercapainya cita-cita provinsi untuk berposisi sebagai salah satu provinsi dengan pendapatan per kapita tinggi pada tahun 2045. Rumusan misi RPJPD Kepulauan Selayar terdiri atas upaya umum terkait substansi transformasi, upaya umum terkait landasan transformasi, dan upaya umum

terkait kerangka implementasi transformasi. Sehingga rumusan misi sebagai berikut:

1. **Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tangguh dan berkualitas**, untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatkan akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi kemaritiman dan ekonomi kerakyatan**, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan; membaiknya struktur perekonomian berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi daerah sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian; semakin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok yang didukung dengan swasembada pangan dan disertai dengan tersedianya jaminan pangan pada tingkat masyarakat; semakin meningkatnya pemanfaatan Iptek dan inovasi serta transformasi digital dalam peningkatan perekonomian daerah; dan semakin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.
3. **Mewujudkan pengembangan tata kelola pemerintahan yang *good governance***, untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik, peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, dan mewujudkan keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung oleh stakeholders dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat.
4. **Mewujudkan kemandapan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan**, untuk meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat; meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat dari segala tindak kejahatan; berkurangnya kasus kekerasan dan diskriminasi; meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung kepastian hukum dan penegakan HAM; meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan daerah; dan meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah.

5. **Mewujudkan ketahanan agama, sosial, budaya, dan ekologi**, untuk makin mantapnya kearifan budaya lokal; meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang, serta makin kuatnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral yang dicirikan dengan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, mengedepankan kegotong royongan; meningkatkan kesadaran sikap mental dan perilaku masyarakat sebagai salah satu modal dasar pembangunan. Untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup; meningkatkan kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, serta menguatkan ketahanan energi, ketahanan air dan kemandirian pangan.
6. **Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah yang terkoneksi**, untuk memantapkan jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru; terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh; dan terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
7. **Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan**, untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pemukiman yang mengurangi laju pemanasan global; dan meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim serta peningkatan komitmen pembangunan rendah karbon.
8. **Mewujudkan daya saing daerah yang tangguh dengan penerapan teknologi dan inovasi**, untuk meningkatnya pembangunan dan kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui literasi digital; meningkatnya penelitian, pengembangan dan penerapan serta kerjasama riset dan inovasi perguruan tinggi, pemerintah dan swasta; optimalisasi pemanfaatan Iptek diberbagai bidang dan peningkatan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Jika dikaitkan dengan visi dan delapan misi pembangunan dapat dilihat pada **Tabel 4.5**.

Tabel 4. 5 Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar

Visi	Misi
Mapan	1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tangguh dan berkualitas
Mandiri	3. Mewujudkan pengembangan tata kelola pemerintahan yang <i>good governance</i>
Maju	2. Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi kemaritiman dan ekonomi kerakyatan
	4. Mewujudkan kemantapan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan
	5. Mewujudkan ketahanan agama, sosial, budaya, dan ekologi
	6. Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah yang terkoneksi
Berkelanjutan	7. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan
	8. Mewujudkan daya saing daerah yang tangguh dengan penerapan teknologi dan inovasi

Sumber : Hasil Olahan, 2024

Misi Kabupaten Kepulauan Selayar telah selaras dengan Misi Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 4.6**.

Tabel 4. 6 Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045

RPJPD Provinsi Tahun 2025 – 2045	RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045
Misi	Misi
1.Mewujudkan transformasi sosial	1.Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tangguh dan berkualitas
2.Mewujudkan transformasi ekonomi	2.Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi kemaritiman dan ekonomi kerakyatan
3.Mewujudkan transformasi tata kelola	3.Mewujudkan pengembangan tata kelola yang <i>good governance</i>
4.Memantapkan kemandirian daerah, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	4.Mewujudkan kemantapan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan
5.Memelihara ketahanan sosial, budaya dan ekologi	5.Mewujudkan ketahanan agama, sosial, budaya, dan ekologi
6.Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	6.Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah yang terkoneksi
7.Mewujudkan pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	7.Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan
8.Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan	8.Mewujudkan daya saing daerah yang tangguh dengan penerapan teknologi dan inovasi

## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

#### 5.1 ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Kebijakan pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kerangka kerja dalam melaksanakan misi dan mencapai visi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Arah kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan dan mengacu pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional yang termuat dalam RPJPN tahun 2025-2045 serta arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Selatan yang termuat dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045 dan disesuaikan dengan karakteristik daerah. Pentahapan pembangunan lima tahunan dilakukan secara terukur guna mencapai Visi dan Sasaran Visi Kabupaten Kepulauan Selayar. Pentahapan implementasi pencapaian Visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045 dapat dilihat pada **Gambar 5.1**.



Gambar 5. 1 Tahapan Implementasi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045

Sumber : Hasil Olahan, 2024

Dukungan penjabaran arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kerangka kerja transformasi untuk menjamin keberhasilan arah prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan yang dijabarkan dalam empat tahapan sebagai berikut :

##### 5.1.1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Tahapan implementasi periode pertama pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan tahap *Penataan dan Penguatan Landasan Transformasi*, diarahkan untuk menata kembali dan membangun Kabupaten Kepulauan Selayar untuk terwujudnya sasaran peningkatan pendapatan perkapita yang dilihat dari capaian PDRB perkapita sebesar 146,13 juta rupiah, Indeks Ekonomi Biru Indonesia berada pada angka 151,93, dan kontribusi PDRB industri pengolahan sebesar 4,80 persen; terwujudnya sasaran pengetasan kemiskinan dan ketimpangan yang dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi pada kisaran rata-rata 6,31 persen per tahun, tingkat kemiskinan menurun pada angka 9,25 persen, Indeks Gini sebesar 0,331, dan kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,34 persen; terwujudnya sasaran peningkatan daya saing daerah yang dilihat dari capaian Indeks Inovasi Daerah sebesar 44,26 (Inovatif) dan Indeks Daya Saing Daerah sebesar 2,99; terwujudnya sasaran peningkatan daya saing sumber daya manusia yang dilihat dari capaian Indeks

Pembangunan Manusia sebesar 75,43; serta terwujudnya sasaran penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilihat dari capaian persentase penurunan intensitas GRK tahunan sebesar 41,27 persen dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 72,32 (Baik), maka dukungan arah kebijakan daerah untuk mencapai kerangka kerja transformasi untuk menjamin keberhasilan arah prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan sebagai berikut:

**Transformasi sosial**, tahap ini difokuskan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial serta peningkatan kualitas SDM produktif.

**Transformasi ekonomi**, tahap ini difokuskan pada proses hilirisasi sumberdaya alam unggulan; peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja; penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru; pemenuhan akses digital; pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan; penyiapan regulasi energi terbarukan secara bertahap; penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga dan pembangunan infrastruktur pendukungnya; dan pembangunan sistem jaringan kelistrikan interkoneksi dan *smart grid*.

**Transformasi tata kelola**, tahap ini difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi; penyempurnaan fondasi penataan regulasi; peningkatan kualitas ASN berbasis merit; kebijakan pembangunan berbasis bukti; penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan; peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan penguatan kapasitas masyarakat sipil.

**Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansi dan stabilitas ekonomi makro daerah**, tahap ini difokuskan pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat; lembaga demokrasi yang kuat; parlemen modern, partai politik yang berbasis nilai; menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat dan kepercayaan investor; menjaga stabilitas fiskal yang adaptif; dan menjaga stabilitas sektor keuangan.

**Ketahanan sosial budaya dan ekologi**, tahap ini difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai dinamika perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrument kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB dan penurunan emisi GRK.

**Pembangunan kewilayahan yang didukung sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan,** tahap ini difokuskan pada pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada; pemanfaatan potensi ketersediaan energi dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah; pengoptimalan pemanfaatan potensi sumber daya energi baru terbarukan; pembangunan konektivitas laut sebagai *backbone* logistik domestik dan konektivitas udara, darat dan digital; dan penataan dukungan pemanfaatan ALKI II dan ALKI III untuk menghubungkan rantai pasok barang dan jasa.

**Pembiayaan pembangunan,** tahap ini difokuskan pada penataan tata kelola fiskal dan pendanaan pembangunan non pemerintah

#### **5.1.2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034**

Tahapan implementasi periode kedua pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan tahap *Akselerasi Transformasi Pembangunan*, diarahkan pada akselerasi peningkatan kemajuan pembangunan untuk terwujudnya sasaran peningkatan pendapatan perkapita yang dilihat dari capaian PDRB perkapita sebesar 236,68 juta rupiah, Indeks Ekonomi Biru Indonesia berada pada angka 208,90, dan kontribusi PDRB industri pengolahan sebesar 5,89 persen; terwujudnya sasaran pengentasan kemiskinan dan ketimpangan yang dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi pada kisaran rata-rata 6,75 persen per tahun, tingkat kemiskinan menurun pada angka 6,47 persen, Indeks Gini sebesar 0,321, dan kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,42 persen; terwujudnya sasaran peningkatan daya saing daerah yang dilihat dari capaian Indeks Inovasi Daerah sebesar 55,92 (Inovatif) dan Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,12; terwujudnya sasaran peningkatan daya saing sumber daya manusia yang dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78,89; serta terwujudnya sasaran penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilihat dari capaian persentase penurunan intensitas GRK tahunan sebesar 55,37 persen dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 78,21 (Baik), maka dukungan arah kebijakan daerah untuk mencapai kerangka kerja transformasi untuk menjamin keberhasilan arah prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan sebagai berikut

**Transformasi sosial,** tahap ini difokuskan pada penguatan pembangunan manusia yang inklusif; dan percepatan pembangunan SDM berkualitas.

**Transformasi ekonomi,** tahap ini difokuskan pada percepatan produktivitas dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan; penerapan ekonomi biru, ekonomi hijau dan bioekonomi; penyiapan infrastruktur pendukung rendah karbon; eksplorasi energi laut (arus, gelombang, pasang surut dan perbedaan suhu lapisan laut); perluasan sistem jaringan kelistrikan interkoneksi dan *smart grid*; penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga listrik secara massif

dan peningkatan pembangunan infrastruktur pendukungnya; pemanfaatan teknologi digital semakin luas di berbagai aspek kehidupan; dan penguatan riset dan inovasi digital.

**Transformasi tata kelola**, tahap ini difokuskan pada terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proporsional, dan berkompeten; penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi; dan peningkatan masyarakat sipil yang partisipatif.

**Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansi dan stabilitas ekonomi makro daerah**, tahap ini difokuskan pada peningkatan masyarakat cerdas dan berkarakter; partai politik yang modern dan mandiri; optimalisasi pengelolaan fiskal dan moneter adaptif; dan optimalisasi pengelolaan sektor keuangan.

**Ketahanan sosial budaya dan ekologi**, tahap ini difokuskan pada penguatan lingkungan pendukung keluarga dan akses partisipasi masyarakat yang inklusif; akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi pendukung ketahanan pangan, air dan energi; penguatan pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan peningkatan kemampuan manusia dan masyarakat yang tangguh adaptif menghadapi berbagai perubahan dan bencana.

**Pembangunan kewilayahan yang didukung sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**, tahap ini difokuskan pada percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru pendukung IKN; dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan

**Pembiayaan pembangunan**, tahap ini difokuskan pada optimalisasi sumber pendanaan pemerintah dan sumber pendanaan non pemerintah.

### **5.1.3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039**

Tahapan implementasi periode ketiga pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan tahap *Perluasan Transformasi*, diarahkan pada perluasan pembangunan yang telah dicapai pada dua periode sebelumnya untuk terwujudnya sasaran peningkatan pendapatan perkapita yang dilihat dari capaian PDRB perkapita sebesar 329,36 juta rupiah, Indeks Ekonomi Biru Indonesia berada pada angka 265,88, dan kontribusi PDRB industri pengolahan sebesar 7,17 persen; terwujudnya sasaran pengentasan kemiskinan dan ketimpangan yang dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi pada kisaran rata-rata 6,85 persen per tahun, tingkat kemiskinan menurun pada angka 3,59 persen, Indeks Gini sebesar 0,311, dan kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,48 persen; terwujudnya sasaran peningkatan daya saing daerah yang dilihat dari capaian Indeks Inovasi Daerah sebesar 68,83 (Sangat Inovatif) dan Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,26; terwujudnya sasaran peningkatan daya saing sumber daya manusia yang dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,38; serta terwujudnya sasaran penurunan

emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilihat dari capaian persentase penurunan intensitas GRK tahunan sebesar 70,33 persen dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 84,09 (Baik), maka dukungan arah kebijakan daerah untuk mencapai kerangka kerja transformasi untuk menjamin keberhasilan arah prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan sebagai berikut:

**Transformasi sosial**, tahap ini difokuskan pada penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif; dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Transformasi ekonomi**, tahap ini difokuskan pada perluasan sistem jaringan kelistrikan interkoneksi dan *smart grid*.

**Transformasi tata kelola**, tahap ini difokuskan pada perwujudan kelembagaan yang adaptif; SDM ASN yang kompetitif; pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi; dan masyarakat sipil yang mandiri.

**Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansi dan stabilitas ekonomi makro daerah**, tahap ini difokuskan pada kebebasan sipil dan kesetaraan warga negara; partai politik yang modern dan berintegritas; dan peningkatan peran sektor keuangan dalam pembiayaan pembangunan.

**Ketahanan sosial budaya dan ekologi**, tahap ini difokuskan pada perwujudan manusia, keluarga dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi perubahan dan bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif; penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi; pengurangan pencemaran lingkungan, penerapan energi bersih dan penanganan limbah (padat dan cair); dan integrasi sistem pangan.

**Pembangunan kewilayahan yang didukung sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**, tahap ini difokuskan pada peningkatan konektivitas dan akselerasi pembangunan infrastruktur wilayah; dan pengembangan energi baru terbarukan.

**Pembiayaan pembangunan**, tahap ini difokuskan pada peningkatan, pemanfaatan dan perluasan cakupan sektor sumber dana non pemerintah.

#### **5.1.4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045**

Tahapan implementasi periode keempat pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan tahap *Penguatan dan perwujudan Kabupaten Selayar Mapan, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan*. Pada tahap ini diharapkan Kepulauan Selayar yang mapan, mandiri, maju dan berkelanjutan telah terwujud serta dapat berkontribusi pada perwujudan Indonesia Emas pada tahun 2045. Untuk terwujudnya sasaran peningkatan pendapatan per kapita yang dilihat dari capaian PDRB perkapita sebesar 413,37 juta rupiah, Indeks Ekonomi Biru Indonesia berada pada angka 334,24, dan

kontribusi PDRB industri pengolahan sebesar 7,71 persen; terwujudnya sasaran pengentasan kemiskinan dan ketimpangan yang dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi pada kisaran rata-rata 7,08 persen per tahun, tingkat kemiskinan menurun pada angka 0,95 persen, Indeks Gini sebesar 0,301, dan kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,48 persen; terwujudnya sasaran peningkatan daya saing daerah yang dilihat dari capaian Indeks Inovasi Daerah sebesar 74,13 (Sangat Inovatif) dan Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,40; terwujudnya sasaran peningkatan daya saing sumber daya manusia yang dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 86,66; serta terwujudnya sasaran penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilihat dari capaian persentase penurunan intensitas GRK tahunan sebesar 84,37 persen dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 91,15 (Sangat Baik), maka dukungan arah kebijakan daerah untuk mencapai kerangka kerja transformasi untuk menjamin keberhasilan arah prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan sebagai berikut:

**Transformasi sosial**, tahap ini difokuskan pada perwujudan kehidupan masyarakat Kepulauan Selayar yang mapan, tangguh dan berkualitas

**Transformasi ekonomi**, tahap ini difokuskan pada perwujudan masyarakat berpendapatan tinggi dan ketimpangan pendapatan semakin merata.

**Transformasi tata kelola**, tahap ini difokuskan pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, profesional dan adaptif.

**Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansi dan stabilitas ekonomi makro daerah**, tahap ini difokuskan pada perwujudan masyarakat dan aparat penegak hukum yang patut hukum; perwujudan demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat; perwujudan masyarakat yang aman dan nyaman; dan perwujudan pengelolaan sektor keuangan yang tangguh.

**Ketahanan sosial budaya dan ekologi**, tahap ini difokuskan pada perwujudan manusia, keluarga dan masyarakat yang tangguh menghadapi berbagai perubahan dan bencana; perwujudan masyarakat religius; dan perwujudan ketahanan air dan pangan.

**Pembangunan kewilayahan yang didukung sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**, tahap ini difokuskan pada perwujudan infrastruktur wilayah dan ketahanan pangan, air dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan.

**Pembiayaan pembangunan**, tahap ini difokuskan pada perwujudan sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah.

Dukungan arah kebijakan daerah dalam mencapai keberhasilan kerangka kerja transformasi dan program prioritas nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan di atas, yang selaras dalam rangka mewujudkan Visi Kepulauan Selayar yang Mapan, Mandiri, Maju dan

Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pertahanan dapat dilihat pada **Tabel 5.1**.

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan Lima Tahunan Berdasarkan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2045

Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
<b>Kabupaten Kepulauan Selayar Mapan, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan</b>	1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tangguh dan berkualitas	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan melalui pemerataan layanan serta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan; Pemenuhan pelayanan pendidikan melalui pemerataan layanan guna mencapai wajib belajar 13 tahun; Pemenuhan pelayanan perlindungan sosial melalui peningkatan upaya pemutakhiran data dan pemenuhan standar pelayanan minimal sosial; dan peningkatan kualitas SDM produktif	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan melalui percepatan peningkatan kualitas layanan serta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas dan merata; Pemenuhan pelayanan pendidikan diprioritaskan pada peningkatan kualitas proses belajar dan mengajar serta mutu pendidikan; Pemenuhan pelayanan perlindungan sosial melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; Penguatan pembangunan manusia yang inklusif; dan Percepatan pembangunan SDM berkualitas	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan melalui perluasan upaya promotif-preventif dan perluasan cakupan dan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata; Pemenuhan pelayanan pendidikan diprioritaskan pada perluasan upaya peningkatan kualitas proses belajar dan mengajar serta mutu pendidikan berbasis TIK dan IoT; dan Pemenuhan pelayanan perlindungan sosial melalui perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dan perluasan aksesibilitas kesempatan kerja secara inklusif; Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif; dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Perwujudan kehidupan masyarakat Kepulauan Selayar yang mapan, tangguh dan berkualitas
	2. Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi kemaritiman dan ekonomi kerakyatan	Hilirisasi sumber daya alam unggulan; Peningkatan kapasitas riset inovasi; Peningkatan produktivitas tenaga kerja; Penerapan	Peningkatan produktivitas sumber daya alam unggulan; Penguatan riset dan inovasi digital; Optimalisasi penerapan ekonomi hijau, ekonomi	Akselerasi peningkatan produktivitas sumber daya alam unggulan dengan penerapan teknologi untuk menghasilkan daya saing produksi;	Perwujudan masyarakat berpendapatan tinggi dan ketimpangan pendapatan semakin merata.

Visi	Misi		Tahapan Arah Kebijakan			
			Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
			ekonomi hijau dan ekonomi biru; Pemenuhan akses digital; dan Pembangunan pusat pertumbuhan baru.	biru dan bioekonomi; Percepatan produktivitas dan perluasan pusat pertumbuhan baru; dan Pemanfaatan teknologi digital semakin luas di berbagai aspek kehidupan.	Akselerasi penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang komprehensif;	
	3.	Mewujudkan pengembangan tata kelola pemerintahan yang <i>good governance</i>	Perbaiki kelembagaan yang tepat fungsi; Penyempurnaan fondasi penataan regulasi; Peningkatan kualitas ASN berbasis merit; Kebijakan pembangunan berbasis bukti; Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan; Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan Penguatan kapasitas masyarakat sipil	Pembentukan kelembagaan yang kolaboratif; SDM ASN yang sejahtera, proporsional dan berkompeten; Penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi; dan Peningkatan masyarakat sipil yang partisipatif.	Perwujudan kelembagaan yang adaptif; SDM ASN yang kompetitif; Pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi; Masyarakat sipil yang mandiri	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, profesional dan adaptif
	4.	Mewujudkan kemantapan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan	Penguatan stabilitas hukum, politik; Lembaga demokrasi yang kuat; Parlemen modern, parpol yang berbasis nilai; Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat; Penataan pendidikan politik masyarakat; Menjaga stabilitas harga, daya beli	Digitalisasi sistem penegakan hukum yang modern; Penguatan kapasitas kelembagaan ketentraman; Peningkatan masyarakat cerdas dan berkarakter; Partai politik yang modern dan mandiri; Optimalisasi pengelolaan sektor keuangan; Optimalisasi pengelolaan fiskal dan	Kesetaraan hukum bagi semua lapisan masyarakat; Partai politik yang modern dan berintegritas; Kebebasan sipil dan kesetaraan warga negara; Peningkatan peran sektor keuangan dalam pembiayaan pembangunan; dan Peningkatan pemanfaatan dan	Perwujudan masyarakat dan aparat penegak hukum yang patut hukum; Perwujudan demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat; Perwujudan masyarakat yang aman dan nyaman; Perwujudan pengelolaan sektor keuangan yang

Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
		masyarakat dan kepercayaan investor; Menjaga stabilitas fiskal yang adaptif dan menjaga stabilitas sektor keuangan; Peningkatan peran sektor keuangan dalam mendorong aktivitas pembangunan; dan Penataan tata kelola fiskal dan pendanaan pembangunan non pemerintah.	moneter adaptif; dan Optimalisasi sumber pendanaan pemerintah dan sumber pendanaan non pemerintah	perluasan cakupan sektor sumber dana non pemerintah	tangguh; Perwujudan sinergitas pendanaan pemerintah dan non pemerintah
	5. Mewujudkan ketahanan agama, sosial, budaya, dan ekologi	Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia; Peningkatan ketangguhan manusia masyarakat dalam menghadapi berbagai dinamika perubahan dan bencana; Peningkatan ketersediaan air dan pangan berkualitas dan keberlanjutan lingkungan; Pelestarian keanekaragaman hayati; Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrument	Peningkatan penyediaan akses keagamaan, budaya; Peningkatan kemampuan manusia dan masyarakat yang tanggu adaptif menghadapi berbagai perubahan dan bencana; Perluasan ketersediaan air dan pangan berkualitas dan penguatan upaya keberlanjutan lingkungan; Pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan ekosistem endemik; Penguatan lingkungan pendukung keluarga dan akses partisipasi masyarakat yang inklusif; Akusisi teknologi berbasis riset dan inovasi pendukung ketahanan pangan, air	Peningkatan masyarakat yang religius; Perwujudan manusia, keluarga dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif; Pelestarian keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi; Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi; Pengurangan pencemaran lingkungan, penerapan energi bersih dan penanganan limbah (padat dan cair); dan	Perwujudan manusia, keluarga dan masyarakat yang tangguh menghadapi berbagai perubahan dan bencana; Perwujudan masyarakat religius; Perwujudan ketahanan pangan, air dan energi.

Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
		kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk energi baru terbarukan; Penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;	dan energi; dan Penguatan pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Integrasi sistem pangan	
	6. Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah yang terkoneksi	Pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada; Pemanfaatan potensi ketersediaan energi dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah; Pengoptimalan pemanfaatan potensi sumber daya energi baru terbarukan; Pembangunan konektivitas laut sebagai <i>backbone</i> logistik domestik dan konektivitas udara, darat dan digital; Penataan dukungan pemanfaatan ALKI II dan ALKI III untuk menghubungkan rantai pasok barang dan jasa	Peningkatan konektivitas wilayah; Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya energi baru dan terbarukan; Peningkatan kualitas pelayanan konektiviti untuk menyiapkan manusia yang berdaya saing; dan Percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru pendukung IKN	Peningkatan konektivitas dan akselerasi pembagunan infrastruktur wilayah; dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan.	Perwujudan infrastruktur wilayah dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan.
	7. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan	Pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan; Pengembangan	Akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK; Eksplorasi energi laut	Pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar, pemukiman dan lingkungan secara merata; Pengurangan	Perwujudan lingkungan hidup berkualitas dengan penerapan energi bersih di seluruh

Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
		kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; Akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK); Penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga dan pembangunan infrastruktur pendukungnya; dan Pembangunan sistem jaringan kelistrikan interkoneksi dan <i>smart grid</i>	(arus, gelombang, pasang surut dan perbedaan suhu lapisan laut); Perluasan sistem jaringan kelistrikan interkoneksi dan <i>smart grid</i> ; dan Penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga listrik secara massif dan peningkatan pembangunan infrastruktur pendukungnya.	pencemaran lingkungan, penanganan limbah (padat dan cair); Penerapan energi bersih; Perluasan sistem jaringan kelistrikan interkoneksi dan <i>smart grid</i>	sektor pembangunan
	8. Mewujudkan daya saing daerah yang tangguh dengan penerapan teknologi dan inovasi	Penguatan pengembangan sektor unggulan; Penataan dan peningkatan kerjasama daerah	Peningkatan daya saing sektor unggulan daerah; Perluasan kerjasama daerah	Akselerasi dan perluasan daya saing sektor unggulan; Peningkatan kerjasama daerah skala global	Perwujudan Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki daya saing tinggi

Sumber : Hasil Olahan, 2024

## 5.2 SASARAN POKOK

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan, maka dalam pembangunan jangka panjang diperlukan sasaran pokok yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan. Sasaran pokok yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain.

### 5.2.1. Sasaran Pokok

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepulauan Selayar, maka prioritas masing-masing tahapan pembangunan jangka menengah akan memiliki tekanan yang berbeda, akan tetapi prioritas tersebut harus tetap memiliki kesinambungan dari periode ke periode berikutnya. Sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) hasil penyelarasan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPN tahun 2025-2045. Selain itu penentuan sasaran pokok juga memperhatikan visi, misi dan arah kebijakan pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025- 2045. Oleh karena itu, dirumuskanlah 17 sasaran pokok dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045 yang dapat dilihat pada **Tabel 5.2**.

Tabel 5. 2 Misi dan Sasaran Pokok Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045

No.	Misi	Sasaran Pokok	
1.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tangguh dan berkualitas	1.	Terwujudnya derajat kesehatan yang merata, maju, modern dan berkualitas
		2.	Terwujudnya pendidikan yang merata, maju, modern dan berkualitas
		3.	Terwujudnya perlindungan sosial masyarakat yang berkeadilan
2.	Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi kemaritiman dan ekonomi kerakyatan	4.	Terwujudnya perekonomian kerakyatan yang inklusif berbasis Iptekin
		5.	Terwujudnya potensi unggulan daerah bernilai ekonomi tinggi melalui penerapan ekonomi hijau ( <i>green economy</i> ) dan ekonomi biru ( <i>blue economy</i> )
		6.	Terwujudnya sumberdaya manusia yang mandiri, kreatif dan inovatif
		7.	Terwujudnya ekspor komoditi unggulan daerah
3.	Mewujudkan pengembangan tata kelola pemerintahan yang <i>good governance</i>	8.	Terwujudnya tata laksana pemerintahan yang berintegritas, efektif, efisien dan adaptif
4.	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan	9.	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum daerah serta demokrasi substansial
		10.	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan efisien
5.	Mewujudkan ketahanan agama, sosial, budaya, dan ekologi	11.	Terwujudnya sumberdaya manusia yang beriman dan berbudaya
		12.	Terwujudnya keberdayaan dan pemenuhan hak dasar perempuan, anak dan

No.	Misi	Sasaran Pokok	
			penyanggah masalah kesejahteraan sosial
		13.	Terwujudnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan
6.	Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah yang terkoneksi	14.	Terwujudnya pembangunan perkotaan dan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan
7.	Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan	15.	Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas
		16.	Terwujudnya infrastruktur dan pemukiman yang resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
8.	Mewujudkan daya saing daerah yang tangguh dengan penerapan teknologi dan inovasi	17.	Terwujudnya daya saing daerah yang kompetitif

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 – 2045 dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD pada setiap tahapan. Uraian sasaran pokok tiap misi dapat dilihat sebagai berikut:

**Misi 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tangguh dan berkualitas**

- a. *Sasaran 1.* Terwujudnya derajat kesehatan yang merata, maju, modern dan berkualitas. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan produktif dalam perlindungan sosial yang berkesinambungan. Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata untuk semua dapat dicapai jika beberapa prasyaratnya dipenuhi yaitu tersedianya infrastruktur kesehatan (fasilitas kesehatan dan alat kesehatan) yang memadai di seluruh wilayah termasuk daerah terpencil dan kepulauan, tersedianya sumberdaya tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata, terlaksananya upaya kesehatan yang komprehensif, tersedianya regulasi untuk mendukung penyempurnaan sistem kesehatan, serta tersedianya ekosistem yang mampu memfasilitasi tumbuhnya industri kesehatan. Capaian kinerja dapat dilihat dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH), meningkatnya kesehatan ibu dan anak, meningkatnya penanganan Tuberkulosis dan meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Indikator utama pembangunan dan target capaian tahun 2045 sasaran pokok dapat dilihat pada **Tabel 5.3.**

Tabel 5. 3 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Derajat Kesehatan yang Merata, Maju, Modern dan Berkualitas Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten		Baseline 2025*	Target 2045
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1. Terwujudnya derajat kesehatan yang merata, maju, modern dan berkualitas	1. Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,64	80,81
		2	Kesehatan Ibu dan Anak		
		a)	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)	77,86	100,00

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten	Baseline 2025*	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		b) Jumlah Kematian Ibu (orang)	3	0
		c) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	36,21	2,01
		3 Penanganan Tuberkulosis:		
		a) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)	82,30	100,00
		b) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)	75,00	95,00
		4 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100,00	100,00

\*) Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target

- b. *Sasaran 2.* Terwujudnya pendidikan yang merata, maju, modern dan berkualitas. Pendidikan menjadi hal penting yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing sehingga dapat terwujud masyarakat yang lebih sejahtera. Kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada transformasi pendidikan, meliputi transformasi tata kelola pendidikan, akses layanan pendidikan termasuk pendidikan tinggi serta mutu pendidikan berorientasi nilai, relevansi dan berbasis teknologi. Capaian kinerja dapat dilihat dengan meningkatnya persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kabupaten, meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, meningkatnya Harapan Lama Sekolah (HLS), meningkatnya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi, meningkatnya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan. Indikator utama pembangunan dan target capaian tahun 2045 sasaran pokok dapat dilihat pada **Tabel 5.4.**

Tabel 5. 4 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Pendidikan yang Merata, Maju, Modern dan Berkualitas Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten	Baseline 2025*	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.Terwujudnya pendidikan yang merata, maju, modern dan berkualitas	2.Pendidikan Berkualitas yang Merata	5 a) Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional di Kabupaten untuk		
		i) Literasi Membaca (%)	45,00	80,00
		ii) Numerasi (%)	35,00	75,00
		b) Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun (tahun)	8,73	12,39
		c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,88	14,08
		6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	20,27	40,17
		7 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan (%)	23,28	32,54

\*) Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target

- c. **Sasaran 3.** Terwujudnya perlindungan sosial masyarakat yang berkeadilan. Perlindungan sosial diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Kepulauan Selayar tanpa terkecuali sesuai tingkat kerentanan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif, yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Capaian kinerja dapat dilihat dengan menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya nilai Indeks Gini, meningkatnya persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal, dan meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Indikator utama pembangunan dan target capaian tahun 2045 sasaran pokok dapat dilihat pada **Tabel 5.5**.

Tabel 5. 5 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Perlindungan Sosial Masyarakat yang Berkeadilan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten	Baseline 2025*	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.Terwujudnya perlindungan sosial masyarakat yang berkeadilan	3.Perlindungan Sosial yang Adaptif	8 a) Tingkat Kemiskinan (%)	10,24	0,95
		b) Indeks Gini (Indeks)	0,341	0,301
		9 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	0,17	0,79
		10 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial	53,45	98,59

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten	Baseline 2025*	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Ketenagakerjaan (%)		

\*) Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target

**Misi 2. Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi kemaritiman dan ekonomi kerakyatan**

- a. *Sasaran 4.* Terwujudnya perekonomian kerakyatan yang inklusif berbasis Iptekin. Peningkatan produktivitas ekonomi dilakukan secara optimal berbasis riset, teknologi, dan inovasi, serta didukung dengan digitalisasi ekonomi yang memadai dan terjangkau. Capaian kinerja dapat dilihat dengan meningkatnya rasio PDRB Industri Pengolahan, meningkatnya pengembangan pariwisata, meningkatnya jumlah industri ekonomi kreatif, meningkatnya produktivitas UMKM, koperasi, BUMD, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja, meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, dan meningkatnya Indeks Kapabilitas Inovasi. Indikator utama pembangunan dan target capaian tahun 2045 sasaran pokok dapat dilihat pada

**Tabel 5.6.**

Tabel 5. 6 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Perekonomian Kerakyatan yang Inklusif Berbasis Iptekin Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten	Baseline 2025*	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Terwujudnya perekonomian kerakyatan yang inklusif berbasis Iptekin	4. Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi	11 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	2,89	7,71
		12 Pengembangan Pariwisata		
		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,25	2,34
		b) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	21.441	68.994
		13 Jumlah Industri Ekonomi Kreatif (Industri)	1.363	2.890
		14 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
		a) Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Kabupaten (Industri)	1.480	3.139
		b) Persentase Koperasi Sehat (%)	20,45	70,00
		c) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,55	1,13
		d) Produktivitas Padi (kw/ha)	73,82	99,53
f) Jumlah Produksi Perikanan (ton)	27.154,14	50.917,34		

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten		Baseline 2025*	Target 2045
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,32	0,10
		16	a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	61,34	85,36
			b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	74,19	92,81
		17	Tingkat Penguasaan IPTEK		
			Indeks Kapabilitas Inovasi (Indeks)	1,01	3,67

\*) Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target

- b. *Sasaran 5.* Terwujudnya potensi unggulan daerah bernilai ekonomi tinggi melalui penerapan ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi biru (*blue economy*). Perwujudan masyarakat Kepulauan Selayar berpenghasilan tinggi dua puluh tahun kedepan dioptimalkan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau agar peningkatan produktivitas komoditas pangan tetap tinggi dan tetap sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan. Arah pembangunan penerapan ekonomi hijau ini diperkuat oleh penerapan ekonomi biru. Capaian kinerja dapat dilihat dengan meningkatnya Indeks Ekonomi Hijau. Indikator utama pembangunan dan target capaian tahun 2045 sasaran pokok dapat dilihat pada **Tabel 5.7.**

Tabel 5. 7 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Potensi Unggulan Daerah Bernilai Ekonomi Tinggi melalui Penerapan Ekonomi Hijau (*Green Economy*) dan Ekonomi Biru (*Blue Economy*) Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten		Baseline 2025*	Target 2045
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
5.Terwujudnya potensi unggulan daerah bernilai ekonomi tinggi melalui penerapan ekonomi hijau ( <i>green economy</i> ) dan ekonomi biru ( <i>blue economy</i> )	5.Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru		
			Indeks Ekonomi Hijau (Indeks)	23,51	35,12

\*) Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target

- c. *Sasaran 6.* Terwujudnya sumberdaya manusia yang mandiri, kreatif dan inovatif. Kebijakan transformasi digital dilaksanakan dengan membangun ekosistem digital tangguh yang dapat mendukung perekonomian dan meningkatkan sumberdaya manusia yang lebih mandiri, kreatif dan inovatif. Capaian kinerja dapat dilihat dengan meningkatnya persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi. Indikator utama pembangunan dan target capaian tahun 2045 sasaran pokok dapat dilihat pada **Tabel 5.8.**

Tabel 5. 8 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Mandiri, Kreatif dan Inovatif Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten		Baseline	Target
				2025*	2045
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
6.Terwujudnya sumberdaya manusia yang mandiri, kreatif dan inovatif	6.Transformasi Digital	19	Persentase layanan Publik yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i> dan Terintegrasi (%)	36,63	96,19

\*) *Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target*

- d. *Sasaran 7.* Terwujudnya ekspor komoditi unggulan daerah. Arah pembangunan integrasi domestik dan global dimaksudkan untuk menguatkan posisi Kepulauan Selayar sebagai hub perdagangan KTI. Capaian kinerja dapat dilihat dengan meningkatnya persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok, meningkatnya pembentukan Modal Tetap Bruto dan meningkatnya Net Ekspor Barang dan Jasa. Indikator utama pembangunan dan target capaian tahun 2045 sasaran pokok dapat dilihat pada **Tabel 5.9**.

Tabel 5. 9 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya ekspor komoditi unggulan daerah Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten		Baseline	Target
				2025*	2045
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
7.Terwujudnya ekspor komoditi unggulan daerah	7.Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok (%)	0,46	0,08
		21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	45,47	49,97
		22	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-9,72	1,21

\*) *Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target*

### **Misi 3. Mewujudkan pengembangan tata kelola pemerintahan yang good governance**

- a. *Sasaran 8.* Terwujudnya tata laksana pemerintahan yang berintegritas, efektif, efisien dan adaptif. Tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan inovatif mengedepankan pengelolaan pemerintahan yang mengutamakan nilai-nilai kejujuran, transparansi kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, serta penggunaan inovasi untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pemerintahan. Capaian kinerja dapat dilihat dengan meningkatnya nilai Indeks Reformasi Hukum, meningkatnya nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), meningkatnya nilai Indeks Pelayanan Publik, meningkatnya nilai Indeks Survey Penilaian Integritas, meningkatnya nilai MCP KPK, dan meningkatnya nilai Indeks Maturitas SPIP. Indikator utama pembangunan dan target capaian tahun 2045 sasaran pokok dapat dilihat pada **Tabel 5.10**.

Tabel 5. 10 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan yang Berintegritas, Efektif, Efisien dan Adaptif Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten		Baseline	Target
				2025*	2045
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
8. Terwujudnya tata laksana pemerintahan yang berintegritas, efektif, efisien dan adaptif	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	23	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	50 (Buruk)	85 (Sangat Baik)
		24	Indeks SPBE (Indeks)	2 (Cukup)	3,5 (Sangat Baik)
		25	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,51 (C)	4,01 (A-)
		26	a) Indeks Survey Penilaian Integritas (Indeks)	70 (Rentan)	85 (Terjaga)
			b) Nilai MCP KPK	72,22	89,98
	c) Indeks Maturitas SPIP (Indeks)	3,1 (Terdefinisi)	4,5 (Optimum)		

\*) Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target

**Misi 4. Mewujudkan kemantapan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan**

- a. Sasaran 9. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum daerah serta demokrasi substansial. Ketaatan hukum, ketertiban, keamanan, dan demokrasi substansial merupakan pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera. Penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh, dan demokrasi yang berkeadilan akan meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat stabilitas sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Capaian kinerja dapat dilihat dengan meningkatnya persentase penegakan hukum peraturan daerah, meningkatnya persentase tindak kriminal yang ditangani, meningkatnya persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD, meningkatnya peraturan daerah yang merupakan inisiatif DPRD dan meningkatnya persentase perempuan pengurus partai politik. Indikator utama pembangunan dan target capaian tahun 2045 sasaran pokok dapat dilihat pada **Tabel 5.11**.

Tabel 5. 11 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah serta Demokrasi Substansial Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten		Baseline	Target
				2025*	2045
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
9. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum daerah serta demokrasi substansial	10. Ketaatan Hukum Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial	27	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100,00	100,00
		28	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani (%)	25,00	75,00
		29	a) Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD (%)	20,00	20,00

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten	Baseline 2025*	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		b) Peraturan Daerah yang merupakan Inisiatif DPRD (Perda)	11	12
		c) Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik (%)	38,66	45,05

\*) Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target

- b. *Sasaran 10.* Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan efisien. Stabilitas ekonomi makro daerah adalah kondisi perekonomian yang mampu berjalan dengan baik tanpa mengalami fluktuasi yang tajam dan tidak terduga. Stabilitas ekonomi makro daerah adalah fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja dapat dilihat dengan meningkatnya rasio pajak daerah terhadap PDRB, menurunnya tingkat inflasi, meningkatnya pertumbuhan investasi daerah dan meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator utama pembangunan dan target capaian tahun 2045 sasaran pokok dapat dilihat pada **Tabel 5.12**.

Tabel 5. 12 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Efisien Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten	Baseline 2025*	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan efisien	11.Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	30 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,241	0,309
		31 Tingkat Inflasi Gabungan (%)	2,84	1,44
		32 Pertumbuhan Investasi Daerah (%)	9,09	18,03
		33 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	66,427	75,440

\*) Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target

#### **Misi 5. Mewujudkan ketahanan agama, sosial, budaya, dan ekologi**

- a. *Sasaran 11.* Terwujudnya sumberdaya manusia yang beriman dan berbudaya . Beragama maslahat dan berkebudayaan maju menunjukkan integrasi harmonis antar agama yang dimaknai dalam konteks manfaat bersama (maslahat) dan pembangunan budaya yang progresif dan inklusif. Tidak hanya tentang menjalankan praktik keagamaan dengan benar tetapi juga mengembangkan dan memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Capaian kinerja dapat dilihat dengan meningkatnya persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi, meningkatnya persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/ fasilitasi oleh pemerintah

daerah. Indikator utama pembangunan dan target capaian tahun 2045 sasaran pokok dapat dilihat pada **Tabel 5.13**.

Tabel 5. 13 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Beriman dan Berbudaya Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten		Baseline 2025*	Target 2045
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
11. Terwujudnya sumberdaya manusia yang beriman dan berbudaya	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	34	Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi (%)	82,05	100,00
		35	Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/ Fasilitas oleh Pemerintah Daerah (%)	100,00	100,00

\*) Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target

- b. **Sasaran 12.** Terwujudnya keberdayaan dan pemenuhan hak dasar perempuan, anak dan penyandang masalah kesejahteraan sosial . Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif menunjukkan sebuah tatanan lingkungan dimana setiap individu memiliki kesempatan untuk hidup dengan martabat dan meraih potensi sepenuhnya, serta dapat mencapai kesejahteraan bersama dan keadilan yang lebih besar. Capaian kinerja dapat dilihat dengan meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, meningkatnya Indeks Perlindungan Anak, dan menurunnya nilai Indeks Ketimpangan Gender. Indikator utama pembangunan dan target capaian tahun 2045 sasaran pokok dapat dilihat pada **Tabel 5.14**.

Tabel 5. 14 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Keberdayaan dan Pemenuhan Hak Dasar Perempuan, Anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten		Baseline 2025*	Target 2045
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
12. Terwujudnya keberdayaan dan pemenuhan hak dasar perempuan, anak dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	36	a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Indeks)	63,5 (Cukup Responsif)	80 (Responsif)
			b) Indeks Perlindungan Anak (Indeks)	61,00	76,00
		37	Indeks Ketimpangan Gender (Indeks)	0,95	0,45

\*) Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target

- c. *Sasaran 13.* Terwujudnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan. Berketahanan energi, air, dan pangan merupakan hal penting dalam konteks keberlanjutan dan keberhasilan suatu daerah dalam memastikan ketersediaan sumber daya vital untuk kehidupan manusia. Ketiga aspek ini saling terkait dan penting untuk membangun masyarakat yang stabil dan sejahtera. Capaian kinerja dapat dilihat dengan meningkatnya ketahanan energi, ketahanan pangan dan ketahanan air. Indikator utama pembangunan dan target capaian tahun 2045 sasaran pokok dapat dilihat pada **Tabel 5.16**.

Tabel 5. 15 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten	Baseline 2025*	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. Terwujudnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	16. Berketahanan Energi, Air dan Pangan	38 Ketahanan Energi, Air dan Pangan		
		a) Ketahanan Energi		
		i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	327,62	587,86
		b) Ketahanan Pangan		
		i) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	7,91	3,25
		ii) Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	77,39	112,53
		iii) Skor Pola Pangan Harapan	88,51	100,00
		a) Ketahanan air		
		i) Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)	62,62	84,44
		ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	42,05	100,00

\*) Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target

**Misi 6. Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah yang terkoneksi**

- a. *Sasaran 14.* Terwujudnya pembangunan perkotaan dan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan. Sasaran ini menggambarkan perkotaan maupun pedesaan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Peran pentingnya perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif pedesaan. Peran ini akan membantu menyeimbangkan distribusi ekonomi, mengurangi disparitas, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk. Capaian kinerja dapat dilihat dengan meningkatnya kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi, meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, meningkatnya nilai Indeks Infrastruktur, dan meningkatnya

persentase desa mandiri. Indikator utama pembangunan dan target capaian Tahun 2045 sasaran pokok dapat dilihat pada **Tabel 5.17**.

Tabel 5. 16 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten	Baseline 2025*	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14. Terwujudnya pembangunan perkotaan dan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	39 Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan		
		a) Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	1,22	1,48
		b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	78,41	100,00
		c) Indeks Infrastruktur (Indeks)	2,37	4,48
		d) Persentase Desa Mandiri (%)	30,86 (25 Desa)	80,25 (65 Desa)

\*) Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target

**Misi 7. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan**

- a. *Sasaran 15.* Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas. Lingkungan hidup berkualitas merupakan kondisi dimana lingkungan alam dan sosial mendukung kesejahteraan manusia dan keberlanjutan ekosistem, bukan hanya tentang kondisi fisik lingkungan, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan keberlanjutan. Capaian kinerja dapat dilihat dengan pengurangan ancaman keanekaragaman hayati, meningkatnya pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati, meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), meningkatnya rumah tangga dengan akses sanitasi aman, dan meningkatnya pengelolaan sampah. Indikator utama pembangunan dan target capaian tahun 2045 sasaran pokok dapat dilihat pada **Tabel 5.15**.

Tabel 5. 17 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten	Baseline 2025*	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15. Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	40 Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati		
		a) Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia (%)	293,37	543,47
		Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati		
		b) Indeks Pertanaman	200	300

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten	Baseline 2025*	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(IP) Padi (Indeks)		
		c) Proporsi Sawah Irigasi (%)	43,57	49,54
		d) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	612,99	1.019,38
		e) Angka Konsumsi Ikan (ton)	70,78	83,24
		41 Kualitas Lingkungan Hidup		
		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	67,61 Baik	91,15 Sangat Baik
		b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	3,68	26,50
		c) Pengelolaan Sampah		
		i) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	5,23	90,00
		ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	20,00	100,00

\*) Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target

- b. *Sasaran 16.* Terwujudnya infrastruktur dan pemukiman yang resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim . Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan kemampuan suatu sistem, komunitas, atau individu untuk tidak hanya bertahan hidup saat terjadi bencana atau perubahan iklim, tetapi juga untuk pulih dengan cepat, mengurangi kerentanan terhadap dampak masa depan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah mengalami krisis tersebut. Secara keseluruhan, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim bukan hanya tentang respons terhadap krisis saat terjadi, tetapi juga tentang upaya preventif, adaptasi jangka panjang, dan pembangunan berkelanjutan untuk menjaga kesejahteraan manusia dan lingkungan di masa depan. Capaian kinerja dapat dilihat dengan menurunnya nilai Indeks Risiko Bencana, dan menurunnya persentase penurunan emisi GRK. Indikator utama pembangunan dan target capaian Tahun 2045 sasaran pokok dapat dilihat pada **Tabel 5.18**.

Tabel 5. 18 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Infrastruktur dan Pemukiman yang Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten		Baseline	Target
				2025*	2045
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
16. Terwujudnya infrastruktur dan pemukiman yang resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	42	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	141,07 (Sedang)	130,06 (Sedang)
		43	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	23,66	84,37

\*) Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target

**Misi 8. Mewujudkan daya saing daerah yang tangguh dengan penerapan teknologi dan inovasi**

- a. Sasaran 17. Terwujudnya daya saing daerah yang kompetitif. Kerjasama antar daerah dan daya saing daerah yang tinggi merupakan dua kondisi yang saling berkaitan dan sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Kepulauan Selayar. Capaian kinerja dapat dilihat dengan meningkatnya nilai Indeks Daya Saing Daerah, dan meningkatnya jumlah kerjasama kab/kota dengan kab/ kota lainnya/ provinsi/ city sister/ skala regional/ nasional/ internasional yang ditindaklanjuti. Indikator utama pembangunan dan target capaian Tahun 2045 sasaran pokok dapat dilihat pada

**Tabel 5.19.**

Tabel 5. 19 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Meningkatnya Daya Saing Daerah Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten		Baseline	Target
				2025*	2045
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
17. Terwujudnya daya saing daerah yang kompetitif	17. Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah Tinggi	44	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)	4	15
		45	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	2,85	3,40

\*) Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target

**5.2.2. Arah Pembangunan**

Arah pembangunan merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan serta merupakan penjabaran dari sasaran pokok daerah. Arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar selama 20 (dua puluh) tahun ke depan telah diselenggarakan dengan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045. Arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas 17

arah pembangunan yang dapat dilihat pada **Tabel 5.20** dan Untuk keselarasan arah pembangunan provinsi dan daerah dapat dilihat pada **Tabel 5.21**.

Tabel 5. 20 Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045

No.	Misi	Arah Pembangunan	
1.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tangguh dan berkualitas	1.	Kesehatan untuk Semua
		2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata
		3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif
2.	Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi kemaritiman dan ekonomi kerakyatan	4.	Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi Tinggi
		5.	Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		6.	Transformasi Digital
		7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
3.	Mewujudkan pengembangan tata kelola pemerintahan yang <i>good governance</i>	8.	Regulasi, Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
4.	Mewujudkan kemandapan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan	9.	Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial
		10.	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5.	Mewujudkan ketahanan agama, sosial, budaya, dan ekologi	11.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		12.	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		13.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
6.	Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah yang terkoneksi	14.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
7.	Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan	15.	Lingkungan Hidup Berkualitas
		16.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
8.	Mewujudkan daya saing daerah yang tangguh dengan penerapan teknologi dan inovasi	17.	Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah Tinggi

Tabel 5. 21 Keselarasan Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Arah Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045

Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan		Arah Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar	
1.	Kesehatan Untuk Semua	1.	Kesehatan untuk Semua
2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata
3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif
4.	Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi	4.	Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi
5.	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	5.	Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
6.	Transformasi Digital	6.	Transformasi Digital
7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan		Arah Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar	
8.	Regulasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	8.	Regulasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
9.	Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial	9.	Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial
10.	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	10.	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
11.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	11.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
12.	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	12.	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
13.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	13.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
14.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	14.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
15.	Lingkungan Hidup Berkualitas	15.	Lingkungan Hidup Berkualitas
16.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	16.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
17.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	17.	Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah Tinggi

Sumber : RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045, 2024

Keterkaitan antara misi, sasaran pokok dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Tabel 5.22**.

Tabel 5. 22 Keterkaitan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045

No.	Misi	Sasaran Pokok		Arah Pembagunan	
1.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tangguh dan berkualitas	1.	Terwujudnya derajat kesehatan yang merata, maju, modern dan berkualitas	1.	Kesehatan untuk Semua
		2.	Terwujudnya pendidikan yang merata, maju, modern dan berkualitas	2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata
		3.	Terwujudnya perlindungan sosial masyarakat yang berkeadilan	3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif
2.	Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi kemaritiman dan ekonomi kerakyatan	4.	Terwujudnya perekonomian kerakyatan yang inklusif berbasis Iptekin	4.	Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi Tinggi
		5.	Terwujudnya potensi unggulan daerah bernilai ekonomi tinggi melalui penerapan ekonomi hijau ( <i>green economy</i> ) dan ekonomi biru ( <i>blue economy</i> )	5.	Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		6.	Terwujudnya sumberdaya manusia yang mandiri, kreatif dan inovatif	6.	Transformasi Digital

No.	Misi	Sasaran Pokok		Arah Pembangunan	
		7.	Terwujudnya ekspor komoditi unggulan daerah	7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
3.	Mewujudkan pengembangan tata kelola pemerintahan yang <i>good governance</i>	8.	Terwujudnya tata laksana pemerintahan yang berintegritas, efektif, efisien dan adaptif	8.	Regulasi, Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
4.	Mewujudkan kemantapan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan	9.	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum daerah serta demokrasi substansial	9.	Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial
		10.	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan efisien	10.	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5.	Mewujudkan ketahanan agama, sosial, budaya, dan ekologi	11.	Terwujudnya sumberdaya manusia yang beriman dan berbudaya	11.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		12.	Terwujudnya keberdayaan dan pemenuhan hak dasar perempuan, anak dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	12.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		13.	Terwujudnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	13.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
6.	Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah yang terkoneksi	14.	Terwujudnya pembangunan perkotaan dan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan	14.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
7.	Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan	15.	Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas	15.	Lingkungan Hidup Berkualitas
		16.	Terwujudnya infrastruktur dan pemukiman yang resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	16.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
8.	Mewujudkan daya saing daerah yang tangguh dengan penerapan teknologi dan inovasi	17.	Terwujudnya daya saing daerah yang kompetitif	17.	Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah Tinggi

### **5.2.3. Arah Kebijakan Transformasi**

Arah kebijakan transformasi Kabupaten Kepulauan Selayar menggambarkan upaya transformasi Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas, melalui pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2045, serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya Visi Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam kerangka pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045, arah kebijakan transformasi diarahkan untuk mencapai sasaran pokok yang dijabarkan dari arah pembangunan, yang secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.23**.

Tabel 5. 23 Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)	
			2025 (4)	2045 (5)		
1. Terwujudnya derajat kesehatan yang merata, maju, modern dan berkualitas	1. Kesehatan untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,64	80,81	1.	Perluasan upaya promotif-preventif-kuratif-dan rehabilitatif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
					2.	Pemenuhan sarana prasarana yang mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis
					3.	Penguatan dan perwujudan upaya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh iklim
		2. Kesehatan Ibu dan Anak	77,86	100,00	4.	Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat lokal yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah sulit akses
		a) Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)			5.	Percepatan pengurangan faktor resiko penyakit tidak menular secara terintegrasi lintas sektor
		b) Jumlah Kematian Ibu (orang)			3	0
		c) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	36,21	2,01	6.	Pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen
		3. Penanganan Tuberkulosis:	82,30	100,00	7.	Percepatan eliminasi penyakit menular dan tidak menular melalui pendekatan integrasi multisektor
		a) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)				
		b) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)	75,00	95,00	8.	Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak ( <i>mobile health services</i> ), khususnya untuk daerah kepulauan dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam
			9.	Peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat		

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)	
			2025 (4)	2045 (5)		
		4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100,00	100,00	10.	Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan).
					11.	Pemberdayaan pegiat sistem kesehatan alami/tradisional (herbal) sebagai alternatif pelayanan kesehatan rumah tangga, khususnya di daerah sulit akses
2.Terwujudnya pendidikan yang merata, maju, modern dan berkualitas	2.Pendidikan Berkualitas yang Merata	5. a) Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional di Kabupaten Untuk			1.	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) secara terintegrasi sesuai kewenangan pemerintah kabupaten
		i) Literasi Membaca (%)	45,00	80,00	2.	Peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis TIK dan <i>Internet of Things (IoT)</i>
		ii) Numerasi (%)	35,00	75,00	3.	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif
		b) Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun (tahun)	8,73	12,39	4.	Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui penguatan sekolah terbuka, pendidikan vokasi dan pendidikan kesetaraan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjangkau daerah kepulauan dan terpencil, serta penyediaan asrama siswa dan perumahan guru
		c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,88	14,08		
		6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	20,27	40,17	5.	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia lokal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lapangan usaha

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)		Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)	
				2025 (4)	2045 (5)		
						6.	Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi
		7.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan (%)	23,28	32,54	7.	Mendorong percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM) Perguruan Tinggi yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah seperti pertambangan pertanian, industri pengolahan hasil pertambangan, industri maritim dan perikanan, serta pariwisata
		8.				8.	Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, yang berbasis digital untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru, termasuk ekosistem pariwisata untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja
3.Terwujudnya perlindungan sosial masyarakat yang berkeadilan	3.Perlindungan Sosial yang Adaptif	8.	a) Tingkat Kemiskinan (%)	10,24	0,95	1.	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran
			b) Indeks Gini (Indeks)	0,341	0,301	2.	Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial
		9.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	0,17	0,79	3.	Memperluas aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas
						4.	Penciptaan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur yang laik dan responsif bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya
10.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	53,45	98,59	5.	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan dan daerah terpencil antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang		

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)
			2025 (4)	2045 (5)	
					disabilitas
					6. Perluasan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah terpencil dan kepulauan
					7. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu
					8. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah sesuai dengan karakteristik wilayah
					9. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan bersubsidi yang memenuhi standar keandalan bangunan
					10. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan, utamanya perumahan bersubsidi.
4.Terwujudnya perekonomian kerakyatan yang inklusif berbasis Iptekin	4.Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	2,89	7,71	1. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya
					2. Pemanfaatan ALKI II dan ALKI III secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global
					3. Pengembangan konektivitas <i>feeder</i> angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo ( <i>Roll-On/Roll-Off</i> ) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah Sulawesi

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)	
			2025 (4)	2045 (5)		
					4.	Pengembangan wilayah termasuk <i>aerocity</i> serta pengembangan bandara perairan dan <i>seaplane</i> termasuk untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas
		12. Pengembangan Pariwisata				
		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,25	2,34	5.	Penumbuhan dan peningkatan kapasitas <i>emerging sectors</i> (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya)
		b) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (orang)	21.441	68.994	6.	Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi ( <i>eco-tourism</i> )
		13. Jumlah Industri Ekonomi Kreatif (industri)	1.363	2.890	7.	Pelaksanaan afirmasi <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, pertambangan dan industri
		14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			8.	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
					9.	Penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah, serta infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah
		a) Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (industri)	1.450	3.139	10.	Pengembangan industri hilir tangguh iklim berbasis masyarakat dan sarana pendukungnya
		b) Persentase Koperasi Sehat (%)	20,45	70,00	11.	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
					12.	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)	
			2025 (4)	2045 (5)		
		c) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,55	1,13	13.	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
		d) Produktivitas Padi (kw/ha)	73,82	99,53	14.	Peningkatan produktivitas sektor perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan, serta pengembangan industri pengolahan sebagai penunjang ekonomi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
		e) Jumlah Produksi Perikanan (ton)	27.154,14	50.917,34	15.	Perluasan akses dan literasi keuangan inklusif dan produktif bagi petani dan nelayan
					16.	Pemanfaatan teknologi pemuliaan tanaman lokal
		15. a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,32	0,10	17.	Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, yang berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja
		16. b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	61,34	85,36	18.	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja perempuan
		c) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	74,19	92,81		
		17. Tingkat Penguasaan IPTEK			19.	Penuntasan dan penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok
		Indeks Kapabilitas Inovasi (Indeks)	1,01	3,67	20.	Penyediaan jaringan seluler khususnya daerah yang masih berada dalam titik <i>blank spot</i> sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan
					21.	Penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan
					22.	Penyediaan infrastruktur TIK yang handal dan terjangkau di seluruh wilayah, termasuk kawasan perairan dan kepentingan pelayaran, mencakup akses internet yang cepat dan stabil, serta dukungan teknologi terbaru seperti 5G di kawasan-kawasan strategis

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)
			2025 (4)	2045 (5)	
					23. Peningkatan literasi digital terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dasar penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan <i>online</i> dan siber
5. Terwujudnya potensi unggulan daerah bernilai ekonomi tinggi melalui penerapan ekonomi hijau ( <i>green economy</i> ) dan ekonomi biru ( <i>blue economy</i> )	5. Penerapan Ekonomi Hijau	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	23,51	35,12	1. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah melalui pengembangan berbagai komoditas unggulan yang dilakukan di wilayah daratan, pesisir, dan lautan
					2. Pengembangan jasa lingkungan dan imbal jasa lingkungan
					3. Pengelolaan lahan, kawasan laut, dan pesisir secara berkelanjutan
					4. Peningkatan rehabilitasi lahan, pesisir dan laut
		5. Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui praktik agroforestri, pertanian regeneratif, dan praktik pertanian berkelanjutan			
		6. Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif			
		7. Peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan bentang lahan dan sumberdaya alam			
		8. Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan pada sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, wisata bahari, dan industri kemaritiman			
		9. Peningkatan penerapan praktik pertanian yang baik, seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan, pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan.			

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)	
			2025 (4)	2045 (5)		
					10.	Pengembangan komoditas unggulan pangan yang dilakukan di wilayah daratan, pesisir, dan lautan berbasis keunggulan wilayah
6. Terwujudnya sumberdaya manusia yang mandiri, kreatif dan inovatif	6. Transformasi Digital	19. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i> dan Terintegrasi (%)	36,63	96,19	1.	Penyediaan jaringan seluler khususnya daerah yang masih berada dalam titik <i>blank spot</i> sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan
					2.	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok
					3.	Peningkatan literasi digital terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dasar penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan <i>online</i> dan siber
					4.	Penyediaan infrastruktur TIK yang handal dan terjangkau di seluruh wilayah, termasuk kawasan perairan dan kepentingan pelayaran, mencakup akses internet yang cepat dan stabil, serta dukungan teknologi terbaru seperti 5G di kawasan-kawasan strategis
7. Terwujudnya ekspor komoditi unggulan daerah	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok (%)	0,46	0,08	1.	Penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antar kawasan pertumbuhan ekonomi
					2.	Perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya
					3.	Peningkatan keterlibatan dan partisipasi para pelaku ekonomi dalam rantai pasok global ( <i>global supply chain</i> )

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)		Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)	
				2025 (4)	2045 (5)		
		21.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	45,47	49,97	4.	Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global
						5.	Peningkatan kerjasama perdagangan internasional, penyederhanaan prosedur kepabeanan, dan efisiensi biaya logistik
		22.	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-9,72	1,21	6.	Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor ke negara yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi
						7.	Pemanfaatan ALKI II disisi wilayah Sulawesi bagian barat dan ALKI III di sisi wilayah Sulawesi bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global
						8.	Pengembangan konektivitas <i>feeder</i> angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal <i>RoRo (Roll-On/Roll-Off)</i> angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda
8.Terwujudnya tata laksana pemerintahan yang berintegritas,efektif, efisien dan adaptif	8.Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	23.	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	50 (Buruk)	85 (Sangat Baik)	1.	Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah
						2.	Pembangunan dan pengembangan <i>Big Data</i> harmonisasi regulasi yang memiliki filter untuk harmonisasi
		24.	Indeks SPBE (Indeks)	2 (Cukup)	3,5 (Sangat Baik)	3.	Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN Daerah, dan pengelolaan aset daerah
						4.	Penyediaan NGWF ( <i>Firewall Jaringan</i> ) & WAF ( <i>Firewall Aplikasi</i> ) serta sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)
			2025 (4)	2045 (5)	
					<p>5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis <i>Human Networking Management</i>, dan pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah</p> <p>6. Pengawasan proses dan penguatan wilayah integritas tata kelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>7. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi</p> <p>8. Penguatan organisasi pemerintah berbasis fungsional <i>government</i>, peningkatan kualitas <i>leadership</i> bagi <i>top</i> dan <i>middle</i> manajemen, dan institusionalisasi budaya kerja <i>fungsional government</i></p>
		25. Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,51 ( C )	4,01 ( A- )	<p>9. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsif, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju <i>zero complain</i>, penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi layanan publik agar lebih responsif, peningkatan akses dan kemudahan layanan publik untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yang disediakan pemerintah</p> <p>10. Pengawasan proses dan penguatan wilayah integritas tata kelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>11. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah</p> <p>12. Pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara</p>

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)
			2025 (4)	2045 (5)	
					pertumbuhan ekonomi, perlindungan dan kesejahteraan sosial secara kesinambungan antar periode pembangunan
		26. a) Indeks Survey Penilaian Integritas (Indeks)	70 (Rentan)	85 (Terjaga)	13. Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital
		b) Nilai MCP KPK	72,22	89,98	14. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
		c) Indeks Maturitas SPIP (Indeks)	3,1 (Terdefinisi)	4,5 (Optimum)	15. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
					16. Peningkatan transparansi dan tata kelola pengadaan barang/jasa yang memperhatikan aspek berkelanjutan dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan
					17. Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang inklusif dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
					18. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional
9.Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum daerah serta demokrasi substansial	9.Ketaatan Hukum Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial	27. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100,00	100,00	1. Perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, bersih dan berkeadilan, serta penguatan implementasi dan penegakan kebijakan yang tegas dan konsisten
		28. Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani (%)	25,00	75,00	2. Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif
					3. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial
		29. a) Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD (%)	20,00	20,00	4. Mendukung penguatan integritas partai politik di daerah
					b) Peraturan Daerah yang merupakan Inisiatif

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)	
			2025 (4)	2045 (5)		
		<p>DPRD (Perda)</p> <p>c) Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik (%)</p>			6.	Peningkatan partisipasi publik dalam pemilihan kepala negara, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah
10. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan efisien	10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	30. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,241	0,309	1.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD).
		31. Tingkat Inflasi Gabungan (%)	2,84	1,44	2.	Penguatan pengendalian inflasi daerah yang tekoordinasi dengan lintas stakeholder
					3.	Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau ( <i>green financing</i> ), pendanaan biru ( <i>blue financing</i> ), dan pembiayaan alternatif lainnya
		32. Pertumbuhan Investasi Daerah (%)	9,09	18,03	4.	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>
5.	Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis					
		33. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	66,427	75,440	6.	Mendorong penguatan sektor keuangan syariah dan integrasinya dalam ekosistem ekonomi syariah
11. Terwujudnya sumberdaya manusia yang beriman dan berbudaya	11. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	34. Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi (%)	82,05	100,00	1.	Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial
					2.	Pelestarian kearifan lokal dan perlindungan warisan budaya
					3.	Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi
					4.	Peningkatan sinergitas antara lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan dan intensitas pertunjukan seni

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)		
			2025 (4)	2045 (5)			
					5.	Penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan	
					6.	Pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal	
					7.	Peningkatan upaya dan ide inovatif dalam menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya	
		35.	Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/ Fasilitas oleh Pemerintah Daerah (%)	100,00	100,00	8.	Penguatan kerukunan antar umat beragama
					9.	Penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika	
					10.	Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan	
					11.	Penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama	
12. Terwujudnya keberdayaan dan pemenuhan hak dasar perempuan, anak dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	12. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	36.	a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Indeks)	63,5 (Cukup Responsif)	80 (Responsif)	1.	Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
					2.	Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia melalui perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, penyediaan sarana dan prasarana yang responsif ragam disabilitas dan lansia utamanya pada sektor pelayanan publik, perluasan akses ragam disabilitas dalam pekerjaan formal, serta memastikan penyandang disabilitas dan lansia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain	

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)
			2025 (4)	2045 (5)	
		b) Indeks Perlindungan Anak (Indeks)	61	76	<p>3. Pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan sistem perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah</p> <p>4. Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang</p> <p>5. Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda agar mampu berkiprah dalam kancah nasional dan internasional</p> <p>6. Penguatan kapasitas lembaga kepemudaan yang diprioritaskan pada ketangguhan dan resiliensi pemuda dalam dinamika globalisasi</p> <p>7. Peningkatan kompetensi sumberdaya dan kelembagaan keolahragaan baik untuk olahraga prestasi dan olahraga masyarakat di kabupaten</p>
		37. Indeks Ketimpangan Gender (Indeks)	0,95	0,45	<p>8. Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformatif</p> <p>9. Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sektor</p> <p>10. Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan</p> <p>11. Pemberdayaan perempuan, pemuda penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan</p>

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)
			2025 (4)	2045 (5)	
13. Terwujudnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	13. Berketahanan Energi, Air dan Pangan	38. Ketahanan Energi, Air dan Pangan a) Ketahanan Energi			1. Penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu FEW Nexus
		i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	327,62	587,86	2. Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik 3. Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas ( <i>smart grid</i> ) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik 4. Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil ( <i>isolated mini/micro-grid</i> ) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas 5. Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia 6. Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik 7. Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan 8. Pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi 9. Peningkatan kapasitas energi listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, terutama yang berbasis sumberdaya perairan 10. Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga terutama di pesisir dan pulau, dan sektor transportasi 11. Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat, pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan kelistrikan yang diikuti kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan
		b) Ketahanan Pangan			12. Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui praktik agroforestri, pertanian regeneratif. dan praktik pertanian berkelanjutan yang lain

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)	
			2025 (4)	2045 (5)		
					13.	Pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang
		i) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	7,91	3,25	14.	Penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama dalam kehidupan, masyarakat berpendapatan rendah, tinggal di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil atau terkena dampak bencana
		ii) Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	77,39	112,53	15.	Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim
					16.	Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting
		iii) Skor Pola Pangan Harapan	88,51	100,00	17.	Penerapan teknologi <i>climate smart agriculture</i> melalui penyediaan bibit berkualitas
		a) Ketahanan air			18.	Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air
		i) Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)	62,62	84,44	19.	Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat
					20.	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air
		ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	42,05	100	21.	Penguatan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkinerja baik dan optimal
					22.	Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang minum aman sesuai karakteristik daerah. terpusat di wilayah perkotaan. berkinerja baik dan optimal
					23.	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum
					24.	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)		
			2025 (4)	2045 (5)			
					dan kepulauan		
14.Terwujudnya pembangunan perkotaan dan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan	14.Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	39. Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan			1. Pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan pengembangan kawasan, simpul transportasi utama (pelabuhan), dan fasilitas antarmoda		
					2. Penerapan transportasi ramah lingkungan <i>Electric Vehicle (EV)</i> , terutama di kawasan perkotaan		
					3. Pengembangan bandara perairan dan <i>seaplane</i> termasuk untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas		
				a) Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	1,22	1,48	4. Peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara)
				b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	78,41	100	5. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan bersubsidi yang memenuhi standar keandalan bangunan
							6. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja
							7. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah sesuai dengan karakteristik wilayah
							8. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan, utamanya perumahan bersubsidi
							9. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau sesuai karakteristik budaya dan wilayah serta kondisi geografis wilayah pesisir dan kepulauan
							10. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)
			2025 (4)	2045 (5)	
					11. Penataan kawasan permukiman wilayah perkotaan dan sekitar wilayah pertumbuhan
					12. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan
		c) Indeks Infrastruktur (Indeks)	2,37	4,48	13. Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif berbasis digital
					14. Peningkatan konektivitas antara daratan dengan pulau serta antara perdesaan dan perkotaan
					15. Pengembangan pusat-pusat agribisnis dan agroindustri berbasis kawasan secara sinergis antara perdesaan dan perkotaan
					16. Pengembangan transportasi perdesaan dan perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan
		d) Persentase Desa Mandiri (%)	30,86 (25 Desa)	80,25 (65 Desa)	17. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah di perdesaan, perkotaan, dan kepulauan
					18. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik
15. Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	40. Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati			1. Perencanaan program konservasi dan restorasi yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati komoditas ekonomis penting dan endemik, dengan mempertimbangkan budaya setempat
		a) Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia (%)	293,37	543,47	2. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana
		Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati			3. Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi
		b) Indeks Pertanaman (IP) Padi (Indeks)	200	300	4. Penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)
			2025 (4)	2045 (5)	
		c) Proporsi Sawah Irigasi (%)	43,57	49,54	
		d) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	612,99	1.019,38	
		e) Angka Konsumsi Ikan (ton)	70,78	83,24	
		41. Kualitas Lingkungan Hidup			5. Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal
					6. Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS serta kawasan konservasi darat dan perairan
					7. Perencanaan dan percepatan upaya penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
					8. Mendukung peningkatan pelaksanaan reforma agraria yang berorientasi pada berkelanjutan
					9. Penguatan implementasi integrasi tataruang darat dan laut melalui pengelolaan DAS, pengelolaan sampah/limbah, dan pendanaan
		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	67,61 (Baik)	91,15 (Sangat Baik)	10. Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang melalui reklamasi lahan bekas tambang untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan, agar dapat berfungsi kembali dan berdaya guna serta meminimalisir bahaya dan ancaman dari lahan yang terbengkalai
					11. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau
					12. Pengelolaan lahan, kawasan laut, dan pesisir secara berkelanjutan
					13. Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa ( <i>home</i>

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)
			2025 (4)	2045 (5)	
					<i>range</i> ) dan konektivitas spesies yang dilindungi
		b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	3,68	26,50	14. Penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan
					15. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman
		c) Pengelolaan Sampah			16. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
		i) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	5,23	90,00	17. Penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan peningkatan persentase sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada prinsip ekonomi sirkular
					18. Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah, termasuk pencegahan kebocoran sampah ke perairan
		ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	20,00	100,00	19. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif berdasarkan karakteristik daerah
16. Terwujudnya infrastruktur dan permukiman yang resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	42. Indeks Risiko Bencana (Indeks)	141,07 (Sedang)	130,06 (Sedang)	1. Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan non struktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan tanggap dan respon bencana
					2. Pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi
					3. Pengembangan <i>natural based solution</i> untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai
					4. Pengembangan <i>Flood Forecasting Warning System</i>

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)
			2025 (4)	2045 (5)	
					5. Perlindungan pulau - pulau kecil dari risiko abrasi
					6. Perwujudan pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.
					7. Peningkatan penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik serta penerapan pertanian berkelanjutan dalam upaya peningkatan produksi pertanian
					8. Peningkatan kapasitas SDM petani dan nelayan yang adaptif terhadap perubahan iklim
					9. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana yang selaras dengan kondisi lingkungan dan kemajuan teknologi dalam meminimalisir munculnya berbagai resiko akibat bencana alam dan perubahan iklim
					10. Pemerataan dan penguatan konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana dan tidak mendisrupsi aktivitas logistik dan perekonomian
					11. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber pendanaan inovatif berbasis lingkungan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
					12. Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim
					13. Pemanfaatan, pengembangan dan penguatan teknologi berbasis kesiapsiagaan dan tanggap bencana
					14. Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim
		43. Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	23,66	84,37	15. Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan aksi mitigasi dan penurunan emisi GRK serta implementasi pembangunan rendah karbon
					16. Peningkatan rehabilitasi hutan/lahan dan mempertahankan luas tutupan hutan minimal

Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten (3)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (6)	
			2025 (4)	2045 (5)		
					17. Peningkatan penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik serta penerapan pertanian berkelanjutan dalam upaya peningkatan produksi pertanian 18. Peningkatan rehabilitasi pesisir dan laut 19. Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah 20. Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau ( <i>green financing</i> ) dan pembiayaan alternatif lainnya 21. Penerapan efisiensi energi dan peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk pengupayaan dekarbonisasi sumber energi 22. Pengembangan transportasi publik dan transportasi berkelanjutan serta elektrifikasi transportasi 23. Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan, terutama berbasis sumberdaya perairan, untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik, serta pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>cofiring</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan 24. Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia	
17.Terwujudnya daya saing daerah yang kompetitif	17.Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah Tinggi	44.	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara ( <i>Sister Province/ Sister City</i> )	4	15	1. Penataan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan kerjasama daerah.
		45.	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	2,85	3,40	2. Peningkatan daya saing dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global 3. Penguatan kemampuan daerah, pemerintah dan komunitas dalam meminimalkan risiko terhadap gangguan atau krisis, serta memperkuat kapasitas untuk menghadapi dan pulih dari dampak yang ditimbulkan

Sumber : Penyelarasan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

#### 5.2.4. Indikator Utama Pembangunan

Indikator utama pembangunan merupakan alat ukur untuk mengetahui keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mencapai sasaran pokok berdasarkan arah pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga kesinambungan, keberlanjutan dan ketercapaian sasaran pokok, serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan indikator utama pengukur keberhasilan sesuai dengan koridor yang ditetapkan dalam kebijakan pembangunan nasional. Rincian indikator utama pembangunan berdasarkan arah pembangunan yang diselaraskan dengan indikator utama pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada **Tabel 5.24**.

Tabel 5. 24 Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kepulauan Selayar

Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan		Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar	
(1)	(2)		(3)	
1.Kesehatan untuk Semua	1.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	1.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
	2.	Kesehatan Ibu dan Anak	2.	Kesehatan Ibu dan Anak
		a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	a)	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)
		b) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	b)	Jumlah Kematian Ibu (orang)
3.	Penanganan Tuberkulosis:	3.	Penanganan Tuberkulosis:	
	a) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)		a)	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)
4.	b) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)	4.	b) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)	
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	
2.Pendidikan Berkualitas yang Merata	5.	a) Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk	5.	
		i) Literasi Membaca (%)		
		ii) Numerasi (%)		
	b) Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk	6.	a) Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional di Kabupaten untuk	
			i) Literasi Membaca (%)	
			ii) Numerasi (%)	
	c) Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun (tahun)	7.	b) Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun (tahun)	
d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	c) Harapan Lama Sekolah (tahun)			
6.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	6.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	
7.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	7.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan (%)	

Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan		Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar	
(1)	(2)		(3)	
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8.	Tingkat Kemiskinan (%)	8.	a) Tingkat Kemiskinan (%) b) Indeks Gini (Indeks)
	9.	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	9.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
	10.	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	10.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
4. Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi	11.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
	12.	Pengembangan Pariwisata	12.	Pengembangan Pariwisata
		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu orang)		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) b) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (orang)
	13.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi terhadap PDB Ekonomi Kreatif (%)	13.	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif (Industri)
	14.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	14.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD
		a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)		a) Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (Industri)
		b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)		b) Persentase Koperasi Sehat (%)
		c) Rasio Kewirausahaan Provinsi (%)		c) Return on Aset (ROA) BUMD (%)
		e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)		d) Produktivitas Padi (kw/ha)
		f) Nilai Tukar Petani Pangan		e) Jumlah Produksi Perikanan (ton)
		g) Nilai Tukar Nelayan		
	15.	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	15.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		a) Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi (%)		
b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)				
16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	16.	a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	
			b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	
17.	Tingkat Penguasaan IPTEK Indeks Kapabilitas Inovasi (Indeks)	17.	Tingkat Penguasaan IPTEK Indeks Kapabilitas Inovasi (Indeks)	
5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	18.	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	18.	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		a) Indeks Ekonomi Hijau (Indeks)		Indeks Ekonomi Hijau (Indeks)
		b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Prime (%)		
6. Transformasi Digital	19.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks)	19.	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara <i>Online</i> dan Terintegrasi (%)
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20.	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi (%)	20.	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok (%)
	21.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	21.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)
	22.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	22.	Net Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)
8. Regulasi dan Tata Kelola yang	23.	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	23.	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)
	24.	Indeks SPBE (Indeks)	24.	Indeks SPBE (Indeks)

Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan		Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar	
(1)	(2)		(3)	
Berintegritas dan Adaptif	25.	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	25.	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)
	26.	Indeks Integritas Nasional (Indeks)	26.	a) Indeks Survey Penilaian Integritas (Indeks)
			26.	b) Nilai MCP KPK
		c) Indeks Maturitas SPIP (Indeks)		
9. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial	27.	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	27.	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)
	28.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	28.	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani (%)
	29.	Indeks Demokrasi Provinsi (Indeks)	29.	a) Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD (%)
			b) Peraturan Daerah yang merupakan inisiatif DPRD (Perda)	
			c) Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik (%)	
10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	30.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	30.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
	31.	Tingkat Inflasi (%)	31.	Tingkat Inflasi Gabungan (%)
	32.	Pendalaman /Intermediasi Sektor Keuangan	32.	Pertumbuhan Investasi Daerah (%)
		a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)		
		b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)		
		a) Nilai Transaksi Saham Per Kapita per Provinsi (Rp.) c) Total Kredit/PDRB (%)		
33.	Inklusi Keuangan (%)	33.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	
11. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	34.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks)	34.	Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi (%)
	35.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	35.	Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/ Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah (%)
12. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	36.	a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Indeks)	36.	a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Indeks)
		b) Indeks Perlindungan Anak (Indeks)		b) Indeks Perlindungan Anak (Indeks)
		c) Indeks Pembangunan Pemuda (Indeks)		
37.	Indeks Ketimpangan Gender (Indeks)	37.	Indeks Ketimpangan Gender (Indeks)	
13. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	38.	Ketahanan Energi, Air dan Pangan	38.	Ketahanan Energi, Air dan Pangan
		a) Ketahanan Energi		a) Ketahanan Energi
		i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)		i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
		ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)		
		b) Ketahanan Pangan		b) Ketahanan Pangan
		i) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)		i) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)
				ii) Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)
		a) Ketahanan air		iii) Skor Pola Pangan Harapan a) Ketahanan air

Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan		Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar					
(1)	(2)		(3)					
		i) Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)		i) Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)				
		ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)		ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)				
14. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	39.	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan	39.	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan				
		a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)		a) Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)				
		b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)				
		c) Persentase Desa Mandiri (%)		c) Indeks Infrastruktur (Indeks)				
		d) Persentase Desa Mandiri (%)		d) Persentase Desa Mandiri (%)				
15. Lingkungan Hidup Berkualitas	40.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Indeks)	40.	Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati				
				a) Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia (%)				
				Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati				
				b) Indeks Pertanaman (IP) Padi (Indeks)				
				c) Proporsi Sawah Irigasi (%)				
				d) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)				
			f) Angka Konsumsi Ikan (ton)					
	41.	Kualitas Lingkungan Hidup	41.	Kualitas Lingkungan Hidup				
					a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)			
					b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)			
c) Pengelolaan Sampah								
i) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)								
ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)								
		ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)						
16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	42.	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	42.	Indeks Risiko Bencana (Indeks)				
					43.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	43.	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)
b. Tahunan								
17. Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah Tinggi	44.	Persentase Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti (%)	44.	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/ Sister City)				
					45.	Indeks Ketahanan Nasional (Indeks)	45.	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)

Sumber : Hasil Olahan, 2024

Selanjutnya, untuk mengukur keberhasilan arah pembangunan, pada setiap indikator utamanya ditetapkan target capaian pada tahun 2045, dan diselaraskan dengan target capaian indikator utama pembangunan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut (**Tabel 5.25**):

Tabel 5. 25 Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar dan Penyelarasan dengan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan menurut Arah Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2045

Arah Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar	IUP RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan				IUP RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar				
	Indikator	Target		Indikator	Target				
		2025	2045		2025	2045			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
1. Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,79	79,18	1.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,64	80,81	
	2	Kesehatan Ibu dan Anak			2.	Kesehatan Ibu dan Anak			
		a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup) (orang)	140	16		a) Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)	77,86	100,00	
		b) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	23,9	6,1		b) Jumlah Kematian Ibu (orang)	3	0	
	3	Penanganan Tuberkulosis:			3.	Penanganan Tuberkulosis:			
		a) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)	79	95		a) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)	82,30	100,00	
		b) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)	91,54	98,0	b) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)	75,00	95,00		
	4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,0	99,5	4.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100,00	100,00	
	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	a) Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk						
			i) Literasi Membaca (%)	8,33-12,50	69,67-70,83				
ii) Numerasi (%)			0,00-4,17	58,33-62,50					
b)		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk			5.	b) Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional di Kabupaten untuk			
		i) Literasi Membaca (%)	31,61-33,61	69,55-71,55		i) Literasi Membaca (%)	45,00	80,00	
		ii) Numerasi (%)	25,30-27,30	61,50-63,50		ii) Numerasi (%)	35,00	75,00	
		c) Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun (tahun)	9,47	11,97-12,02		c) Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun (tahun)	8,73	12,39	
d) Harapan Lama Sekolah (tahun)		13,80-13,81	15,27-15,31	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,88	14,08			
6		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	12,81	12,81-13,96	6.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	20,27	40,17	

Arah Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar	IUP RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan				IUP RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar				
	Indikator	Target		Indikator	Target				
		2025	2045		2025	2045			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	76,58	90,0	7.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan (%)	23,28	32,54	
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	7,30-7,89	0,19-0,69	8.	a) Tingkat Kemiskinan (%)	10,24	0,95	
						b) Indeks Gini (Indeks)	0,341	0,301	
	9	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	44,5-45,0	79,22	9.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	0,17	0,79	
	10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	20,0	50,0	10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	53,45	98,59	
4. Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	12,95-13,05	18,62-19,92	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	2,89	7,71	
	12	Pengembangan Pariwisata			12	Pengembangan Pariwisata			
		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,51	2,4		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,25	2,34	
		b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu orang)	78,22	195,55		b) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (orang)	21.441	68.994	
	13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi terhadap PDB Ekonomi Kreatif (%)	2,68	2,97	13	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif (industri)	1.363	2.890	
	14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
		a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	10,24	13,08		a) Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (industri)	1.480	3.139	
		b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	1,46	3,38		b) Persentase Koperasi Sehat (%)	20,45	70,00	
		c) Rasio Kewirausahaan Provinsi (%)	3,53	10,02		c) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,55	1,13	
		e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,97	5,62		d) Produktivitas padi (kw/ha)	73,82	99,53	
		f) Nilai Tukar Petani Pangan	98,0	115-117		e) Jumlah produksi perikanan (ton)	27.154,14	50.917,34	
		g) Nilai Tukar Nelayan	122	120-122					
		15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,32	0,10
			a) Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi (%)	3,80-4,10	2,63-3,64				
		b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	39,0	80,0					
	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,3	64,7	16	a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	61,34	85,36	
						b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	74,19	92,81	

Arah Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar	IUP RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan				IUP RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar			
	Indikator	Target		Indikator	Target			
		2025	2045		2025	2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	17	Tingkat Penguasaan IPTEK			17	Tingkat Penguasaan IPTEK		
		Indeks Kapabilitas Inovasi (Indeks)	3,8	4,5-4,9		Indeks Kapabilitas Inovasi (Indeks)	1,01	3,67
5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru			18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru		
		a) Indeks Ekonomi Hijau (Indeks)	67,8	77,03		Indeks Ekonomi Hijau (Indeks)	23,51	35,12
		b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	53,85	79,69				
6. Transformasi Digital	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks)	6	7,7	19	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i> dan Terintegrasi (%)	36,63	96,19
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi (%)	8,67	5,25	20	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok (%)	0,46	0,08
	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	38,07	38,92	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	45,47	49,97
	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	6,8	12,9	22	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-9,72	1,21
8. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	23	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	79,9	100	23	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	50 (Buruk)	85 (Sangat Baik)
	24	Indeks SPBE (Indeks)	3,2	5	24	Indeks SPBE (Indeks)	2 (Cukup)	3,5 (Sangat Baik)
	25	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,41	5	25	a) Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,51 (C)	4,01 (A-)
	26	Indeks Integritas Nasional (Indeks)	73,95	89,08	26	a) Indeks Survey Penilaian Integritas (Indeks)	70 (Rentan)	85 (Terjaga)
					b) Nilai MCP KPK	72,22	89,98	
					c) Indeks Maturitas SPIP (Indeks)	3,1 (Terdefinisi)	4,5 (Optimum)	
9. Ketaatan Hukum Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial	27	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	70	100	27	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100	100
	28	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	64,53	81,91	28	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani (%)	25,00	75,00
	29	Indeks Demokrasi Indonesia (Indeks)	Tinggi	Tinggi	29	a) Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD (%)	20,00	20,00
					b) Peraturan Daerah yang merupakan inisiatif DPRD (Perda)	1	1	
					c) Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik (%)	38,66	45,05	
10. Stabilitas	30	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,1	0,9	30	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,241	0,309

Arah Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar	IUP RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan				IUP RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar			
	Indikator	Target		Indikator	Target			
		2025	2045		2025	2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
Ekonomi Makro Daerah	31	Tingkat Inflasi (%)	3,2-3,8	1,1-3,2	31	Tingkat Inflasi Gabungan (%)	2,84	1,44
	32	Pendalaman /Intermediasi Sektor Keuangan			32	Pertumbuhan Investasi Daerah (%)	9,09	18,03
		a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	23,54	61,6				
		b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	2,91				
		c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita per Provinsi (Rp)	2.718.532,8	29.931.570,98				
c) Total Kredit/PDRB (%)	24,2	58,4						
33	Inklusi Keuangan (%)	94,46	99,04	33	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	66,427	75,440	
11. Beragama Masalah dan Berkebudayaan Maju	34	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks)	56,43 - 56,51	65,44 - 66,14	34	Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi (%)	82,05	100,00
	35	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (Indeks)	77,14 - 77,16	84,61 - 84,83	35	Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/ Fasilitas oleh Pemerintah Daerah (%)	100,00	100,0
12. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	36	a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Indeks)	70,34 - 70,35	75,33 - 75,42	36	a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Indeks)	63,5 (Cukup Responsif)	80,0 (Responsif)
		b) Indeks Perlindungan Anak (Indeks)	61,37 - 62,48	75,0 - 85,0		b) Indeks Perlindungan Anak (Indeks)	61,00	76,00
		c) Indeks Pembangunan Pemuda (Indeks)	54,67 - 55,42	69,0 - 75,0				
	37	Indeks Ketimpangan Gender	0,358 - 0,344	0,163 - 0,122	37	Indeks Ketimpangan Gender (Indeks)	0,95	0,45
13. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	38	Ketahanan Energi, Air dan Pangan			38	Ketahanan Energi, Air dan Pangan		
		a) Ketahanan Energi				a) Ketahanan Energi		
		i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1.680	5.335		i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	327,62	587,86
		ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	298	338				
		b) Ketahanan Pangan				b) Ketahanan Pangan		
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	7,05	0,42		i) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	7,91	3,25
						ii) Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	77,39	112,53
						iii) Skor Pola Pangan Harapan	88,51	100,00
		a) Ketahanan air				a) Ketahanan air		
		i) Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)	3,3	12,26		i) Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)	62,62	84,44
	ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	42,01	100		ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	42,05	100,00	

Arah Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar	IUP RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan				IUP RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar				
	Indikator	Target		Indikator	Target				
		2025	2045		2025	2045			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
14. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan			39	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan				
	a) Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (WM)	1,47	1,81		a) Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	1,22	1,48		
	b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	77,5	100		b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	78,41	100,00		
	c) Persentase Desa Mandiri (%)	0,75	9,93		c) Indeks Infrastruktur (Indeks)	2,37	4,48		
15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Indeks)	0,537	0,634	40	Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati				
				a) Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia (%)	293,37	543,47			
				Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati					
				b) Indeks Pertanaman (IP) Padi (Indeks)	200	300			
				c) Proporsi Sawah Irigasi (%)	43,57	49,54			
	d) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	612,99	1.019,38						
	e) Angka Konsumsi Ikan (ton)	70,78	83,24						
Kualitas Lingkungan Hidup			41	Kualitas Lingkungan Hidup					
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	77,6	84,75		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	67,61 (Baik)	91,15 (Sangat Baik)		
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	12,83	60,0		b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	3,68	26,50		
	c) Pengelolaan Sampah				c) Pengelolaan Sampah				
	i) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11,0	90,0		i) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	5,23	90,00		
	ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	35,0	100		ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	20,00	100,00		
16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	42	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	150,07	122,30-98,59	42	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	141,07 (Sedang)	130,06 (Sedang)	
	43	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			43	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)		23,66	84,37
		a. Kumulatif	6,53			32,56			
b. Tahunan	12,82	69,93							
17. Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah Tinggi	44	Persentase Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti (%)	60	90	44	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/ Sister City)	4	15	
	45	Indeks Ketahanan Nasional (Indeks)	3,04	4,04	45	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	2,85	3,40	

Sumber : Hasil Olahan, 2024

Untuk memberikan arahan pencapaian target indikator pembangunan pada pembangunan jangka menengah daerah, ditetapkan target capaian indikator pembangunan setiap periode 5 tahun hingga akhir periode RPJPD di tahun 2045 yang dapat dilihat pada **Tabel 5.26**

Tabel 5. 26 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan dan Target Berdasarkan Tahapan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten		Baseline	Target Pentahapan			
				2025*	Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045
(1)	(2)	(3)		(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Terwujudnya derajat kesehatan yang merata, maju, modern dan berkualitas	1. Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,64	74,53	76,04	77,96	80,81
		2	Kesehatan Ibu dan Anak					
		a)	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)	77,86	82,26	87,76	93,26	100,00
		b)	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	3	2	1	0	0
		c)	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	36,21	29,37	20,82	12,27	2,01
		3	Penanganan Tuberkulosis:					
		a)	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)	82,30	88,56	92,30	96,50	100,00
		b)	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00
		4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2. Terwujudnya pendidikan yang merata, maju, modern dan berkualitas	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	a) Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional di Kabupaten untuk			
i)	Literasi Membaca (%)			45,00	50,00	60,00	70,00	80,00
ii)	Numerasi (%)			35,00	40,00	50,00	60,00	75,00
b)	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun (tahun)			8,73	9,46	10,38	11,29	12,39
c)	Harapan Lama Sekolah (tahun)			12,88	13,12	13,42	13,72	14,08
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)			20,27	24,25	29,22	34,20	40,17
7	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan (%)			23,28	25,23	27,44	29,76	32,54

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten		Baseline 2025*	Target Pentahapan			
					Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045
(1)	(2)	(3)		(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. Terwujudnya perlindungan sosial masyarakat yang berkeadilan	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	a) Tingkat Kemiskinan (%)	10,24	9,25	6,47	3,59	0,95
			b) Indeks Gini (Indeks)	0,341	0,331	0,321	0,311	0,301
		9	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	0,17	0,29	0,45	0,60	0,79
		10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	53,45	64,48	78,26	92,05	98,59
4. Terwujudnya perekonomian kerakyatan yang inklusif berbasis iptekin	4. Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	2,89	4,80	5,89	7,17	7,71
		12	Pengembangan Pariwisata					
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,25	0,54	1,14	1,45	2,34
		13	b) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	21.441	30.891	42.830	54.768	68.994
			Jumlah Industri Ekonomi Kreatif (%)	1.363	1.584	1.911	2.306	2.890
		14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
			a) Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	1.480	1.720	2.076	2.505	3.139
			b) Persentase Koperasi Sehat (%)	20,45	27,00	45,00	65,00	70,00
			c) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,55	0,63	0,75	0,90	1,13
			d) Produktivitas Padi (kw/ha)	73,82	76,07	79,23	86,92	99,53
			e) Jumlah Produksi Perikanan (ton)	27.154,14	31.906,78	37.847,58	43.788,38	50.917,34
		15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,32	1,01	0,61	0,22	0,10
		16	a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	61,34	68,54	76,21	80,78	85,36
b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	74,19		77,91	82,57	87,22	92,81		
17	Tingkat Penguasaan IPTEK							
	Indeks Kapabilitas Inovasi (Indeks)	1,01	1,76	2,34	2,98	3,67		
5. Terwujudnya potensi unggulan daerah bernilai ekonomi tinggi melalui penerapan ekonomi hijau ( <i>green economy</i> ) dan ekonomi biru ( <i>blue economy</i> )	5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru					
			Indeks Ekonomi Hijau (Indeks)	23,51	26,41	29,31	32,22	35,12
6. Terwujudnya sumberdaya manusia yang mandiri, kreatif dan inovatif	6. Transformasi Digital	19	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara <i>Online</i> dan Terintegrasi (%)	36,63	47,74	62,88	78,02	96,19

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten		Baseline 2025*	Target Pentahapan			
					Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045
(1)	(2)	(3)		(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. Terwujudnya ekspor komoditi unggulan daerah	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok (%)	0,46	0,38	0,29	0,19	0,08
		21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	45,47	46,37	47,49	48,62	49,97
		22	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-9,72	-8,22	-6,35	-2,24	1,21
8. Terwujudnya tata laksana pemerintahan yang berintegritas, efektif, efisien dan adaptif	8. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	23	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	50 (buruk)	60 (cukup)	70 (cukup baik)	80 (baik)	85 (sangat baik)
		24	Indeks SPBE (Indeks)	2 (Cukup)	2,4 (Cukup)	2,7 (Baik)	3,1 (Baik)	3,5 (Sangat Baik)
		25	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,51 ( C )	3,0 ( C )	3,25 ( B- )	3,75 ( B )	4,01 ( A- )
		26	a) Indeks Survey Penilaian Integritas (Indeks)	70 (rentan)	73,7 (waspada)	77,4 (waspada)	80 (terjaga)	85 (terjaga)
			b) Nilai MCP KPK	72,22	75,78	80,22	84,66	89,98
c) Indeks Maturitas SPIP (Indeks)	3,1 (terdefinisi)		3,5 (terdefinisi)	3,9 (terdefinisi)	4,2 (terkelola dan terukur)	4,5 (optimum)		
9. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum daerah serta demokrasi substansial	9. Ketaatan Hukum Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial	27	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100	100	100	100	100
		28	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani (%)	25,00	35,00	45,00	60,00	75,00
		29	a) Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD (%)	20	20	20	20	20
			b) Peraturan Daerah yang merupakan Inisiatif DPRD (Perda)	1	1	1	1	1
			c) Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik (%)	38,66	40,26	41,85	43,45	45,05
10. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan efisien	10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	30	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,241	0,246	0,258	0,275	0,309
		31	Tingkat Inflasi Gabungan (%)	2,84	2,56	2,21	1,86	1,44
		32	Pertumbuhan Investasi Daerah (%)	9,09	13,04	14,53	16,67	18,03
		33	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	66,427	68,230	70,483	72,736	75,440
11. Terwujudnya sumberdaya manusia yang beriman dan berbudaya	11. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	34	Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi (%)	82,05	84,62	87,18	92,31	100,00
		35	Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/ Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12. Terwujudnya keberdayaan dan pemenuhan hak dasar	12. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat	36	a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Indeks)	63,5 (cukup responsif)	67 (cukup responsif)	70 (cukup responsif)	75 (cukup responsif)	80 (responsif)

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten		Baseline 2025*	Target Pentahapan			
					Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045
(1)	(2)	(3)		(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
perempuan, anak dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Inklusif		b) Indeks Perlindungan Anak (Indeks)	61,00	63,30	69,04	72,00	76,00
		37	Indeks Ketimpangan Gender (Indeks)	0,95	0,85	0,72	0,60	0,45
13. Terwujudnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	13. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	38	Ketahanan Energi, Air dan Pangan					
			a) Ketahanan Energi					
			i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	327,62	379,66	444,72	509,78	587,86
			b) Ketahanan Pangan					
			i) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	7,91	7,82	6,52	4,95	3,25
			ii) Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	77,39	84,42	93,20	101,99	112,53
			iii) Skor Pola Pangan Harapan	88,51	93,03	98,68	100	100
			a) Ketahanan air					
			i) Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)	62,62	66,99	72,44	77,90	84,44
			ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	42,05	50,13	77,10	100	100
14. Terwujudnya pembangunan perkotaan dan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan	14. Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	39	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan					
			a) Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	1,22	1,34	1,42	1,48	1,48
			b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	78,41	92,79	100	100	100
			c) Indeks Infrastruktur (Indeks)	2,37	2,61	2,88	3,51	4,48
			d) Persentase Desa Mandiri (%)	30,86 (25 Desa)	43,21 (35 Desa)	55,56 (45 Desa)	67,90 (55 Desa)	80,25 (65 Desa)
15. Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	40	Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati					
			a) Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia (%)	293,37	343,39	405,92	468,44	543,47
			Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati					
			b) Indeks pertanaman (IP) Padi (Indeks)	200	200	200	300	300
			c) Proporsi Sawah Irigasi (%)	43,57	44,84	46,11	47,89	49,54
			d) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	612,99	678,63	770,64	875,13	1,019,38
			e) Angka Konsumsi Ikan (ton)	70,78	72,45	75,00	79,67	83,24

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten		Baseline 2025*	Target Pentahapan			
					Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045
(1)	(2)	(3)		(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		41	Kualitas Lingkungan Hidup					
			a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	67,61 Baik	72,32 Baik	78,21 Baik	84,09 Baik	91,15 Sangat Baik
			b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	3,68	4,00	4,86	5,50	26,50
			c) Pengelolaan Sampah					
			i) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	5,23	10,00	30,00	60,00	90,00
			ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	20,00	80,00	90,00	100,00	100,00
16. Terwujudnya infrastruktur dan permukiman yang resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	42	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	141,07 (Sedang)	138,80 (Sedang)	136,60 (Sedang)	132,40 (Sedang)	130,06 (Sedang)
		43	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	23,66	41,27	58,13	73,47	84,37
17. Terwujudnya daya saing daerah yang kompetitif	17. Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah Tinggi	44	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara ( <i>Sister Province/ Sister City</i> )	4	9	11	13	15
		45	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	2,85	2,99	3,12	3,26	3,40

\*) Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target  
Sumber : Hasil Olahan, 2024

### **5.3. ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN SARANA PRASARANA**

#### **5.3.1 Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar**

Kabupaten Kepulauan Selayar (KKS) termasuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari daratan Pulau Sulawesi. Kondisi ini menyebabkan aksesibilitas yang masih terbatas, sehingga sangat berpengaruh terhadap laju pemerataan pembangunan. Namun demikian dalam perspektif pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI), kondisi tersebut memiliki nilai strategis.

Secara geografis, Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan Barat-Timur NKRI dan berada di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan ALKI III. Keunggulan tersebut dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi tersebut melalui Selat Selayar, sehingga Kepulauan Selayar sangat potensial dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Lebih jauh lagi, pengembangan Kepulauan Selayar dan pulau-pulau kecil disekitarnya didukung pula oleh potensi sumberdaya alam, terutama di sektor perminyakan di kawasan Utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di kawasan Utara, Tengah dan Selatan Pulau Selayar dan wilayah kepulauan serta Taman Nasional Laut Takabonerate.

Terkait dengan kondisi tersebut serta dalam rangka pemerataan pembangunan KTI, kawasan Utara Pulau Selayar dinilai memiliki peranan penting dalam mentransformasikan Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai salah satu daerah yang maju dan mandiri. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022-2042, telah ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada dalam wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu:

- a. Kawasan ekonomi khusus pariwisata Selayar di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan;
- b. Kawasan industri perikanan terpadu di pesisir pantai Teluk Bone yang meliputi Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pembentukan kawasan yang dapat berfungsi sebagai katalisator dalam mempercepat transaksi ekonomi terutama dalam meningkatkan arus barang dan jasa adalah salah satu solusi yang ditawarkan dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut di atas. Kawasan Utara Pulau Selayar sebagai kawasan Industri dan Kawasan Distribusi Barang dan Jasa KTI agar masalah riil saat ini yakni minimnya pasokan barang yang berimbas kepada kenaikan harga dan inflasi yang penyebab utamanya adalah sistem logistik yang tidak efektif dan

efisien di KTI dapat segera teratasi. Dalam upaya pemerataan pembangunan agar KTI dapat sejajar dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) terutama dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, maka diperlukan langkah nyata yang terkoordinasi dengan baik agar percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di KTI dapat segera terwujud dengan pemanfaatan sebesar-besarnya keunggulan komparatif yang ada. Mengingat di kawasan Utara Pulau Selayar juga merupakan kawasan sumberdaya minyak, maka pembangunan Industri Perminyakan Terpadu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari fungsionalisasi kawasan distribusi barang dan jasa KTI, seperti yang diarahkan dalam Kajian Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Investasi Daerah Tertinggal (Studi Kasus Kabupaten Selayar) pada tahun 2009. Atas hal tersebut, maka pembentukan suatu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) termasuk kawasan (areal) industri perminyakan tersebut menjadi suatu kebutuhan yang mendasar dalam mempercepat pencapaian target yang telah ditentukan dari kajian tersebut.

Terkait dengan kondisi tersebut, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki peranan penting, sebagai salah satu daerah yang maju dan mandiri. Keadaan tersebut dapat dimulai dengan mengembangkan Pulau Selayar sebagai Industri Perikanan, Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Pusat Distribusi Logistik. Untuk itu, pembangunan kewilayahan akan diterapkan tiga transformasi yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Transformasi ini didukung oleh dua landasan transformasi yaitu keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Substansi transformasi dan landasan transformasi ini diterjemahkan kedalam 8 (delapan) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Transformasi sosial bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kepulauan Selayar yang tangguh dan berkualitas. Transformasi tata kelola bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kepatuhan kepada hukum yang bermuara pada pelayanan publik berkualitas dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Transformasi Ekonomi bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi agar tercapai peningkatan pendapatan yang merata berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi biru dan penerapan ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan, diiringi dengan pengendalian pemanfaatan ruang, implementasi transformasi digital, penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah dan rantai pasok global, dalam rangka memperkuat peran Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan bagian dari kawasan pembangunan Bulukumba sebagai Pusat Pertumbuhan Pariwisata dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di bagian Selatan.

Landasan transformasi yakni keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah bertujuan untuk menjamin keberhasilan transformasi secara menyeluruh melalui penciptaan stabilitas ekonomi makro daerah, daya saing daerah, pengembangan kerjasama antar daerah, ketaatan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian juga dengan landasan transformasi berupa ketahanan sosial budaya dan ekologi bertujuan untuk memastikan pembangunan dilaksanakan dengan basis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, serta memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim, pada seluruh kawasan pembangunan tersebut.

#### **5.3.1.1 Arah Kebijakan Wilayah**

Pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bagian dari Kawasan Pembangunan Bulukumba diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Pariwisata dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di bagian Selatan yang meliputi:

- a) **Arah Pembangunan Kecamatan Bontomatene**, yang berfungsi sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Industri Selayar dan berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan yang berperan sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi hijau. Untuk itu pengembangan Kecamatan Bontomatene diarahkan pada : **Pertama**, perwujudan kehidupan masyarakat Kepulauan Selayar yang maju dan mandiri diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar. **Kedua**, perwujudan kawasan Batangmata sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran sebagai pusat pelayanan pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan berbasis potensi kemaritiman yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, khususnya komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan. Perwujudan kawasan industri berbasis komoditas unggulan terintegrasi dengan pusat-pusat pengembangan komoditi. Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagai wisata budaya maritim untuk meningkatkan jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara.
- Ketiga**, pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan peningkatan kualitas pelayanan publik. **Keempat**, kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan dan kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan

sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah. Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum daerah. **Kelima**, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi - tempat penyimpanan berupa depo bahan bakar.

**Keenam**, perwujudan pemerataan pembangunan antar wilayah yang terkoneksi diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kapasitas Pelabuhan Penyeberangan Pamatata, pelabuhan pengumpan lokal Batangmata, pelabuhan pengumpan lokal Bone Lohe, pelabuhan pengumpan lokal Pamatata dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, pembangunan bangunan sumber daya air yaitu: Embung Malelang untuk peningkatan ketahanan air dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta peningkatan kemandirian pangan. **Ketujuh**, perwujudan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan melalui penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana dan dampak perubahan iklim dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah. **Kedelapan**, perwujudan daya saing daerah yang tinggi dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- b) **Arah Pembangunan Kecamatan Buki**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan yang berperan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi hijau. Untuk itu pengembangan Kecamatan Buki diarahkan pada : **Pertama** perwujudan kehidupan masyarakat Kepulauan Selayar yang maju dan mandiri, diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar. **Kedua**, perwujudan kawasan Buki sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pelayanan pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan berbasis potensi kemaritiman yang didukung oleh pengembangan

UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, khususnya komoditas pertanian dan perkebunan. Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagai wisata budaya maritim untuk meningkatkan jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara

**Ketiga**, pengembangan tata klola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan peningkatan kualitas pelayanan publik. **Keempat**, kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan dan kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah. **Kelima**, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal.

**Keenam**, perwujudan pemerataan pembangunan antar wilayah yang terkoneksi diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta peningkatan kemandirian pangan. **Ketujuh**, perwujudan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan melalui penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana dan dampak perubahan iklim dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah. **Kedelapan**, perwujudan daya saing daerah yang tinggi dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- c) **Arah Pembangunan Kecamatan Bontomanai**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan yang berperan sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi hijau. Untuk itu pengembangan Kecamatan Bontomanai diarahkan pada : **Pertama**, perwujudan kehidupan masyarakat Kepulauan Selayar yang maju dan mandiri diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar. **Kedua**, perwujudan kawasan Polebunging sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan berbasis potensi

kemaritiman yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, khususnya komoditas pertanian dan perkebunan. Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagai wisata budaya maritim untuk meningkatkan jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara.

**Ketiga**, pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan peningkatan kualitas pelayanan publik. **Keempat**, kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan dan kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah. Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum daerah. **Kelima**, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

**Keenam**, perwujudan pemerataan pembangunan antar wilayah yang terkoneksi diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, pembangunan bangunan sumber daya air yaitu: Bendung Posi, Embung Bonea Timur, Embung Cinimabela, Embung Serbaguna Baturapa dan Embung Serbaguna Mare-mare untuk peningkatan ketahanan air dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta peningkatan kemandirian pangan. **Ketujuh**, perwujudan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan melalui penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana dan dampak perubahan iklim dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah. **Kedelapan**, perwujudan daya saing daerah yang tinggi dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- d) **Arah Pembangunan Kecamatan Benteng**, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal yang berperan sebagai pusat pemerintahan dan pusat

pelayanan jasa, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi biru. Untuk itu pengembangan Kecamatan Benteng diarahkan pada : **Pertama**, perwujudan kehidupan masyarakat Kepulauan Selayar yang maju dan mandiri diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar. **Kedua**, perwujudan kawasan perkotaan Benteng sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan jasa berbasis potensi kemaritiman yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan khususnya komoditas perikanan tangkap. Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagai wisata minat khusus pariwisata terpadu dan merupakan kawasan strategis pariwisata daerah untuk meningkatkan jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara

**Ketiga**, pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan peningkatan kualitas pelayanan publik. **Keempat**, kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan dan kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah. Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum daerah. **Kelima**, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

**Keenam**, perwujudan pemerataan pembangunan antar wilayah yang terkoneksi diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kapasitas Pelabuhan pengumpul Selayar/Benteng/Rauf Rahman dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta peningkatan kemandirian pangan. **Ketujuh**, perwujudan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan melalui penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana dan dampak

perubahan iklim dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah. **Kedelapan**, perwujudan daya saing daerah yang tinggi dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- e) **Arah Pembangunan Kecamatan Bontoharu**, yang berfungsi sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan fungsi dan daya lingkungan hidup berupa kawasan ekosistem mangrove dan berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan yang berperan sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru. Untuk itu pengembangan Kecamatan Bontoharu diarahkan pada : **Pertama**, perwujudan kehidupan masyarakat Kepulauan Selayar yang maju dan mandiri diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar. **Kedua**, perwujudan kawasan Matalalang sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan berbasis potensi kemaritiman yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, khususnya komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan budidaya. Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagai wisata minat khusus pariwisata terpadu dan merupakan kawasan strategis pariwisata daerah untuk meningkatkan jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara. **Ketiga**, pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan peningkatan kualitas pelayanan publik. **Keempat**, kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan dan kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah. **Kelima**, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

**Keenam**, perwujudan pemerataan pembangunan antar wilayah yang terkoneksi diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kapasitas Pelabuhan pengumpan lokal Padang dan pengembangan bandara udara pengumpan H. Aroepala, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, pembangunan bangunan sumber daya air yaitu: Embung Bontoharu, Embung Bontojaya, Embung Losong 2 untuk peningkatan ketahanan air, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta peningkatan kemandirian pangan.

**Ketujuh**, perwujudan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan melalui penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana dan dampak perubahan iklim dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.

**Kedelapan**, perwujudan daya saing daerah yang tinggi dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- f) **Arah Pembangunan Kecamatan Bontosikuyu**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan yang berperan sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi biru dan ekonomi hijau. Untuk itu pengembangan Kecamatan Bontosikuyu diarahkan pada : **Pertama** perwujudan kehidupan masyarakat Kepulauan Selayar yang maju dan mandiri diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar.
- Kedua**, perwujudan kawasan Harapan sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan berbasis potensi kemaritiman yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, khususnya komoditas pertanian, perkebunan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perwujudan kawasan industri sebagai hub Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata wisata minat khusus pariwisata terpadu dan merupakan kawasan strategis pariwisata daerah untuk meningkatkan jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara.

**Ketiga**, pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan peningkatan kualitas pelayanan publik. **Keempat**, kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan dan kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah. **Kelima**, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro (PLTH) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

**Keenam**, perwujudan pemerataan pembangunan antar wilayah yang terkoneksi diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kapasitas Pelabuhan Penyeberangan Patumbukang, Pelabuhan pengumpan lokal Appatana, Pelabuhan pengumpan lokal Pulau Tambolongan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, pembangunan bangunan sumber daya air yaitu: Embung Serbaguna Kunyi dan Embung Bontoala untuk peningkatan ketahanan air dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta peningkatan kemandirian pangan. **Ketujuh**, perwujudan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan melalui penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana dan dampak perubahan iklim dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah. **Kedelapan**, perwujudan daya saing daerah yang tinggi dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- g) **Arah Pembangunan Kecamatan Taka Bonerate**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan yang berperan sebagai kawasan pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan, diarahkan menjadi pusat konektivitas wilayah antar pulau untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Untuk itu pengembangan Kecamatan Taka Bonerate diarahkan pada : **Pertama** perwujudan kehidupan masyarakat Kepulauan Selayar yang maju dan mandiri diprioritaskan pada pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan

sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar. **Kedua**, perwujudan kawasan Kayuadi sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran sebagai kawasan transportasi berbasis potensi kemaritiman yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, khususnya komoditas pertanian, perkebunan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagai wisata minat khusus bahari dengan daya tarik utama Taman Nasional Taka Bonerate dan merupakan kawasan strategis pariwisata daerah untuk meningkatkan jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara. **Ketiga**, pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan peningkatan kualitas pelayanan publik. **Keempat**, kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan dan kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah. **Kelima**, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal. peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Peruntukan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup. **Keenam**, perwujudan pemerataan pembangunan antar wilayah yang terkoneksi diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kapasitas Pelabuhan penyeberangan Kayuadi, Pelabuhan pengumpan lokal Kayuadi, Pelabuhan pengumpan lokal Pulau Jinato, Pelabuhan pengumpan lokal Pulau Rajuni, Pelabuhan pengumpan lokal Pulau Tarupa, Pelabuhan pengumpan lokal Pasitallu dan pangkalan pendaratan ikan Kayuadi serta pengembangan bandara perairan (*seaplane*), pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, pembangunan unit distribusi dan penampungan air hujan untuk peningkatan ketahanan air, pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta peningkatan kemandirian pangan. **Ketujuh** perwujudan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan melalui penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana gempa dan tsunami dan dampak perubahan iklim dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.

**Kedelapan**, perwujudan daya saing daerah yang tinggi dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- h) **Arah Pembangunan Kecamatan Pasimasunggu**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan yang berperan sebagai kawasan pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan, diarahkan menjadi pusat konektivitas wilayah antar pulau untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Untuk itu pengembangan Kecamatan Pasimasunggu diarahkan pada : **Pertama** perwujudan kehidupan masyarakat Kepulauan Selayar yang maju dan mandiri diprioritaskan pada pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar. **Kedua**, perwujudan kawasan Kayuadi sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran sebagai pusat pelayanan pemerintahan kecamatan dan pusat layanan lingkungan berbasis potensi kemaritiman yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, khususnya komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan budidaya. Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagai wisata bahari dengan daya tarik utama wisata pantai untuk meningkatkan jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara. **Ketiga**, pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan peningkatan kualitas pelayanan publik. **Keempat**, kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan dan kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah. Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum daerah. **Kelima**, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal. peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

**Keenam**, perwujudan pemerataan pembangunan antar wilayah yang terkoneksi diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kapasitas Pelabuhan Penyeberangan Jampea, Pelabuhan pengumpan regional Jampea, Pelabuhan pengumpan lokal Pulau Bembe/Tanamalala, dan Pelabuhan perikanan serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, pembangunan bangunan sumber daya air yaitu: Embung Binanga Bakka, Embung Binanga Parra, Embung Dodak, Embung Penga 1 dan Embung Penga 2 untuk peningkatan ketahanan air, pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta peningkatan kemandirian pangan. **Ketujuh** perwujudan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan melalui penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana gempa dan tsunami dan dampak perubahan iklim dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah. **Kedelapan**, perwujudan daya saing daerah yang tinggi dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- i) **Arah Pembangunan Kecamatan Pasimasunggu Timur**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan yang berperan sebagai kawasan pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan, diarahkan menjadi pusat konektivitas wilayah antar pulau untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Untuk itu pengembangan Kecamatan Pasimasunggu Timur diarahkan pada : **Pertama** perwujudan kehidupan masyarakat Kepulauan Selayar yang maju dan mandiri diprioritaskan pada pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar. **Kedua**, perwujudan kawasan Bontobulaeng sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan pusat pelayanan lingkungan berbasis potensi kemaritiman yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, khususnya komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan budidaya. Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagai wisata bahari dengan daya tarik utama wisata pantai untuk meningkatkan jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara. **Ketiga**, pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

**Keempat**, kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan dan kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah. **Kelima**, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal.

**Keenam**, perwujudan pemerataan pembangunan antar wilayah yang terkoneksi diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kapasitas Pelabuhan pengumpan lokal Pulau Biropa, Pelabuhan pengumpan lokal Ujung Jampea dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, pembangunan bangunan sumber daya air yaitu: Embung Balang Timallang, Embung Pakangkang, Embung Serbaguna Dolok untuk peningkatan ketahanan air, pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta peningkatan kemandirian pangan.

**Ketujuh** perwujudan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan melalui penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana gempa dan tsunami dan dampak perubahan iklim dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah. **Kedelapan**, perwujudan daya saing daerah yang tinggi dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- j) **Arah Pembangunan Kecamatan Pasimarannu**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan yang berperan sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan, diarahkan menjadi pusat konektivitas wilayah antar pulau untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau. Untuk itu pengembangan Kecamatan Pasimarannu diarahkan pada : **Pertama** perwujudan kehidupan masyarakat Kepulauan Selayar yang maju dan mandiri diprioritaskan pada pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar. **Kedua**, perwujudan kawasan Bonerate sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan berbasis potensi kemaritiman yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, khususnya

komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan. Perwujudan Kawasan peruntukan pariwisata sebagai wisata bahari dengan daya tarik utama wisata pantai untuk meningkatkan jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara. **Ketiga**, pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan peningkatan kualitas pelayanan publik. **Keempat**, kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan dan kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah. **Kelima**, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal. Peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

**Keenam**, perwujudan pemerataan pembangunan antar wilayah yang terkoneksi diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kapasitas Pelabuhan Penyeberangan Bonerate, Pelabuhan pengumpan lokal Pulau Bonerate, Pelabuhan pengumpan lokal Pulau Komba-komba, Pelabuhan pengumpan lokal Pulau Lambego dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta peningkatan kemandirian pangan. **Ketujuh** perwujudan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan melalui penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana gempa dan tsunami dan dampak perubahan iklim dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah. **Kedelapan**, perwujudan daya saing daerah yang tinggi dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- k) **Arah Pembangunan Kecamatan Pasilambena**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan yang berperan sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan, diarahkan menjadi pusat konektivitas wilayah antar pulau untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau. Untuk itu pengembangan Kecamatan Pasilambena diarahkan pada : **Pertama**,

perwujudan kehidupan masyarakat Kepulauan Selayar yang maju dan mandiri diprioritaskan pada pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar. **Kedua**, perwujudan kawasan perkotaan Kalaotoa sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan lingkungan berbasis potensi kemaritiman yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, khususnya komoditas pertanian dan perkebunan. Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata wisata bahari dengan daya tarik utama wisata pantai untuk meningkatkan jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara. **Ketiga**, pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan peningkatan kualitas pelayanan publik. **Keempat**, kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan dan kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah. **Kelima**, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal. Peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Peruntukan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

**Keenam**, perwujudan pemerataan pembangunan antar wilayah yang terkoneksi diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kapasitas Pelabuhan Penyeberangan Kalaotoa, Pelabuhan pengumpan lokal Kalaotoa, Pelabuhan pengumpan Pulau Kalao, Pelabuhan pengumpan lokal Pulau Madu, dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, pembangunan unit distribusi dan penampungan air hujan untuk peningkatan ketahanan air, pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta peningkatan kemandirian pangan. **Ketujuh** perwujudan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan melalui penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana gempa dan tsunami dan dampak perubahan iklim dengan

mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah. **Kedelapan,** perwujudan daya saing daerah yang tinggi dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Untuk mewujudkan Visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar hingga akhir periode harus melibatkan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan yang mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045.

#### **A. Konsistensi Perencanaan**

Konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas termasuk kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatan secara optimal. Konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan hingga ke level keluaran serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan

##### **1. Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Daerah**

- a. RPJPD memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan pembangunan turunannya, yang meliputi dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan perangkat daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan dokumen perencanaan perangkat daerah meliputi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
- b. RPJPD merupakan perencanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahunan yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang terdiri atas 4 (empat) periode RPJMD dalam kurun waktu 2025-2045.
- c. RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan Visi, Misi dan Program dalam RPJMD bagi calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah

- d. Substansi Visi dan Misi pembangunan berikut upaya muatan utama, arah kebijakan dan indikator sasaran pokok pembangunan RPJPD menjadi pedoman dalam penentuan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan daerah dalam RPJMD. Muatan utama pada RPJMD tersebut menjadi pedoman dalam penentuan tujuan, sasaran dan IKU pada Renstra SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan kabupaten. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
  - e. RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar diselaraskan dengan RPJPD Provinsi meliputi penyelarasan visi (berdasarkan karakteristik daerah) dan 5 sasaran visi, 8 misi (agenda), 17 arah (tujuan) pembangunan dan 45 indikator utama Pembangunan.
2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) dalam perencanaan pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan yang mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/ Relevant dan Time-Bound* (SMART).
  3. Pencapaian sasaran pembangunan di daerah perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya mewujudkan sasaran pembangunan memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai dari sektor publik dan non publik. Selain upaya peningkatan efektivitas dan kualitas belanja sesuai dengan tahapan dan prioritas pembangunan, peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru hingga optimalisasi peran sektor keuangan. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik perlu dibarengi dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga dapat digunakan secara optimal.

## B. Pendanaan Pembangunan

Pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045 diperlukan kapasitas pembiayaan yang memadai untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif dan tepat sasaran. Dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan dilakukan

peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan dapat dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan inovasi pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik, optimalisasi peran sektor keuangan dan perluasan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

#### C. Kerangka Pengendalian

Untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan, diperlukan pengendalian baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan secara kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Manajemen risiko perlu diterapkan karena adanya risiko-risiko strategis yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan. Risiko-risiko ini perlu diidentifikasi, dianalisis, dan ditangani agar gangguan terhadap pencapaian tujuan dapat diminimalkan atau apabila terjadi dampaknya tidak signifikan.

Pengendalian RPJPD dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusif untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan dan penjabaran RPJPD ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan dan tahunan telah memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang melingkupi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

#### D. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga penelitian dan kelompok masyarakat lainnya. Pemberian insentif dapat didasarkan pada pencapaian kinerja yang diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi pendanaan, konsistensi pencapaian indikator kinerja utama dan pencapaian program prioritas.

#### E. Mekanisme Perubahan RPJPD

RPJPD dimungkinkan dilakukan pemuktahiran apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan

tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan terjadi perubahan yang mendasar seperti: guncangan politik, bencana alam, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional. Untuk efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun dan atau sesuai peraturan yang berlaku.

#### F. Strategi Komunikasi

Pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045 diperlukan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia yang dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan obyektif agar dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

#### G. Transisi Periode RPJPD

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, sebelum berakhirnya periode RPJPD tahun 2025-2045 ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya dengan waktu dan format penyusunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI

